

MUHAMMADIYAH
DI BAWAH
TEKANAN
POLITIK

Kini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bercorak tajdid telah memasuki abad kedua. Di Sumatra Barat, Muhammadiyah juga sudah mendekati satu abad sejak didirikan 1925. Berbagai hempasan ombak dan badai sejarah yang melandanya, Muhammadiyah masih tetap bertahan kuat dan bahkan semakin kokoh. Adapun tantangan itu bukan hanya berasal dari masyarakat yang belum paham dengan Muhammadiyah, melainkan juga datang sejak dari masa kolonial. Pada masa kolonial, selain dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah kolonial, gerak Muhammadiyah juga ditentang dan dihalang-halangi oleh komunis. Sedangkan pada era pascakemerdekaan, persisnya setelah kekalahan PRRI, Muhammadiyah kembali dijadikan sasaran utama kaum komunis sehingga Muhammadiyah sulit bergerak dan anggota-anggotanya terpaksa melarikan diri.

Akan tetapi, tentu saja semangat para aktivis dan penggerak Muhammadiyah tidak pernah luntur atas tantangan dan pembatasan ruang gerak tersebut, termasuk di antaranya Moehammad Yatim. Bahkan, berkat peran mereka, Muhammadiyah mampu terus berkembang di hampir seluruh nagari di Minangkabau. Pemandangan yang menggembirakan itu dituangkan dalam buku Muhammadiyah di bawah Tekanan Politik: Studi terhadap implikasi pemikiran politik Islam dan pergolakan politik lokal ini. Buku ini berusaha menampilkan citra bahwa keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang kokoh dan kuat, namun tidak luput dari tekanan politik. Buku ini perlu dibaca oleh para aktivis dan penggerak Muhammadiyah selanjutnya sebab pengalaman Muhammadiyah ini tentu dapat dijadikan bahan untuk berkaca diri dan menjadi sumber motivasi.

 **SUARA**
MUHAMMADIYAH
Melayani Ilmu dan Amal



 **SUARA**
MUHAMMADIYAH
Melayani Ilmu dan Amal

DR. BAKHTIAR, M.AG.

MUHAMMADIYAH
DI BAWAH
TEKANAN
POLITIK

DR. BAKHTIAR, M. AG.

MUHAMMADIYAH
DI BAWAH
TEKANAN
POLITIK

Studi terhadap
Implikasi Pemikiran Politik Islam
dan Pergolakan Politik Lokal

SUARA MUHAMMADIYAH

MUHAMMADIYAH
DI BAWAH
TEKANAN
POLITIK

Studi terhadap
Implikasi Pemikiran Politik Islam
dan Pergolakan Politik Lokal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DR. BAKHTIAR, M. AG.

MUHAMMADIYAH
DI BAWAH
TEKANAN
POLITIK

Studi terhadap
Implikasi Pemikiran Politik Islam
dan Pergolakan Politik Lokal

SUARA MUHAMMADIYAH



MUHAMMADIYAH DI BAWAH TEKANAN POLITIK **Studi terhadap Implikasi Pemikiran Politik Islam** **dan Pergolakan Politik Lokal**

Penulis • **Dr. Bakhtiar, M. Ag.**

Penyunting • **Abu Aksa**

Pemeriksa Aksara • **Yayum Kumai**

Desain Sampul • **Amin Mubarak**

Tata Letak • **Padangatine**

Diterbitkan pertama kali oleh **Penerbit Suara Muhammadiyah** atas seizin penulis

Alamat • **Grha Suara Muhammadiyah**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan 107, Yogyakarta, 55122

Telp. • **(0274) 428 4110, Fax. 411306**

SMS/WA • **0812 1738 0308**

Facebook • **Penerbit Suara Muhammadiyah**

Email • **Penerbitsm@gmail.com (Redaksi)**

Adm2015penerbitansm@gmail.com (Admin)

Homepage • **www.suaramuhammadiyah.id**

Cetakan I, April 2019

xii + 346 hlm., 15 x 23 cm

Hak Cipta © Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

ISBN: 978-602-6268-84-6

Pengantar Penerbit

SEJAK dahulu, Ranah Minang memiliki peran tak ubahnya Kawah Candradimuka, yang menghasilkan berbagai tokoh nasional yang punya andil besar mulai dari pergerakan nasional, revolusi kemerdekaan, hingga era kontemporer. Indonesia dan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai pihak yang banyak diuntungkan oleh kemunculan tokoh-tokoh dari Ranah Minang, sebut saja Syekh Ahmad Chatib, Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), Yusuf Amrullah, Saalah Sutan Mangkuto, Muhammad Hatta, AR Sutan Mansur, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Syekh Jamil Jambek, A. Rivai, Abdul Malik Karim Amrullah, Mohammad Natsir, hingga Abdul Muis. Tokoh-tokoh itu ditempa ekstra keras oleh berbagai situasi genting yang merambah berbagai aspek kehidupan di Ranah Minang, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Tak pelak, mereka pun begitu disegani di panggung nasional, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia.

Tercatat ada beberapa pergolakan yang begitu dahsyat dampaknya bagi situasi nasional, termasuk di antaranya Pemberotakan Anti-Belasting pada 1908, Pemberontakan Komunis di Silungkang pada 1927, perlawanan terhadap Ordonansi Guru pada 1928, hingga Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Tak habis di situ, dari segi keagamaan Ranah Minang pun menjadi salah satu pusat modernisme Islam, sekaligus juga menjadi tempat lahirnya

sekolah Islam modern yang pertama, Sumatra Thawalib. Menyusul kemudian, perkembangan Muhammadiyah di Sumatra pun semakin trengginas berkat perjuangan Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), AR Yusuf Amrullah, Sutan Mansur, dan Haji Fachrodin, dan itu dimulai dari Minangkabau.

Tentu saja, lagi-lagi akibat situasi yang berlaku di sana, Muhammadiyah di Minangkabau khususnya memiliki corak tersendiri. Beberapa pengamat seperti Herman L. Beck dan Ahmad Najib Burhani bahkan tak ragu-ragu menyimpulkan bahwa watak puritanisme Muhammadiyah Minangkabau begitu kental, melampaui watak Muhammadiyah Jawa. Dalam buku ini diulas salah satu faktor yang menyebabkan mengapa watak Muhammadiyah Minangkabau begitu khas, yakni tekanan politik. Tinjauan sejarah Muhammadiyah di Sumatra Barat yang disajikan dalam buku ini niscaya dapat memberi wawasan yang utuh kepada pembaca.

Alhamdulillah, sebagai penerbit terdepan di lingkungan Muhammadiyah kami berhasil menunaikan penerbitan buku ini. Atas terbitnya buku ini, kami ingin berterima kasih kepada berbagai pihak. *Pertama*, Dr. Bakhtiar, M. Ag. selaku penulis yang telah mengamanahi kami untuk menerbitkan buku ini. *Kedua*, kepada Pusat Data dan Pengkajian Muhammadiyah Minangkabau (Pusdakum) berikut para pekaryanya yang tergabung di dalamnya. *Ketiga*, kepada Anda, para pembaca yang budiman.

Akhirnya, harapan kami buku ini dapat memberikan manfaat, ilmu, dan pencerahan kepada segenap pembaca pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya, sehingga penerbitan buku ini terhitung sebagai amal saleh. Selamat membaca.

Bilahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat!

Penerbit Suara Muhammadiyah

Pengantar Penulis

ALHAMDULILLAH, puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT., berkat bimbingan dan hidayah-Nya buku ini *Muhammadiyah di Tengah Tekanan Politik: Studi terhadap implikasi pemikiran politik islam dan pergolakan politik lokal* dapat dirampungkan. Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah meninggalkan dua pegangan hidup (Al-Qur'an dan As-Sunnah), yang dengan itu kita menjalani hidup sehingga tidak terlepas dari bimbingan-Nya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam rangka melanjutkan misi kekhilifahan di dunia ini.

Muhammadiyah sebagai organisasi telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan bangsa dan negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam sejarahnya, meskipun sampai saat ini masih bertahan dengan kuat dan kokoh terutama di Minangkabau, menghadapi banyak tantangan seiring dengan irama sejarah dan perkembangan sosial dan politik Indonesia. Banyak pihak yang dari awal tidak menginginkan Muhammadiyah ada di Minangkabau karena dipandang akan menghambat kepentingan mereka. Akan tetapi, tantangan itu dijalani oleh para penggiat Muhammadiyah dengan kesabaran dan kekokohan dalam menumbuhkan dan mempertahankannya. Hal itu, sudah terbukti sepanjang sejarah. Sebesar apapun badai dan gelombang sejarah, Muhammadiyah tetap

tegak dan tumbuh walaupun kadang harus mengalami kesurutan untuk melangkah jauh ke depan.

Khusus setelah meletusnya peristiwa PRRI, Muhammadiyah secara langsung menanggung risiko yang luar biasa. Pada saat itu, nyaris aktivitasnya mengalami kelumpuhan karena sebagian besar dari pimpinan ikut lari “*ijok*” baik ikut dalam barisan pasukan PRRI maupun tidak tahan dengan tekanan dan intimidasi oleh komunis. Kalaupun ada sebagian yang tidak ikut *ijok*, umumnya mereka tidak berani menggerakkan kembali Muhammadiyah karena trauma dan ketakutan. Hampir semua amal usaha Muhammadiyah ditinggalkan dan diduduki oleh tentara maupun komunis serta pihak yang sebelumnya antipati terhadap Muhammadiyah. Dalam kondisi itulah muncul Moehammad Yatim mengambil peran dalam menyelamatkan dan mempertahankan Muhammadiyah di Minangkabau. Ia tidak mengenal rasa takut ditekan dan diintimidasi oleh tentara maupun komunis dan lainnya. Ia melakukan konsolidasi dan meyakinkan kembali warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan cara mengunjungi satu persatu, rumah ke rumah dan kampung ke kampung untuk menghidupkan Muhammadiyah. Dalam situasi yang sulit itu, ia jalani tanpa ada pembiayaan darimanapun. Siang dan malam pemikiran aktivitasnya tercurah kepada Muhammadiyah. Semangat jihad yang ditopang oleh keikhlasan itulah yang semakin memperkukuh pendiriannya dalam menghadapi berbagai tindakan dan intimidasi pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah.

Itulah yang membuat penulis terinspirasi untuk menelusuri jejak dan langkahnya dalam menyelamatkan dan mempertahankan Islam khususnya Muhammadiyah dalam pergolakan daerah. Sulit memang mencari sumber-sumber data primer di dalam penulisan ini, karena dokumen-dokumen penting nyaris sangat sulit untuk diakses. Penulis sangat dibantu oleh keluarga besar almarhum terutama ibu Nurmiyati, putri almarhum, yang sudah mengupayakan pula mencarikan dan menghubungi sumber-sumber yang penulis perlukan termasuk, diantaranya laporan Pimpinan Muhammadiyah Minangkabau dan tulisan-tulisan almarhum yang berkaitan perkembangan Muhammadiyah termasuk perjalanan hidupnya. Dalam hal itu, penulis

ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ibu Nurmiyati, semua itu tidak ternilai harganya. Bagi Muhammadiyah, tentunya dokumen tersebut sangat penting karena di sekretariat nyaris tidak ditemukan lagi. Semoga itu semua, dibalas oleh Allah SWT.. Selain itu, penulis merasa berhutang moral kepada bapak RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Abdurrahman S. Chan yang selalu mendorong dan mendesak penulis untuk segera menyelesaikan tulisan tentang Muhammadiyah. Baik dalam kapasitasnya sebagai ketua dan bendahara Pusat Data dan Pengkajian Muhammadiyah Minangkabau maupun sebagai orang tua Muhammadiyah yang memiliki perhatian besar terhadap keberlanjutan Muhammadiyah di Minangkabau (Sumatra Barat) secara khusus. Kalaulah tidak dorongan dan desakan itu, kemungkinan tulisan ini tidak akan bakal bisa diselesaikan. Begitu pula secara khusus, kepada istri penulis, Kurnia Dewi, telah memberikan pengertian yang mendalam kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tulisan ini. Begitu pula kepada anak-anak penulis (Hafizah Khairin, M. Fitra Zuhaili, M. Rasyid Ridha, Aidan Quenteen Hamizan dan Muhammad Abdul Hafiz), semua tentunya dalam keadaan membutuhkan kasih sayang, tetapi hak-haknya itu kadang “terampas”. Kalaulah tidak dengan pengertian itu, penulis tentunya tidak akan dapat dengan nyaman merangkai hasil bacaan dan perenungan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan ini. Selanjutnya, kepada semua pihak yang sudah ikut terselesaikannya tulisan dan penerbitan buku ini terutama kawan-kawan yang ada pada Pusat Data dan Pengkajian Muhammadiyah Minangkabau (Pusdakum).

Begitu pula kepada penerbit penulis ucapkan terima kasih yang telah bersedia menerbitkan buku ini serta semua pihak yang telah membantu. Mudah-mudahan jerih payah kita dibalasi oleh Allah SWT. dengan berlipatganda. Amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karenanya dengan segala senang hati penulis menerima saran dan kritikan dari pembaca. Atas kekhilafan yang ditemui, penulis mohon maaf. •

Daftar Isi

Pengantar Penerbit __v

Pengantar Penulis __vii

Daftar Isi __xi

Bab I

Pendahuluan __1

Bab II

Pergerakan Muhammadiyah sebelum Pergolakan __11

Pengenalan Muhammadiyah __11

Perubahan Organisasi Lokal “Tiang Aman” menjadi

Muhammadiyah __35

Pembentukan Tabligh Muhammadiyah __54

Ulama Kaum Tua Masuk Muhammadiyah __68

Penugasan AR. Sutan Mansur, Datuk Nan Bareno dan Fatimah
ke Minangkabau __84

Pengurus Besar Mengunjungi Minangkabau __105

Kongres Muhammadiyah Pertama di Luar Jawa __118

Memuhammadiyahkan Nagari dan Menagarikan
Muhammadiyah __130

Beban Berat pada Pendudukan Jepang __136

Pertahanan dari Agresi Belanda __156

Bab III**Muhammadiyah dan Pergolakan Politik __169**

Revolusi yang belum Selesai __169

Konflik Pusat-Daerah __179

Pergolakan PRRI __186

Muhammadiyah Nyaris Dibubarkan __206

Bab IV**Moehammad Yatim****dan Misi Penyelamatan Muhammadiyah __221**

Situasi Sulit di Tengah Pergolakan __221

Kehidupan Keluarga dan Karier __235

Meniti Karir di Kantor Pos dan Telegraf __242

Mengendalikan SSPTT dan PPRI __250

Menanamkan Urat Tunggang __255

Pertahanan di Tengah Pergolakan __269

Bab V**Penutup __333****Daftar Pustaka __339****Tentang Penulis __345**

Bab I

Pendahuluan

KINI, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bercorak tajdid telah memasuki abad kedua. Di Sumatra Barat, Muhammadiyah juga sudah mendekati satu abad sejak didirikan 1925. Berbagai hempasan ombak dan badai sejarah yang melandanya, Muhammadiyah masih tetap bertahan kuat dan bahkan semakin kokoh. Kebertahanannya di panggung sejarah telah memberikan kontribusi besar terhadap bingkai kesejarahan dan peradaban umat Islam dan Indonesia, seiring dengan dinamika sejarahnya. Salah satu faktor penyangganya adalah corak gerakan yang bersifat tajdid yang mencerahkan dan berkemajuan. Dalam irama sejarah Indonesia itu, Muhammadiyah masih tetap kukuh menggerakkan misi dakwah Islam dalam segala aspek kehidupan. Tajdid yang dimaksudkan adalah mengamalkan ajaran Islam yang bersifat transendental dan mendinamisasikan yang profan. Pada konteks ini, ada yang harus tetap dipertahankan dan dipelihara, agar kebersinambungan gerakan dapat berjalan baik dan dinamis. Selain itu, terdapat pula yang mesti berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan waktu dan tempat. Hal ini adalah suatu keniscayaan, agar masyarakat dalam menjalani kehidupannya tidak mengalami kesulitan.

Kemudian tajdid itu dalam bentuk yang praksis diwujudkan

melalui ijtihad, yaitu suatu aktivitas penalaran yang dilakukan secara maksimal dengan menggunakan metode-metode tertentu. Untuk kepentingan ijtihad yang dimaksud, Muhammadiyah lebih memilih melakukannya secara kolektif (*ijtihad jama'i*) daripada pribadi (*ijtihad fardh*). Pemilihan kolektif itu dimungkinkan karena persoalan yang dihadapi umat semakin dinamis dan kompleks, sementara kemampuan perorangan sangat terbatas untuk menyelesaikannya secara menyeluruh. Ditambah lagi dengan kecenderungan spesialisasi ilmu pengetahuan yang semakin tajam, di mana saat ini sulit ditemukan seseorang yang memiliki tiga atau empat kepakaran sekaligus. Hal ini berbeda dengan abad pertengahan. Misalnya, Ibn Rusyd, selain kepakarannya dalam bidang hukum sekaligus sebagai filosof dan ahli medis. Begitu pula Al-Ghazali, di samping sebagai ahli bidang hukum, juga filosof dan ahli tasawuf.

Hal yang sama dalam menata kehidupan sosial yang harmonis diperlukan penguatan dan konsolidasi kekuatan umat. Dalam hal itu, Ahmad Dahlan menawarkan gagasan baru bahwa untuk membumikan Islam dan mengangkat harkat dan martabat umat Islam di nusantara tidak cukup dengan modal semangat individual tanpa terorganisir dalam suatu wadah yang rapi dan kuat. Pergerakan yang dilakukan secara individual, sebagaimana yang sudah diwujudkan oleh tokoh-tokoh lain, dipandang kurang efektif dan tidak berkesinambungan. Kurang efektif karena pergerakan itu sangat bergantung kepada tokoh atau figur tertentu. Begitu pula ketidaksinambungannya, di mana gagasan dan perjuangan akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya tokoh tersebut, kecuali ia betul-betul menyiapkan kader sebagai pelanjutnya. Dalam kenyataannya, hal itu jarang terwujud. Berbeda dengan pergerakan yang dibangun secara terorganisir, meskipun tokohnya sudah tiada, pergerakan itu tetap dilanjutkan generasi berikutnya.

Fakta sejarah menunjukkan pula bahwa tidak banyak organisasi yang didirikan pada masa lalu hilang ditelan sejarah dan tidak banyak yang dapat bertahan. Misalnya, Budi Utomo dengan corak nasionalisme kebangsaan. Para penggerak umumnya berasal dari tokoh yang pernah mengenyam pendidikan dari Barat, terutama

negeri Belanda. Meskipun diakui bahwa sebagian besar aktivisnya adalah Muslim, namun pemahaman dan visi keislaman mereka masih belum dapat diharapkan untuk memperjuangkan umat dalam konteks keislaman. Dalam istilah Clifford Geertz, sebagaimana dikemukakan Mark R. Woodward, bahwa mereka termasuk dalam kelompok *Abangan*.¹ Dalam kerangka itu, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ia belum memiliki pengalaman mengenai seluk beluk pergerakan, maka ia bergabung Budi Utomo dengan tujuan untuk banyak belajar, meskipun yang terjadi justru Ahmad Dahlan menjadi figur yang ikut menentukan arah pergerakan dan mencerahkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya.

Muhammadiyah yang didirikan Ahmad Dahlan mengambil segmen yang berbeda dengan Budi Utomo, yaitu menggerakkan potensi umat berbasis agama. Pergerakan ini berkembang lebih cepat dan bahkan lajunya di luar dugaan sebelumnya. Begitu pula kebertahanannya di tengah perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan umat Islam yang terkungkung dan terpinggirkan dalam segala bidang pada saat itu menyadarkan sebagian elite Islam untuk keluar dari keadaan demikian. Hanya saja, keprihatinan itu belum dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang lebih konkret. Dalam hal itu, Ahmad Dahlan mengambil sebagian peran itu dengan membentuk persyarikatan yang berbeda dengan yang dilakoni tokoh-tokoh Islam semasanya, termasuk kelompok intelektual lainnya. Secara ideologis, bangunan pergerakan yang dibangun kelompok elite intelektual cenderung tidak menunjukkan keberpihakan pada visi keislaman, melainkan lebih didominasi kelompok Abangan, sehingga pergerakan itu sulit diharapkan dapat memperjuangkan umat Islam. Begitu pula dalam bentuk pergerakan tokoh Islam lainnya, tidak menunjukkan upaya simultan dan tersistem. Tokoh-tokoh Islam di bidang pendidikan cenderung menjauhi perkembangan ilmu pengetahuan dari luar, termasuk melarang mencontoh sesuatu yang berada di luar kebiasaan umat Islam, seperti memakai dasi, belajar secara klasikal, dan seterusnya. Hal itu dipandang sebagai *tasyabbuh*, yaitu meniru

¹ Mark R Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 2.

dan menyamai orang-orang yang tidak seakidah. Hukumnya haram.

Mereka lebih konsentrasi pada pengembangan pesantren dengan pola belajar yang konvensional, tanpa ada pengembangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, model perjuangan tokoh Islam lainnya cenderung menggunakan jalan politik, seperti Agus Salim dengan Sarekat Islam (SI)-nya. Begitu pula sistem pendidikan yang dikembangkan pemerintah, cenderung meninggalkan nilai-nilai keislaman. Akibatnya, dua sistem pendidikan ini nyaris tidak pernah ketemu. Pada konteks demikian, Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah berupaya mengelaborasi dua sistem tersebut sehingga peserta didik dapat mendalami pendidikan secara baik tanpa mengabaikan salah satunya. Selain bidang pendidikan, dalam mengembangkan sayap dakwahnya, Ahmad Dahlan juga aktif bergumul dengan kehidupan masyarakat yang dibinanya. Tahap demi tahap rintisan dan perjuangannya semakin memperoleh sambutan masyarakat, tidak hanya dari kalangan Kauman, tetapi respons positif juga diperoleh dari sebagian besar masyarakat Jawa. Tentu saja, tantangannya juga tidak ringan. Tak jarang ia memperoleh ancaman dan intimidasi, bahkan diusir dari kampungnya sendiri.

Figur Ahmad Dahlan menjadi fenomenal saat itu, mengingat Ahmad Dahlan termasuk orang yang ke dalam Islamnya diakui dan disegani oleh ulama tradisional yang anti Barat. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga dekat bahkan ikut terlibat secara aktif dengan pergerakan yang dibangun oleh kelompok Abangan dan bahkan sempat pula menjadi guru di sekolah Belanda. Dahlan pun menawarkan perubahan sistem dan kurikulum pendidikan, hingga ia mendirikan sekolah sendiri. Sekolah itu berbeda dengan sekolah Belanda dan pesantren. Para muridnya memperoleh pelajaran yang sama dengan sekolah Belanda dan sekaligus memperoleh pendidikan agama secara mendalam.

Diakui bahwa dalam pengamalan keagamaan, Dahlan belum begitu banyak menyentuh persoalan-persoalan *furu'*, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dipandanginya sangat mendasar. Misalnya, ia meluruskan arah kiblat Masjid Kasultanan Yogyakarta yang menurutnya tidak mengarah ke Ka'bah, melainkan ke Etiopia. Namun, tindakannya itu menyulut pro-kontra, tidak hanya pada

masyarakat umum, tetapi juga elite Kesultanan. Mereka marah dan gusar. Dalam sejarahnya, peristiwa itulah yang membuat Dahlan berencana meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke tempat lain karena sudah tidak tahan lagi menerima ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

Setelah meninggalnya Dahlan, Muhammadiyah semakin berkembang melampaui zamannya. Lembaga pendidikan yang ia bangun dengan segala keterbatasan terus berkembang menjadi model dan sistem pendidikan Indonesia modern. Begitu pula pelayanan sosial seperti panti asuhan tumbuh di mana-mana, tidak hanya sekadar mengayomi anak-anak yatim dan terlantar, tetapi menjadikan mereka berkembang dan memiliki masa depan sebagaimana halnya anak-anak yang lain. Jejaring Muhammadiyah juga semakin solid dan terus melangkah mengembangkan sayapnya di Jawa hingga masuk ke pelosok nusantara. Pada tempat-tempat tertentu, perkumpulan-perkumpulan Islam yang hidup dan aktif meleburkan diri ke dalam Muhammadiyah dengan kesadaran sendiri para aktivisnya. Misalnya, “Tiang Aman Sendi Selamat” di Minangkabau (Tanjung Sani, Maninjau). Perkumpulan ini dipimpin oleh Haji Yusuf Amrullah,² adik Syekh Abdul Karim Amrullah, ulama besar pembaru. Sejalan dengan itu, keanggotaannya juga semakin menyebar dan meningkat secara signifikan melintasi etnis dan kultur serta geografis. Begitu pula di perantauan tokoh-tokoh Minang ikut bergabung dengan Muhammadiyah. Organisasi rantau yang pada mulanya didirikan untuk menyatukan orang rantau berubah menjadi Muhammadiyah.

Perkembangan itu memengaruhi gerak Muhammadiyah. Perkembangan itu menjadi kekuatan Muhammadiyah. Keragaman latar belakang keanggotaan mulai dari masyarakat awam dalam agama, intelektual, sarjana sampai ulama menjadi potensi dan modal sosial yang besar dalam membangun gerakan dakwah yang modern dan mampu menyisir semua lini kehidupan dan strata sosial masyarakat. Namun demikian, potensi ini juga menjadi persoalan dan memunculkan kelemahan di internal Muhammadiyah. Sebab, amal usaha yang semakin banyak kadangkala tidak terkontrol dengan baik,

² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Panjimas, 1983), hlm. 189.

sehingga menjadi lebih longgar. Rekrutmen anggota belum memiliki sistem yang baku untuk memproteksi warganya dari pengaruh kelompok dan aliran lain, yang memiliki misi berbeda dengan Muhammadiyah. Keragaman pemahaman ulama tentang persoalan keagamaan karena berasal dari latarbelakang kultur dan pendidikan yang berbeda-beda juga menjadi masalah.

Selain dikenal sebagai ulama penggerak, Ahmad Dahlan adalah administrator-organisatoris persyarikatan. Ia dibantu beberapa teman dekat dan sekaligus sebagai murid setianya. Figur atau ketokohnya masih sentral: tempat orang meminta perlindungan, bertanya, bahkan menggantungkan hidup. Tokoh atau figur masih kuat pada saat itu. Organisasi belum menjadi *term* kecuali pada tingkat elite intelektual, masih sangat terbatas. Hal itu, dapat dilihat dari pergerakan yang tumbuh dan muncul sezaman dengan itu. Gerakan pembaruan Islam di Minangkabau, misalnya, belum dilakukan secara kolektif dalam bentuk pengorganisasian. Meskipun pembaruan tersebut oleh para sejarawan dinamakan dengan gerakan Paderi, tetapi dalam fakta pergerakan tersebut tetap saja tidak terkondisikan secara kelembagaan. Para tokoh itu, misalnya H. Piobang, H. Sumanik, dan H. Miskin, bergerak dan berjuang sendiri-sendiri, meskipun gagasan dan idenya sama. Begitu pula Abdul Karim Amrullah, melanjutkan gerakan pembaruan di Minangkabau tidak dalam bentuk yang terlembaga. Setelah melihat secara langsung gerakan yang dilakukan Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah di Yogyakarta, ia baru mendirikan Sumatra Thawalib di Padang Panjang.³ Hal yang sama juga dilakukan Fakhri Usman dengan Ikhyaus Sunnah dan Tabligh Tanbighul Ghafilin-nya di Surabaya, serta Datuk Bareno, Datuk Majolelo, dan Sutan Marajo dengan Nurul Islamnya di Pekalongan.

Muhammadiyah di Minangkabau merupakan keberlanjutan dari gerakan pembaruan sebelumnya, yaitu gerakan Paderi dan ulama kaum muda. Akan tetapi, corak dan pendekatannya berbeda dengan yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih persuasif, santun, dan akomodatif, sehingga lebih dapat diterima oleh semua unsur seperti ninik mamak dan intelektual.

³ *Ibid.*

Namun, bukan berarti tidak ada tantangan. Dalam perjalanannya, keberadaan Muhammadiyah di berbagai tempat di Minangkabau juga ditantang dan muncul perlawanan dari berbagai pihak, sebagaimana diungkapkan Hamka bahwa

Ingatlah ketika 30 tahun jang lalu! Kita sebagai pelopor dari tjita-tjita kebangunan Islam pernahlah merasa terpentjil dalam masjarakat keislaman. Segala golongan Islam jang tidak menjetudjui paham kita, dan banjak jang tidak menjetudjui itu, pernahlah kita sebagai “momok kaum muda. Kita dibentji, meskipun lama kelamaan amal usaha kita diakui dengan diam-diam. Sengadja didirikan orang-perkumpulan buat menentang kita.⁴

Tantangan itu bukan hanya berasal dari masyarakat yang belum paham dengan Muhammadiyah, melainkan juga datang dari pemerintah sejak dari masa kolonial. Pada masa kolonial, selain dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, gerak Muhammadiyah juga ditentang dan dihalang-halangi oleh komunis. Semangat para aktivis dan penggerak Muhammadiyah tidak pernah luntur atas tantangan dan pembatasan ruang gerak tersebut. Bahkan Muhammadiyah terus berkembang di hampir seluruh *nagari* di Minangkabau. Pada masa itu pula kongres pertama di luar Jawa berhasil dengan sukses, bukan hanya dari sisi pelaksanaan melainkan sebagai sendi baru Muhammadiyah di nusantara. Keberhasilan itu, akhirnya mengilhami munculnya semangat “*memuhammadiyahkan nagari dan menagarikan Muhammadiyah*”.

Perjalanan sejarah Indonesia terus berputar, penjajahan terus berlanjut dengan militer Jepang, meskipun dalam waktu yang relatif singkat. Masa pendudukan Jepang memang hanya sebentar dibandingkan Belanda, tetapi kerusakan dan kesengsaraan yang diakibatkannya sangat luar biasa. Masyarakat tidak dibenarkan berpolitik. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dibubarkan. Kalaupun tidak terkena dengan pembubaran itu, ruang geraknya sangat dibatasi dan bahkan corak dan karakternya diupayakan diubah sejalan dengan kepentingan Jepang. Muhammadiyah termasuk bagian yang tidak terkena pembubaran itu, tetapi tidak dapat bergerak lebih leluasa karena sangat dibatasi oleh pemerintah militer Jepang. Sebagian besar amal usaha Muhammadiyah

⁴ Hamka, *Muhammadiyah-Masjumi* (Jakarta: Masyarakat Islam, t.th), hlm. 30.

dalam bentuk lembaga pendidikan, panti asuhan, dan sejenisnya, tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan keberadaannya semakin terancam. Padahal pada masa pemerintah kolonial Belanda, lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi sekolah pilihan bagi warga pribumi. Sebarannya hampir merata di seluruh nagari-nagari di Minangkabau. Di Singkarak, Solok, misalnya, sekolah Muhammadiyah menjadi sarana pendidikan awal di nagari tersebut. Sebelum pemerintah mampu menyediakan sarana sekolah, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah pertama pada 1930 dengan tujuan mencerdaskan anak nagari dari keterbelengguan penjajahan dan keterbelakangan.

Sementara itu, pasca kemerdekaan, kebebasan hanya dirasakan sebentar saja. Belanda kembali datang untuk menjajah. Pada masa ini, Muhammadiyah Minangkabau mengerahkan segala potensinya bersama komponen bangsa lainnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Akibatnya, secara organisasi, Muhammadiyah kembali mengalami kevakuman dan tidak dapat melakukan konsolidasi gerakan. Begitu pun lembaga pendidikannya, habis diprakporandakan Belanda.

Setelah masa kemerdekaan, Muhammadiyah Minangkabau kembali mengalami nasib yang kurang beruntung. Ketika meletusnya gerakan dan kekalahan PRRI, Muhammadiyah menjadi sasaran utama untuk dihabisi oleh kelompok komunis. Menurut mereka, Muhammadiyah adalah pendukung utama Masyumi. Bahkan dalam suatu rapat besar, dengan mengatasnamakan masyarakat Minangkabau, Muhammadiyah direkomendasikan kepada pemerintah untuk dilarang di Minangkabau karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Begitu pun tempat kegiatannya yang selama ini dipusatkan di Jl. M. Yamin, Padang (Masjid Muhammadiyah Sumatra Barat sekarang) diminta oleh rapat tersebut untuk dibongkar karena dinilai sebagai bangunan liar. Dalam sejarahnya, rapat besar tersebut dikondisikan oleh pihak komunis.

Pada masa itu pula, Muhammadiyah nyaris lumpuh dan tidak dapat bergerak. Sebagian besar pimpinan Muhammadiyah sudah pergi meninggalkan kota dan “*ijok*” (lari) yang disebabkan dua hal. *Pertama*, ikut berjuang dengan pasukan PRRI dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. *Kedua*, tidak tahan dengan

tekanan dan intimidasi yang dilakukan pihak komunis, terutama pihak OPR, sehingga tidak ada jalan lain selain harus menyelamatkan diri dengan cara keluar dari kampung. Kemudian, tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya aktif menggerakkan Muhammadiyah tidak mampu berbuat banyak. Jangankan menggerakkan, mengaku Muhammadiyah pun jiwa mereka terancam. Akibatnya, Muhammadiyah lumpuh total, baik keorganisasian maupun amal usahanya.

Dalam keadaan demikian, Moehammad Yatim, tokoh yang sebelumnya tidak begitu dikenal pada kepemimpinan tingkat wilayah (provinsi), muncul mempertahankan dan menyelamatkan Muhammadiyah di Minangkabau. Meskipun bergerak sendirian dengan didukung penuh oleh istri dan keluarganya, secara bertahap ia mampu mempertahankan dan menyelamatkan Muhammadiyah. Tanpa ada kecemasan dan kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarganya, ia bergerak mempertahankan dan menyelamatkan Muhammadiyah di tengah berkecamuknya perang saudara tersebut. Kepemimpinan Muhammadiyah yang mengalami kevakuman dan kekosongan pun diambil alih Moehammad Yatim. Pimpinan dan amal usaha yang nyaris tidak berpenghuni satu demi satu dapat dikonsolidasikan dan dinormalkan.

Dalam perjalanannya, dalam suasana mencekam dan menakutkan, tidak mudah menggerakkan dan mengkonsolidasikan kembali. Hampir setiap cabang yang ada di nagari-nagari yang ia kunjungi selalu dihalang-halangi oleh penguasa setempat. Apalagi, bila penguasa lokal tersebut dijabat oleh kader dan simpatisan komunis. Untuk memperoleh izin rapat saja harus berurusan dengan penguasa militer. Bukan hanya itu, pimpinan dan warga Muhammadiyah mengalami perlakuan yang kadang tidak manusiawi. Mereka diinterogasi, ditekan, dan diintimidasi. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun. Muhammadiyah berada pada posisi yang sangat sulit dan dilematis. Akan tetapi, bersama para kolega seperjuangannya, terutama dari kalangan saudagar di pasar raya Padang, Muhammad Yatim berhasil mengatasinya. Dalam penelusuran penulis, Muhammad Yatim tidaklah muncul tiba-tiba. Ia memiliki pengalaman menghadapi masa-masa sulit pada dua zaman penjajahan: Belanda dan Jepang.

Pada masa-masa itu, meskipun dalam situasi yang berbeda, di mana pun ditugaskan oleh pimpinannya sebagai pegawai pada kantor pos dan telegraf, ia selalu memelopori berdirinya Ranting dan Cabang Muhammadiyah. Selain berpengalaman dalam menghadapi situasi-situasi sulit, dukungan keluarga juga sangat menentukan.

Buku ini merupakan bagian dari penelusuran penulis dalam melihat keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang kokoh dan kuat, namun tidak luput dari tekanan politik. Apalagi di saat-saat terjadinya pergolakan daerah, yang lebih dikenal dengan peristiwa PRRI. Peristiwa ini, bagi sejarah Minangkabau, menjadi momok sangat menakutkan dan efeknya bukan hanya pada politik melainkan memengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat. Di sinilah tampak peran Moehammad Yatim dalam menyelamatkan dan mempertahankan Muhammadiyah di tengah gejolak politik setelah meletusnya PRRI di Sumatra Barat.

Sebelum sampai kepada pertahanan dan penyelamatan Moehammad Yatim, buku ini berupaya membentangkan gerakan Muhammadiyah sebelumnya. Buku ini akan dimulai dengan pengenalan Muhammadiyah oleh para perantau Minang sampai pada Agresi Belanda. Hampir dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah di Minangkabau sangat diwarnai oleh perkembangan sosial dan politik daerah. Begitu pun sebaliknya, irama dinamika Minangkabau selalu diwarnai pula oleh gerakan dan tokoh Muhammadiyah. Oleh sebab itu, Minangkabau dan Muhammadiyah menjadi satu tanpa terpisahkan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengacaan pergerakan Muhammadiyah dalam menghadapi gerak dan tantangan sejarah. Tokoh-tokoh masa lalu dengan zamannya sudah berhasil dan sukses menggerakkan Islam melalui Muhammadiyah di Minangkabau, maka adalah kewajiban bagi generasi sekarang untuk mampu membaca tanda-tanda zaman demi Muhammadiyah dan Sumatra Barat ke depan. Apalagi dengan perubahan sosial yang sangat cepat, Ranting dan Cabang Muhammadiyah sebagai urat nadi mesti lebih kokoh dan kukuh dalam mempertahankan misi Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. •

Bab II

Pergerakan Muhammadiyah sebelum Pergolakan

Pengenalan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH sebagai organisasi Islam bercorak pembaruan (tajdid) telah tumbuh dan berkembang di Minangkabau sejak 1925. Perkembangannya merupakan kelanjutan dari gerakan pembaruan yang sudah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Pembaruan episode pertama ditandai dengan kepulangan tiga ulama Minangkabau: Haji Miskin (asal Pandai Sikek), Haji Sumanik (asal Tanah Datar), dan Haji Piobang (asal Luhak Limapuluh Kota). Tiga ulama ini pulang dari Makkah sekitar 1803 dengan membawa paham agama dalam bentuk pemurniaan (purifikasi), yaitu membersihkan masyarakat dari praktik keagamaan yang bercampur aduk dengan “adat” yang tidak sejalan dengan Islam. Gerakan ini sudah menjalar ke seluruh ranah Minang hampir selama 18 tahun: sejak 1803 sampai datangnya penjajah Belanda. Pergerakan ini berhenti setelah para tokoh dan pimpinannya berhasil digempur oleh Belanda, termasuk Tuanku Imam Bonjol yang berperang mati-matian hingga 1838.¹ Namun, semangat pergerakan untuk

¹ Sjafnir Aboe Nain, *Tuanku Imam Bonjol* (Padang: PPIM,2004), hlm. viii.

terus melakukan pembaruan tidak pernah mengalami kemunduran. Kebangkitannya hanya menunggu momentum waktu dan situasi.

Sedangkan pembaruan pada episode yang kedua baru muncul kembali pada awal abad XX, ditandai dengan munculnya beberapa tokoh dan ulama: Syaikh Abdullah Ahmad, Syaikh Muhammad Jamil Jambek, Syaikh Abdul Karim Amrullah, Syaikh Muhammad Thaib, Syaikh Ibrahim Musa, dan lain-lain. Semua ulama tersebut melakukan pergerakan setelah kembali dari belajar kepada Ahmad Khatib al-Minangkabawi di Makkah.² Episode pembaruan ini, dalam sejarah pergerakan pembaruan pemikiran Islam, disebut *gerakan kaum muda*, gerakan antitesis terhadap kaum tua, yaitu kelompok ulama di ranah Minang yang mempertahankan praktik keagamaan sebagaimana diwariskan sebelumnya, di mana praktik keagamaannya lebih banyak dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan lokal. Gerakan pembaruan yang ditanamkan oleh kaum Paderi bukan berarti mengalami kelumpuhan sejalan dengan meninggalnya para tokohnya yang benar-benar gigih dalam memperjuangkan ide dan gagasannya. Sebagian pengikutnya, ada yang memperjuangkannya dengan tidak memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat sekitarnya, sehingga terkesan keras tanpa kompromi.

Dalam rentang waktu lebih dari 100 tahun setelah kaum Paderi, gerakan pembaruan dalam bentuk yang lebih nyata tampak tidak lagi melakukan pergerakan, namun bukan berarti pendukung, simpatisan, dan pendukungnya tidak melakukan upaya-upaya pembenahan. Yang terjadi adalah selama rentang waktu tersebut digunakan untuk mempersiapkan gerakan yang lebih matang. Dalam bentuk yang lebih konkret, gerakan pembaruan itu dilakukan melalui pembenahan dan mempersiapkan sumber daya dengan “menyauk” ilmu ke sumbernya, yaitu Makkah. Pada masa itu, Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama asal Minangkabau sedang memegang peran penting di Makkah, yaitu menjadi Imam Besar di Masjid Haram.³ Dalam sejarahnya, jarang ada imam masjid bersejarah tersebut yang berasal dari luar Arab Saudi.

² Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad ini* (Jakarta: Panjimas, 1983), hlm. 53-88.

³ Hamka, *Muhammadiyah...*, *op. cit.*, hlm. 8.

Mungkin ia adalah satu-satunya, pada saat itu, yang berasal dari luar Saudi. Penguasaan yang menonjol ulama ini adalah *fiqh*. Ia tidak pernah pulang kampung sejak bepergian ke Makkah hingga meninggal dunia, karena dalam pandangannya harta pusaka dalam adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam. Kehidupan orang Minang umumnya telah memakan harta haram setiap harinya.

Selain Ahmad Khatib, ulama lain yang muncul pada masa ini adalah Syaikh Ismail al-Khalidi, guru besar dalam bidang tasawuf.⁴ Sama dengan Ahmad Khatib, Ismail al-Khalidi memiliki ratusan murid, sehingga pengaruhnya juga cukup kuat dan tersebar di dunia Islam, terutama di Nusantara. Pada awal abad XX, sebagian besar murid dua ulama ini kembali pulang ke tanah air. Masing-masing berupaya melakukan pergerakan dan perubahan, terutama berkaitan dengan paradigma pemahaman keagamaan. Mereka lebih berorientasi pada pengamalan Islam yang bersih dan murni dari pencampuran adat dan kebiasaan lokal. Sebagaimana yang ditanamkan oleh Ahmad Khatib bahwa sebagian besar pengamalan Islam di tanah air tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, ketika pulang langkah utama yang mereka lakukan adalah mengubah paradigma masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam. Gerakan yang mereka bangun denyutnya sangat terlihat, khususnya di Minangkabau, tempat asal Ahmad Khatib. Dari situlah kemudian “corong” dan “gendang” pembaruan sentak mengguncang para ulama yang berpandangan keagamaan lama. Bahkan pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh ulama muda tersebut tidak jarang dinilai oleh ulama kaum tua sebagai pemahaman yang sesat dan menyesatkan masyarakat. Dalam hal itu, tak heran suatu ketika muncul fatwa dari Saudi Arabia—tentunya atas pengaduan sebagian ulama Nusantara kepada pihak otoritas keagamaan di Saudi—yang melarang ulama muda ini pergi menunaikan ibadah haji. Pengaruh dari gerakan yang mereka kembangkan tidak hanya mengguncang Minangkabau, melainkan cepat merambah ke daerah-daerah lain seperti Sulawesi, Kalimantan, Bima, Sumbawa, dan terutama di tanah

⁴ *Ibid.*

Melayu.⁵ Sebagaimana di tanah Minang, di tempat-tempat yang disebutkan itu juga sentak mengguncang ulama setempat, terutama ulama yang pemahaman agamanya masih bertahan kepada yang lama.

Menyebarnya pengaruh dari murid-murid dua ulama di atas menunjukkan terjadinya penyebaran gagasan yang begitu cepat dan masif hingga seluruh pelosok tanah air. Sebagai gerakan pembaruan, tentu saja tidak semua ulama menyetujui gerakan tersebut, bahkan di beberapa tempat muncul ketegangan yang luar biasa. Perdebatan dan perbedaan tersebut dengan sendirinya melahirkan polarisasi kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Khusus di ranah Minang, perdebatan dan perbedaan tersebut melahirkan dua kelompok besar: *kaum ulama tua* dan *kaum ulama muda*. Perseteruan dua kelompok ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pengumpulan pemikiran Islam masa lalu yang sudah ditanamkan oleh tokoh-tokoh Paderi. Pertentangan itu tidak dapat dihindari karena, pada satu sisi, kelompok ulama tua bertahan dengan pendapat dan pemikirannya, sejalan dengan kematangannya, dan karena sudah diwariskan berpuluh-puluh tahun. Begitu pula, pada sisi yang lain, kaum ulama muda melihat banyak praktik keagamaan masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Celakanya, pertentangan dan perbedaan tersebut oleh Belanda terus dipelihara dan dipupuk. Kadangkala, keadaan demikian tidak disadari oleh ulama yang bertikai, sehingga terjadi perpecahan dan keterbelahan umat. Perseteruan pendapat antara ulama kaum tua dan ulama kaum muda, pada satu sisi, bermakna positif karena suasana pencarian kebenaran berada dalam suasana yang lebih kondusif. Kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat tentu akan lebih menyemarakkan wacana dan keragaman pendapat. Begitu pula dalam pengamalan ajaran agama, masyarakat dapat mencari berbagai pilihan dan alternatif dari perbedaan pendapat ulama itu, sehingga tidak ada yang mengklaim bahwa dialah yang paling benar, sedangkan yang lain keliru dan salah. Akibatnya, akan menimbulkan masalah baru yang semestinya tidak boleh terjadi. Jadi, di Minangkabau

⁵ Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), hlm. 82.

khususnya, gejala yang timbul di masyarakat lebih terlihat dan kentara. Oleh sebab itulah, pengelompokan kaum muda dan kaum tua sangat kuat dan menonjol dibandingkan daerah lain.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, perdebatan dan perbedaan ini tanpa disadari dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Pemerintah kolonial Belanda secara kasat mata kadang lebih menampakkannya sebagai sang pendamai dan penengah, tetapi sebenarnya memiliki misi yang sangat kontraproduktif. Tidak jarang, perbedaan itu oleh pemerintah kolonial dipelihara dan dipertahankan dalam rangka memelihara kepentingan mereka. Kolonial juga berupaya membenturkan antara ulama dan ninik mamak. Padahal, keduanya seiring dan sejalan. Sebagian besar ulama adalah juga sebagai pemangku adat dan berpengaruh di kaum dan nagarnya. Begitu pula sebagian ninik mamak, para datuk sekaligus sebagai ulama. Jadi, keduanya sulit dibedakan karena satu sama lain saling membutuhkan dan mendukung.

Pengaruh ulama muda ini bukan hanya tersebar di ranah Minang melainkan ke tempat-tempat lain di nusantara. Pengaruh tersebut merambah melalui murid-muridnya yang tersebar ke berbagai pelosok. Di antara murid-muridnya ada yang menjalankan misinya dalam bentuk perseorangan dan sebagian yang lain membentuk perkumpulan. Fakih Usman, misalnya, membentuk organisasi Ikhyaus Sunnah dan Tabligh Tanbighul Ghafilin di Surabaya. Pada mulanya, organisasi ini dibentuk hanya dalam bentuk perkumpulan orang Minang di perantauan. Akan tetapi, dalam perjalanannya berkembang menjadi pengajian yang bersifat umum. Dari sini, banyak anggota pengajian yang menyebarkan gagasan dan ide pembaruan sebagaimana yang dikembangkan Fakih Usman. Ketika itu, memang harus berhadapan dengan "*mainstream*" umat Islam dengan pemahaman keagamaan yang masih mencampuradukan Islam dengan kebiasaan lokal. Akibatnya, gesekan-gesekan di tengah masyarakat tidak dapat dihindari, tetapi masih dalam batas-batas toleransi. Ketika organisasi ini semakin berkembang dan pengaruhnya tampak lebih nyata dan menguat, Mas Mansur yang pada mulanya bergabung dengan perkumpulan yang pemahamannya berorientasi pada corak tradisional menyatakan keluar dari perkumpulan tersebut. Pada waktu itu, murid-

murid Mas Mansur sendiri sudah memiliki jaringan perkumpulan yang dibentuk oleh Fakih usman. Dengan demikian, Fakih Usman memiliki pengaruh yang cukup kuat. Ide pembaruan yang dibawanya secara perlahan dapat menyebar ke masyarakat Surabaya, termasuk kepada murid-murid Mas Mansur. Dalam hal itu, tinggal menunggu waktu perjumpaan antara dua tokoh ini.

Perantau Minang di Pekalongan juga melakukan hal yang sama. Mereka mendirikan organisasi "Nurul Islam". Pada mulanya, anggota organisasi ini terbatas hanya pada orang rantau Minang. Namun, kemudian berkembang kepada masyarakat umum. Sebagaimana diketahui, perantau Minang yang berada di suatu daerah umumnya tidak hanya sebatas pada misi ekonomi melainkan juga berperan sebagai dai karena mereka sudah memiliki basis agama yang kuat. Kebanyakan dari penggerak organisasi ini terdiri dari perantau Minang dengan akar dan corak pemahaman keagamaan yang dianut oleh kaum ulama muda. Ketika terjadi perjumpaan organisasi tersebut dengan Muhammadiyah, dua-duanya memiliki corak yang hampir sama. Pembauran itu terjadi setelah Muhammadiyah memandang bahwa Nurul Islam sangat berpotensi untuk mengembangkan benih Muhammadiyah. Begitu pun sebaliknya, Nurul Islam menilai bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang akan berkembang dan wataknya tidak jauh berbeda dengan yang dikembangkan oleh mereka.

Organisasi-organisasi yang dibentuk dan dikembangkan oleh perantau Minang, dalam sejarahnya, berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan daerah masing-masing. Satu sama lain tidak memiliki hubungan secara organisatoris. Jadi, mereka umumnya bergerak secara independen dan tidak terorganisir dalam bentuk yang lebih luas dan cenderung bergerak terbatas pada wilayah-wilayah tertentu dengan jangkauan sangat terbatas. Pergerakan yang sama juga terjadi di Minangkabau sendiri sebagai lokomotif awal dari gerakan pembaruan tersebut. Dalam hal itu, Abdul Azis Thaba mengungkapkan bahwa gerakan pembaruan yang dilakukan oleh ulama-ulama Minangkabau tidak dapat melahirkan organisasi berskala nasional,⁶ meskipun orang

⁶ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 132.

Minang sendiri tersebar di berbagai pelosok nusantara dan mereka mendirikan perkumpulan. Begitu pula pengaruh ulama pembaru yang berasal dari Minang dan memiliki pengaruh luas secara nasional. Lebih lanjut, Abdul Azis Thaba mengemukakan bahwa hal itu terjadi karena dua kemungkinan: karena adanya pertikaian internal atau karena kuatnya tekanan penjajah.⁷

Asumsi Abdul Azis tersebut mungkin ada benarnya karena pada waktu itu dan sebelumnya Minangkabau dilanda konflik yang sangat serius. Perang Paderi, misalnya, membawa pengaruh yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pada satu sisi, antara sesama umat Islam di ranah Minang sedang terjadi polemik antara ulama yang membawa pembaruan dengan ulama yang tetap menginginkan corak pemahaman dan amalan yang sudah diterima secara turun temurun. Selain pertikaian antara sesama ulama, pada sisi yang lain, pemerintah kolonial juga berupaya membenturkan antara ulama dengan kaum adat dengan teori *divide et impera*. Belum lagi selesai pertikaian itu, muncul lagi gerakan komunis yang menguras energi umat.

Pada saat itu, pergulatan dan perdebatan pemikiran antara tiga komponen, yaitu komunisme, ulama kaum tua, dan kaum ulama muda sangat tajam. Komunis lebih memilih isu perjuangan, berdikari, anti penjajah, dan kemandirian bangsa. Akan tetapi, di balik itu semua, justru membawa malapetaka tidak hanya bagi Minangkabau tetapi juga seluruh nusantara. Beberapa pemberontakan dan peristiwa kemanusiaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari irama sejarah Minangkabau. Sejalan dengan itu, tekanan penjajah begitu sangat kuat. Organisasi-organisasi keagamaan dan politik ditekan sedemikian rupa hingga tidak berdaya secara mandiri. Lembaga-lembaga pendidikan dengan gurunya harus berjalan sesuai dengan keinginan dan pengawasan pemerintah kolonial. Kebebasan ulama dan tokoh masyarakat dibatasi hingga tidak dapat lagi bersikap kritis. Ulama dan tokoh yang bersikap kritis ditahan, diteror, diasingkan, dan dibuang.

Berbeda dengan gerakan pembaruan yang dilakoni oleh pembaru dari Minangkabau, Ahmad Dahlan, meskipun sama-sama pernah belajar ke Ahmad Khatib, tetapi ia memiliki model, cara, dan strategi sendiri

⁷ *Ibid.*

dalam menyebarkan gagasan dan ide pembaruannya, yaitu dengan membangun organisasi yang lebih kuat. Begitu juga dalam menghadapi pemerintah kolonial. Kadangkala Ahmad Dahlan bersikap akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Akan tetapi, pada sisi-sisi tertentu tetap bersikap kritis. Dalam hal itu, kadang muncul kecurigaan dari kelompok lain bahwa Muhammadiyah menerima bantuan dari pihak pemerintah. Bahkan ada yang menuduh bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang penurut dan penakut kepada pemerintah. Mereka istilahkan dengan “Penjilat Ekor Belanda (PEB)”.

Dalam sejarah Muhammadiyah di Minangkabau, kehadiran Muhammadiyah merupakan bagian terpenting dari pergerakan Muhammadiyah secara nasional sebagai salah satu cabang dari Yogyakarta.⁸ Bagi Muhammadiyah, daerah Minangkabau adalah ibarat Yogyakarta bagi Jawa. Di Minangkabau, Muhammadiyah menemukan lahan yang sangat subur sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat.⁹ Tak heran jika muncul istilah bahwa Muhammadiyah lahir di Yogyakarta dan dibesarkan oleh Minangkabau. Ini tentu fakta sejarah yang sulit dibantah. Apalagi dengan kepiawaian para pedagang Minangkabau yang tersebar di hampir seluruh nusantara. Mereka pergi merantau selain didorong oleh faktor ekonomi juga semangat keagamaan, karena sejak sebelum merantau mereka sudah memiliki basis agama yang kuat.

Para perantau Minang umumnya tidak bercita-cita menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, melainkan sebagai pedagang sekaligus dai atau ulama. Dalam hal itulah, terlihat generasi para perantau Minang sebelum Orde Baru hanya sebagian kecil yang menjadi pegawai pemerintah maupun perusahaan atau tempat lain. Status “anak buah” bagi mereka bukan untuk selamanya, tetapi hanya menunggu waktu yang pas untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan kepada “tuan”nya. Telah tertanam dalam diri mereka bahwa biarlah hidup sederhana, asalkan tidak diatur oleh orang lain. Dengan bahasa lain, bagi mereka tidak akan bertahan lama menjadi “anak buah”. Budaya ini sangat berpengaruh kepada perkembangan

⁸ *Ibid.*

⁹ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abd Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 82.

Muhammadiyah. Sikap yang bersifat agresif dan aktif membuat Muhammadiyah lebih cepat tumbuh dan berkembang setelah orang-orang Minangkabau banyak yang bergabung di dalamnya dibandingkan dengan sebelumnya.

Cepatnya perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau tidak terlepas dari pergerakan yang sudah disemaikan oleh ulama-ulama sebelumnya di berbagai pelosok Minangkabau, baik kaum Paderi maupun kaum muda. Hal ini diakui Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah sebagai faktor yang membantu mempercepat proses perkembangan Muhammadiyah di daerah ini.¹⁰ Kehadiran Muhammadiyah di Minangkabau tepat di saat para pembaru Minangkabau sedang pada titik puncaknya. Yakni pada saat Abdul Karim Amrullah, Djamil Jambek, Daud Rasyidi, Ibrahim Musa dan sederetan tokoh pembaru lainnya, memiliki pengaruh kuat di Minangkabau. Muhammadiyah hadir ketika tokoh-tokoh tersebut sedang populer. Setelah itu dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Kebanyakan dari para muridnya sebagai penerus dari gerakan pembaruan dan bergabung Muhammadiyah. Sekedar untuk menyebut murid pembaru yang dimaksud, di antaranya: Hamka, AR. Sutan Mansur, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Malik Ahmad, Samik Ibrahim, Harun Elmaany, dan seterusnya. Mereka tersebar di berbagai daerah di Minangkabau dan bahkan dipersiapkan menjadi tokoh nasional. AR. Sutan Mansur, Malik Ahmad, Hamka, dan lain-lain, adalah bagian dari yang dipersiapkan oleh ulama pembaru tersebut, dan kenyataannya memang menjadi tokoh nasional.

Hal itu menunjukkan bahwa benih Muhammadiyah di Minangkabau sudah disemaikan atau lahannya sudah dibentangkan oleh para ulama kaum muda. Muhammadiyah tinggal menanam dan memeliharanya. Meskipun demikian, penanaman itu tidak mudah untuk dilakukan. Tantangan dan hambatan datang dari berbagai pihak, baik dari kalangan umat Islam yang sudah dipengaruhi oleh komunis maupun yang antipati terhadap gerakan pembaruan sebelumnya. Termasuk juga tantangan yang datang dari luar umat Islam seperti pemerintah kolonial.

¹⁰ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op. cit.*, hlm. 82.

Dikatakan benih pembaruan sudah disemaikan karena, dari sisi ideologis, ulama dari kaum muda memiliki akar ideologi yang sama dengan Muhammadiyah. Begitu pula dengan corak dan pemahaman keagamaan keduanya lebih berorientasi modernis, meskipun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan (seperti dalam bidang fikih perempuan). Akan tetapi, perbedaan itu tidak sampai pada hal-hal yang bersifat mendasar sehingga tidak sampai pada kebuntuan yang menyebabkan satu sama lain sulit untuk disatukan. Hal itulah yang kemudian menjadi faktor banyaknya tokoh-tokoh kaum muda bergabung dan aktif dalam gerakan Muhammadiyah.¹¹ Kalaupun tidak menjadi pimpinan dan anggota aktif, mereka menjadi pendukung dalam melapangkan jalan bagi keleluasaan perkembangan Muhammadiyah. Apalagi, jika mereka sedang memegang posisi-posisi strategis di tingkat nagari.

Pada ranah itu, peran Muhammadiyah adalah mengisi dan memperkuat penyemaian yang sudah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Lagi pula, Abdul Karim Amrullah, Jamil Jambek, Daud Rasyidi, Ibrahim Musa memang bersungguh-sungguh dalam mendukung dan mendorong agar Muhammadiyah dapat berkembang lebih cepat dan kuat, meskipun secara organisatoris tokoh-tokoh tersebut tidak masuk ke dalamnya. Para ulama tersebut sudah membentangkan benih pembaruan yang akan ditanamkan oleh Muhammadiyah. Dengan kondisi demikian, pergerakan persyarikatan lebih leluasa menyebarkan paham pembaruan dan memperluas organisasi secara masif. Kehadiran Muhammadiyah pasti dalam bingkai pemeliharaan Islam, tampil dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi politik modern seperti kolonialisme dan sekulerisme serta kebertahanannya karena memiliki akar kuat dalam masyarakat.¹² Bukan hanya itu, Muhammadiyah merupakan organisasi yang memiliki lembaga pendidikan yang terbanyak,¹³ dan termasuk dalam bidang yang lainnya.

¹¹ A. Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Kedua Puluh* (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm. 77.

¹² Alfian, *Muhammadiyah; The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: UGM Press, 1989), hlm. 340-343.

¹³ Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau* (Padang: PPIM, 2003), hlm. 184.

Jika dilacak akar sejarahnya, pengenalan Muhammadiyah kepada masyarakat Minangkabau sudah berlangsung jauh sebelum 1925. Bermula dari beberapa orang Minangkabau yang menetap di Pekalongan, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada tiga tempat tersebut, mereka sudah lebih dulu bergabung Muhammadiyah.¹⁴ Hanya saja, Muhammadiyah secara terbuka baru dikenalkan sejak kembalinya Abdul Karim Amrullah dari Jawa yang kedua kalinya. Pengenalan Muhammadiyah kepada masyarakat Minangkabau sebelum Abdul Karim Amrullah dilakukan melalui para perantau yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, terutama di Pulau Jawa. Melalui merekalah sesungguhnya pengenalan awal Muhammadiyah, baik ketika mereka pulang kampung maupun orang kampungnya yang datang ke Jawa.

Persentuhan gagasan dan ide pembaruan tersebut semakin menguat ketika para intelektual dan ulama Minangkabau secara langsung melakukan kontak dengan para perantau tersebut dan tokoh Muhammadiyah sendiri. Pada 1920, misalnya, para perantau Minang, terutama yang berasal dari Sungai Batang, telah mendirikan organisasi “Nurul Islam” di Pekalongan. Di sini ada Datuk Majolelo, Sutan Marajo, dan Datuk Nan Bareno.¹⁵ Organisasi lokal ini pada mulanya hanya organisasi yang dibentuk untuk berhimpunnya para orang rantau yang berada di sekitar Pekalongan. Akan tetapi, karena sama-sama memiliki paham agama, organisasi orang rantau ini dengan kesadaran dan kesepakatan bersama melebur diri masuk Muhammadiyah, dan menjadi bagian dari salah satu cabang dari Muhammadiyah.

Begitu pula Fakih Usman, murid Abdul Karim Amrullah yang merantau ke Surabaya. Selain sebagai pedagang yang sukses, ia juga sekaligus ulama. Lingkungannya di Surabaya memanggil dengan “ulama Padang” karena asalnya dari Padang. Pada 1920, Fakih Usman dan temannya, Haji Ali, mendirikan perkumpulan Ikhyaus Sunnah dan Tabligh Tanbighul Ghafilin.¹⁶ Tabligh yang dikembangkan Fakih Usman ini adalah pengembangan dari gagasan dan ide yang diperoleh selama “menyauk” ilmu dari Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim

¹⁴ Yusuf Abdullah Puar, *loc. cit.*

¹⁵ Alfian, *op. cit.*, hlm. 245.

¹⁶ A. Jainuri, *op. cit.*, hlm. 41.

sendiri pernah berkunjung ke Pakih Hasyim, ketika ia melakukan muhibah pertama ke Jawa untuk menemui HOS. Cokroaminoto di Surabaya. Saat itu, Abdul Karim Amrullah tidak menerima tawaran Coakrominoto untuk memimpin Sarekat Islam di Minangkabau dengan alasan tidak memiliki kemampuan dalam bidang politik.¹⁷

Meskipun awalnya gerakannya hanya terbatas kepada perantau Minang, perkumpulan ini dalam perkembangannya meluas kepada masyarakat sekitar hingga terbuka untuk umum. Sebagian dari jamaah pengajiannya juga pernah belajar kepada Mas Mansur. Corak pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh Mas Mansur hampir mirip dengan yang diajarkan oleh Fakih Usman. Fakih Usman mengajarkan dan menganjurkan dalam belajar dan mengamalkan Islam untuk tidak berhenti pada kitab-kitab mazhab, tetapi hendaklah mencocokkannya ajaran-ajaran tersebut dengan sumber aslinya: Al-Qur'an dan Hadis.¹⁸ Hal yang sama juga diajarkan oleh Mas Mansur kepada murid-muridnya. Walaupun Mas Mansur sendiri mulanya tergabung atau bagian dari kelompok *maenstream* yang menganjurkan untuk mengikatkan diri pada mazhab tertentu, yaitu Mazhab Syafi'i. Pemikiran dan tabligh yang dikembangkan Fakih Usman ini mengejutkan kebanyakan ulama yang ada di Surabaya dan sekitarnya karena pendapatnya yang berbeda dengan ulama mainstream: ulama tradisional.

Oleh sebab itu, mereka yang pernah belajar kepada Mas Mansur merasa sangat cocok dengan yang dikembangkan oleh Fakih Usman. Dalam konteks demikian, murid Mas Mansur ini pun berinisiatif untuk memediasi agar dua ulama ini dapat dipertemukan. Akhirnya, murid-murid Fakih Usman dan Mas Mansur mengembangkan corak pemikiran dan pengamalan Islam yang telah diraihinya sehingga pengaruhnya semakin kuat dan meluas. Hal ini, dalam sejarahnya, telah mengguncang masyarakat Surabaya. Para ulama tradisional pun melakukan reaksi terhadap corak pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh dua ulama tersebut. Sejalan dengan reaksi itu, pengaruh Fakih Usman dan

¹⁷ Fathiannisa Cesaria, *Proses Pergeseran Sekolah Muhammadiyah; dari Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah ke Sekolah Guru Agama Atas (SGAA) Muhammadiyah Padang Panjang, 1951-1959*, Skripsi (Jakarta: Universita Indonesia, 2010), hlm. 32.

¹⁸ A. Jainuri, *op. cit.*, hlm. 76.

perkumpulannya dengan sendirinya juga semakin meluas. Organisasi lokal bentukan Fakhri Usman ini pun terus mengembangkan sayapnya dan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki jalan pemikiran yang sama. Tabligh yang pada mulanya terbatas kepada para perantau Minang semakin berkembang dan bersifat terbuka bagi siapa saja, tanpa ada pembatasan.

Pada sisi yang lain, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Mas Mansur memiliki corak pemahaman agama yang hampir sejalan dengan yang dikembangkan Fakhri Usman, sehingga perbedaan pendapat dalam perkumpulan yang selama ini digelutinya tidak bisa dihindari. Perbedaan pendapat itu berujung dengan mundurnya Mas Mansur dari perkumpulan tersebut. Sementara, perkumpulan "*Ikhyaus Sunnah*" sesekali menghadirkan guru dari luar perkumpulan, dan Mas Mansur termasuk salah seorang ulama yang diminta untuk menjadi narasumber. Hal ini, tentu dapat dimaklumi bahwa di antara jamaah pengajiannya pernah belajar kepada Mas Mansur. Para muridnya itulah yang kemudian memediasi atau mendatangkan Mas Mansur ke pengajian tersebut. Beberapa kali pertemuan dalam pengajian tersebut agaknya dua ulama ini memiliki persepsi dan kecocokan yang sama hingga, dalam perjalanannya, keduanya bergabung dalam perkumpulan "*Ikhyaus Sunnah*". Kemudian Mas Mansur diberikan amanah untuk memimpin perkumpulan itu.

Dengan masuknya Mas Mansur dalam perkumpulan ini, bertambahlah energi baru dalam mengembangkan dan menyebarluaskan corak pemahaman agama yang lebih mencerahkan. Apalagi, selain sebagai orang Surabaya, Mas Mansur juga sudah cukup dikenal dan populer di kalangan masyarakat luas. Hal ini makin mempermudah terjadinya pembauran antara dua ulama asal Minang dan Surabaya ini. Dua ulama yang memiliki akar budaya berbeda, tetapi dapat disatukan dalam organisasi tersebut.

Hubungannya dengan Muhammadiyah, Mas Mansur sebelumnya sudah sangat dekat dan bahkan sudah lebih dulu masuk perkumpulan Muhammadiyah. Dalam rangka pengembangan, perkumpulan "*Ikhyaus Sunnah*" yang dipimpin dua ulama ini beberapa kali mengundang Ahmad Dahlan dalam pengajian tersebut. Pada

kedatangan Ahmad Dahlan yang kedua kalinya, perkumpulan ini resmi menggabungkan diri dalam Muhammadiyah dan dijadikan sebagai Cabang di Surabaya dengan ketuanya KH. Mas Mansur. Peresmian tersebut bertepatan dengan 01 November 1921.¹⁹

Ada kesamaan pemikiran pembaruan Muhammadiyah dengan orang Minang ini, utamanya para perantau yang pada waktu itu tidak lepas dari basis gerakan pembaruan di Minangkabau, di mana pengaruhnya menyebar di berbagai tempat. Tambah lagi dengan kultur Minang, mereka bukan hanya sekedar mencari nafkah di negeri orang melainkan sekaligus menempatkan diri sebagai dai atau ulama. Melalui para perantau Minang yang pada umumnya berprofesi sebagai saudagar juga sekaligus menjadi ulama dan dai yang menyebarkan paham agama yang bercorak pembaruan. Dengan pola demikian, mereka yang sudah bergabung dan memahami Muhammadiyah tentu akan mengembangkan dan memperluas Muhammadiyah tanpa terlebih dahulu ada perintah dari pimpinan tertinggi.

Berbeda dengan Muhammadiyah Minangkabau, di Yogyakarta umumnya dianut oleh pegawai negeri, yang memiliki pola birokrasi. Dua pola ini pasti berbeda dalam menjalankan dan menggerakkan organisasi. Masuknya orang-orang Minang dalam Muhammadiyah membawa perubahan kultur di Muhammadiyah atau paling tidak terjadi kolaborasi antara dua kultur tersebut. Pemikiran orang Minang yang terbuka, kritis, dan lebih cenderung pendobrak kemapanan dapat membawa dinamisasi gerakan Sementara, kultur birokrasi yang tertanam pada pegawai juga sangat dibutuhkan dalam mengkonsolidasikan dan merapikan gerakan. Suatu pergerakan tidak mungkin bisa jalan dengan solid dan rapi bila tidak tertata dengan rapi pula. Ketelatenan dalam membangun ketertiban organisasi sangat dibutuhkan. Budaya demikian, mungkin bisa dilakukan oleh para pegawai yang sudah terbiasa dengan budaya birokrasi. Oleh karena itu, mengembangkan Muhammadiyah diperlukan dua budaya tersebut, sehingga organisasi dapat bergerak secara dinamis, solid, dan rapi. Bergabungnya dua kultur tersebut (Minang dan Surabaya), gerak Muhammadiyah dapat lebih kencang.

Bergabungnya orang Minang di perantauan ke Muhammadiyah,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

secara tidak langsung, sama dengan mengenalkan Muhammadiyah ke Ranah Minang. Orang Minang yang merantau memiliki kepedulian terhadap kampung halaman sangat tinggi. Kemajuan yang mereka peroleh di perantauan akan ditularkan di kampungnya. Dalam budaya Minang, sejauh mana pun merantau, mereka tidak berniat untuk meninggalkan kampung halaman selamanya. Merantau hanyalah tempat mencari penghidupan sementara, di mana pada suatu saat akan kembali pulang. Dalam istilah pepatah Minang disebut “setinggi-tinggi bangau terbang, hinggapnya pasti di kubangannya jua”. Pepatah lain mengungkapkan “sedalam-dalam tenggelamnya paku, kepalanya tetap jua kelihatan”. Dua pepatah ini bermaksud bahwa sejauh mana pun seseorang pergi merantau, pada suatu saat dia akan tetap pulang kembali. Bagaimana pun juga seseorang di perantauan akan tetap memiliki kepedulian terhadap kampung halamannya. Dalam proses budaya inilah, perantau yang sudah bergabung dengan Muhammadiyah akan mengenalkan (dan mengembangkan) Muhammadiyah di kampung halamannya.

Interaksi mereka ketika pulang dengan masyarakat yang ada di kampung memiliki pengaruh terhadap corak kehidupan sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Apa pun bentuk kemajuan yang diperolehnya di perantauan dapat dipastikan akan ditularkan ke kampung halamannya. Bahkan, pada daerah-daerah tertentu yang sebagian besar penduduknya hidup di perantauan, yang pada hari-hari biasa kampung tersebut tampak lengang dari warganya, tetapi rumah dan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, panti, dan sebagainya, justru berdiri dengan megah. Kemegahan fasilitas umum tersebut umumnya dibiayai dari perantauan.

Selain dikenalkan oleh para perantau, Muhammadiyah juga dikenalkan melalui orang kampung yang pergi berkunjung ke keluarga yang ada di rantau. Model ini diakui lebih efektif dalam mengenalkan Muhammadiyah. Hal ini karena mereka yang berkunjung melihat secara nyata apa yang dikerjakan dan diamalkan oleh keluarganya itu. Ketika kembali pulang, pengalaman ini mereka ceritakan kepada keluarga dan lingkungannya yang ada di kampung. Sehingga dengan penyebaran informasi tersebut, Muhammadiyah dengan sendirinya

dapat tersosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Informasi itu kadang memunculkan respons yang beragam baik positif maupun negatif. Pro dan kontra itu pun sesungguhnya, dari sisi pengenalan Muhammadiyah, semakin dapat menyebar dengan cepat walaupun dalam bentuk yang kurang positif.

Selain dikenalkan oleh para perantau, Muhammadiyah secara tidak langsung juga dikenalkan oleh pihak-pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah. Mereka umumnya tidak menginginkan Muhammadiyah ada dan berkembang di Minangkabau. Cara yang mereka lakukan adalah membenci dan menjauhkan Muhammadiyah dari masyarakat. Sebagaimana diketahui, sebelum masuk ke Minangkabau, Muhammadiyah secara nasional sudah menjadi organisasi yang cukup diperhitungkan, baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun oleh partai politik dan sesama organisasi masyarakat. Corak pembaruan yang dibawanya membuat banyak pihak merasa tidak senang dan risih. Bahkan ada yang berpandangan, perkembangan Muhammadiyah ini akan menjadi ancaman baru. Kekhawatiran dan ketakutan tersebut tentu wajar karena potensi yang dimiliki Muhammadiyah sangat berpeluang untuk memiliki pengaruh yang dominan: selain memiliki kekuatan pemikiran yang dinamis, juga diiringi dengan kekuatan amal usahanya, terutama pendidikan dan layanan sosialnya.

Ada pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya akan terusik bila Muhammadiyah berkembang. Salah satu kelompok yang dimaksud adalah komunis. Pengaruh komunis sudah berkembang di Minangkabau sebelum Muhammadiyah masuk. Dalam sejarahnya, komunis secara resmi membuka cabangnya di Padang pada Maret 1923 melalui tokoh-tokoh penggeraknya baik dari Minang sendiri maupun India. Umumnya mereka adalah pegawai kereta api. Selain itu, orang-orang Nias dan Manado yang banyak menjadi pendukung dan simpatisannya juga melapangkan jalan demi perkembangan komunis di Minangkabau.

Menurut sejarawan, Magas adalah salah seorang yang diperkirakan membawa komunis ke ranah Minang.²⁰ Ia sudah cukup lama berada di Jawa dan intens berinteraksi dengan tokoh-tokoh komunis. Sedangkan

²⁰ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 221.

dalam bentuk penguatan dan konsolidasinya dilakukan semasa Ahmad Khatib Datuk Batuah bersama dengan Natar Zainuddin.²¹ Gerakannya semakin kuat, kokoh, dan berpengaruh kuat setelah dibentuknya *International Debating Club*. Dua tokoh yang disebutkan terakhir ini memiliki kemampuan memobilisasi pengaruhnya di Sumatra Thawalib karena ia adalah guru dalam bidang keagamaan bahkan termasuk orang yang pada awalnya dekat dengan Abdul Karim Amrullah. Akan tetapi, pengaruh komunis masuk kepadanya setelah melakukan interaksi dengan beberapa tokoh komunis sehingga gerak dan corak pemikirannya lebih mengarah pada komunis. Akan tetapi, ada dugaan bahwa komunis yang ia gerakan bukanlah komunis yang orientasinya bersifat ideologis melainkan anti terhadap kolonial: anti kemiskinan dan ketertindasan. Kemungkinan perbedaan ideologis dengan Islam yang mereka anut belum mereka ketahui secara komprehensif sehingga yang ia pahami bahwa komunis tidak bertentangan Islam. Faktanya, dalam khutbah, ceramah, dan diskusi yang mereka lakukan, masih menggunakan sumber dan dalil nash yang juga digunakan oleh para ulama lain. Misalnya, tema-tema tentang anti penjajahan atau kolonial, anti penindasan dan kemiskinan. Semua itu, sesungguhnya memiliki akar kuat dalam ajaran Islam. Hanya saja, tidak ada tokoh yang mungkin bisa memberikan penjelasan agak lebih komprehensif kepadanya sehingga sadar dan kembali kepada jalan yang benar.

Agaknya, kasusnya sama dengan Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah pada awal penerimaannya terhadap Ahmadiyah. Awalnya, Ahmadiyah di Yogyakarta berhasil mendekati Muhammadiyah, karena mereka bergerak dalam pendidikan dan menentang kristenisasi. Pada saat itu, PB Muhammadiyah belum mengetahui secara lebih mendalam misi di balik gerakan itu. Ternyata, di kemudian hari *belang* Ahmadiyah terbuka bahwa dari sisi akidah sangat berbeda dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah dan umat Islam secara umum. Dalam hal itu, PB Muhammadiyah bersikap tegas terhadap mereka yang terlibat di dalamnya. Jadi, kemungkinan besar yang dilakukan oleh Datuk Batuah dan Zainuddin seperti itu juga. Keduanya masih memahami dan mengetahui baru sebatas gerakan

²¹ *Ibid.*

luarnya, yang memang secara normatif tidak ada perbedaan pokok yang dipahami dalam Islam, tetapi di balik gerakannya ada misi yang sangat berbeda secara mendasar dengan Islam. Dalam hal itu, tokoh lain sudah memperoleh informasi yang agak luas dan lengkap bahwa komunis tidak akan mungkin dapat dipersatukan dengan Islam. Sekali lagi, diduga kuat hal itu belum sampai kepada dua tokoh tersebut. Jika itu yang terjadi, tidak mengherankan bila dua tokoh itu tidak mau mengalah dan tetap bersikukuh mempertahankan dan menggerakkan komunis dan berpandangan bahwa komunis tidak bertentangan dengan Islam sama sekali. Ia memang tidak pernah menyatakan keluar dari Islam dan bahkan tetap menggunakan sumber-sumber dan dalil nash dalam mendukung pendapatnya.

Dapat diduga bahwa pergerakan komunis pada mulanya masuk ke ranah Minang domainnya tidak dalam bentuk ideologis melainkan menyelusup melalui baju gerakan anti penjajah dan anti kemiskinan dan penindasan. Jika masuk melalui ideologis, tentu orang Minang akan menolaknya, termasuk dua tokoh tersebut. Dikatakan demikian, karena keduanya merupakan guru pada perguruan yang di situ berkumpul ulama-ulama modernis. Keduanya sudah memiliki basis agama yang cukup kuat. Jadi, komunisnya bukan dalam bentuk komunis yang sifatnya ideologis. Pengaruh itu sudah sangat dominan dalam pola pemikirannya. Sebagai orang yang memiliki basis keilmuan agama yang cukup kuat, tentu memiliki jurus-jurus pilihan dalam menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat, terutama kepada murid-murid Sumatra Thawalib. Pengaruhnya sangat besar dan kuat sehingga Sumatra Thawalib menjadi basis utamanya dalam menggerakkan dan mengembangkan komunis. Padahal, Abdul Karim Amrullah sebagai pendirinya masih berada di situ. Namun, pengaruh keduanya sudah sangat kental, sehingga Abdul Karim Amrullah sendiri merasa tidak nyaman dengan kehadiran komunis tersebut. Mereka bukan hanya berhasil menggusur pengaruh, tetapi juga secara fisik.

Dengan ketidakmauan Abdul Karim Amrullah mengajar di Sumatra Thawalib, hal itu menunjukkan semakin kuat pengaruhnya di lembaga pendidikan tersebut. Meskipun Abdul Karim Amrullah sendiri memiliki alasan bahwa penolakannya itu disebabkan sudah

tidak melihat lagi ada tanda-tanda perguruan tersebut akan bisa diselamatkan dari pengaruh komunis. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Datuk Batuah sudah sangat dominan/kental di Sumatra Thawalib. Guru dan murid-muridnya berhasil dipengaruhi sehingga kekuatan lain yang tidak terpengaruh oleh komunis tidak berdaya mengimbangnya. Apalagi Abdul Karim Amrullah tidak lagi menjadi menjadi guru di sana. Keberhasilan menguasai Sumatra Thawalib, dua tokoh tersebut terus memperluas pengaruhnya dengan target yang kedua: masuk ke jantung-jantung masyarakat yang berbasis pada nagari-nagari. Dengan langkah itu, komunis semakin menyebar dan kuat di masyarakat. Langkah itu pun berhasil, sehingga beberapa nagari dan komunitas masyarakat tertentu di Minangkabau dapat dikuasainya. Puncaknya, terjadi pemberontakan pada 1927 di Silungkang. Peristiwa ini melibatkan banyak pegawai yang bekerja di pertambangan batu bara Ombilin.

Sejalan dengan perkembangan itu, komunis secara masif berupaya menghambat masuknya Muhammadiyah di Minangkabau, karena di daerah lain, terutama di Yogyakarta, Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang sulit dimasuki, dipengaruhi, dan dihabisi. Gerakan komunis di Minangkabau akan menghambat agar Muhammadiyah tidak masuk dan berkembang. Gerakan ini sudah terbangun dan menjadi sasaran dari komunis secara nasional. Sebab, potensi Muhammadiyah untuk berkembang di Minangkabau sangat besar. Hal itu ditandai dengan sudah banyaknya orang Minang yang sudah bergabung dengan Muhammadiyah, terutama yang berada di perantauan. Mereka bukan hanya sebatas anggota biasa melainkan menjadi tokoh penggerak utama, seperti di Surabaya dan Pekalongan. Jadi, perkembangannya di Minang tinggal menunggu para orang rantau membawa ke ranah Minang. Oleh karena itulah, komunis berupaya keras menghalangi agar Muhammadiyah tidak masuk ke ranah Minang. Salah satu yang mereka propagandakan adalah menanamkan kebencian masyarakat terhadap Muhammadiyah. Targetnya, masyarakat menolak keberadaan Muhammadiyah. Meskipun pada masa itu, Muhammadiyah sendiri belum ada di Minangkabau.

Ketika itu, Muhammadiyah baru sebatas informasi dari luar dan belum ada yang mengembangkannya. Namun demikian, komunis sudah menprediksi dengan yakin bahwa Muhammadiyah lambat laun akan masuk ke Minangkabau. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan agar Muhammadiyah tidak masuk ke Minangkabau. Dalam pandangan komunis, Muhammadiyah adalah organisasi agama yang memiliki kekuatan dan sulit dilumpuhkan karena memiliki pondasi yang lebih kokoh dan kuat. Apalagi Muhammadiyah bergerak tidak hanya mengandalkan kepada figur atau ketokohan tertentu, melainkan dijalankan dengan sistem, sehingga siapa pun yang menjadi pimpinan, pergerakannya akan tetap jalan. Berbeda dengan organisasi agama lain termasuk partai politik yang dengan mudah dapat dilumpuhkan karena ketergantungan kepada figur tertentu.

Selain itu, sikap Muhammadiyah yang apolitis dipandang juga merepotkan komunis. Sebagaimana diketahui bahwa jargon yang selalu didengungkan oleh komunis adalah anti terhadap penjajahan, anti penindasan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, secara politik, mereka langsung berhadapan dengan pemerintah kolonial. Tidak jarang para tokoh dan aktivis komunis dicurigai dan ditangkap. Sementara Muhammadiyah mengambil strategi perjuangan bersifat apolitis. Langkah ini sulit diprediksi ke mana arahnya oleh komunis: apakah mendukung perjuangan anti penjajahan atau betul-betul di pihak kolonial. Muhammadiyah kadang melunak pada kebijakan pemerintah, tetapi di sisi lain sangat keras. Untuk kepentingan itu, komunis menggunakan beberapa isu terhadap Muhammadiyah. Salah satunya dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah penjilat pemerintah. Propaganda ini dijalankan secara nasional, sehingga pada salah satu kongres sempat menjadi isu santer. PB pada saat itu agak kerepotan dalam memberikan penjelasan. Sampai-sampai Pengurus Cabang diminta PB untuk memeriksa semua administrasi dan dokumen dalam rangka membuktikan bahwa PB tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh komunis tersebut. Dengan begitu, secara nasional, Muhammadiyah menjadi target utama untuk dilumpuhkan.

Hampir sama dengan di Jawa, pada saat itu, belum ada pergerakan Islam yang diorganisir secara tertib dan rapi. Pergerakan anti

penjajahan dan pembaruan pemikiran Islam memang sudah cukup intens dilakukan tetapi terbatas pada pergerakan perorangan. Dengan kata lain, pergerakan keagamaan masih sangat mengandalkan figur ulama tertentu. Setelah ulama tersebut sudah tiada, pergerakan itu akan terhenti. Kalau ada yang meneruskan, pergerakannya tidak mampu berjalan secara kontinu. Lagi-lagi sangat bergantung pula kepada tokoh yang meneruskannya. Begitu pula ketika tokoh-tokoh pergerakan itu semasa, mereka jalan dan bergerak sendiri-sendiri tanpa terorganisir dengan baik dan rapi. Misalnya, pada saat itu ada Abdul Karim Amrullah, Jamil Djambek, Ibrahim Musa, dan seterusnya. Abdul Karim Amrullah jalan sendirian dengan Sumatra Thawalib. Jamil Djambek berjalan sendiri dengan basis gerakan suraunya di Tengah Sawah, Bukittingi. Begitu pula Ibrahim Musa membentuk satu lembaga pendidikan yang dikenal dengan Parabek. Jadi, tidak ada keterkaitan secara organisatoris di antara tokoh tersebut. Bahkan Sumatra Thawalib bisa lepas dan ditinggalkan oleh pendirinya. Komunis melihat bahwa hal itu adalah kelemahan organisasi keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada partai politik yang berbasis keagamaan. Ketergantungan terhadap tokoh sangat kuat, karena tidak dibangun dengan sistem.

Berbeda halnya dengan Muhammadiyah. Ia terbentuk dengan organisasi yang tertib, teratur, dan solid. Dalam kepemimpinannya tidak bergantung kepada satu figur tertentu, melainkan digerakkan secara kolektif. Jika salah satu tokohnya meninggal, maka yang lain akan muncul menggantikannya. *Tumbuh sebelum patah, berganti sebelum hilang*. Maksudnya, proses perkaderan tidak pernah berhenti. Jadi, tidak mesti patah terlebih dahulu baru tumbuh dan tidak mesti pergantian itu terjadi sebelum hilang. Bagi komunis, organisasi model ini tidak mudah dihancurkan karena yang dibangun adalah sistem.

Dalam hal menjauhkan dan menanamkan kebencian masyarakat terhadap Muhammadiyah, komunis melakukan propaganda dengan memprovokasi masyarakat dengan berbagai propaganda. Salah satu isu yang dikembangkan komunis adalah sikap lunak Muhammadiyah terhadap pemerintah. Menurut mereka, sikap tersebut adalah termasuk bagian dari *Politicshe Ekonomische Bond* (PEB), yaitu suatu organisasi yang didirikan pihak pemerintah kolonial dalam rangka

membela dan mempertahankan kepentingan kolonial. Anggotanya terdiri dari orang-orang pribumi yang sudah dididik dan menjadi kaki tangan kolonial. Mereka adalah orang pribumi yang sikap dan tindakannya lebih Belanda daripada Belanda sendiri. Inilah yang disematkan pihak komunis kepada Muhammadiyah. Beberapa alasan pendukung isu tersebut antara lain bahwa Muhammadiyah menerima subsidi dari pemerintah kolonial. Subsidi tersebut digunakan untuk keperluan menghidupkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah dianggap tidak akan mungkin mampu mengoperasikan sekolah yang didirikannya tanpa bantuan pihak pemerintah, sebagaimana yang dilakukan kepada kelompok Kristen.²²

Selain itu, komunis juga mengeluarkan jurus kedua karena jurus pertama tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat. Jurus keduanya adalah dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah penjiilat pemerintah. PEB yang singkatannya sebagaimana diungkapkan di atas diplintir menjadi *Penjiilat Ekor Belanda*. Tuduhan ini disebar berkaitan dengan sikap Muhammadiyah yang lebih akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin akan menguntungkan umat Islam. Dari sikap itu pulalah Muhammadiyah dapat mengambil manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Propaganda komunis ini bukan hanya disebar kepada masyarakat Minangkabau melainkan sudah menjadi isu dan target secara nasional. Pada daerah lain, isu ini berhasil sehingga posisi pimpinan dan warga Muhammadiyah banyak yang terjepit. Muhammadiyah tidak dapat bergerak leluasa karena masyarakat termakan oleh propaganda tersebut. Beberapa Cabang Muhammadiyah terpaksa harus bertanya dan meminta penjelasan kebenaran isu tersebut kepada PB. Muhammadiyah

²² Akan tetapi, komunis lupa bahwa Muhammadiyah mendirikan sekolah tidak berawal dari subsidi pemerintah, melainkan dimulai dari iuran dan infak anggota. Dengan iuran dan infak itulah sekolah tersebut dioperasikan. Kalaupun ada bantuan dari pihak ketiga termasuk pemerintah digunakan untuk kepentingan pendukung kegiatan, bukan sebagai pemenuhan kebutuhan pokoknya. Bahkan ketika sekolah tidak lagi memiliki dana, Ahmad Dahlan melelang peralatan rumah tangganya, meskipun pada akhirnya, peralatan tersebut terjual habis dan diserahkan kembali oleh warganya kepada Ahmad Dahlan.

di saat rapat besar tahunan ke-12 (30 Maret-2 April 1923, di Yogyakarta).²³ Kemudian PB memberikan penjelasan bahwa propaganda tersebut tidak benar, tetapi sengaja diciptakan dan dihembuskan oleh komunis untuk membenci dan menjauhkan masyarakat dari Muhammadiyah. Bukan hanya berupa penjelasan—untuk lebih meyakinkan Cabang-Cabang Muhammadiyah—PB meminta kepada Cabang-Cabang memeriksa dokumen-dokumen PB untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Di Minangkabau, propaganda tersebut berhasil memengaruhi beberapa komunitas masyarakat. Salah satunya adalah sebagian dari murid-murid di Sumatra Thawalib, di bawah bayang-bayang Datuk Batuah. Hal itu terlihat dengan mudarnya pengaruh Abdul Karim Amrullah dan menguatnya pengaruh Datuk Batuah. Melemahnya pengaruh Abdul Karim Amrullah tentu dengan sendirinya Muhammadiyah tersendat dan terhambat masuk ke Sumatra Thawalib. Melihat yang demikian, Abdul Karim tidak masuk ke Sumatra Thawalib, melainkan mengajak murid-muridnya yang belum terkontaminasi pengaruh komunis, terutama yang berasal dari Sungai Batang. Murid-muridnya itulah yang kemudian bergabung dalam “Tabligh Muhammadiyah.” Abdul Karim Amrullah menolak dan tidak mau mengajar lagi di Sumatra Thawalib karena ia tidak melihat ada tanda-tanda penyelamatan dari pengaruh komunis.²⁴ Sikap ini tentu saja semakin memperlapang jalan komunis untuk menanamkan dan memperkuat pengaruhnya di Sumatra Thawalib karena tidak ada lagi tokoh kuat yang mengimbangi kekuatan komunis tersebut.

Selain di Sumatra Thawalib, pengaruh komunis juga berhasil memengaruhi masyarakat di Pitalah. Di kampung Saalah Yusuf Sutan Mangkuto ini, komunis sudah cukup kuat sehingga Saalah sendiri tidak bisa berbuat banyak untuk mengembangkan Muhammadiyah di nagarinya. Organisasi lokal yang sudah pernah berdiri tetap saja tidak bisa berbuat banyak. Pada waktu itu, kepala negeri sudah termakan isu komunis tersebut. Bahkan kepala negeri sendiri

²³ Hamka, *Muhammadiyah..., op. cit.*, hlm.19.

²⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 88.

memandang Muhammadiyah sebagai ancaman baru bagi nagari. Dan ini disebarkan secara merata di seluruh masyarakat setempat. Pada saat itu, Muhammadiyah tidak bisa digerakkan secara leluasa. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, pengaruh Muhammadiyah di Pitalah justru lebih kuat daripada yang lain.

Pada satu sisi, Muhammadiyah sangat dirugikan dengan isu-isu yang tidak berdasar. Beberapa komunitas yang terpengaruh propaganda tersebut melakukan penolakan ketika Muhammadiyah diperkenalkan. Bukan hanya menolak, kadang para aktivisnya pun diperlakukan tidak manusiawi. Mereka diasingkan dari pergaulan sosial dan kemudian disebarkan isu-isu yang sesungguhnya tidak benar. Akan tetapi, di sisi lain, Muhammadiyah secara tidak langsung sudah diperkenalkan oleh pihak komunis sendiri, meskipun dengan tujuan dan maksud yang tidak baik. Bagi masyarakat yang terbuka dan kritis, tentu isu tersebut tidak dapat mereka terima begitu saja. Mereka akan mencari informasi ke sumbernya. Komunis pun tidak mudah melakukan provokasi dan meyakinkan masyarakat.

Ketika Abdul Karim Amrullah bersama tokoh lainnya memperkenalkan Muhammadiyah, organisasi ini diterima secara terbuka dan berkembang sangat cepat, kecuali di beberapa tempat yang pengaruh komunisnya sudah sangat dominan. Di daerah yang disebutkan terakhir ini, keberadaan Muhammadiyah belum bisa masuk karena penolakannya sangat kuat. Akan tetapi, secara berangsur-angsur pengaruh Muhammadiyah masuk menelusup ke nagari-nagari dan komunitas masyarakat. Bahkan, ketika AR. Sutan Mansur ditugasi oleh PB Muhammadiyah untuk memimpin pergerakan Muhammadiyah di Minangkabau, para tokoh adat atau ninik mamak yang bergelar datuk lebih terbuka dan banyak di antaranya yang menjadi Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah. Padahal, sebelumnya, sebagiannya antipati terhadap pergerakan ulama kaum muda. Bukan hanya ninik mamak dan pemangku adat, kader-kader komunis sekalipun dapat ditundukkan oleh Muhammadiyah, di antara pentolannya justru menjadi pimpinan dan dai yang membela dan mengembangkan Muhammadiyah.

Dengan demikian, sebelum ada tokoh yang secara terencana

mengenalkan Muhammadiyah, pengenalan Muhammadiyah di Minangkabau sudah dilakukan melalui tiga jalur: melalui para perantau Minang yang sudah terlebih dahulu bergabung dalam Muhammadiyah, melalui famili yang berkunjung ke para keluarganya di tempat perantauan, dan melalui propaganda negatif komunis.

Perubahan Organisasi Lokal “Tiang Aman” menjadi Muhammadiyah

Muhammadiyah pada fase ini sangat ditentukan oleh para perantau dan masyarakat Sungai Batang, Maninjau, yang sudah lebih dahulu masuk Muhammadiyah. Kemudian dibawa dan diperkenalkan kepada masyarakat di sekeliling danau Maninjau. Salah satu, yang sangat menopang dalam memperkenalkan Muhammadiyah adalah dileburnya organisasi lokal “Tiang Aman Sendi Selamat” yang sudah berdiri di Sungai Batang. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial masyarakat di sekeliling Danau Maninjau sendiri yang umumnya lebih banyak pergi merantau. Hal itu, sejalan dengan keadaan potensi sumber daya yang terdapat di daerah tersebut. Secara ekonomi, kehidupan masyarakat lebih banyak bergantung kepada sumber daya yang terdapat pada danau yang sangat terbatas. Dalam hal itulah, masyarakat terutamanya yang berusia produktif lebih banyak mencari penghidupan di luar nagarinya.

Keadaannya hampir sama dengan masyarakat Sulit Air di Kabupaten Solok, di mana masyarakatnya lebih banyak berada di perantauan. Umumnya yang pergi merantau berprofesi sebagai pedagang dan dulunya nyaris tidak ada yang menjadi pegawai negeri. Kehidupan mereka yang pergi merantau sebagian besar terjadi perubahan baik ekonomi maupun pola pikirannya. Oleh sebab itu, mereka yang pergi merantau ketika pulang ke kampung dari sisi status sosialnya sedikit lebih terangkat dan terhormat.

Muhammadiyah mulai diperkenalkan di Minangkabau ketika Abdul Karim Amrullah pulang dari Jawa yang kedua kalinya. Pada waktu Abdul Karim Amrullah berkunjung yang pertama pada 1917, sesungguhnya sudah mengenal Muhammadiyah dari pendirinya, Ahmad Dahlan, secara langsung setelah berkunjung kepada Pakih Hasyim, yang sudah terlebih dahulu masuk Muhammadiyah. Selain

itu, ia juga bertemu dengan Tjoakrominoto, tokoh politik Islam. Ia dengan dua tokoh ini saling memberi informasi tentang perkembangan mutakhir pergerakan Islam terutama di daerah masing-masing. Namun, pertemuannya dengan Tjoakrominoto kurang menarik baginya karena lebih berorientasi pada gerakan politik. Meskipun Tjoakrominoto sendiri ketika kunjungan itu menawarkan untuk memimpin Sarekat Islam di Minangkabau.

Bagi Abdul Karim Amrullah, yang menarik dari pertemuan tersebut adalah perbincangan dan aktivitas gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan sehingga ia tinggal beberapa hari di tempat Ahmad Dahlan guna melihat dari dekat berbagai macam aktivitas dan pergerakan yang dibangun Ahmad Dahlan. Di situlah ia melihat Ahmad Dahlan membangun pola pendidikan dengan mengadopsi cara-cara yang ada di sekolah Belanda. Abdul Karim melihat banyak barang-barang bekas seperti tempat “peti” minyak goreng yang dijadikan tempat duduk sebagai kursi bagi murid-murid. Pembelajarannya tidak lagi menggunakan model “halaqah” tetapi sudah menggunakan sistem klasikal. Begitu pula materinya, sudah tidak lagi terbatas sebagaimana yang diajarkan pada madrasah-madrasah umumnya. Di sekolah tersebut, bahasa Belanda diajarkan. Pakaian para guru dan muridnya juga tidak lagi sebagaimana pada madrasah-madrasah seperti pakai kain sarung. Kunjungannya itu menginspirasi Abdul Karim Amrullah untuk melakukan perubahan di Minangkabau. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Abdul Karim mengajar agama Islam pada sekolah guru (Normal School) di Padang Panjang. Pelajaran yang diberikannya itu kemudian dibukukan dalam satu judul *Dinullah*. Setahun kemudian ia bersama murid-muridnya mendirikan perkumpulan dengan maksud mempertinggi mutu ilmu pengetahuan. Perkumpulan yang dimaksud adalah Sumatra Thawalib.²⁵ Perkumpulan ini akhirnya melahirkan lembaga pendidikan yang terinspirasi sekolah Muhammadiyah sebagai perubahan dari sistem pembelajaran di Surau Jembatan Besi, yang selama ini sudah diterapkan dalam bentuk halaqah.

Seperti kunjungan pertama, kunjungan kedua pada 1925 ke Pekalongan ia melihat AR. Sutan Mansur — menantu dan muridnya —

²⁵ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Panjimas, 1984), hlm. 185.

dan beberapa perantau Minang lainnya ternyata sudah bergabung dengan Muhammadiyah, bahkan menjadi pimpinannya di Pekalongan. Begitu pula Fathimah, anaknya sendiri dan istri dari AR. Sutan Mansur, aktif menggerakkan perempuan di bawah naungan 'Aisyiyah. Pada saat berkunjung kedua kalinya itu, ia tidak pergi sendiri, melainkan ditemani oleh murid setianya, yaitu Moehammad Yatim Sutan Besar.²⁶ Sedangkan Ja'far Amrullah, adiknya, sudah duluan pula berada di Pekalongan, termasuk anak sulungnya Abdul Malik.²⁷ Jadi, di Pekalongan sudah berkumpul keluarga besar dari ulama ini.

Baginya, tampak ada yang berubah pada diri AR. Sutan Mansur. Apalagi kedatangan Abdul Karim Amrullah persis di saat-saat umat Islam sedang melaksanakan puasa Ramadhan, sehingga aktivitasnya penuh dengan ibadah, seperti mengumpulkan beras yang berasal dari zakat fitrah untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berekonomi lemah. Dalam hal itu, merasa semakin kagum dan bangga terhadap cara-cara yang dilakukan menantu dan anggota Muhammadiyah lainnya. Beberapa hari ia tinggal di tempat AR. Sutan Mansur beraktivitas memimpin Muhammadiyah, maka semakin penasaran dengan gerakan tersebut, meskipun beberapa tahun yang lalu sudah pernah mendengar dan melihat secara langsung dari pendiri Muhammadiyah sendiri. Yang semakin menarik baginya adalah gerakan yang dibangun Muhammadiyah yang terorganisir dan rapi dari Pengurus Besar sampai ke tingkat cabang sebagaimana yang dipimpin AR. Sutan Mansur. Oleh sebab itu, semakin menarik baginya untuk melihat lebih dekat lagi dari Pengurus Besar tentang berbagai macam aktivitas yang produktif dalam membangun dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Islam. Hal itu, menjadi faktor pendorong ia untuk kembali berkunjung ke Yogyakarta guna bertemu dengan Pengurus Besar Muhammadiyah dan melihat secara langsung pergerakan Muhammadiyah dari pusatnya.

Dengan dimediasi oleh Marah Sutan—orang kampungnya yang sudah lama tinggal di Ngupasan dan telah lebih dahulu bergabung Muhammadiyah—Abdul Karim Amrullah dapat bertemu dengan H.

²⁶ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 14.

²⁷ *Ibid.*

Fachrodin dan tokoh Muhammadiyah lainnya.²⁸ Kunjungan tersebut adalah kunjungan kedua ke Pengurus Besar Muhammadiyah. Pertemuan tersebut sangat penting, bukan hanya bagi Abdul Karim Amrullah tetapi juga bagi Pengurus Besar Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa di Jawa Muhammadiyah sudah mulai menampakkan pengaruhnya, bukan hanya di tengah masyarakat, melainkan juga pada pusat kekuasaan. Begitu pula Abdul Karim Amrullah, pengaruh corak pembaruan yang dibawanya memiliki pengaruh yang menyebar hampir di seluruh tanah air melalui para perantau Minang dan muridnya.

Abdul Karim sendiri sesungguhnya sudah tidak asing lagi bagi Pengurus Besar Muhammadiyah, karena dari berbagai informasi, pemikiran dan gerakan yang dibangunnya dengan basis di Minangkabau memiliki kesamaan dengan corak pembaruan yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Begitu pula bagi Abdul Karim Amrullah sendiri, Muhammadiyah selain sama-sama menggerakkan pembaruan dalam Islam, sekaligus menjadi harapan baru karena para perantau Minang termasuk menantu dan muridnya sudah terlebih dahulu bergabung Muhammadiyah. Hanya saja, bedanya gerakan pembaruan yang digerakkan di Minangkabau lebih berorientasi kepada corak pemikiran terhadap paham keagamaan. Sedangkan Muhammadiyah selain orientasinya kepada corak pemikiran, juga diiringi dengan gerakan pengamalan Islam. Dua-duanya berjalan secara bersama-sama. AR. Sutan Mansur pernah mengungkapkan bahwa ia belum menemukan Islam sebagaimana yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Itulah salah satu sebab mengapa ia ikut bergabung Muhammadiyah.

Pada bagian lain yang amat penting dari kunjungannya itu adalah pertemuannya dengan Mirza Wali Ahmad Begh, tokoh Ahmadiyah. Tanpa direncanakan pertemuan tersebut menjadi ajang perdebatan yang tajam antara Mirza Wali Ahmad Begh dengan Abdul Karim Amrullah. Pada satu sisi, Pengurus Besar Muhammadiyah sudah menerima baik kehadiran Ahmadiyah yang dibawa Mirza Wali Ahmad Begh karena dalam informasinya Ahmadiyah memiliki orientasi yang sama dengan Muhammadiyah. Apalagi umat Islam ketika itu

²⁸ *Ibid.*

dalam menghadapi musuh bersama, berupa keterbelakangan dan kuatnya misi salibis dan zending. Dalam hal itu, belum diketahui misi tersembunyi dari Ahmadiyah yang memiliki perbedaan paham agama secara mendasar dengan Muhammadiyah dan umat Islam umum lainnya. Sedangkan bagi Abdul Karim Amrullah, Ahmadiyah termasuk perkumpulan yang perlu diwaspadai dan di jauhi karena ajaran yang dibawanya bertentangan dengan paham agama yang dianut oleh umat Islam secara umum.

Sementara itu, Abdul Karim Amrullah sudah mengetahui dan memahami Ahmadiyah yang sesungguhnya. Dalam hal itu, di Minangkabau sendiri Ahmadiyah sudah berkembang dan ditentang oleh para ulama baik oleh kaum muda maupun kaum tua.²⁹ Tampaknya, informasi ini belum sampai kepada Pengurus Besar Muhammadiyah. Dengan adanya perdebatan tersebut kedua tokoh itu dengan sendirinya membuka tabir yang disembunyikan oleh Ahmadiyah selama ini.³⁰ Fachroddin dan Pengurus Besar lain yang

²⁹ Ahmadiyah di Sumatra Barat pada mulanya dibawa oleh Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, Zaini dahlan, Nuruddin dan lain-lain. Umumnya mereka adalah mahasiswa yang sedang studi di India berasal dari Sumatra Barat, dan lebih khusus lagi merupakan alumni Sumatra Thawalib di Padangpanjang. Selanjutnya, Khalifah II, Mirza Bayiruddin Ali untuk datang ke Indonesia atas permintaan mereka semua. Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 175.

³⁰ Dalam sejarahnya, Muhammadiyah pernah kecolongan dengan keberhasilan para pentolan Ahmadiyah masuk ke dalam Muhammadiyah. Salah satu tokoh yang berhasil menyusup tersebut adalah Mirza Wali Ahmad Beg. Ia sengaja datang dari India ke Yogyakarta menemui pimpinan Muhammadiyah dan beberapa orang ulama. Kemudian Ia menawarkan diri menjadi guru di Mualimat Yogyakarta dan meyakinkan pimpinan Muhammadiyah sebagai mubaligh untuk kerja sama menghadapi misi kriterisasi dan gerakan zending. Kedatangan awal ini tentunya dengan tidak memperlihatkan identitas dan misinya yang sesungguhnya sehingga Ia diterima sebagai guru di Mualimat Muhammadiyah dengan fasilitas tempat tinggal. Lama kelamaan ia mulai menjalankan misi terselubungnya dengan meyakinkan tokoh-tokoh kunci pimpinan Muhammadiyah untuk dijinaki. Salah seorang di antaranya yang berhasil mereka yakinkan adalah M. Ng. Joyosugito, ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah dan Mohammad Husni. Ia berhasil diyakinkan Mirza bahkan menjadi anggota setia Ahmadiyah. Setelah diketahui misi yang disembunyikannya itu pimpinan Muhammadiyah

hadir ketika itu mencermati secara serius perdebatan tersebut, yang akhirnya menyimpulkan bahwa gerakan dan misi Mirza selama ini sangat berbeda dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi, pertemuan itu dengan sendirinya bermuara pada penelanjangan atau membuka “belang” Mirza yang selama ini disembunyikannya dari pimpinan Muhammadiyah. Beberapa orang tokoh Muhammadiyah secara diam-diam sudah masuk ke dalam perangkap Ahmadiyah. Sejak itu pula terjadi kecurigaan besar Pimpinan Muhammadiyah terhadap Mirza yang membawa misi Ahmadiyah Lahore,³¹ termasuk kepada tokoh Muhammadiyah sendiri yang sudah berhasil ditarik, di antaranya Joyosugito, ketua Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah serta Mohammad Husni sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Muhammadiyah. Mereka akhirnya disisihkan³² bahkan diberhentikan dari Muhammadiyah. Tindakan yang sama diberlakukan pula kepada Muhammad Kusban, Sutantyo dan Supratolo.³³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Muhammadiyah ketika itu nyaris menghadapi bahaya besar, yaitu diinfiltrasi oleh paham Ahmadiyah.³⁴ Penilaian Abdul Karim Amrullah terhadap Mirza sebagai orang Ahmadiyah dalam penguasaan tentang Islam, dikatakannya kepada Hamka ketika pulang dari Yogyakarta ke Pekalongan dengan ungkapan bahwa “Professor engkau itu, Malik, tidak ada isinya sama sekali!”³⁵

Di luar perdebatannya dengan Mirza dan keberhasilan Ahmadiyah menelusup ke dalam Muhammadiyah, Abdul Karim Amrullah melihat dan tetap meyakini bahwa Muhammadiyah secara organisasi akan dapat menyelesaikan dan membersihkannya dari bahaya penyelusupan

mengambil sikap tegas terhadap Ahmadiyah termasuk kepada anggota dan pimpinan yang sudah masuk ke dalamnya. *Ibid*, hlm. 189.

³¹ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, terj. Dari *The New World of Islam* (Djakarta: t.p., 1966), hlm. 312.

³² Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 15.

³³ Iskandar Zulkarnain, *op. cit.*, hlm. 202 dan 314.

³⁴ Hamka, *Dari hati ke Hati tentang Agama Sosial, Budaya dan Politik* (Jakarta: Panjimas, 2005), hlm. 10.

³⁵ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR.H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra* (Jakarta: Panjimas, 1982), hlm. 183.

tersebut. Dalam hal itu, ia berpikir pula sekembali dari Jawa akan lebih baik mengembangkan Muhammadiyah dengan terlebih dahulu mengubah organisasi lokal di kampungnya “Tiang Aman” yang dipimpin oleh Yusuf Amrullah, adiknya sendiri menjadi Muhammadiyah.³⁶ Dalam hal itu, Sumatra Thawalib yang ia bentuk sekembali bertemu dengan Ahmad Dahlan sebelumnya, tidak bisa banyak diharapkan karena pengaruh komunis sudah sangat kental dan ia sudah pesimis tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Pemikiran tersebut muncul setelah melihat secara empiris bahwa Muhammadiyah yang digerakan di Jawa terutama oleh perantau Minang termasuk murid dan menantunya itu jauh berbeda dengan pergerakan di Minangkabau sendiri yang digerakannya selama ini. Islam tidak akan mungkin bisa ditegakkan, dilaksanakan dan diperjuangkan secara baik jika tidak diorganisir dan ditata dengan rapi dan baik dengan jaringan yang lebih kuat. Abdul Karim Amrullah melihat bahwa Muhammadiyah sangat berpotensi untuk itu. Oleh sebab itu, selain rencananya akan mengubah organisasi lokal di kampungnya menjadi Muhammadiyah, ia juga meminta dan mendorong AR. Sutan Mansur mengembangkan pula Muhammadiyah di Minangkabau.³⁷ Artinya, Abdul Karim Amrullah sesungguhnya sangat berkeinginan agar menantunya tersebut kembali pulang ke ranah Minang selain bisa bersama-sama kembali anak dan cucunya juga dalam rangka mengembangkan Muhammadiyah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kunjungannya keberbagai wilayah ia menemukan sesuatu yang baru untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan di Minangkabau.

Ia sebagai ulama besar pembaru, asal Minangkabau, memiliki pengaruh kuat bukan hanya di Minangkabau melainkan juga di daerah lain. Pengaruhnya itu tidak bisa dilepaskan dari peran para murid-muridnya dan pengaruh pembaruan yang sudah digerakan oleh ulama sebelumnya terutama oleh para perantau Minang sendiri. Bahkan pemikiran dan aktivitasnya tidak luput pula dari perhatian pusat-pusat peradaban Islam seperti Universitas Al-Azhar di Mesir. Universitas Islam tertua di dunia ini pada 1926 telah memberikan gelar

³⁶ Alfian, *op. cit.*, hlm. 245.

³⁷ Bakhtiar, RB. Khatib Pahlawan Kayo (Ed.), *Dari Pergulatan Ideologis ke Penguatan Aqidah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 28.

penghormatan atas usaha dan pemikirannya yang mengguncangkan dunia Islam berupa doktor honoris causa.³⁸ Jauh sebelum itu, sekitar 1923, Abdul Karim Amrullah oleh ulama Mekkah semasa kekuasaan Syarif Husain pernah dinyatakan sesat lagi menyesatkan.³⁹ Tentunya, fatwa sesat tersebut dikeluarkan atas informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan gerakan yang dibangunnya. Sebagaimana diketahui bahwa Abdul Karim Amrullah berada pada garis terdepan ketika berhadapan dengan ulama kaum tua. Dalam hal itu, diduga kuat bahwa informasi tentang berbagai pendapatnya yang selama ini banyak berbeda dengan corak dan paham keagamaan yang dikembangkan oleh ulama kaum tua. Bersamaan dengan itu pula, gagasan dan pemikirannya banyak tersebar melalui tulisan-tulisannya yang dimuat oleh majalah al-Munir yang terbit dua dalam sebulan secara kontinu. Ahmad Dahlan sendiri, merupakan pelanggan tetap dari majalah ini.

Pengamatan dan penglihatannya terhadap Muhammadiyah dalam mengembangkan Islam semakin memperkuat keyakinannya akan dapat disambut baik oleh umat Islam di Minangkabau. Hal itu ditandai dengan beberapa indikator bahwa; *Pertama*, pengaruh ulama kaum muda cukup kuat dan menyebar hampir merata di ranah Minang. Abdul Karim sendiri memiliki keyakinan karena ia sendiri yang menjadi ujung tombak di dalam menggelorakan gerakan pembaruan tersebut. Melihat fakta bahwa “sawah” pembaruan itu sudah dibentangkannya bersama dengan ulama kaum muda lainnya, Muhammadiyah tinggal menanamkan benih yang sudah disemaikannya itu. *Kedua*, dukungan yang diberikan oleh para perantau Minang cukup kuat baik dalam bentuk moral maupun material. Faktanya, Muhammadiyah di nagari-nagari umumnya dalam konteks pembiayaan didorong kuat oleh para perantau. Sekolah dan panti asuhan yang hampir tersebar di seluruh nagari-nagari, banyak pembiayaannya berasal dari rantau. Oleh sebab itu, Abdul Karim semakin optimis terhadap gerakan Muhammadiyah akan dapat berkembang dengan lebih baik. Jauh dari itu, Islam akan lebih kuat, solid dan lebih maju dari sebelumnya.

³⁸ Hamka, *Ayahku..., op. cit.*, hlm. 160.

³⁹ Hamka, *Islam...*, hlm. 204.

Pengalamannya setelah berkunjung ke beberapa wilayah lain terutama kunjungannya kedua kalinya ke Jawa semakin mendorongnya untuk mengenalkan Muhammadiyah di ranah Minang. Apalagi, beberapa organisasi yang diprakarsai pembentukannya oleh para perantau telah lebih dahulu menggabungkan diri menjadi Muhammadiyah.⁴⁰ Dalam hal itu, ia semakin tidak ragu lagi terhadap Muhammadiyah sebagaimana propaganda pihak komunis selama ini, terutama yang disebarluaskan di Minangkabau. Bahkan ia memiliki pandangan yang lebih meyakinkan bahwa umat Islam hanya dapat dimajukan dan keluar dari perangkap kejumudan bilamana digerakan secara terorganisir dengan baik sebagaimana yang direalisasikan oleh Muhammadiyah. Sedangkan di Minangkabau sendiri belum muncul gerakan seperti yang dibangun oleh Muhammadiyah di tanah Jawa. Apalagi dalam bentuk skala nasional. Penyebabnya, bisa jadi sebagaimana yang dikemukakan Azis Thaba, yaitu tekanan kuat dari kolonial atau karena pertikaian intern.⁴¹

Oleh sebab itu, ia berfikir untuk dapat pula Muhammadiyah dikembangkan di tanah Minang sehingga Islam semakin menjadi kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Apalagi tantangan yang dihadapi umat Islam ke depan semakin berat. Tantangan yang ada di depan itu antara lain berasal dari internal umat Islam sendiri dan kuatnya tekanan dari pihak penjajah. Tantangan dalam bentuk internal di antaranya menyelusupnya aliran dan paham-paham lain ke dalam kekuatan umat Islam. Dalam hal itu, umat Islam terbelah ke dalam tiga kelompok besar, yaitu; *Pertama*, arus yang tetap menginginkan Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan selama ini. Praktik keagamaan banyak dipengaruhi oleh budaya lokal terutama berkaitan dengan ibadah termasuk dengan kelompok tariqatnya. Kecenderungan kelompok ini sudah tersebar merata di seluruh nagari-nagari di Minangkabau. Arus ini lebih populer dengan

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Barat* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 77-78.

⁴¹ Abdul Aziz Thaba, *op. cit.*, hlm. 132.

kaum tua. *Kedua*, arus yang menghendaki adanya pembaruan dalam pemahaman keagamaan. Dalam soal ibadah, arus ini mengembangkan agar kembali kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis tanpa mencampur adukan dengan budaya lokal. Sedangkan dalam bidang muamalat pemahamannya harus dikontektualisasikan sejalan dengan perkembangan zaman. Arus ini populer disebut dengan kaum muda. *Ketiga*, arus yang sudah dipengaruhi oleh komunis. Umat Islam dalam bentuk arus ini telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ketiga arus ini satu sama lain saling berebut pengaruh dan bersaing dalam mengembangkan misinya masing-masing. Agaknya, sulit untuk dipersatukan satu sama lain karena memang berbeda haluan. Apalagi antara pihak komunis dengan kaum tua dan kaum muda. Sedangkan tantangan dari luar muncul dari pihak penjajahan. Umat Islam setiap saat berada dalam tekanan penguasa dan tidak mudah untuk melaksanakan ajaran agama secara baik dan sempurna. Dalam hal itu, diperlukan usaha dan energi yang luar biasa untuk menggerakannya. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan mental dan fisik. Pada kenyataannya, ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial tidak hanya mental dan fisik, harus siap mengorbankan jiwa dan raga.

Apalagi pergerakan Islam yang muncul di tanah Minang sebelumnya lebih mengandalkan kepada kekuatan figur tertentu dan belum diorganisir secara rapi dan solid. Pada aras itu, keinginan kuat Abdul Karim Amrullah untuk membawa Muhammadiyah ke tanah Minang kelihatannya tidak bisa dibendung lagi. Dalam hal itu, sesampai di kampungnya ia dirikan cabang Muhammadiyah di Sungai Batang. Muhammadiyah untuk pertama kalinya diperkenalkan dan dikembangkan di sini. Pemilihan Sungai Batang tempat pengenalan pertama tentunya sangat rasional, di antaranya; *Pertama*, kebanyakan dari para perantau Minang terutama yang ada di Jawa dan lebih khususnya lagi di Pekalongan sebagian besarnya berasal dari Sungai Batang. Mereka semuanya sudah bergabung lebih dahulu dengan Muhammadiyah. Apalagi ketika dikomunikasikan dengan para perantau tersebut merekapun sangat mendukung keinginan Abdul Karim. Bahkan, di antaranya sudah menyatakan kesiapan untuk ikut pulang kampung untuk menggerakkan Muhammadiyah. *Kedua*, masyarakat Sungai Batang

sendiri dengan corak pemahaman keagamaan yang dikembangkannya selama ini secara kultur tidak akan mungkin terjadi penolakan karena memiliki akar kesamaan satu sama lain. *Ketiga*, dalam bentuk organisasi, di Sungai Batang sudah terdapat perkumpulan yang bergerak di tingkat lokal. Perkumpulan tersebut langsung berada di bawah pembinaannya dipimpin oleh Yusuf Amrullah. Peleburan perkumpulan itu menjadi Muhammadiyah tentunya tidak akan menemui kesulitan dan pertentangan dengan para pengurusnya. Meskipun Muhammadiyah diupayakannya dengan dukungan penuh, tetapi dari sisi keanggotaan ia tidak masuk ke dalamnya.⁴²

Setelah pelaksanaan puasa Ramadhan di 1925⁴³ Abdul Karim Amrullah bersama beberapa orang perantau lainnya, kembali pulang kampung dalam rangka merealisasikan pemikiran dan rencananya untuk mendirikan Muhammadiyah. Sebagaimana rencana awalnya ketika masih di Jawa bahwa sekembali dari Jawa, akan mengubah perkumpulan lokal yang sudah ada di Sungai Batang “Tiang Aman Sendi Selamat” menjadi Muhammadiyah. Perubahan itu terjadi pada tahun itu juga⁴⁴ dengan tidak banyak menimbulkan pro-kontra di kalangan pengelola organisasi lokal tersebut. Perkumpulan ini pada awalnya didirikan atas inisiatif dari dua tokoh penting di nagari Sungai Batang yang terdiri dari ulama dan ninik mamak. Tokoh yang dimaksud antara lain Yusuf Amrullah dan M. Amin Datuk Pengulu Basa.⁴⁵ Kemudian pembinanya langsung di bawah Abdul Karim Amrullah. Yusuf Amrullah sendiri merupakan adiknya Abdul Karim Amrullah. Dalam sejarahnya, perkumpulan ini pada mulanya kurang berkenan di tengah masyarakat. Soalnya, dalam gerakan yang dibangunnya lebih berorientasi pada pembaruan agama dan sekaligus adat. Pada ranah praksis, sering muncul pertentangan-pertentangan dengan masyarakat sehingga terkesan bahwa perkumpulan ini anti

⁴² Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad ini* (Jakarta: Panjimas, 1983), hlm. 71.

⁴³ Hamka, *Muhammadiyah...*, *op. cit.*, hlm. 15 dan idul fitri ketika itu jatuh sekitar 24 April 1925.

⁴⁴ Ishaq Thaher, *Sejarah Kebangkitan Nasionan Daerah Sumatra Barat* (Jakarta: Depdikbid, 1978), hlm. 77-78 .

⁴⁵ Hamka, *Ayahku...*, *op. cit.*, hlm. 305.

adat dan anti penghulu.⁴⁶ Hal ini menyebabkan kurang mendapat tempat di tengah masyarakat Sungai Batang sendiri terutama bagi ninik mamak dan pemangku adat lainnya, dan karena itu perkumpulan ini kurang mendapat pengikut yang banyak.⁴⁷

Berbeda ketika perkumpulan tersebut sudah dilebur menjadi Muhammadiyah, persepsi itu berubah secara total. Muhammadiyah menggunakan cara dan pendekatan yang lebih persuasif meskipun terjadi pertentangan praktik agama dan adat. Dalam hal itu, tidak ditonjolkan pertentangan itu, tetapi Muhammadiyah mengubahnya secara berangsur-angsur dan tidak terkesan radikal. Dengan pendekatan demikian, Muhammadiyah dapat diterima oleh semua komponen di Sungai Batang dan tidak menimbulkan kegoncangan baru bagi masyarakat. Para penggerakannya sangat menyadari bahwa Muhammadiyah didirikan di atas bangunan sistem sosial dan ekonomi yang sudah ada.⁴⁸ Adat lokal dan praktik keagamaan yang mungkin tidak persis sama dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah tidak dikecam dan dipersalahkan, tetapi diperbaiki dengan memperhatikan kearifan lokal yang memang sudah berjalan dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hal itu, bukan berarti Muhammadiyah tidak konsisten dengan misi pendiriannya. Pada ranah itu, dalam pandangan penggerakannya memerlukan dan membutuhkan strategi dan waktu sehingga tidak menyebabkan masyarakat antipati terhadapnya. Apalagi Muhammadiyah di Minangkabau baru pada posisi fase pengenalan. Jika dilakukan dengan corak pemahaman keagamaan itu, apalagi terkait dengan ibadah dapat dipastikan akan menimbulkan kontra-produktif dengan masyarakat setempat sehingga bisa jadi tujuannya tidak mungkin dapat dicapai. Dalam hal itu, penggiat awal Muhammadiyah lebih memilih pendekatan yang bersifat persuasif.

Dengan memperhatikan kearifan lokal tersebut Muhammadiyah dapat berkembang dengan cepat dan nyaris tidak ada penolakan dari masyarakat khususnya di sekitar Danau Maninjau. Bukan hanya

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 77.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

persoalan keagamaan, Muhammadiyah pada ranah praksis justru semakin memperkuat adat yang sudah ada. Dalam hal itu, nagari sebagai sistem pemerintahan yang hidup dan digunakan oleh masyarakat adat dipersyaratkan adanya balai-balai adat, masjid, tanah lapang dan pasar. Dengan hadirnya Muhammadiyah, persyaratan itu diperkuat lagi dengan adanya sekolah minimal satu lokal. Persyaratan itu tentunya sejalan dengan syarat berdirinya cabang Muhammadiyah, di mana cabang baru bisa didirikan jika sudah ada satu amal usaha. Salah satu amal usaha itu adalah sekolah. Pada ranah itu, di mana ada ranting atau cabang di situ ada sekolah sehingga pada setiap nagari sangat mudah menemukan sekolah-sekolah Muhammadiyah bersamaan dengan layanan sosial lainnya seperti panti asuhan. Yang disebutkan terakhir bahkan jumlahnya melebihi daripada yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Penyebaran sekolah Muhammadiyah di nagari-nagari menjadi fenomenal karena pemerintah sendiri belum mampu mengadakannya untuk masyarakat setempat. Muhammadiyah dengan sumber daya dengan didukung oleh masyarakat telah membantu kewajiban pemerintah dalam hal pencerdasan kehidupan bangsa.

Hal itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan adat pada prinsipnya tidak ada benturan, bahkan Muhammadiyah memperkuatnya. Dalam sejarahnya, fakta membuktikan bahwa sebagian besar dari pendukung dan pimpinan Muhammadiyah berasal dari pemangku adat dan tokoh yang memiliki peran strategis pada nagari-nagari di Minangkabau. Fakta itu sudah dimulai dari sejak awal pendirian Muhammadiyah di berbagai pelosok Minangkabau. Misalnya, di Sungai Batang pimpinan Muhammadiyah banyak yang berasal dari para ninik mamak yang bergelar datuk. Hal ini membuktikan juga bahwa para penghulu yang menjadi anggota dan pimpinan dalam mengembangkan Muhammadiyah sejalan dengan cara adat yang berlaku⁴⁹ di tengah masyarakat. Pada satu sisi, mereka yang aktif, mendukung dan menjadi pimpinan Muhammadiyah menjadi orang Islam yang taat dan konsekuen dengan pendirian mereka dalam menjalankan agama, dan dipihak lain berada dijalan adat. Hal itu, berjalan seiring tanpa mendahulukan dan

⁴⁹ *Ibid.*

mengemudikan yang lain. Dengan kata lain, keduanya berjalan bersama-sama tanpa mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Muhammadiyah pada konteks demikian mendorong untuk ikut berpartisipasi ke dalam kehidupan masyarakat dan menggabungkan diri pada posisi-posisi strategis dalam lembaga sosial dan adat yang terdapat pada nagari. Jadi, sifatnya, Muhammadiyah sangat lentur dan akomodatif terhadap kearifan lokal tanpa kehilangan roh tajdid yang menjadi misi utamanya. Tentunya, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh ulama pembaru sebelumnya.

Setelah Abdul Karim selesai meleburkan perkumpulan “Sendi Aman Tiang Selamat” dengan sukses dan memberikan prinsip-prinsip dasar dalam menggerakkan Muhammadiyah, maka ia kembali ke Padang Panjang. Dalam hal itu, penumbuhan dan pengembangan Muhammadiyah di Sungai Batang tidak dilakukannya secara langsung melainkan dipercayakan kepada beberapa orang tokoh Sungai Batang sendiri baik tokoh yang sebelumnya sudah terlebih dahulu masuk ke dalam Muhammadiyah ketika di rantau seperti Ja’far Amrullah Sutan Malano⁵⁰ maupun tokoh lokal yang sebelumnya bergabung dalam Tiang Aman Sendi Selamat seperti Yusuf Amrullah, Datuk Penghulu Basa dan Datuk Sidi Bandaro. Masing-masing sebagai pemuka (ketua) satu dan dua. Sedangkan Zainuddin Kari Pamuncak dan Ismail Sutan Jamaris, masing-masing sebagai sekretaris satu dan dua. Dalam hal kebendaharaan ditangani oleh Sutan Palembang.⁵¹ Pada saat itu, Abdul Karim Amrullah tidak menetap di Sungai Batang, melainkan berdomisili di Padang Panjang. Oleh sebab itu, pembinaan dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas, seperti ketika pulang kampung setelah adanya laporan para pimpinan cabang atau pada saat pimpinan berkunjung ke rumahnya sendiri di Padang Panjang. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang sudah ditetapkan bersama dengan Abdul Karim oleh penggerak Muhammadiyah dilaksanakan secara baik. Pembinaan yang dilakukan Abdul Karim adalah dalam

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatra Barat dalam Perspektif Sejarah)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 98.

bentuk memberikan arahan dan nasihat. Sedangkan yang menjalankan di lapangan adalah para pimpinan cabang. Menurut Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pendirian Muhammadiyah di Sungai Batang ini terjadi pada bulan Juni 1925⁵² setelah perubahan Tiang Aman Sendi Selamat. Selanjutnya, dimintakan pengakuan dari Pengurus Besar Muhammadiyah.⁵³

Setelah Muhammadiyah dibentuk dan diperkenalkan kepada masyarakat di Sungai Batang dan daerah sekitarnya, perkembangannya semakin pesat dan menguat ketika perantau Sungai Batang yang sudah sangat intens menggerakkan Muhammadiyah di Pekalongan bahkan ia termasuk tokoh yang ikut dari awal mendirikan “Nurul Islam” yang dilebur menjadi Cabang Muhammadiyah ketika AR. Sutan Mansur sudah ikut di dalamnya. Tokoh yang dimaksud, di antaranya Jakfar Datuk Majo Lelo, Datuk Nan Barena, dan Sutan Marajo. Apalagi ketiga tokoh ini masuk ke dalam bagian lingkaran perantau yang sukses secara ekonomi. Tambah lagi ketiganya dalam kaum masing-masing tergolong orang yang disegani. Jabatannya di kaum adalah sebagai penghulu. Oleh sebab itu, katanya didengarkan dan ditaati oleh kaumnya. Selain itu, ia memiliki kharisma kepemimpinan yang mungkin itu tidak dimiliki oleh pihak lain. Jadi, dukungan dari aspek statusnya di dalam adat, ekonomi yang mapan dan kekharismaannya sangat mendukung dalam menggerakkan Muhammadiyah. Sebagai pedagang sukses di Pekalongan, ketiganya sekaligus menjadi penyandang dana dalam Muhammadiyah ketika masih ada di rantau apalagi setelah benar-benar terjun menggerakkan di kampungnya. Dengan statusnya demikian dan ekonomi yang mapan mereka sangat membantu mengembangkan Muhammadiyah di Maninjau.⁵⁴

Dukungan yang luas dan kuat itu dari perantauan menyebabkan Muhammadiyah berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Perkembangannya bukan hanya dalam bentuk wacana keagamaan,

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *loc.cit.*

⁵³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm.15.

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *loc. cit.*

tetapi jauh dari itu struktur organisasi dibangun dengan kuat. Hal itu, ditandai dengan terbentuknya ranting-ranting di sekitar danau Maninjau. Salah satu faktor yang mendorong percepatan tumbuhnya Muhammadiyah pada awal ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang memang sangat disegani. Sebagian besar penggerakannya adalah para ulama dan ninik mamak “datuk” yang kata dan perilakunya menjadi rujukan bagi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah bagi mereka menjadi media membangun komunikasi yang lebih intens lintas suku. Muhammadiyah dengan keanggotaannya yang terbuka dan tidak menjadi salah satu milik dari suku tertentu telah memungkinkannya sebagai sarana untuk menghimpun semua potensi sumber daya yang terdapat pada semua suku di nagari-nagari. Faktanya, memang pimpinan Muhammadiyah di ranting dan cabang tidak didominasi oleh suku tertentu melainkan semuanya ada di dalamnya. Hal ini, menjadi potensi besar yang belum dimiliki oleh organisasi sejenis. Apalagi dukungan kuat dari perantauan juga sangat menentukan terutama di dalam dukungan sumber daya dana baik yang nyata-nyata sudah pulang ataupun yang masih berada di perantauan. Mereka satu sama lain bahu membahu guna membangun kampung halamannya melalui Muhammadiyah. Dalam hal itu, pada mula berdirinya cabang Muhammadiyah ini tidak menggantungkan hidupnya kepada bantuan pemerintah ataupun pihak ketiga lainnya di luar orang Sungai Batang. Kebersamaan dan kesatuan masyarakat di rantau itu sangat memungkinkan Muhammadiyah menjadi kuat dan solid karena selain mereka sebagai pedagang sekaligus menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang militan.⁵⁵

Setelah Muhammadiyah berkembang dan kuat di Sungai Batang dan sekitarnya, para tokoh dan pimpinannya terus memperluas dakwahnya. Jika selama ini, gerakannya lebih terfokus kepada pembentukan struktur organisasi dan wacana keagamaan yang terus dikembangkannya. Dalam perjalanannya, pimpinan Muhammadiyah menyadari bahwa untuk kelangsungan dan pengembangan organisasi tidak cukup dilakukan melalui usaha sebelumnya. Akan tetapi, harus ada lembaga pendidikan sebagai basis untuk menggerakkan

⁵⁵ *Ibid.*

Muhammadiyah ke depan sekaligus untuk memajukan anak nagari dari ketertinggalan. Dalam hal itu, Pimpinan Muhammadiyah merencanakan pendirian sekolah yang materi dan modelnya berbeda dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Meskipun sekolah tingkat yang sama sudah ada di Sungai Batang dengan pengelolaannya oleh pemerintah. Bagi Muhammadiyah, pendirian sekolah selain dimaksudkan untuk mencerdaskan anak nagari sekaligus diharapkan untuk membentengi masyarakat dari praktik dan penyimpangan agama yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Dalam pada itu, sekolah ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dengan targetnya agar pada suatu saat dapat melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Sekolah yang didirikan Muhammadiyah ketika itu sangat berbeda dengan sekolah yang dibentuk oleh pemerintah dan sekaligus juga berbeda dengan lembaga pendidikan yang didirikan oleh ulama sebelumnya. Perbedaannya dengan sekolah pemerintah dari sisi tujuannya sangat jelas. Sekolah yang dikelola pemerintah bertujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingannya bertahan di nusantara. Bahkan jauh dari itu, melapangkan jalan bagi upaya pengembangan agama nasrani.

Hal ini, tentunya berbanding terbalik dengan sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah sendiri. Dari sisi legalitas, sekolah Muhammadiyah ini mendapatkan perlindungan dari pemerintah nagari. Hal ini, sesuatu yang tidak mungkin bisa didapatkan pada sekolah swasta lain. Perlindungan dari pemerintah nagari ini tentunya tidak terlepas dari kuatnya pengaruh pimpinan Muhammadiyah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pimpinan Muhammadiyah di Sungai Batang ini terdiri dari orang-orang yang disegani di tengah masyarakat. Kewibawaan dan kekharismaannya tersebut sangat berpengaruh kepada perjalanan dan kewibawaan Muhammadiyah sebagai organisasi yang baru tumbuh dan berkembang. Dalam hal itu, tidak mengherankan bilamana pemerintah nagari secara hukum memberikan perlindungan kepada sekolah Muhammadiyah yang baru didirikan tersebut. Meskipun pemerintah sendiri sudah mengadakan sekolah di nagari yang sama. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa melarang rencana Muhammadiyah karena sekolah itu mendapat

dukungan kuat dari semua komponen yang ada di nagari Sungai Batang. Sedangkan para gurunya direkrut dari putra dan putri Sungai Batang sendiri yang sudah selesai dari studinya di Sumatra Thawalib.

Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam hal itu adalah Datuk Majo Lelo. Ia selain sebagai pimpinan Muhammadiyah juga sebagai salah seorang anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Batang. Keanggotaannya di Kerapatan Adat memiliki pengaruh kuat terhadap tokoh-tokoh lainnya sehingga peran di dalamnya sangat menentukan terhadap putusan-putusan yang akan dikeluarkan oleh kerapatan tersebut. Posisi itulah yang dimainkannya di dalam mengawal kebijakan pemerintah nagari termasuk menyetujui pendirian sekolah yang didasarkan pada Islam ini.⁵⁶ Setelah sekolah itu resmi didirikan dan penerimaan murid sudah dimulai, ternyata peminatnya di luar dugaan. Sebagai lembaga pendidikan baru yang tidak di bantu pembiayaannya oleh pemerintah, sudah barang tentu belum sebaik sekolah pemerintah baik dalam bentuk sarana prasarananya maupun dari sisi sumber daya manusianya. Hal yang sangat menggembirakan pengelola adalah antusiasnya masyarakat menyerahkan putra dan putrinya ke sekolah tersebut ketimbang sekolah pemerintah. Hanya dalam waktu yang relatif singkat sekolah tersebut mempunyai murid sampai ribuan orang melebihi dari sekolah pemerintah.

Keberhasilan pimpinan dan pengelola dalam meyakinkan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh, ninik mamak dan perantau yang bergabung ke dalam Muhammadiyah termasuk para simpatisannya. Masyarakat dalam hal ini merasakan bahwa sekolah yang dibangun Muhammadiyah benar-benar muncul dan berasal dari masyarakat, sedangkan sekolah yang dikelola oleh pemerintah terpisah dari masyarakat.⁵⁷ Bukan hanya itu, sekolah pemerintah oleh masyarakat dipandang sebagai sekolah yang membawa misi negatif yang berujung pada pencerabutan dari akar budaya Minangkabau sendiri. Jauh dari itu, sekolah pemerintah dipandang memberikan jalan yang lapang bagi penyebaran agama tertentu. Tidak mengherankan bilamana hampir seluruh masyarakat

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 78.

⁵⁷ *Ibid*.

lebih memilih sekolah ini sebagai alternatif terbaik dalam menyerahkan anaknya untuk pendidikan. Hanya saja, dalam sumber daya yang sangat terbatas sekolah ini mengalami kewalahan dalam menyiapkan fasilitas pendidikan karena ternyata masyarakat sangat antusias menyerahkan anak-anaknya ke sekolah ini.

Setelah berhasil mendirikan sekolah, Cabang Muhammadiyah Sungai Batang ini terus memperluas jangkauan dakwahnya dengan membentuk organisasi perempuan. Segmen ini dipandang sangat penting, karena perempuan sebagai bundokandung di Minangkabau memiliki peran strategis bagi pengembangan Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan misalnya, sebelum anak-anak masuk ke lembaga pendidikan formal yang mendidik adalah para ibu. Dengan posisi demikian, maka perempuan bagi Muhammadiyah dipandang sangat mendasar untuk dimobilisasi potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pada 1926 Pimpinan Muhammadiyah mendirikan 'Aisyiyah sebagai perkumpulan bagi perempuan untuk menata dan memperjuangkan hak-haknya baik pada ranah privat maupun publik. Sedangkan keanggotaannya direkrut dari para istri pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Organisasi perempuan ini ketika itu dijadikan sebagai bagian dari struktur organisasi dalam Muhammadiyah. Setelah AR. Sutan Mansur ditugasi oleh Pengurus Besar Muhammadiyah ke Minangkabau dan istrinya pun ikut pulang, maka 'Aisyiyah mulai berdiri sendiri. Kemudian 'Aisyiyah dipimpin oleh istrinya AR. Sutan Mansur. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan dalam Muhammadiyah mengambil peran yang sangat penting karena dalam banyak kegiatan terdapat hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Muhammadiyah. Masalah itu mesti diselesaikan oleh perempuan itu sendiri. Sebagai organisasi pergerakan yang bernaung di bawah Muhammadiyah 'Aisyiyah banyak mendukung perluasan gerakan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah di Sungai Batang pada generasi awal separohnya berasal dari anggota 'Aisyiyah. Pembentukan 'Aisyiyah ini semakin memperlihatkan akan eksistensi Muhammadiyah di ranah Minang. Salah satu peran yang sangat penting dalam sejarah 'Aisyiyah di Minangkabau adalah perannya di dalam penyelenggaraan

kongres Muhammadiyah di Bukittinggi pada 1930. Selain aktif dalam kepanitaan kongres tersebut 'Aisyiyah juga mendatangkan anggota dan peserta kongres dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 158 utusan.⁵⁸

Kesuksesan mendirikan sekolah dan 'Aisyiyah, pimpinan Muhammadiyah terus bergerak membangun ranting-ranting di sekitar Danau Maninjau. Artinya, Muhammadiyah sudah mulai keluar dari "kotak" Sungai Batang. Pada 1926 itu terbentuk Ranting Muhammadiyah Pandan. Bersamaan dengan itu pula, pada tahun itu berdiri 'Aisyiyah Padang Panjang dengan anggotanya yang pertama adalah Dariah (istri dari H. Abdul Karim Amrullah) dan adiknya Hafisah.⁵⁹ Kemudian berturut-turut tahun berikutnya terbentuk Ranting Muhammadiyah Sigiran, tepatnya pada 2 Juli 1927, Ranting Muhammadiyah Gelapung pada 15 Juli 1927, Ranting Muhammadiyah Arikir pada 8 Agustus 1927, Ranting Muhammadiyah Batu Nanggai pada 4 September 1927 dan Ranting Muhammadiyah Tanjung Sani pada 1 Januari 1928.⁶⁰ Pendirian ranting yang digerakan secara masif tersebut menunjukkan bahwa eksistensinya semakin jelas dan tersistematis.

Pembentukan Tabligh Muhammadiyah

Perkembangan Muhammadiyah di Sungai Batang boleh dikatakan tidak terdapat tantangan yang sangat berarti baik di dalam memobilisasi sumber daya maupun membangun struktur organisasi. Dari sisi sumber daya manusia, Muhammadiyah digerakan oleh para tokoh ulama dan ninik mamak yang disegani oleh banyak pihak. Mereka umumnya memiliki posisi strategis di tingkat nagari. Begitu pula di dalam memobilisasi sumber daya dana, pergerakan Muhammadiyah didukung kuat oleh para perantau, yang umumnya sudah memiliki ekonomi yang cukup mapan. Berbeda dengan di Sungai Batang, perkembangan Muhammadiyah di Padang Panjang mengalami banyak rintangan dan kendala seperti di dalam memobilisasi sumber daya. Sumber daya Muhammadiyah belum begitu siap sebagaimana yang ada di Sungai

⁵⁸ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 19.

⁵⁹ Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatra Barat 1927-1933*, diterjemahkan oleh Lindayanti dan A. Guntur (Padang: FSUA, 1988), hlm. 102.

⁶⁰ RB. Khatib Pahlawan Kayo dkk, *op. cit.*, hlm. 98.

Batang. Meskipun Abdul Karim Amrullah sendiri ikut turun kelapangan guna memperkenalkan Muhammadiyah, tetapi belum cukup kuat untuk membujuknya di Padang Panjang dan sekitarnya. Walaupun dalam perkembangannya, Padang Panjang akhirnya menjadi pusat aktivitas Muhammadiyah daerah Minangkabau bahkan pengakuan Pengurus Besar lebih dahulu didapatkannya daripada di cabang Sungai Batang. Sebagai pusat Muhammadiyah Minangkabau, di Padang Panjang ini pula lahir Kauman kedua setelah di Yogyakarta. Dari sini pula masa depan Muhammadiyah secara nasional ditentukan.

Usaha Abdul Karim Amrullah mengenalkan dan mengembangkan Muhammadiyah tidak hanya sebatas di Sungai Batang. Keinginan kuatnya sebagaimana diutarakannya kepada beberapa orang rantau yang pergi merantau ke Pekalongan pada kunjungannya yang kedua kali itu, betul-betul dibuktikannya. Setiba dari Pekalongan, ia tidak langsung pulang ke Padang Panjang melainkan terlebih dahulu menuju Sungai Batang. Dalam komitmennya, langkah awal yang akan dilakukannya adalah mengubah perkumpulan “Aman Sendi Tiang Selamat” menjadi Muhammadiyah. Ia dengan beberapa orang rantau bertemu dan mengumpulkan para pengurus perkumpulan tersebut akan niat dan maksudnya. Usahnya itu berhasil dan pengurusnya pun dengan tangan terbuka menerima keinginan ulama kaum muda ini.

Setelah sukses dan berhasil meletakkan dasar-dasar gerakan dan organisasi Muhammadiyah, kemudian ia meninggalkan Sungai Batang menuju kembali ke Padang Panjang karena pada saat itu, ia belum berniat untuk menetap di Sungai Batang. Pilihannya tetap di Padang Panjang meskipun secara sosiologis ia mengetahui akan tantangan yang akan dihadapinya dari berbagai pihak terutama dari pemerintah kolonial, komunis termasuk dari dalam Sumatra Thawalib sendiri. Dalam hal itu, ia memperkenalkan dan mengembangkan Muhammadiyah di Padang Panjang dengan model dan sasaran yang berbeda.

Kalau di Sungai Batang, Muhammadiyah digerakan oleh tokoh dan ulama lokal berkolaborasi dengan tokoh yang sudah bergabung terlebih dahulu dengan Muhammadiyah di perantauan. Bahkan dalam hal mobilisasi sumber daya, Muhammadiyah di Sungai Batang mendapat donasi dana dari para perantau dan termasuk tokoh

rantau yang sudah kembali pulang kampung sehingga pimpinan Muhammadiyah setempat tidak perlu memintakan sumbangan kepada masyarakatnya maupun pemerintah. Artinya, Muhammadiyah dengan sumber daya yang dimilikinya sendiri tidak menggantungkan hidupnya kepada bantuan pemerintah ataupun kepada yang lain, melainkan dapat memanfaatkan sumber daya sendiri melalui anggota dan pendukungnya, yang sesungguhnya berasal dari Sungai Batang sendiri. Dalam hal itu, Muhammadiyah dikenalkan secara langsung kepada masyarakat luas dan sekaligus pembentukan ranting-ranting Muhammadiyah di sekitar Danau Maninjau. Dengan begitu di Sungai Batang ini, pertumbuhan Muhammadiyah selain melakukan pengembangan anggota sekaligus mengembangkan organisasi secara struktural. Jadi, agak lebih leluasa dalam membangun struktur organisasi. Kemudian dalam gerakannya menyentuh denyut kehidupan masyarakatnya sehingga Muhammadiyah dapat berkembang lebih cepat dalam artian organik. Dalam pada itu, perkumpulan lokal dengan terbuka dapat dijadikan sebagai Muhammadiyah.

Sedangkan di Padang Panjang sasaran utamanya bukan masyarakat luas melainkan para pelajar yang masih dalam proses menyelesaikan studinya di Sumatra Thawalib terutama yang berasal dari Sungai Batang sendiri. Pada saat itu, komunis di Sumatra Thawalib masih sangat kental terutama di bawah pengaruh Datuk Batuah. Sementara para pelajar yang berasal dari Sungai Batang masih bisa ia kendalikan, dan diyakininya pengaruh Datuk Batuah belum begitu menguat. Dalam hal itu, ia mencari alternatif lain karena Sumatra Thawalib sudah tidak bisa lagi ia harapkan untuk diselamatkan dari pengaruh komunis. Oleh sebab itu, sasaran ini dipastikan berbeda di antara dua daerah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu Padang Panjang menjadi salah satu pusat pendidikan, khususnya bagian Sumatra sehingga yang diperlukan sebagai langkah strategis adalah memberikan pengaruh terhadap para pelajar. Oleh karena itu, pelajar menjadi sasaran utama untuk menyebarkan dan basis gerakan berbagai paham dan aliran. Sumatra Thawalib menjadi sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat ketika itu dari berbagai daerah. Apalagi sekolah ini didirikan

dan dipimpin pada mulanya oleh ulama besar. Kepopulerannya sejalan dengan keterkenalan dari Abdul Karim Amrullah sendiri.

Hal ini menandakan bahwa sasaran pengenalan Muhammadiyah adalah para pelajar bukan masyarakat luas. Pemilihan sasaran ini terkait dengan tantangan yang dihadapinya karena di Padang Panjang persoalannya lebih kompllit dibandingkan dengan di Sungai Batang. Kalau di Sungai Batang, masyarakatnya lebih mudah menerima kehadiran Muhammadiyah karena sangat dibantu oleh para perantau yang sudah terlebih dahulu sudah bergabung dengan Muhammadiyah. Apalagi yang menggerakannya adalah tokoh-tokoh senior di nagari. Sementara itu di Panjang Panjang belum ada satupun di antara tokoh yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan Muhammadiyah ataupun mungkin yang bisa dibawa ke dalam Muhammadiyah. Oleh sebab itu, sulit untuk dicari tokoh yang kemungkinan akan bisa dibawa kerja sama dalam pengenalan dan pengembangan Muhammadiyah. Meskipun dalam bentuk wacana Muhammadiyah sudah tersosialisasi ketengah masyarakat baik melalui para perantau maupun melalui propanda komunis. Akan tetapi, usaha untuk memperkenalkan dan mengembangkan sesuai dengan misinya belum seorangpun tokoh yang tampak akan bisa dibawa dalam gerakan tersebut. Apalagi, pertentangan antara ia dengan ulama kaum tua masih tetap jalan dan pengaruhnya masih sangat terasa. Oleh sebab itu, pilihannya hanyalah dengan merekrut para pelajar yang secara khusus belum ada wadah untuk memfasilitasi mereka untuk melakukan kegiatan selain di Sumatra Thawalib.

Pada sisi lain, perkembangan Muhammadiyah di Sungai Batang semakin kuat dan meluas termasuk lembaga pendidikan yang akan didirikan oleh pimpinan setempat. Oleh sebab itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang siap untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Beberapa bidang itu, antara lain dalam konteks kepemimpinan. Muhammadiyah yang semakin berkembang itu, diperlukan kontinyuitas pergerakan. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan adanya proses regenerasi. Di Sungai Batang sendiri belum mungkin untuk diharapkan karena sarananya belum tersedia, sementara di Padang Panjang sudah ada meskipun tidak langsung didirikan oleh Muhammadiyah. Akan tetapi, potensi itu sangat dimungkinkan karena akar pergerakan yang

ditanamkan oleh sekolah-sekolah agama di Padang Panjang pada mulanya berakar dari pembaruan seperti Sumatra Thawalib. Oleh sebab itu, diperlukan keterpaduan gerakan. Dalam hal itu, diperlukan penyiapan sumber daya manusia yang akan meneruskan kepemimpinan Muhammadiyah terutama yang ada di Sungai Batang. Begitu pula dalam tabligh, yang akan mengisi pembinaan pada masyarakat terutama yang berbasis pada masjid dan surau. Perkembangan Muhammadiyah yang semakin dapat diterima oleh masyarakat di sekitar danau Maninjau diperlukan adanya dai-dai yang siap diturunkan kemasjid-masjid dan surau-surau. Tentu, dai yang dimaksud adalah dai yang memiliki akar dan corak pemahaman keagamaan yang sama dengan Muhammadiyah. Hal yang sama juga berkaitan dengan penyiapan lembaga pendidikan. Antusiasnya masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah tentunya membutuhkan sumber daya guru dan pengelolanya sekaligus.

Dengan dilandasi oleh dasar pemikiran tersebut, Abdul Karim tentunya memiliki tanggung jawab moral terhadap ketersediaan sumber daya manusia tersebut. Pada ranah itu, Abdul Karim Amrullah menginisiasi pembentukan “Tabligh Muhammadiyah”, yang anggotanya adalah murid-murid Sumatra Thawalib sendiri. Pembentukan tersebut terjadi pada 20 Juni 1925⁶¹ dengan pusat kegiatannya di rumahnya, Jl. Gatayangan Padang Panjang. Murid-murid Sumatra Thawalib yang direkrut inilah yang merupakan generasi awal dari anggota Muhammadiyah. Meskipun dalam jumlah dan kemampuan yang sangat terbatas. Pada waktu itu, gerakan Muhammadiyah di Padang Panjang belum lagi bisa diandalkan karena para anggota yang direkrut hanya baru pada tingkat anak-anak sekolah yang masih dalam proses belajar.

Menurut Alfian dalam penelitiannya, kepengurusan tabligh tersebut terdiri dari Djamaan Sidi Sutan dan Makmur Salim masing-masing sebagai ketua dan sekretaris.⁶² Dalam sumber lain disebutkan bahwa kepengurusan awal adalah Musa Sutan Ma’ruf dan Yusuf M.

⁶¹ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op. cit.*, hlm. 84.

⁶² Alfian, *op. cit.*, hlm. 245.

Nur Amrullah, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris.⁶³ Tabligh ini dijadikan tempat berlatih bagi anggotanya. Sedangkan pembinanya secara langsung berada di bawah Abdul Karim Amrullah. Kegiatan yang dilakukan pada lembaga baru ini antara lain dengan melakukan pengajian satu kali dalam seminggu. Bagi Abdul Karim Amrullah “Tabligh Muhammadiyah” ini dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan secara intensif terhadap kader-kader muda tersebut dengan harapan mereka akan menjadi cikal bakal penggerak Muhammadiyah ke depannya. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dinamis meskipun belum memberitahukan dan belum mendapatkan izin dari Pengurus Besar Muhammadiyah. Sedangkan bagi anggotanya dimanfaatkan untuk melatih dan menyiapkan diri di dalam penempaan mental, mematangkan keilmuan dan melatih keterampilan berupa teknik berkhotbah, bertabligh termasuk manajemen pengelolaan organisasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan Tabligh Muhammadiyah ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu *pertama*, perkembangan dan dinamika Muhammadiyah di Sungai Batang. Sejak diperkenalkannya Muhammadiyah perkembangan dan penyebarannya terjadi begitu cepat sehingga dalam rentang waktu yang singkat Muhammadiyah sudah masuk dan hampir merata ada di nagari-nagari. Para ninik mamak dan masyarakat menerimanya dengan terbuka dan antusias, bahkan di sini Muhammadiyah nyaris tidak ada pertentangan dari masyarakat meskipun organisasi lokal yang dilebur menjadi Muhammadiyah sebelumnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena dinilai antipati terhadap adat yang berlaku. Muhammadiyah hadir dengan pola dan cara yang berbeda dan lebih akomodatif terhadap budaya lokal sehingga dapat diterima tanpa adanya pertentangan yang sangat berarti. Cara ini pun berbeda pula dengan yang dikembangkan oleh ulama Paderi dan ulama kaum muda yang menggerakkan pembaruan sebelumnya dengan kurang memperhatikan sosiologis masyarakat setempat sehingga muncul tantangan dari kaum adat atau tradisional.

Kedua, banyaknya putra putri Sungai Batang yang sedang studi di Sumatra Thawalib. Masyarakat Sungai Batang yang memang sejak

⁶³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 15.

dari lama memiliki perhatian agak lebih kepada sektor pendidikan. Oleh sebab itu, dalam situasi sesulit apapun pendidikan menjadi perhatian serius. Dalam hal itu, banyak anak-anak Maninjau yang sekolahnya berada di luar daerahnya. Dalam konteks itu, tidak mengherankan bilamana sejak masa lalu daerah ini menyumbangkan banyak tokoh baik dalam skala nasional maupun lokal bagi perjuangan dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan lebih-lebih bagi Muhammadiyah. Pada saat itu, Sumatra Thawalib menjadi lembaga pendidikan pilihan bagi masyarakat Maninjau yang memang sedang berkembang dan berada pada kemajuan. Apalagi sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama besar asal daerahnya sendiri, yaitu Abdul Karim Amrullah. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat sekitar Danau Maninjau banyak mempercayakan pendidikan anaknya ke sekolah tersebut.

Dua hal ini oleh Abdul Karim Amrullah sangat disadari bahwa diperlukan sinergitas antara dua faktor tersebut. Pada satu sisi, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang diharapkannya dapat menjadi penggerak umat dan merealisasikan ide-ide pembaruannya, tentunya memerlukan tenaga-tenaga yang mumpuni dan sekaligus bisa menggerakkan masyarakat. Pada ranah demikian, Abdul Karim Amrullah merasa memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan sumber daya yang dimaksud. Para pelajar yang sedang proses menyelesaikan studinya di Sumatra Thawalib sendiri dilihatnya sebagai potensi dan peluang yang harus dimanfaatkannya secara maksimal terutama dalam menyiapkan kader-kader baru untuk itu. Apalagi, potensi Muhammadiyah cukup besar untuk berkembang terus. Sedangkan di sisi lain, para pelajar yang berasal dari Sungai Batang secara khusus setelah mereka selesai dari studinya dapat diterjunkan secara langsung ketengah-tengah masyarakat sehingga ketika mereka sudah kembali kekampung halamannya tidak canggung berhadapan dengan masyarakat yang sudah terbiasa dengan kultur Muhammadiyah. Sebagian di antara mereka ada yang dipersiapkan menjadi guru pada sekolah-sekolah yang sudah dirintis oleh Muhammadiyah. Sebagian lagi ada yang dipersiapkan untuk menjadi dai dan pimpinan sebagai

penggerak Muhammadiyah di kampung halamannya masing-masing.⁶⁴ Dengan demikian, mereka sudah terlebih dahulu dipersiapkan di Tabligh Muhammadiyah untuk terjun ke masyarakat luas. Dalam hal itu, diperlukan adanya persenyawaan yang kuat antara kedua potensi tersebut. Persiapan sumber daya yang demikian, tentunya tidak dimiliki oleh murid-murid kebanyakan dari Sumatra Thawalib yang lain.

Sejak dibentuk oleh Abdul Karim Amrullah, Tabligh Muhammadiyah bergerak secara dinamis dan peminatnya pun semakin bertambah. Pengajian seminggu sekali, yaitu hari Sabtu malam dijadikan sebagai kegiatan rutin anggota. Pada saat itulah Abdul Karim sebagai penggagas dan sekaligus pembinanya melakukan pemompaan dan pematangan kader sehingga pada suatu saat akan lahir kader-kader Muhammadiyah yang militansi dan komitmennya tidak diragukan. Dalam kerangka itu, sebelum Abdul Karim Amrullah tampil sebagai narasumber utama, para anggota dan pengurus tabligh itu diwajibkan terlebih dahulu mengisi pengkajian tersebut. Forum ini juga sekaligus berfungsi sebagai tempat penempatan diri bagi anggota tabligh. Kegiatan tabligh semakin berkembang dan meluas bahkan menjadi pilihan baru bagi para pelajar di Padang Panjang⁶⁵ selain mereka belajar pada sekolah-sekolah.

Kemudian ketika Hamka bergabung di dalamnya, sekembali dari Jawa pada bulan Juli 1925, aktivitas tabligh tidak lagi terbatas pada tabligh dalam artian yang konvensional melainkan diperluas dengan penerbitan majalah bulanan. Majalah yang dimaksud diberi nama *Khatib al-Ummah*. Sedangkan pimpinan redaksi majalah dan penerbitannya tersebut diserahkan kepada Hamka sendiri. Pertimbangannya adalah bahwa ia memiliki pengalaman lebih daripada yang lain terutama terkait dengan keluwesan wawasan dan jaringan karena telah mengikuti pelatihan dan kursus politik di Jawa yang dilaksanakan oleh para tokoh nasional seperti Cokroaminoto, H. Fakhrudin, Sutan Mansur dan Suryopranoto.⁶⁶ Majalah bulanan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 78.

⁶⁶ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 16.

ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengurus dan anggota Tabligh Muhammadiyah untuk melatih dalam tulis menulis. Selain itu, mereka dapat pula memanfaatkannya gagasan dan idenya dalam bentuk yang tertulis sehingga tabligh tidak lagi monoton pada ceramah. Dengan begitu, kegiatan tabligh semakin eksis untuk dijadikan sebagai referensi baik bagi pihak yang simpati terhadap Muhammadiyah maupun antipati.

Dalam perkembangan yang demikian, Tabligh Muhammadiyah dapat suntikan “darah” baru dengan bergabungnya Saalah Yusuf Sutan Mangkuto asal Pitalah dan Datuk Sati sebelum AR. Sutan Mansur ditugasi oleh Pengurus Besar Muhammadiyah untuk menuntun pergerakan Muhammadiyah di Minangkabau. Dengan bergabungnya Saalah ke dalam tabligh semakin memperkuat barisan Muhammadiyah yang sudah mulai tumbuh dengan subur terutama di luar Sungai Batang. Apalagi pada waktu itu, Saalah termasuk salah seorang pemuda yang memiliki visi jauh ke depan dan di kampungnya termasuk pemuda yang aktif dan disegani oleh kawan-kawannya. Apalagi antara Hamka dan Saalah dari sisi umur tidak terlalu jauh berbeda. Keduanya sama-sama memiliki visi ke depan yang disertai dengan potensi untuk berkembang. Dalam sejarahnya, terbukti keduanya sama-sama menjadi tokoh penting baik di dalam Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Perbedaan di antara keduanya, terletak pada kecenderungan masing-masing. Hamka memang dari awal lebih cenderung kepada sisi-sisi keagamaan, sastra dan sejarah, tetapi juga memiliki nyali politik. Meskipun yang terakhir tidak begitu kental betul. Sementara itu, Saalah memiliki kecenderungan yang lebih dominan kepada politik. Hal itu, dikemudian hari terbukti bahwa Hamka lebih populer dengan keulamaannya selain sebagai sastrawan dan sejarawan.

Namun demikian, ia dalam beberapa lama sempat pula sebagai politisi bahkan duduk sebagai pimpinan partai politik serta parlemen. Sementara itu, Saalah ketenarannya bukan dalam bidang keulamaan meskipun pernah dua kali menduduki ketua Muhammadiyah Minangkabau. Ia lebih populer sebagai politisi dan intelektual. Dalam sejarahnya, ia pernah menduduki posisi penting dan strategis baik dalam konteks lokal maupun nasional. Beberapa posisi strategis yang

pernah didudukinya antara lain bupati Solok yang pertama, pelaksana tugas gubernur Sumatra Tengah, bupati Padang Pariaman dan anggota parlemen pada tingkat pusat. Bergabungnya kedua tokoh ini, semakin memperkuat kehadiran Tabligh Muhammadiyah meskipun dalam usia yang masih relatif muda. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kepengurusan Tabligh Muhammadiyah yang lain, Hamka dan Saalah termasuk yang agak lebih tua daripada yang lain.

Pertemuan kedua tokoh ini dan akhirnya bergabung ke dalam Muhammadiyah berawal dari kunjungan Abdul Karim Amrullah atas undangan tokoh masyarakat Lubuk Bauk Batipuh Baruh untuk melakukan pengajian menjelang memasuki bulan Ramadhan 1343H. Sebagai ulama dari kaum muda, disela-sela akan dilaksanakannya pengajian, ia banyak memberikan informasi tentang perkembangan mutakhir yang mungkin akan berguna bagi kemajuan masyarakat. Begitupun tokoh-tokoh yang hadir bersamanya sangat antusias mendengarkan bentuk informasi tersebut. Hal yang sama juga disampaikan tokoh-tokoh masyarakat terutama terkait dengan perkembangan di kampung tersebut. Salah satu di antaranya adalah kepulauan Hamka, putranya Abdul Karim Amrullah dari Jawa. Pada waktu itu, Hamka ikut dalam pengajian tersebut. Hamka sebagaimana yang diceritakan Abdul Karim banyak mendapat pengalaman dalam kunjungannya itu. Hal itu, mungkin sangat berguna bagi perjuangan Minangkabau ke depan karena ia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional baik tokoh nasional yang berasal dari Jawa sendiri maupun yang berasal dari Minangkabau. Begitu pula pihak tokoh masyarakat Pitalah yang ikut mendampingi ulama tersebut, menceritakan pula anak nagarinya yang baru pula pulang dari Jawa. Justru tokoh pemudanya ini sempat di perjalanan ditahan oleh pemerintah kolonial karena diduga terlibat dalam keanggotaan komunis. Saalah menurut yang diinformasikan oleh tokoh-tokoh Pitalah ini termasuk pemuda yang aktif dan sering menyebut-nyebut perkembangan partai politik dan Muhammadiyah di level nasional.

Oleh karena terjadinya saling menceritakan tentang perkembangan terakhir situasi dan kondisi daerah baik dalam skala lokal maupun nasional, maka keduanya sepakat untuk mempertemukan kedua tokoh

pemuda tersebut. Di antara tokoh nagari yang ikut mempertemukannya adalah Engku Haji Harun, biasa dipanggil *at-Thubuhiy al-Faryamaniy* dan Engku Datuk Rangkayo Marajo, mantan kepala negeri Batipuh Baruh. Pada pertemuan itu antara kedua tokoh tersebut berbagi pengalaman dan informasi tentang nasibnya di perantauan termasuk perkembangan politik di tanah air dan di Minangkabau secara khusus. Dalam pembicaraan itu, Saalah menyebut-nyebut gerakan Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Akan tetapi, keduanya memiliki garis perjuangan yang berbeda meskipun tujuan yang akan dicapai sama, yaitu sama-sama menghadirkan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Muhammadiyah mengambil jalan dengan dakwah kultural, sedangkan Sarekat Islam memperjuangkan Islam dalam bentuk struktural atau politik. Setelah terjadi diskusi semalaman di antara keduanya, di mana Hamka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam Muhammadiyah melalui Tabligh Muhammadiyah, maka Saalah pada sejak itu juga memilih bergabung dengan Muhammadiyah dan meniggalkan Sarekat Islam. Dengan masuknya Saalah ke dalam Muhammadiyah, tentunya Tabligh Muhammadiyah memiliki tenaga dan “darah baru” dalam mengembangkan Muhammadiyah.

Sedangkan pada saat itu, propaganda komunis sangat menguat di tengah masyarakat dengan tujuan agar membenci dan menjauhi Muhammadiyah. Akan tetapi, semangat para penggiatnya yang terdiri dari anak-anak muda tidak pernah surut selangkah pun. Apalagi dengan masuknya Saalah yang menambah kekuatan baru dalam Muhammadiyah. Perkembangan Muhammadiyah melalui “tablighnya” semakin tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Pada sisi lain, fakta itu juga tidak menyurutkan langkah pihak komunis untuk terus menebarkan propaganda yang menurut mereka sangat “seksi” untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dengan bergabungnya Saalah ke dalam Muhammadiyah di Padang Panjang, tentunya semakin memperkuat dan memperluas barisan Muhammadiyah. Jika sebelumnya, Muhammadiyah melalui tabligh jangkauannya hanya terbatas pada pelajar Sumatra Thawalib khususnya yang berasal dari Sungai Batang, maka dengan masuknya Saalah pergerakan Muhammadiyah mulai menelusuk ke tengah-tengah masyarakat luas

terutama di tempat asalnya Saalah, yaitu Pitalah, salah satu dari nagari di Padang Panjang.

Dalam memobilisasi pergerakan Muhammadiyah, Saalah di Pitalah berupaya menghimpun para ulama dan tokoh-tokoh setempat untuk diajak bergabung dalam Muhammadiyah. Untuk mempermudah gerakannya itu, Saalah memanfaatkan perkumpulan lokal yang sudah ada di Pitalah sendiri, yaitu; "Perkumpulan Tani" dengan anggotanya terdiri dari orang yang sudah dewasa.⁶⁷ Organisasi ini oleh Saalah dijadikan sebagai anak cabang dari Tabligh Muhammadiyah. Namun, gerakan yang dibangun oleh Saalah ini pada masa itu tidak berkembang dengan baik karena Pitalah sendiri sesungguhnya oleh komunis dijadikan sebagai daerah basisnya. Pengaruh komunis sudah masuk terlebih dahulu sehingga perkumpulan lokal yang ia memiliki relasi baik dan bahkan dekat termasuk yang menjadi sasaran untuk dilenyapkan oleh komunis. Pengaruh Saalah belum sebanding kuat dengan yang dihembuskan oleh komunis sehingga ia belum banyak bisa berbuat untuk menanamkan Muhammadiyah di nagarinya itu.

Dalam hal ini, komunis berupaya untuk menghalangi masuknya Muhammadiyah ke nagari tersebut. Mereka menyebarkan informasi melalui propaganda bahwa Muhammadiyah merupakan ancaman baru bagi nagari. Propaganda komunis tersebut sudah termakan oleh masyarakat termasuk para elite di nagari sehingga kehadiran Muhammadiyah kurang mendapat respons positif. Bukan hanya sekadar tidak diterima melainkan Muhammadiyah dicurigai dan dianggap sebagai ancaman baru bagi nagari termasuk membunuh karakter tokohnya. Saalah termasuk salah seorang korban dari propaganda komunis tersebut sehingga ia tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di nagari. Pada hal sebelumnya, ia termasuk salah seorang pemuda yang tidak pernah absen dari kegiatan di nagarinya. Dalam istilah lain, ia menjadi tidak populer di kalangan para pemangku adat.⁶⁸ Artinya, Saalah dipandang oleh tokoh adat sebagai orang yang mesti disingkirkan dan tidak dilibatkan dalam agenda-agenda nagari. Meskipun demikian,

⁶⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 79

⁶⁸ *Ibid.*

Saalah tidak pernah berputus asa dan ia terima dengan sadar dan sabar. Secara perlahan tetapi pasti, ia akhirnya mampu meyakinkan masyarakat dan tokoh setempat bahwa propaganda komunis tersebut tidaklah benar. Akhirnya, Saalah dengan Muhammadiyah berhasil mengalahkan pengaruh komunis. Bukan hanya itu, Saalah juga berhasil meyakinkan beberapa ulama yang memiliki pengaruh kuat di Padang Panjang, meskipun paham keagamaannya berbeda dengan corak dan pola yang dipahami Muhammadiyah sendiri.

Pada sisi lain, Abdul Karim Amrullah sendiri sebagai tokoh yang membidangi lahirnya Tabligh Muhammadiyah terus menerus dicurigai oleh pihak Belanda karena dipandang berbahaya bagi eksistensi pemerintah. Dalam pada itu, pihak pemerintah kolonial Belanda pun menghalang-halangi dan membatasi ruang gerak Tabligh Muhammadiyah karena secara fakta rumah Abdul Karim Amrullah dijadikan sebagai pusat kegiatan. Selain itu, ia sendiri juga sebagai pembina utama tabligh tersebut. Hal ini memengaruhi gerak Tabligh Muhammadiyah secara keseluruhan hingga akhirnya eksistensinya kurang berkembang dan bahkan mengalami kevakuman dalam beberapa lama sebelum dibentuknya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Meskipun pada jalur Padang Panjang ini perkembangan Muhammadiyah melalui Tabligh Muhammadiyah mengalami ketersendatan, namun pengaruhnya tetap menjalar kedaerah-daerah sekitar. Jauh dari itu, melalui jalur Sungai Batang Muhammadiyah mengalami perkembangan dan perluasan yang cukup pesat.⁶⁹

Saalah sebagaimana dikemukakan di atas berhasil meyakinkan beberapa tokoh ulama yang memiliki pengaruh kuat di beberapa nagari. Salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad Jamil Jaho, ulama yang memiliki pengaruh kuat di Padang Panjang. Langkah ini oleh Saalah dipandang strategis karena untuk mengembangkan Muhammadiyah secara luas di daerahnya memerlukan tokoh dan ulama yang memiliki basis kuat pada masyarakat. Sedangkan Muhammadiyah belum memiliki tokoh atau ulama yang demikian. Sebagaimana diketahui bahwa semua penggerak Muhammadiyah masih terdiri dari tokoh-tokoh muda semuanya. Abdul Karim Amrullah

⁶⁹ *Ibid.*

sendiri sebagai tokoh yang mengenalkan dan mendukung sepenuhnya tidak secara langsung masuk ke dalamnya. Akan tetapi, hanya menjadi pendukung dan pendorong utama agar Muhammadiyah hidup dan berkembang. Dalam hal itu, Saalah berupaya keras meyakinkan beberapa orang ulama yang memiliki pengaruh kuat untuk dapat bergabung di dalamnya. Salah satu alasan yang kemungkinan dijadikan peluru oleh Saalah adalah bahwa komunis sudah begitu sangat kuat pengaruhnya di tengah masyarakat. Dalam menghadapi komunis tersebut tidak bisa dilakukan dengan hanya menghandalkan kepada figur tertentu saja, melainkan harus dimobilisasi dalam bentuk organisasi yang rapi dan teratur. Gerakan tersebut mesti dibangun bukan hanya di tingkat lokal, tetapi harus bergerak secara nasional. Apalagi komunis bukan hanya di Minangkabau saja melainkan sudah menjadi gerakan yang masif di seluruh nusantara. Dalam hal itu, Muhammadiyah menjadi salah satu bagian terpenting dari pergerakan dalam menghadapi komunis yang dimaksud.

Sejalan dengan pemikiran itu, umat Islam sedang tertekan oleh pihak kolonial Belanda. Selama Belanda bercokol di negeri ini, umat Islam tetap saja tidak akan bisa keluar dari keadaan itu. Pada konteks itu, diperlukan adanya kebergabungan antara ulama baik ulama kaum muda maupun kaum tua termasuk tokoh-tokoh lain yang belum terkontaminasi oleh pengaruh komunis dan menjadi kaki tangan pemerintah kolonial. Dalam hal itulah, Iyiek Jaho berhasil diyakinkan oleh Saalah meskipun dari sisi paham agamanya berbeda dengan Abdul Karim Amrullah sebagai tokoh yang mengenalkan Muhammadiyah sejak dari awal. Lagi pula Inyiek Jaho termasuk ulama yang kurang melakukan konfrontatif dan tidak melakukan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Kalaupun merasa tidak senang dengan kebijakan pemerintah, ia sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih lunak dan tidak terkesan melawan pemerintah. Oleh sebab itu, ia termasuk ulama yang tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial. Tentunya, berbeda dengan Abdul Karim Amrullah. Karakternya yang keras dan tegas membuat pemerintah kolonial tidak senang dan merasa terancam tidak senang dengan tokoh tersebut. Apalagi, ia sering melontarkan kritik tajam kepada pemerintah kolonial ketika

kebijakan dinilainya merugikan kepentingan masyarakat, apalagi bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, ia termasuk ulama yang gerak geriknya selalu diawasi oleh pihak Belanda karena merasa kepentingannya terusik.

Ulama Kaum Tua Masuk Muhammadiyah

Kondisi Tabligh yang semakin terjepit dengan diawasi terus seluruh gerak geriknya oleh Belanda bersamaan dengan kecurigaannya kepada Abdul Karim Amrullah. Belum lagi, propaganda komunis yang tidak pernah berhenti, bahkan kuantitasnya semakin tinggi. Dalam hal itu, bagi Saalah diperlukan strategi lain agar perkembangan Muhammadiyah berjalan dengan lancar dan baik. Semua kekuatan dan potensi mesti dimanfaatkan. Apalagi yang dihadapi adalah kekuatan besar. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah itu ada tiga komponen, yaitu; pemerintah kolonial, komunis dan umat Islam yang terpengaruh oleh komunis. Belanda dan komunis meskipun dua kekuatan yang tidak mungkin bisa disatukan karena masing-masing saling curiga, tetapi keduanya merupakan sama-sama musuh yang harus dihadapi sekaligus. Menyikapi hal itu, salah satu di antaranya dengan meyakinkan para ulama berpengaruh pada masyarakat luas. Kekuatan yang dimiliki ulama itu tentunya tidak dimiliki oleh pihak kolonial Belanda, kecuali pengaruh kekuasaan. Memang dalam faktanya pengaruh kekuasaan ini oleh kolonial dimanfaatkan di dalam memelihara dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia termasuk di Minangkabau. Dalam konteks demikian, kolonial tidak jarang menggunakan kekerasan kepada rakyat. Banyak di antara ulama dan tokoh masyarakat yang terperangkap dalam jeratan kolonial tersebut hingga dibuang dan dipenjarakan. Sedangkan pengaruh komunis di tengah masyarakat menjadi kuat karena kepandaian para aktivisnya dalam memanfaatkan suasana terutama bagi kelompok-kelompok yang “terpinggirkan” dan hak-haknya selalu dirugikan oleh pihak kekuatan yang sedang berkuasa. Dalam hal itu komunis masuk melalui pemanfaatan kelas sosial. Sementara itu, pengaruh ulama di tengah masyarakat bukan sebagaimana pengaruhnya kolonial dan bukan pula seperti pengaruh komunis melainkan murni muncul dari kekharismaan ulama yang bersangkutan. Kekuatan ini menjadi

sangat penting karena dalam situasi apapun pengaruh ulama dapat digunakan untuk membangun kekuatan yang lebih besar.

Dalam hal itu, Saalah berhasil meyakinkan Inyiek Jaho. Ia merupakan salah seorang ulama yang memiliki pengaruh kuat terutama di kalangan masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Hanya saja, corak pemahaman keagamaannya agak berbeda dengan ulama kaum muda. Tentunya, juga berbeda dengan Muhammadiyah. Bagi Saalah, bukan perbedaan itu yang dimunculkan, tetapi bagaimana menghadapi musuh bersama umat Islam. Meskipun dalam catatan Hamka, Saalah sendiri belum mengetahui dan memahami benar secara mendalam perbedaan antara ulama tua dengan ulama muda. Begitu pula halnya dengan Inyiek Jaho sendiri. Sebagai ulama yang terkatagori kepada kaum tua belum mengetahui dan memahami secara mendalam tentang Muhammadiyah. Bagi ulama kaum tua, tidak segan-segan menuduh golongan Pembaru sebagai zindik, telah sesat, menyesatkan, dan kafir. Kebanyakan ulama-ulama yang masih teguh memegang teguh pendirian lama ini merasa tersinggung karena tarekatnya diganggu.⁷⁰ Hal itu, terbukti nanti ketika ulama ini setelah mengetahuinya tidak lagi aktif di Muhammadiyah. Dengan masuknya ulama ini, Saalah berkeyakinan bahwa Muhammadiyah akan dapat menghadapi kekuatan Belanda dan membendung serta menangkis pengaruh komunis di Minangkabau.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam perkembangannya, Tabligh Muhammadiyah terus mengalami ketertekanan oleh pihak pemerintah Belanda. Begitu pula kekuatan komunis semakin meningkatkan propagandanya karena mereka mengetahui Muhammadiyah semakin hari semakin meluas bahkan penguasa nagari Pitalah pada saat itu—atas hasutan komunis—mencurigai Muhammadiyah sebagai ancaman baru bagi nagari. Kuatnya tekanan dari dua kekuatan tersebut, belum dapat diatasi oleh Tabligh Muhammadiyah yang umurnya memang masih sangat muda. Para tokohnya belum banyak yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Apalagi, keadaannya baru dalam proses pengenalan. Akibatnya, pergerakan Tabligh Muhammadiyah tersendat dan bahkan

⁷⁰ Nurhabsyah, *Pemberontakan PKI Di Silungkung Tahun 1927*, e-USU Repository © 2004 Universitas Sumatra Utara/pdf, diakses 20 Februari 2016, hlm. 2.

dalam beberapa waktu sempat mengalami kevakuman. Kondisi ini, oleh pimpinan Muhammadiyah di Sungai Batang perkembangannya terus diikuti dan diamati.

Menyikapi keadaan demikian, Yusuf Amrullah, ulama dan sekaligus sekretaris Muhammadiyah Sungai Batang memandang kondisinya sudah begitu sangat sakit dan kronis. Oleh karena itu, ia berpandangan tidak mungkin lagi dihidupkan sebagaimana awalnya. Tidak ada jalan lain, kecuali dimatikan dan diganti dengan yang baru. Itulah yang terjadi pada 2 Juni 1926.⁷¹ Yusuf Amrullah memfasilitasi pertemuan itu dengan tetap meminta kepada pengurus Tabligh Muhammadiyah sebagai penggerak utamanya karena ia sendiri bukan berdomisili di Padang Panjang melainkan di Sungai Batang. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan *oprchting vergadering*, yaitu rapat untuk mendirikan Muhammadiyah. Pada saat itu, dihadiri oleh para tokoh Muhammadiyah, di antaranya Saalah Yusuf St. Mangkuto, Dt. Sati dan lain-lain. Sedangkan perwakilan dari pimpinan Muhammadiyah Sungai Batang dihadiri langsung oleh Yusuf Amrullah.⁷² Pertemuan bersejarah itu, dilaksanakan di rumah Abdul Karim Amrullah, Gatangan, Padang Panjang. Meskipun ia sendiri tidak ikut hadir dalam rapat pembentukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padang Panjang tersebut. Ketidakhadiran Abdul Karim Amrullah disebabkan karena ketika itu ia dalam perjalanan ke Mesir guna memenuhi undangan dari Universitas al-Azhar, Mesir untuk menerima penganugerahan gelar kehormatan, *honoris causa*. Oleh sebab itu, yang bertindak sebagai tuan rumahnya adalah Yusuf Amrullah. Pada rapat perdana pembentukan cabang tersebut tersusun struktur dan personalia pimpinan.

Pedoman penyusunan struktur dan personalia, tentunya merujuk kepada pimpinan cabang yang ada di Sungai Batang karena yang hadir ketika itu adalah sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah Sungai Batang. Rapat tersebut akhirnya berhasil menyusun kepengurusan Muhammadiyah yang terdiri dari Saalah Yusuf Sutan Mangkuto (ketua),

⁷¹ Marjohan dkk, *Embrio Muhammadiyah ada di kauman Padang panjang* (Padangpanjang: Panitia Peringatan 80 Tahun Perguruan Kauman Muhammadiyah padangpanjang, 2006), hlm. 2.

⁷² *Ibid.*

Dt. Sati (wakil ketua), A. Wahid R (Sekretaris), St. Saidi (bendahara) dengan anggota-anggota Yusuf Amrullah, Yusuf M. Nur, A. Karim Dt. Mangkuto Marajo, St. Mudo, St. Panduan, Dt. Rangkayo Mulia dan Sersan M. Jamil.⁷³ Sedangkan secara legalitas formal, Muhammadiyah Cabang Padang Panjang baru mendapat pengesahan dari Hoofbestuur setahun kemudian, yaitu pada 20 Juli 1927 berdasarkan besluit nomor 56/HB/1927.⁷⁴ Cabang ini menjadi tonggak perkembangan awal bagi Muhammadiyah di Indonesia. Jika selama ini, Muhammadiyah baru berkembang di Jawa, sejak keluarnya besluit tersebut Muhammadiyah secara organisatoris tidak lagi berada dalam satu “kotak” Jawa melainkan meluas ke Minangkabau. Seterusnya Muhammadiyah makin maju dengan masuknya banyak kaum pembaru lain serta menyebar keseluruh penjuru nusantara. Dalam perkembangannya, untuk tingkat kecabangan, Inyiek Jaho dipilih pula untuk menjadi ketua Muhammadiyah Padang Panjang dengan berbasis anggota 45 orang yang terdiri dari pelajar dari Sumatra Thawalib. Bersamaan dengan bergabungnya Inyiek Jaho, hal yang sama juga diikuti Syaikh Muhammad Zain, ulama kaum Tua asal Simabur, Batusangkar.⁷⁵

Hampir sama dengan Inyiek Jaho, M. Zain masuk ke dalam Muhammadiyah dengan keyakinan dapat membendung komunis yang pengaruhnya sudah semakin kuat di masyarakat. Oleh sebab itu, ketika diyakinkan oleh Saalah, kemudian ditimbal oleh Inyiek Jaho, ia dengan terbuka bergabung dengan Muhammadiyah. Bahkan bukan hanya sebagai anggota biasa, M. Zain dipilih menjadi pucuk pimpinan, yaitu sebagai ketua Muhammadiyah. Seiring dengan masuknya ulama ini ke dalam gerakan tajdid diikuti pula oleh para penghulu-penghulu pemangku adat⁷⁶ dan masyarakat yang ada di nagari Simabur bahkan para ninik mamak yang memiliki pengaruh kuat pun menyatakan diri bergabung dengan Muhammadiyah. Ninik mamak yang dimaksud, di antaranya Datuk Majo Indo (Kepala Nagari Simabur dan saudara

⁷³ *Ibid*, hlm. 3.

⁷⁴ *Ibid*. 2.

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 79.

⁷⁶ *Ibid*.

kandungnya), Datuk Mangkuto Majolelo, dan Datuk Bungsu. Hal ini sangat membantu melapangkan jalan pergerakan Muhammadiyah. Kemudian perkembangan itu, diikuti dengan pendirian sekolah HIS Muhammadiyah Simabur. Pada waktu itu, Saalah datang langsung melakukan pembinaan dan konsolidasi sehingga gerakan Muhammadiyah tidak dapat terbendung oleh pihak komunis maupun kekuatan lainnya.

Ia sendiri belum memahami secara utuh dan mendalam tentang tujuan dan misi Muhammadiyah yang sesungguhnya. Hal itu, baru diketahuinya secara mendalam ketika mengikuti Kongres Muhammadiyah. Akan halnya Inyiek Jaho sepulang dari kongres tersebut M. Zain tidak lagi aktif dan secara perlahan mengundur diri dari Muhammadiyah. Kemudian ia mengikuti keluarganya ke Perak karena istrinya berasal dari daerah tersebut dan di sana diangkat menjadi mufti Kerajaan.⁷⁷ Kemudian kepemimpinan cabang Muhammadiyah Simabur digantikan oleh Haji Musa dan Haji Mukhtar yang selama ini lebih dikenal dengan ulama kaum muda dan tentunya memiliki paham agama yang berbeda pula dengan M. Zain. Ketika pulang ke Simabur sekali-kali, ternyata suasana di kampungnya sudah dominan diwarnai oleh “kaum muda”, yaitu gerakan yang ia pandang sebelumnya kelompok “sesat”. Oleh sebab itu, ketika pulang kampung pada 1955 setelah masa pensiun dari mufti ia betul-betul tidak lagi merasakan suasana yang kondusif baginya untuk menanamkan “ajaran agama” yang dipahaminya terutama tariqat naqsyabandi karena tidak ada lagi yang menyukai tariqat tersebut. Justru, pengaruh kaum muda dengan berbalut Muhammadiyahlah yang berpengaruh kuat di dalam masyarakat nagari Simabur. Dalam pada itu, ia pindah dan berdomisili di Pariaman atas permintaan murid-muridnya untuk membimbing suluk dan khalwatnya sampai meninggal pada 1957.⁷⁸

Tokoh ketiga dari kaum tua yang ikut bergabung dengan Muhammadiyah adalah Engku Tafakis.⁷⁹ Hanya saja, tidak banyak yang dapat diungkap dari ulama yang ketiga ini karena keterbatasan literatur

⁷⁷ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 32.

⁷⁸ Hamka, Ayahku..., *op. cit.*, hlm. 293.

⁷⁹ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 105.

dan informasi. Perbedaannya dengan ulama yang sebelumnya, Engku Tafakis ini tidak sampai menjadi pucuk pimpinan Muhammadiyah, tetapi berpengaruh terhadap masyarakat terutama di sekitar Tafakis.

Ada suasana baru yang dapat dilacak ketika ketiga ulama ini masuk dan bahkan menjadi pimpinan Muhammadiyah bahwa pergerakan Muhammadiyah mulai kembali berdenyut. Sebelumnya, sempat mengalami kevakuman beberapa lama karena kuatnya tekanan dari pemerintah kolonial. Jadi, semangat baru itu sempat kembali menyemarakkan syiarnya Muhammadiyah. Dalam perjalanannya, meskipun Muhammadiyah sudah mulai bergerak di bawah kepemimpinan dua ulama berpengaruh ini, tetap saja tidak menyelesaikan persoalan. Justru muncul masalah baru secara internal. Sebagaimana diketahui bahwa kedua ulama ini bukan termasuk ulama dari kalangan kaum muda melainkan paham dan pemikiran keagamaannya mewakili kaum tua. Yang jelas, paham agama ketiga ulama ini juga berbeda dengan paham keagamaan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Akan tetapi, pada waktu itu, perbedaan tersebut baik oleh ketiga ulama ini maupun bagi yang mengembangkan Muhammadiyah sendiri seperti Saalah belum diketahui perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Lantaran itu, bagi ketiganya belum menjadi sebuah persoalan. Sedangkan bagi ulama yang tidak sepaham dengan kedua ulama ini, sikap yang mereka ambil hanyalah dengan cara tidak mau mendekat dan menjauh diri dari Muhammadiyah. Sikap seperti ini sebagaimana ditunjukkan oleh H. Mukhtar di Simabur. Ketika Muhammadiyah Simabur dipimpin oleh M. Zain ia tidak mendekat kepada Muhammadiyah. Akan tetapi, setelah tidak dipimpin oleh M. Zain lagi, H. Mukhtar merapat dan bahkan menjadi Pimpinan Muhammadiyah menggantikan posisinya. Begitu pula sikap yang ditunjukkan oleh beberapa ulama yang selama ini memberikan dukungan dan ikut turun dalam menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah di berbagai tempat. Abdul Karim Amrullah misalnya, menunjukkan sikap membatasi diri hanya memberikan dukungan kepada Muhammadiyah di Sungai Batang. Begitu pula Jamil Jambek menunjukkan sikap yang sama dengan menyatakan hanya akan memberikan dukungan kepada Muhammadiyah di Bukittingi. Daud

Rasyidi juga sama. Sikap ini sesungguhnya merupakan protes kepada pimpinan Muhammadiyah terutama yang ada di Padang Panjang bahwa hal itu mestinya tidak terjadi.

Akan tetapi kepemimpinan dua ulama ini di Muhammadiyah tidak bertahan lama, bahkan keduanya mundur secara perlahan sebelum habis masa periodenya. Peristiwa itu terjadi setelah keduanya mengikuti dan menjadi anggota Kongres ke-16 Muhammadiyah bersama dengan Saalah. Kongres tersebut diselenggarakan di Pekalongan pada 1927. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Inyiek Jaho dan M. Zain Simabur pada kongres tersebut justru tidak semakin memperkuat pendiriannya untuk terus berjuang dalam Muhammadiyah, tetapi justru sebaliknya kedua ulama ini merasa salah masuk.⁸⁰ Banyak hal, informasi yang didapatkan oleh kedua ulama ini pada kongres tersebut terutama berkaitan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang sesungguhnya. Paham agama yang menjadi materi-materi kongres yang disampaikan oleh para pimpinan Muhammadiyah ternyata berbeda secara mendasar dengan yang dikembangkan oleh kedua ulama ini, bahkan nyaris sama dengan yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh kaum muda di Minangkabau seperti Abdul Karim Amrullah. Salah satu materi yang sangat jelas perbedaannya dengan paham agama yang dikembangkan kedua ulama ini adalah penjelasan tentang khittah Muhammadiyah. Materi ini disampaikan oleh Mas Mansur sebagai konsul Muhammadiyah Surabaya. Isinya, lebih banyak menyinggung persoalan ketidakbolehan bertaqlid kepada imam-imam mazhab atau mengikat diri pada satu mazhab tertentu khususnya kepada mazhab Syafi'i.⁸¹ Pemahaman yang secara nyata ini berbeda dengan kedua ulama tersebut yang mengembangkan pemahaman ulama Syafi'i sebagaimana juga dikembangkan oleh *maenstream* ulama di Indonesia. Dalam kongres yang dihadiri oleh Inyiek Jaho dan M. Zain inilah pembentukan Majelis Tarjih yang berfungsi untuk mengkaji dan menelaah berbagai pendapat ulama di dalam memahami teks nash dan penetapan hukum. Majelis ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama Muhammadiyah di dalam melakukan penelitian dan kajian terhadap landasan-landasan

⁸⁰ Yusuf Abdullah Puar, *op. cit.*, hlm. 86.

⁸¹ A. Jainuri, *op. cit.*, hlm. 48.

yang paling kuat untuk menjadi dasar pengamalan Islam, baik dalam bidang akidah, ibadah maupun mu'amalat⁸² dan mempersatukan masalah khilafiyah yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah.⁸³ Dalam manhaj yang dikembangkannya sejak dari awal adalah pendapat yang terkuatlah yang dipilih untuk diamalkan sedangkan yang lemah ditinggalkan. Sementara itu, kedua ulama ini sudah mengikatkan diri pada mazhab Syafi'i sejalan dengan yang dikembangkan oleh ulama kaum tua sejak lama.

Hal itu, menunjukkan bahwa bergabungnya ketiga ulama di atas (Inyiek Jaho, M. Zain dan Engku Tafakis) dilatar belakang oleh dua faktor, yaitu; *Pertama*, kuatnya pengaruh komunis dilingkungan masing-masing. Baik Inyiek Jaho maupun M. Zain dan Engku Tafakis menilai bahaya yang sangat besar akibat dari menguatnya pengaruh komunis. Dalam hal itu, ketiga ulama tersebut sama-sama memandang perlu adanya perlawanan yang dilakukan secara terorganisir bukan hanya di tingkat lokal, melainkan juga secara nasional karena pergerakan komunis skalanya lebih luas dan tidak hanya bergerak secara masif di Minangkabau. Muhammadiyah, dilihat oleh ketiganya meskipun baru di Minangkabau tetapi memiliki potensi besar untuk itu. Keyakinan tersebut ditambah lagi dengan sifat gerakan Muhammadiyah yang tidak berorientasi "politik" sebagaimana halnya pergerakan Sarekat Islam. Lagi pula, Muhammadiyah didukung kuat oleh ulama-ulama berpengaruh di Minangkabau utamanya dari kaum muda. Potensi tersebut bagi ketiga ulama ini mesti dimanfaatkan agar pengaruh komunis tidak semakin kuat dan harus ada yang membendungnya. *Kedua*, belum mengetahui dan memahami tujuan dan maksud Muhammadiyah secara menyeluruh dan mendalam. Paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah tentunya memiliki kemiripan dengan gerakan pembaruan yang dikembangkan oleh ulama kaum muda di Minangkabau sehingga mendapat dukungan kuat dari ulama-ulama tersebut. Keterikatan terhadap mazhab tertentu oleh Muhammadiyah termasuk salah satu bagian pemahaman yang menjadi

⁸² Ahmad Azhar Basyir, "Mekanisme Ijtihad di Kalangan Muhammadiyah", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 17 Tahun ke-67, 1987, hlm. 30.

⁸³ H.D.G. Mukhtar, *Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih* (Jakarta: Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, t.th), hlm. 11.

sasaran untuk dibongkar sehingga dalam pelaksanaan ajaran Islam tidak lagi harus mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Melainkan dicari mana di antara pendapat yang berbeda tersebut yang lebih kuat dan itulah yang mesti diamalkan. Selain itu, Muhammadiyah secara tegas memisahkan di antara aspek ibadah, akidah dan muamalat. Berkaitan dengan ibadah dan akidah pelaksanaannya harus murni dan konsekuen, tidak boleh dicampuradukan dengan kebiasaan atau adat lokal. Oleh karena kedua bidang tersebut adalah domainnya ta'abudi. Dalam konteks inilah dimunculkan istilah TBC (Takhayul, Bid'ah dan Churafat).

Sedangkan dalam muamalat, Muhammadiyah memiliki pemahaman yang lebih loggar dan luas untuk lebih dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman dan situasi lokal selama prinsip-prinsip dasar tidak terlanggar. Hanya saja, bagi ketiga ulama ini, prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Muhammadiyah tersebut belum sampai sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang kemuhammadiyahannya belum diketahui secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan setelah mengikuti Kongres ke-16 Muhammadiyah di Pekalongan pada 1927, kedua ulama ini merasa salah masuk. Sikap salah masuk itu ditunjukkan dengan tidak ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam arena kongres tersebut. Pada hal, forum kongres merupakan forum yang sangat strategis dalam mengarahkan pergerakan Muhammadiyah ke depannya.

Walaupun demikian, sepanjang pengamatan dan penilaian Hamka terutama ketika bersama-sama bertabligh ke kantong-kantong Muhammadiyah maupun ke tempat yang lain di saat menjabat sebagai ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang, perbedaannya tidak begitu banyak dengan ulama kaum muda dan malah pada masalah-masalah tertentu memiliki pandangan yang sama.⁸⁴ Misalnya, dalam masalah *Thariqat Naqsyabandi*, Inyiek Jaho lanjut Hamka justru berbeda pendapat dengan Syekh Sulaiman Arrasuli bahkan pendapatnya lebih dekat dengan pendapat Abdul Karim Amrullah.⁸⁵ Walaupun antara Inyiek Jaho dan Iyiek Candung tergolong kepada ulama kaum tua. Hanya saja pada suatu kali antara Inyiek Jaho dan Abdul

⁸⁴ Hamka, *Ayahku...*, *op. cit.*, hlm. 295.

⁸⁵ *Ibid.*

Karim Amrullah terlibat perdebatan tajam tentang suatu masalah sampai menyinggung perasaan masing-masing. Sejak itu pula Inyiek Jaho tidak lagi datang-datang ke Muhammadiyah dan bahkan mengundurkan diri.⁸⁶ Dalam pada itu, ia mulai menampakan diri dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan kemudian menjadi tokohnya sebagaimana Inyiek Candung.⁸⁷ Ketika Inyiek Jaho tidak lagi aktif sebagai ketua cabang Muhammadiyah, maka kendali pimpinan dilaksanakan oleh Hamka yang perposisi sebagai wakil ketua.

Dengan demikian, bagi Inyiek Jaho dan M. Zain semakin jelas dan terang hakikat dan tujuan Muhammadiyah berbeda jauh dengan paham agama yang selama ini dianut dan dikembangkannya dengan mengikatkan diri pada Mazhab Syafi'i.⁸⁸ Paham yang dianut Muhammadiyah sejalan dengan paham agama yang dianut dan dikembangkan oleh Abdul Karim Amrullah, M. Jamil Jambek, Daud Rasyidi, dan lainnya. Oleh sebab itu, menurut Hamka pada kongres tersebut keduanya mengambil sikap diam, tidak memberikan komentar apapun termasuk tidak memberikan bantahan terhadap berbagai penjelasan dan pernyataan yang disampaikan oleh Pengurus Besar maupun oleh peserta lain termasuk Mas Mansur. Jadi, keduanya merasa salah masuk.⁸⁹ Lanjutan dari sikap diamnya pada kongres dan merasa salah masuk, keduanya setelah pulang dari kongres tersebut tidak lagi aktif. Akan tetapi, tidak menyatakan mundur baik dari ketua cabang maupun dari keanggotaan sebagai Muhammadiyah bahkan ketika dilaksanakannya rapat tahunan pada akhir 1928 Inyiek Jaho sebagai ketua cabang pun tidak datang.⁹⁰ Pada hal rapat tahunan tersebut sangat penting karena di situ dibicarakan evaluasi terhadap kepemimpinan yang sedang berlangsung dan pemilihan pimpinan yang baru sebagai kelanjutan dari pimpinan sebelumnya. Oleh sebab itu, Inyiek Jaho tidak lagi dipilih oleh peserta rapat karena memang pada saat itu ada aturan yang mempersyaratkan bahwa calon yang tidak hadir dalam arena rapat

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Yusuf Abdullah Puar, *op. cit.*, hlm. 86.

⁸⁹ Hamka, *Muhammadiyah..., op. cit.*, hlm. 31.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

tidak boleh dipilih.⁹¹ Akhirnya, pada rapat tahunan tersebut digantikan oleh Tuanku Jalaluddin Rajo Endah sebagai ketua dan Hamka, wakilnya. Kedua ulama ini dikenal dengan ulama kaum muda yang pasti berbeda paham agamanya dengan Inyiek Jaho.

Meskipun Muhammadiyah di awal pertumbuhannya mulai tumbuh subur dengan didukung penuh oleh ulama-ulama yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat termasuk dari kalangan ulama kaum tua seperti Inyiek Jaho, M. Zain dan Engku Tafakis, namun tantangan yang dihadapi semakin keras terutama datang dari kalangan umat Islam sendiri yang sudah dipengaruhi oleh komunis dan orang komunis yang mempergunakan Islam sebagai kedok.⁹² Perjalanan gerakan Muhammadiyah pada masa kepemimpinan dua ulama kaum tua ini mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan ulama-ulama yang sebelumnya karena berbeda dalam paham agama. Hal itu, terlihat dengan tidak ada dukungan dari pihak ulama kaum muda bahkan menjauh dari Muhammadiyah, seperti yang dilakukan oleh Tuanku Jalaluddin Rajo Endah di Padang Panjang dan Haji Musa serta Haji Mukhtar di Simabur. Jadi, usaha Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan lainnya untuk merangkul ulama kaum tua masuk ke dalam Muhammadiyah sesungguhnya cukup berhasil. Hanya saja, belum sampai pada kemampuan dan usaha mengkompromikan perbedaan tajam antara paham agama masing-masing dan memang tidak akan mungkin bisa disatukan. Hal itu terbukti ketika Saalah antara 1925-1928 berupaya mempertemukan kedua kelompok ulama ini diundang untuk membahas secara bersama tentang persoalan-persoalan yang diperbedakan tersebut tetap saja tidak bisa dilakukan. Dalam perjalanannya, fiksi ulama kaum tua di Muhammadiyah tidak bertahan lama karena sifat dari paham agama yang dianut oleh Muhammadiyah nyata-nyata sulit dikompromikan dengan paham agamanya kaum ulama tua. Justru, dapat dukungan penuh dari ulama kaum muda yang hampir sejalan dengan paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Dalam hal itu, tidak mengherankan bilamana ulama

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 80.

besar dan berpengaruh dari kaum muda memberikan dukungan penuh kepada Muhammadiyah seperti Abdul Karim Amrullah, M. Jamil Jambek, Daud Rasyidi, Ibrahim Musa Parabek, dan seterusnya. Ketika Cabang Muhammadiyah dipimpin oleh Inyiek Jaho ini, ulama yang berpaham kaum muda seperti Haji Mukhtar, murid dari Abdul Karim Amrullah nyaris tidak mau mendekat dan menjauh dari Muhammadiyah.⁹³

Komunis⁹⁴ yang memang sudah sejak lama melancarkan propaganda

⁹³ Hamka, Muhammadiyah..., *Ibid*, hlm. 29.

⁹⁴ Menurut Ricklefs, peneliti berkebangsaan Belanda, ajaran tentang komunisme di Indonesia pertama kali dibawa oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet dari Belanda. Ia datang ke Indonesia pada 1913. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 260. Di Belanda sendiri ia termasuk aktivis partai sosial demokratik sebagai anggota di SDAP (*Sociaal Democractische Arbeiders Partij*). Akan tetapi, pada 1909 ia keluar dari partai tersebut dan lebih konsentrasi pada perdagangan. Dari sisi ideologi dan keagamaan, pada awalnya, ia merupakan penganut mistik katolik, tetapi beralih keyakinan kepada komunis. Sebelum datang ke Indonesia ia telah membangun komunikasi dengan pihak komunis internasional. Oleh sebab itu, ketika mendirikan organisasi ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*) bersama B.J.A. Bransteder, hlm.W. Dekker, P. Bergsma dan Semaun pada 9 Mei 1914 ia mendapat dukungan dari komunis internasional. *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adipustaka, 1990), Jilid XII, hlm. h.88. Pada awal kedatangannya di Indonesia ia diperkerjakan sebagai staf pada redaksi *Soerabajaasch Handelsblaad*. Tidak lama setelah bekerja di redaksi tersebut ia pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris di perusahaan *Semarangsche Handelvereniging*. Ketika ia mendirikan ISDV dan kerja samanya dengan insulinde, Sarekat Islam telah berkembang dengan pesat, di mana memiliki ribuan pendukung yang tersebar di berbagai daerah. Ia melihat potensi Sarekat Islam tersebut harus dimanfaatkan guna membangun dan menyebarkan pengaruh komunis di Hindia-Belanda. Untuk hal itu, ia menyusupkan anggota komunis ke dalam Sarekat Islam. Upaya itu dalam perjalanan sejarahnya, cukup efektif dan berhasil hingga kekuatan Sarekat Islam dapat dipecah. Hal itu, ditandai dengan munculnya penolakan dan gugatan terhadap perwujudan dari cita-cita awal pendirian Sarekat Islam, yaitu Pan-Islami dari dalam partai sendiri. Dua tokoh utama dari partai ini, yaitu Agus Salim dan Abdul Muis, dapat mengetahui lebih awal misi dibalik penolakan dan gugatan yang dilancarkan tersebut bahwa pihak intelektual yang berada dibelakangnya adalah komunis. Oleh sebab itu, kedua tokoh asal Minang ini mendesak kepada kongres ke-6 di Bandung untuk membersihkan partai dari penyusupan tersebut. Akan tetapi, kongres

terhadap Muhammadiyah dengan maksud agar dijauhi dan dibenci oleh masyarakat tidak pernah absen melakukan propaganda dimaksud. Para kader komunis tidak henti-hentinya melakukan penghadangan terhadap gerakan Muhammadiyah yang baru tumbuh. Sama dengan tantangan yang dihadapi di Sungai Batang, tantangan di Padang Panjang datang dari pihak komunis di mana sejak lama sudah menyebarkan propaganda-propaganda yang selalu menyudutkan Muhammadiyah. Pengaruh komunis pada masa ini sudah sangat menguat⁹⁵ terutama di beberapa tempat seperti di Sumatra Thawalib. Hal itu, ditandai dengan kekecewaan Abdul Karim Amrullah terhadap lembaga pendidikan yang didirikannya itu dan akhirnya ia meninggalkan serta menolak untuk mengajar disekolah ini.⁹⁶

tidak dapat mengambil keputusan karena di antara anggota kongres belum semuanya dapat memahami dan mengetahui sesungguhnya yang terjadi. Apalagi, gerakan komunis itu sesungguhnya belum merata adanya pada seluruh daerah, kecuali pada beberapa cabang yang memang sudah dimasuki oleh kelompok kiri tersebut. Lagi pula sebagian peserta kongres yang disusupi itu berhasil masuk sebagai peserta kongres. Selesai kongres ke-6, di tubuh Sarekat Islam terjadi perpecahan menjadi dua kelompok besar, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih.

Pembersihan itu sebagaimana diusulkan oleh Agus Salim dan Abdul Muis baru menjadi sebuah keputusan pada kongres ke-7 di Madiun. Sejak itu, konflik dua kelompok besar Sarekat Islam tersebut semakin tajam dan menegangkan bahkan Sarekat Islam Merah di bawah bayang-bayang komunis melaksanakan kongres tandingan. Salah satu keputusan kongres tandingan tersebut adalah di mana ada Sarekat Islam Putih di situ ada Sarekat Islam Merah. Tidak lama setelah pelaksanaan kongres tandingan itu, tepatnya pada bulan April 1924, Sarekat Islam Merah ini berganti nama menjadi Sarekat Rakyat dan resmi menjadi *onderbouw* PKI. Sejak itu pula kegiatan indoktrinasi diintensifkan secara masif keseluruh cabang-cabang yang dimilikinya. Akhirnya, pada bulan Desember 1924 Sarekat Rakyat dilebur ke dalam PKI dengan slogan “*more riches to the rich, no taxes to the poor, more mosque to the picas, more jobs to the semi literates.*” Ruth McVey, *The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents* (Ithaca: Cornell University Press, 1960), hlm. xxi

⁹⁵ Paham komunisme di Sumatra Thawalib pada awalnya diperkenalkan oleh guru Sumatra Thawalib sendiri, yaitu Datuk Batuah, yang kembali dari Jawa pada 1923. Kemudian dibantu oleh Zainuddin. Kedua orang ini mempergunakan cara propaganda melalui tabligh dan penerbitan-penerbitan. Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 57.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

Berbeda dengan tokoh lain, seperti Syaikh M. Jamil Djambek berhasil mengantisipasi pengaruh komunisme dari suraunya dengan cara melakukan pemecatan terhadap dua pembantunya yang terlibat dalam gerakan komunis. Hal yang sama juga dilakukan Syaikh Ibrahim Musa sehingga pengaruh komunis dapat disingkirkan dari perguruanannya.⁹⁷ Dalam hal itu, Sumatra Thawalib terpecah ke dalam dua fiksi, yaitu pihak yang pro komunis dan bergabung dengan pihak komunis dalam berjuang terhadap Belanda, serta yang mengakui diri mereka sebagai termasuk dalam lingkungan gerakan Komunis di satu pihak, dan golongan lain yang anti Komunis.⁹⁸ Golongan yang disebutkan terakhir menurut penelitian Deliar Noer membatasi kegiatan mereka pada perjuangan pembaruan pendidikan tanpa mempersoalkan kedudukan Belanda di Indonesia, sekurang-kurangnya tidak terlalu secara terbuka.⁹⁹ Pengaruh komunis di Sumatra Thawalib bertahan sampai 1927 setelah Belanda menghabisi mereka terutama setelah pemberontakan di Silungkang. Setelah gagal pemberontakan Silungkang dan penangkapan sejumlah tokoh-tokoh Permi serta diiringi oleh bubarnya partai itu, maka Muhammadiyah menjadi satu-satunya organisasi sosial-kemasyarakatan yang tetap eksis di Minangkabau hingga zaman Jepang.¹⁰⁰

Namun sebelum peristiwa tersebut meletus dan semua pimpinan dan aktivis komunis ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Digul, Tabligh Muhammadiyah yang berposko di rumah Abdul Karim Amrullah menjadi sasaran utama bagi komunis termasuk juga oleh pihak pemerintah kolonial. Salah satu keberhasilannya adalah menyingkirkan pengaruh Abdul Karim Amrullah di lembaga pendidikan yang didirikannya sendiri sehingga ia harus meninggalkan dan menolak untuk mengajar di tempat tersebut. Penolakannya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa lembaga pendidikan tersebut tidak mungkin lagi bisa diselamatkan dari pengaruh komunis. Oleh karena Datuk Batuah sudah berhasil memisahkan Abdul

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 88-89.

¹⁰⁰ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 183.

Karim Amrullah dari Sumatra Thawalib, maka ia pun mengalihkan sasarannya kepada Tabligh Muhammadiyah. Propagandanya terhadap Muhammadiyah semakin ditingkatkan dengan berbagai macam cara. Tidak tahan dengan propaganda yang dilancarkan oleh pihak komunis, maka Muhammadiyah pun melakukan pembelaan sehingga terjadilah perang dingin di antara keduanya. Model perang tersebut pun beragam mulai dari yang bersifat akademis sampai kepada debat terbuka melalui penerangan agama atau khutbah Jum'at dengan tema-tema yang aktual seperti cara perjuangan antara Islam dan nasionalisme.¹⁰¹ Secara akademis, pihak Sumatra Thawalib melontarkan isu kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah lebih berpihak kepada pemerintah Belanda. Hal itu, ditunjukkan dengan tidak maunya bergerak di bidang politik dan tidak mau memperjuangkan kepentingan bangsa dari tekanan pemerintah Belanda serta hanya mengurus sebagian orang saja. Sebaliknya, Muhammadiyah selain melakukan pembelaan terhadap propaganda komunis tersebut, juga membuka kepada publik bahwa komunis tidak melandaskan perjuangannya dengan agama Islam. Sebagai orang Islam sewajarnya kalau Islam dijadikan dasar dan tujuan perjuangan Sumatra Barat.¹⁰²

Propaganda yang dilancarkan oleh komunis terhadap Muhammadiyah bukan hanya di Minangkabau saja melainkan sudah menjadi isu yang berskala nasional. Menurut catatan Hamka propaganda demikian sudah bergerak secara masif sejak 1923 dengan tuduhan bahwa Muhammadiyah adalah P.E.B (Politicshe Ekonomische Bond).¹⁰³ Kemudian singkatan PEB ini diplintir menjadi Penjilat Ekor Belanda. Bersamaan dengan isu tersebut, Muhammadiyah juga dituduh sebagai Sarekat Hijau, yaitu sebagai lambang dari penghinaan dan lawan dari warna merah berupa simbol revolusionir. Alasan lain yang digunakan pihak komunis untuk menghabisi Muhammadiyah adalah dengan mengembangkan opini bahwa Muhammadiyah di

¹⁰¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 79.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 80.

¹⁰³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 18.

Yogyakarta menerima subsidi dari pemerintah kolonial untuk sekolah-sekolah yang didirikannya.¹⁰⁴ Opini yang disebutkan terakhir semakin menjadi-jadi dikembangkan kepada masyarakat Minangkabau utamanya kepada pelajar-pelajar yang ada di Sumatra Thawalib yang sudah sangat kental pengaruh komunisnya.¹⁰⁵ Jauh sebelum Muhammadiyah resmi ditumbuhkan dan dikembangkan oleh para ulama. Tentunya, propaganda tersebut sejalan dengan kepulauan Datuk Batuah dari Jawa yang dibantu oleh Zainuddin.

Hal itulah yang menurut penelitian Deliar Noer menunjukkan terjadinya hubungan Sumatra Thawalib dengan Muhammadiyah yang sempat mengalami masalah meskipun sama-sama memiliki basis paham agama yang sama karena Sumatra Thawalib sempat berada di bawah pengaruh komunisme. Pada hal bila dilihat dari perkembangan kedua lembaga umat ini sama-sama saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Ada banyak, kader-kader Muhammadiyah yang sebetulnya ikut membesarkan lembaga pendidikan ini. Sebaliknya, lembaga pendidikan ini juga banyak memasok sebagai warga, pimpinan dan sumber daya manusia di amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah terutama melalui alumninya.¹⁰⁶

Kebencian orang-orang komunis di saat itu kepada Muhammadiyah tidak tanggung-tanggung bahkan ketika Hamka akan berangkat ke Jawa pun sempat disampaikan juga kepadanya oleh Mohammad Zain Jambek—kader militan komunis sebelum masuk ke dalam Muhammadiyah—sempat mengutarakan bahwa “Muhammadiyah yang AR. Sutan Mansur menjadi tokohnya di Pekalongan merupakan PEB sebagai penjilat ekor Belanda, supaya perkumpulan seperti itu tidak masuk pula ke Minangkabau.¹⁰⁷ Propaganda-propaganda yang dimainkan oleh komunis sebagaimana dijelaskan di atas tidak menghalangi para pimpinan dan aktivis Muhammadiyah untuk mengembangkan sayapnya. Abdul Karim Amrullah sebagai tokoh yang berpengaruh di Ranah Minang semakin memberikan dorongan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 61.

¹⁰⁷ Hamka, *Muhammadiyah..., loc. cit.*

yang penuh bahkan ikut ke mana-mana mengenalkan Muhammadiyah termasuk merekrut anggota barunya. Ia berkeliling dari suatu nagari ke nagari memberikan pengajian sekaligus mengenalkan Muhammadiyah yang ia lihat secara dekat. Ia juga berkeinginan untuk mengembangkannya di Minangkabau. Salah satu, daerah yang dipandanginya sangat berpotensi untuk mengembangkannya adalah Pitalah. Oleh sebab itu, ia mulai masuk ke daerah ini melalui komunikasinya dengan beberapa tokoh masyarakat setempat disela-sela pengajian yang diundang oleh masyarakat Pitalah saat bulan puasa akan tiba. Salah satu hasilnya adalah masuknya Saalah Yusuf Sutan Mangkuto ke dalam Muhammadiyah. Ia adalah salah seorang pemuda yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah ke depan.

Penugasan AR. Sutan Mansur, Datuk Nan Bareno, dan Fatimah ke Minangkabau

Bersamaan dengan pengembangan Muhammadiyah yang digerakan oleh Saalah Yusuf Sutan Mangkuto di Padang Panjang dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sungai Batang di bawah pimpinan Yusuf Amrullah. Gerakan Muhammadiyah pada kedua jalur tersebut didukung penuh oleh Abdul Karim Amrullah. Dalam pada itu, Muhammadiyah diperkuat lagi dengan kedatangan AR. Sutan Mansur yang memang ditugasi langsung oleh Pengurus Besar Muhammadiyah pada akhir 1925. Bukan hanya AR. Sutan Mansur, Jeffrey Hadler dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pengurus Besar Muhammadiyah menugaskannya bersama dengan Datuk Nan Bareno untuk menjadi wakil-wakil resminya. Selain itu, Fatimah, istrinya juga menjadi wakil 'Aisyiyah, organisasi sayap perempuan Muhammadiyah.¹⁰⁸ Meskipun yang paling dikenal dalam sejarah Muhammadiyah adalah AR. Sutan Mansur. Penugasan ketiga tokoh ini ke Minangkabau hampir bersamaan dengan pendirian Jong Islamieten (Liga Pemuda Islam) yang dibentuk oleh Haji Agus Salim, tokoh asal

¹⁰⁸ Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformis Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*, diterj. dari Muslim and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hlm. 282.

Minangkabau di Batavia, yaitu suatu organisasi yang secara politik kaum reformasi terhadap aliansi di kalangan mahasiswa yang terdidik secara Belanda.¹⁰⁹

'Aisyiyah sebagai organisasi yang membidangi perempuan dalam Muhammadiyah, dalam sejarahnya tumbuh dan berkembang sejalan dengan Muhammadiyah. Anggota pertamanya adalah Ummi Hindun Shahih dan Ummi Fatimah Latif.¹¹⁰ Dalam sumber lain, disebutkan bahwa anggotanya pertama adalah Dariah (istri dari Abdul Karim Amrullah) dan adiknya Hafsa.¹¹¹ Keberadaan 'Aisyiyah sebagai organisasi pergerakan perempuan semakin eksis dan berkembang setelah Fatimah bersama AR. Sutan Mansur kembali dari Pekalongan pada pertengahan 1927. Fatimah sebagaimana ia di Pekalongan adalah tokoh perempuan Minang yang aktif menggerakkan 'Aisyiyah. Fokus gerakannya terkait dengan pembinaan kehidupan kaum wanita. Sejak kepulangan itu pula 'Aisyiyah mulai berdiri sendiri dan semakin berkembang¹¹² dengan kepengurusan Hafsa sebagai ketua, Aisyah sebagai sekretaris, Jamilah sebagai bendahara, sedangkan anggotanya antara lain Dariah, Maimunah, Siti Raham, Ramisan, dan Fatimah.¹¹³

Perkenalan dan persentuhan AR. Sutan Mansur dengan Muhammadiyah dimulai sejak ia berada di Pekalongan pada 1921.¹¹⁴ Satu tahun kemudian, istrinya, Fatimah binti Abdul Karim dan putranya yang masih kecil, Anwar Rasyid menyusul mengikuti AR. Sutan Mansur berangkat ke Pekalongan.¹¹⁵ Sama halnya dengan orang Minang lainnya, tujuan utama mereka pada awalnya pergi merantau meninggalkan kampung halaman dimotivasi oleh faktor ekonomi. Oleh sebab itulah orang Minang diperantauan pada umumnya

¹⁰⁹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, t.th), hlm. 73.

¹¹⁰ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat, *Mengenal Muhammadiyah Sumatra Barat dalam Rangka Milad Muhammadiyah ke-70* (Bukittinggi: PW. Muhammadiyah Sumatra Barat, 1983), hlm. 9.

¹¹¹ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 102.

¹¹² Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 102.

¹¹³ Hamka, *Ayahku...*, hlm. 184.

¹¹⁴ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 25.

¹¹⁵ Hamka, *Muhammadiyah...op. cit.*, hlm. 13.

berprofesi sebagai pedagang yang ulet bukan menjadi pegawai atau pejabat, kecuali beberapa dekade terakhir. Selain berprofesi sebagai pedagang mereka biasanya sekaligus juga sebagai pendakwah karena sebagian besarnya sudah memiliki dasar agama yang kuat. Kedua hal itu, ada pada diri AR. Sutan Mansur yang baru tiba di Pekalongan. Pada satu sisi, ia adalah pedagang, tetapi di sisi lain dasar keilmuan agamanya melebihi daripada yang lain. Dalam sejarahnya, Sutan Mansur termasuk pedagang batik yang sukses.¹¹⁶

Dalam pada itu, ia menemukan Islam yang di gerakan oleh Muhammadiyah dengan corak yang menghidupkan dan menggembirakan. Hal itu, belum ditemukannya selama ini baik ketika di kampungnya maupun ketika dikirim oleh gurunya ke Lubuk Buaya dan Kuala Simpang, Aceh untuk menjadi guru di sana.¹¹⁷ Islam yang dipelajari selama ini seperti menara gading tanpa berpengaruh terhadap sikap dan bahkan tidak direalisasikan dalam kehidupan nyata. Islam yang ia dapati itu bukan hanya sebatas dipelajari sebagai ilmu dan diperdebatkan melainkan diamalkan dan digerakan serta diorganisir dalam bentuk yang rapi dan terencana sehingga umat berlomba dalam melaksanakannya. Ajaran tentang kurban misalnya, yang ia pelajari dan diajarkan di dua tempat tersebut sebatas pada keilmuan dan perdebatan ulama tentang hal itu, tetapi umat tidak diajak bagaimana menggerakkan untuk mengamalkannya. Kemudian ibadah kurban yang ia temukan tidak sebatas diketahui dan dipahami melainkan digerakan untuk diamalkan dan dilaksanakan sehingga setelah shalat idul adha warga ramai-ramai membawa hewan kurban mereka ke lapangan untuk disembelih dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang tergolong berekonomi lemah. Begitu pula terkait dengan penafsiran Surat Al-Ma'un, surat tersebut bukan hanya sekadar untuk dihafal, diketahui makna dan maksudnya, tetapi jauh dari itu yang dimintainya adalah bagaimana mengamalkannya. Hal ini, ia temui hanya di dalam Muhammadiyah, yang digerakan oleh Ahmad Dahlan. Dalam hal itu, AR. Sutan Mansur berpandangan bahwa berislam seperti dimaksud di atas sangat diperlukan di tengah

¹¹⁶ Jeffrey Hadler, *op. cit.*, hlm. 281.

¹¹⁷ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 13.

pergumulan hidup umat. Oleh sebab itu, ia segera bergabung dengan Muhammadiyah secara totalitas. Kesungguhan dan kepiawaiannya serta ditopang oleh kekharismaannya sebagai panutan umat yang berada di sekelilingnya membuat ia dipercaya memimpin sebagai ketua Cabang Muhammadiyah Pekalongan dan Pekajangan.¹¹⁸ Dalam perkembangannya, bukan hanya AR. Sutan Mansur yang bergabung, tetapi ulama lain sebagai pembaru pun ikut memberikan dukungan penuh kepada Muhammadiyah sebagaimana yang terjadi di tanah Minang. Kemudian hal itu, menjalar ke seluruh nusantara, yang tentunya sangat menguntungkan bagi Muhammadiyah untuk tersebar secara merata.¹¹⁹ Dalam perkembangannya, AR. Sutan Mansur sendiri bagi Muhammadiyah di tanah Jawa, sesudah meninggalnya KH. Ahmad Dahlan dipandang sebagai salah seorang pembina ideologinya dan termasuk tokoh yang sangat penting di luar Jawa.¹²⁰

Sejak bergabung di cabang Muhammadiyah hingga dipercaya menjadi pimpinan, AR. Sutan Mansur bukan lagi sebatas sebagai pedagang batik¹²¹ yang sukses melainkan sudah memperluas jangkauan aktivitasnya dengan menjadi guru agama dan dai. Oleh karena semakin padatnya kegiatan sebagai pimpinan Muhammadiyah dan melayani umat, maka dengan sendirinya dagangan yang ia geluti banyak yang tertinggal. Kesibukannya mengajar dan bertabligh agaknya sudah mulai menyita waktunya karena banyak permintaan dari masyarakat. Apalagi sejak dipilih menjadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah, ia semakin sibuk mengurus umat sehingga waktu untuk mengurus dagangannya semakin tidak memungkinkan lagi. Setelah dengan pertimbangan yang matang, akhirnya ia meninggalkan dunia dagang dan lebih berkonsentrasi pada guru agama dan menjadi dainya Muhammadiyah. Sementara dagangannya itu, diserahkan kepada yang lain.

Bersamaan dengan tantangan dari komunis, tantangan Muhammadiyah juga datang dari dalam sendiri terutama ketika

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

¹¹⁹ Mochammad Ali Shodiqun, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqh yang terlupakan* (Jakarta: Noura Books, 2013), hlm. 48.

¹²⁰ Hamka, *Muhammadiyah...op. cit.*, hlm. 21.

¹²¹ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 25.

menghadapi berbagai persoalan. Tantangan yang dimaksud adalah di kalangan tokoh dan warga Muhammadiyah yang memang belum bisa memahami sepenuhnya kultur Muhammadiyah serta sosiologis masyarakat secara memadai. Dalam hal itu, kadang secara psikologis muncul rasa keakuan dari tokoh yang sudah bergabung dengan Muhammadiyah sebagaimana digambarkan Hamka bagaikan “*bujang jolong berkeris*.”¹²² Walaupun begitu, Abdul Karim Amrullah tetap punya keyakinan dan optimis bahwa perkumpulan Muhammadiyah inilah satu-satunya perkumpulan yang dapat menyusun tenaga umat buat beramal.¹²³

Pada satu sisi, tampak Muhammadiyah mengalami pertumbuhan dan perkembangan terutama dari jalur Sungai Batang, tetapi di sisi lain Muhammadiyah mendapat tantangan berat baik dari kalangan luar maupun dari dalam sendiri di Padang Panjang. Tantangan dari luar berasal dari komunis, Belanda dan umat Islam yang dapat dipengaruhi oleh propaganda komunis. Sehingga ada yang menilai bahwa Muhammadiyah sebagai ancaman baru bagi nagari dan kelompok Islam lainnya. Sedangkan tantangan dari dalam berasal dari sumber daya manusia Muhammadiyah sendiri. Sebagai organisasi yang baru tumbuh dan berkembang para penggiatnya belum banyak mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hakikat dan maksud Muhammadiyah terutama gerakan yang berbasis di Padang Panjang. Dalam hal itu, ada kemungkinan perjalanan Muhammadiyah tidak sejalan dan bahkan menyimpang dari misi Muhammadiyah itu sendiri.

Pada kondisi yang demikian, dibutuhkan adanya tuntunan yang menuntut perjalanan Muhammadiyah agar sejalan dan tidak menyimpang dari misi utamanya. Dalam hal itu, secara khusus Pengurus Besar menugaskan AR. Sutan Mansur kembali pulang kampung untuk memimpin dan memandu gerakan Muhammadiyah.¹²⁴ Penugasan ini dilaksanakan AR. Sutan Mansur pada penggal terakhir 1925.¹²⁵ Momentum berpindahannya ke kampung halaman dengan memboyong kembali keluarganya menjadi sangat penting bagi

¹²² Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 15.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Yusuf Abdullah Puar, *op. cit.*, hlm. 86.

¹²⁵ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 21.

Muhammadiyah. Pada saat itu, propaganda komunis terhadap Muhammadiyah semakin meningkat sebagaimana digambarkan Hamka bahwa

Kalau kiranya bukanlah St. Mansur yang datang, atau kalau dia tidak datang bagaimana jadinya Muhammadiyah yang mulai berkembang di Minangkabau itu. Yang terang hanyalah perkelahian yang akan sengit dengan kaum komunis atau bukan orang komunis yang akan terpengaruh oleh propaganda komunis atau lantaran dorongan dari propaganda demikian penuhlah Muhammadiyah dimasuki oleh orang-orang penjilat pemerintah, sehingga fitnah itu benar-benar jadi kenyataan. Atau terperosok menyambung pertentangan Kaum Muda dengan Kaum Tua yang telah membawa perpecahan selama 20 tahun.¹²⁶

Sejalan dengan gambaran Hamka di atas, Aisyah Rasyid, putrinya AR. Sutan Mansur mengemukakan pula bahwa

Kehadiran AR. Sutan Mansur menjadi sitawa sidingin yang akan membawa angin sejuk, karena sebelum berangkat ketanah Jawa dahulu, dia sudah terhitung murid terkemuka dari Syaikh Abdul Karim Amrullah yang bisa membawa kedamaian di antara pihak-pihak yang berseberangan.¹²⁷

Dua kutipan tokoh terdekat dari AR. Sutan Mansur di atas menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah sudah tumbuh dan mulai berkembang dari dua tempat (Sungai Batang dan Padang Panjang) sangat dirasakan membutuhkan sosok yang betul-betul memahami dan bisa memahamkan Muhammadiyah secara menyeluruh ke dalam lubuk hati banyak orang. Kehadiran AR. Sutan Mansur bagi kalangan pegiat Muhammadiyah bak turunnya embun di bawah terik panasnya Matahari. Oleh karena AR. Sutan Mansur memiliki pengalaman memimpin dan menggerakkan Muhammadiyah di Jawa. Selain itu, secara psikologis ia tidak memiliki beban psikis dengan kelompok manapun termasuk dengan kaum komunis karena belum terlibat dalam perdebatan ideologis secara langsung. Begitu pula pergumulan dengan kaum tua ia belum punya rekam jejak yang bisa mengurangi penghormatan pihak ulama tua kepadanya sehingga

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 31.

bisa diterima oleh banyak pihak. Apalagi oleh ulama kaum muda yang cenderung bersifat modernisme.

Penugasan tersebut tentunya dengan pertimbangan bahwa AR. Sutan Mansur adalah tokoh yang berpengalaman dalam menggerakkan Muhammadiyah yang sedang tumbuh dan berkembang. Pada saat itu, ia merupakan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Pekalongan dan Pekajangan. Pertimbangan lain adalah bahwa AR. Sutan Mansur adalah tokoh Minangkabau sendiri yang secara sosiologis sangat mengetahui dan memahami masyarakat Minangkabau. Bersamaan dengan itu pula AR. Sutan Mansur selain menantu, juga murid kenamaan dari Abdul Karim Amrullah, sehingga diharapkan dukungan ulama berpengaruh kuat asal ranah Minang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya dukungan ulama tersebut, tentunya ulama lain yang sama-sama mengemban misi pembaruan juga akan melakukan dukungan yang sama.

Berbagai pertimbangan itu, tampaknya menjadi sebuah kenyataan bahwa setelah AR. Sutan Mansur melakukan tugas-tugasnya di Minangkabau, Muhammadiyah semakin kuat dan berkembang. Begitu pula dukungan dari ulama yang berpikiran modernis—ulama kaum muda—bukan hanya Abdul Karim Amrullah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari ulama lain seperti M. Jamil Jambek, Daud Rasyidi, Ibrahim Musa dan lain-lain. Sama dengan Abdul Karim Amrullah, dukungan M. Jamil Jambek dan Ibrahim Musa sangat menentukan perjalanan Muhammadiyah. M. Jamil Jambek memberikan fasilitas berupa suraunya untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah di Bukittinggi. Begitu pula halnya dengan Ibrahim Musa memberikan dukungan penuh dengan suraunya di Parabek. Semua dukungan ini, tentunya tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan oleh AR. Sutan Mansur sebagai tokoh Muhammadiyah yang sangat memahami kondisi sosiologis masyarakat Minang. Bukan hanya dari ulama modernis ini, Muhammadiyah juga mendapat dukungan kuat dari ninik mamak. Dalam perjalanannya, tidak sebatas hanya dukungan para ninik mamak yang ada pada Sungai Batang saja melainkan hampir dapat dukungan dari semua ninik yang ada di nagari-nagari lain di Minangkabau. Hal itu, ditandai dengan

meratanya cabang-cabang Muhammadiyah dipimpin oleh komponen yang memiliki peran penting di nagari-nagari.

Peneguhan dan pengembangan Muhammadiyah yang digawangi oleh AR. Sutan Mansur ketika memimpin Muhammadiyah melakukan pendekatan yang berbeda dengan tokoh-tokoh ulama sebelumnya. Ia berupaya untuk berada di atas pada semua pihak. Dalam hal itu, sosiologis masyarakat tampaknya sangat dipahaminya di mana saat itu pergulatan pemikiran antara kaum tua dan kaum muda masih berlangsung sebagai kelanjutan dari gerakan pembaruan yang digerakan oleh beberapa ulama sebelumnya. Begitu pula pertentangan antara ideologis masih sangat tajam terutama dengan kaum komunis. Oleh sebab itu, AR. Sutan Mansur mengambil pendekatan yang lebih santun, merangkul semua pihak, ramah, toleran tetapi tidak kehilangan prinsip. Menghormati semua kalangan, dan tidak mudah mengambil kesimpulan. Dalam menghadapi masalah ia tidak menunjukkan sikap yang reaktif, hati-hati tetapi taktis sehingga putusan yang diambilnya mengena.

Pendekatan ini dalam sejarahnya, menunjukkan keberhasilan yang berdampak pada pengembangan Muhammadiyah. Ia lebih mengutamakan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dan bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk yang lebih kongrit daripada menyinggung persoalan-persoalan khilafiyah di mana berpuluh-puluh tahun telah menguras energi umat di sekitar fur'iyah antara kaum tua dan kaum muda. Hal itu, bukan berarti tidak konsisten menjalankan misi dan paham Muhammadiyah yang sebagian besarnya berbeda dengan paham agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat umumnya. Sikapnya itu, terlihat benar di dalam beberapa tulisan yang bisa dibaca hingga sekarang. Penekanannya lebih kepada ketauhidan bukan kepada *fiqhiyah*.

Dalam pada itu, AR. Sutan Mansur sendiri di Jawa sepeninggal dari Ahmad Dahlan dipandang sebagai tokoh kunci dalam Muhammadiyah terutama dalam konteks ideologinya. Bahkan jauh dari itu ada yang berpendapat bahwa roh tajdid dalam bentuk puritan menjadi terkristal setelah tokoh Minang masuk dan menjadi tokoh penentu dalam Muhammadiyah.¹²⁸ Tokoh Minang yang dimaksud tentunya adalah

¹²⁸ Ahmad Sarwono bin Zahir dan Shofrotum binti al-Aydrus, *KH.R.Ng.*

AR. Sutan Mansur karena ialah tokoh yang pertama dan utama dari Minang yang ikut menuntun arah pergerakan Muhammadiyah untuk seluruh nusantara. Khusus di Minangkabau kehadirannya membawa pandangan dan suasana baru dalam masyarakat Minangkabau. Ia selain memiliki kemampuan dalam memahami sosiologis masyarakat, sekaligus mengguncangkan masyarakat Minang karena pemikiran pembaruan keagamaan yang ia bawa. Pemahaman keagamaannya yang sudah menjadi satu dalam Muhammadiyah, meskipun memiliki kemiripan dengan misi yang dikembangkan oleh ulama kaum muda, tetapi dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya, kasus tentang kedudukan perempuan. Muhammadiyah membolehkan perempuan berpidato di depan publik, sedangkan Abdul Karim Amrullah justru melarangnya. Begitu pula dalam pendistribusian zakat fitrah. Dalam Muhammadiyah ketika itu, zakat fitrah akan lebih baik dikumpulkan terlebih dahulu oleh suatu kepanitiaan setelah itu baru didistribusikan kepada orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan atau tergolong yang berhak menerimanya. Sementara Abdul Karim Amrullah berpendapat zakat fitrah itu mesti langsung diserahkan dari orang yang berzakat kepada orang yang dipandang berhak menerimanya.

Hal ini menunjukkan bahwa antara Muhammadiyah dan ulama kaum muda selain memiliki kesamaan pemahaman, tetapi pada sisi lain juga terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Hanya saja, pendapat Muhammadiyah bersifat kolektif, sedangkan pendapat ulama muda tersebut sebatas pendapat pribadi. Dalam hal itu, AR. Sutan Mansur sendiri pernah dikecam oleh Abdul Karim Amrullah dengan mengungkapkan istilah “gila’ sebagaimana yang digambarkan oleh Hamka bahwa “Ayah saya sendiri pernah menuduhnya “gila”.¹²⁹ Hal itu, telah mengguncang Minangkabau. Dalam hal itu, pengajiannya berbeda dengan ulama lain. Yang diketuk dan dihunjamnya adalah lubuk hati dan perasaan orang yang mendengarkannya. Ia menghindari pembicaraan tentang persoalan-persoalan khilafiyah

Ahmad Dahlan *Pembaru, Pemersatu dan Pemelihara Tradisi Islam* (Yogyakarta: Matan, 2013), hlm. 174.

¹²⁹ Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Panjimas, 1994), hlm. 3.

yang bisa menyulut persoalan. Dengan model yang digunakannya, orang dari berbagai kelompok merasa tidak tersinggung dengan yang disampaikannya tetapi targetnya dapat tercapai tanpa menimbulkan pro dan kontra di tengah jamaahnya. Bagi yang mendengarkan tablighnya mesti “lekat”, terutama dalam golongan muda.¹³⁰

Kemampuan dan kelebihan interpersonal yang dimilikinya baik di dalam membaca situasi, meyakinkan orang lain akan kebenaran jalan yang ditempuhnya maupun ketenangan menghadapi musuh yang agresif, AR. Sutan Mansur mampu memperluas dan mengembangkan organisasi dan pengaruh Muhammadiyah di Minangkabau. AR. Sutan Mansur dalam kapasitasnya sebagai tokoh Muhammadiyah oleh ninik mamak sangat dihargai dan dihormati. Hal itu dilakukannya dengan sepenuh hati. Sebaliknya AR. Sutan Mansur sangat menghormati ninik mamak. Dalam pandangannya, ninik mamak menjadi juru kunci dalam penerimaan Muhammadiyah di berbagai nagari. Bilamana ninik mamak dapat didekati dan dirangkul menjadi anggota Muhammadiyah, maka jalan dan gerakan Muhammadiyah akan mudah dan lancar bahkan untuk keperluan itu AR. Sutan Mansur mendalami adat kepada Muhammad Amin Datuk Pengulu Besar. Justru, yang tekankannya adalah pentingnya meluruskan tauhid dan merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam bentuk yang lebih nyata dengan corak dan gayanya sendiri sehingga gerakan yang dibangunnya tidak menimbulkan resistensi dan penolakan dari pihak tokoh adat.

Cara dan pendekatan tersebut tampak berhasil dan sukses dengan banyaknya para ninik mamak yang menyatakan dukungan dan bahkan masuk dalam lingkaran pimpinan Muhammadiyah di berbagai daerah. Dalam hal itu, AR. Sutan Mansur jarang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang produktif. Apalagi akan menyulut tidak simpatinya kaum adat terhadap Muhammadiyah. Keberhasilan AR. Sutan Mansur dalam mengembangkan Muhammadiyah, tentunya tidak terlepas pula dari keterbukaan para ninik mamak yang ada di nagari-nagari. Hampir sebagian besarnya pimpinan dan pendukung gerakan Muhammadiyah di nagari-nagari berasal dari ninik mamak dengan gelar datuk. Sekedar untuk menyebutkan para datuk yang

¹³⁰ *Ibid.*

menjadi pimpinan Muhammadiyah semasa itu, di antaranya; Datuk Sati di Pandan, Datuk Singo Mangkuto di Sigiran, Datuk Rajo Endah Nan Tinggi di Tanjungsani, Engku Muhammad Amin Datuk Pengulu Besar, Datuk Rangkayo Marajo di Batipuh Baruh, Datuk Majo Indo, Datuk Mangkuto Majolelo dan Datuk Bungsu di Simabur, Datuk Rajo di Langit dan Datuk Mangulak Basa di Bukittinggi, Datuk Makhudum di Sarabayo Lubuk Basung dan seterusnya.¹³¹ Hal ini menunjukkan bahwa ninik mamak di Minangkabau memiliki peran penting dalam mengembangkan Muhammadiyah sehingga hampir di setiap nagari Muhammadiyah dapat hidup dengan subur tanpa terpengaruh oleh propaganda komunis.

Hal yang sama juga dilakukan kepada ulama baik tergolong dari kaum tua maupun muda. Banyak kalangan ulama yang menyatakan empatinya kepada AR. Sutan Mansur meskipun tidak masuk ke dalam Muhammadiyah. Sebagiannya bukan hanya menerima secara pasif melainkan sebagian besar di antaranya aktif mendukung dan mengembangkannya. Ada yang menjadi bagian dari pimpinan dan bagian lain meskipun tidak menjadi pimpinan tetapi dengan posisinya yang strategis di tingkat kenagarian mereka melapangkan bagi jalan dan perkembangan Muhammadiyah. Misalnya, di Padang Panjang sendiri, Bukittinggi, Lubuk Basung dan tempat-tempat lain di Minangkabau yang menjadi tulang punggung Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Dengan pilihan model ini, ulama tua dan ulama muda yang sebelumnya sulit untuk dikompromikan, keduanya bisa menerima AR. Sutan Mansur. Ia sangat dihargai oleh Syaikh M. Jamil Jaho dan Syaikh M. Zain Simabur sebagai ulama dari kaum tua, yang pernah menjadi ketua Cabang Muhammadiyah. Apalagi oleh kaum ulama muda seperti Abdul Karim Amrullah, Syaikh Jamil Djambek, Syaikh Daud Rasyidi dan seterusnya. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh AR. Sutan Mansur dan tidak dimiliki oleh orang lain termasuk ulama-ulama sebelumnya adalah kekuatan menarik orang dalam bertabligh.

Dalam hal terjadinya dua fiksi paham agama di Muhammadiyah

¹³¹ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 31 dan Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 23.

terutama ketika cabang Muhammadiyah Padang Panjang dan Simabur dipimpin oleh Inyiek Jaho dan M. Zain yang berpaham agama kurang sejalan dengan prinsip paham agama Muhammadiyah dan juga ulama kaum muda, sudah diupayakan mempertemukannya oleh Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dalam rentang waktu 1923-1927. Akan tetapi, usaha tersebut belum berhasil dilakukan. Pada waktu itu, terjadi polarisasi paham agama, paling tidak bagi pimpinan Muhammadiyah terutama sejak Muhammadiyah dipimpin oleh Inyiek Jaho dan M. Zain. Keduanya sebagaimana dijelaskan di atas mengembangkan paham agama yang kurang sejalan dengan prinsip dasar paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Akan tetapi, hal itu cepat disadari kedua ulama tersebut sehingga secara berangsur-angsur mundur dari kepemimpinan Muhammadiyah.

Ketika AR. Sutan Mansur telah pulang berupaya untuk kembali mendekati ulama yang dimaksud termasuk pula kepada ulama kaum muda. Ulama kaum tua menunjukkan simpati dan hormat terhadap apa yang dilakukan oleh AR. Sutan Mansur, tetapi bukan untuk perubahan kepada paham agama yang dikembangkan oleh kedua ulama tersebut. Begitu pula yang ditunjukkan oleh ulama kaum muda. Akan tetapi ulama kaum muda menyampaikan sikap dan pendiriannya yang tegas dan agaknya sulit dikompromikan dengan ulama kaum tua. Dukungan ulama kaum muda mulai membatasi diri dalam memberikan dukungannya hanya terhadap Muhammadiyah yang berada dilokasi-lokasi tertentu saja sesuai dengan tempat domisili masing-masing dan sekitarnya. Abdul Karim Amrullah misalnya, menyatakan dukungan kepada Muhammadiyah di Sungai Batang dan Syaikh M. Jamil Jambek hanya memberikan dukungan kepada Muhammadiyah di Bukittinggi.¹³² Hal itu, mengisyaratkan ketidaksetujuan ulama kaum muda terhadap Muhammadiyah sendiri, tetapi karena digerakan dan yang merangkul adalah orang yang selama ini dipercayai oleh Abdul Karim Amrullah, yaitu Saalah sendiri dan beberapa tokoh muda lainnya. Kritik tersebut itu disampaikan dengan bahasa yang tidak fulgar, tetapi santun dan menyejukan. Selain itu, mereka juga sangat berkeyakinan bahwa

¹³² RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah...op. cit.*, hlm. 102.

kepemimpinan dan pengaruh ulama kaum tua tidak akan bertahan lama karena paham agama yang dikembangkannya kurang sejalan dengan yang digariskan oleh Muhammadiyah. Keyakinan itu, betul-betul menjadi suatu kenyataan ketika kedua ulama tersebut pulang dari kongres Muhammadiyah dengan tidak lagi mengaktifkan diri pada Muhammadiyah. Protes itu, sesungguhnya juga dapat dimaklumi karena di Padang Panjang dipimpin oleh ulama kaum tua yang berbeda dengan cara dan pandangannya.

Setelah kepemimpinan Muhammadiyah di Padang Panjang dan Simabur tidak lagi dipimpin oleh ulama kaum tua, ulama-ulama kaum muda yang selama ini menjauh dari Muhammadiyah mulai menyatakan simpati, membantu, memberikan masukan dan bahkan membela Muhammadiyah secara terbuka meskipun tidak masuk dalam keanggotaan Muhammadiyah. Sebutlah Abdul Karim Amrullah kembali menyatakan dukungan penuh terhadap Muhammadiyah. Begitu pula Syaikh Muhammad Jamil Jambek, bahkan suraunya di Tengah Sawah Bukittinggi dijadikan markas Muhammadiyah Bukittinggi.¹³³ Apalagi sejak terjadinya perubahan pemikiran dan aktivitas Zain Jambek secara drastis dari pengaruh komunis menjadi Muhammadiyah. Bahkan ia termasuk salah seorang ujung tombak dalam mengembangkan Muhammadiyah. Kedua ulama tersebut menurut Hamka adalah pengayom dan pelindung Muhammadiyah yang menyebabkan ninik mamak dalam Nagari Kurai Lima Jorong dan Nagari Kamang menjadi pencinta Muhammadiyah.¹³⁴ Begitu pula di Surau Inyiek Jambek di Tengah Sawah banyak yang menjadi jamaahnya di antara anggota Muhammadiyah. Kemudian ditopang pula oleh Mohammad Siddik, Kali Birugo sebagai kadi dan pernah menjadi ketua Cabang Muhammadiyah Bukittinggi.¹³⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa dukungan kedua ulama tersebut sangat penting artinya bagi perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau dan Sumatra umumnya.

Kepiawaian AR. Sutan Mansur bukan hanya berhasil membawa

¹³³ Zulqayyim, *Boekittiggi Tempo Doeloe*, Padang: Andalas University Press), hlm. 118.

¹³⁴ Hamka, *Muhammadiyah...*, *op. cit.*, hlm. 35.

¹³⁵ *Ibid.*

ninik mamak dan ulama lain, kader-kader komunis yang telah dibina sejak lamapun berhasil dirangkul masuk ke dalam Muhammadiyah. Mereka menjadi orang Islam yang taat dan bahkan menjadi ujung tombak bagi gerakan Muhammadiyah meskipun sebelumnya memusuhi dan menentang Muhammadiyah. Sekedar untuk menyebut nama misalnya, M. Zein Jambek, Abdullah Kamil, Abdul Malik Sidik dan lain-lain.¹³⁶ Semua yang disebutkan itu, awalnya merupakan orang-orang yang pengaruh komunisnya sudah sangat kental, tetapi mereka kembali dan bergabung dengan Muhammadiyah. Mereka bagaikan Umar bin al-Khathab. Pada mulanya menjadi orang yang paling ditakuti dan berperan dalam menghalangi Islam, tetapi pada saat sudah masuk ke dalam Islam menjadi orang yang berada digaris depan dalam perjuangan Islam. Begitu pula orang-orang yang disebutkan di atas, pada mulanya mereka adalah kader-kader komunis yang sangat intens mempropagandakan Muhammadiyah, tetapi setelah masuk mereka pula yang berada digaris depan perjuangan dan membela Muhammadiyah mati-matian.

Usaha AR. Sutan Mansur dalam mengembangkan Muhammadiyah bukan hanya terbatas kepada merangkul pihak-pihak yang selama ini memusuhi Muhammadiyah. Bagi kesinambungan gerakan Muhammadiyah AR. Sutan Mansur menyiapkan kader-kader militan yang akan diproyeksikan menjadi pimpinan Muhammadiyah ke depan baik untuk tingkat lokal maupun nasional. Mereka direkrut dari hampir seluruh daerah di Minangkabau. Sekedar untuk menyebut nama, misalnya Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Hitam Sutan Mudo, Udin, Muhammad Ilyas, Rasyid Idris Dt. Sinaro Panjang, Haji Khatib Kubang, Samik Ibrahim, Imam Arifin, Kahar Thaher, Darwis Muin, H. Abu Samah, Ya'kub Rasyid.¹³⁷ Begitu pula kader-kader militan dari kalangan perempuan. Misalnya, Fathimah Latif, Khadijah Idrus, Hindun Sahih, Cek Ani Kesuma, Jawanis Syarif, Nurni Zain, Maimunah, Rohani, Rukayah Rasyid, Rukiah Syua'ib, Daniah Siddik, Fathimah Jalil, Hafsa Amrullah, Intan Fathimah, Cendrawati dan Ramisan, dan lain-

¹³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 81.

¹³⁷ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 26.

lain.¹³⁸ Setelah melalui gembleran AR. Sutan Mansur dan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah lainnya, semua tokoh-tokoh tersebut tersebar di berbagai daerah di Minangkabau sehingga Muhammadiyah menjadi hidup dan bergerak secara dinamis. Mereka semua diberikan ruang dan dibukakan jalan untuk berkembang sehingga potensi yang terdapat pada masing-masing dengan harapan dapat mengembangkan Muhammadiyah di kemudian hari.¹³⁹

Begitu pula bagi pengembangan organisasi, meskipun melalui jalur Sungai Batang, Muhammadiyah tumbuh dan berkembang, tetapi di Padang Panjang dan daerah lainnya di Minangkabau mendapat tantangan berat dari berbagai pihak. Sejak adanya pengakuan berupa legalitas dari Pengurus Besar Muhammadiyah melalui keputusan (Besluit) Nomor: 36 tanggal 20 Juli 1927,¹⁴⁰ Muhammadiyah Padang Panjang terus bergerak melakukan pengembangan. Cabang ini merupakan tonggak sejarah atau *starting poin* pergerakan Muhammadiyah di Minangkabau/Sumatra Tengah.¹⁴¹ Bahkan bukan hanya untuk Minangkabau, pengakuan tersebut awal dari pergerakan Muhammadiyah untuk nusantara karena dari sini kemudian Muhammadiyah tidak hanya terpusat di Jawa melainkan menjadi mengindonesia. Seterusnya Muhammadiyah semakin maju dengan masuknya banyak kaum pembaru lain serta menyebar keseluruh penjuru nusantara.¹⁴² Dalam hal itu, tempat yang menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah menjadi agenda utama karena pada saat itu belum ada tempat yang secara khusus dimiliki Muhammadiyah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya terutama ketika Tabligh Muhammadiyah dilaksanakan di rumahnya Abdul Karim Amrullah. Selain sekretariat pimpinan Muhammadiyah, juga diprogramkan mendirikan lembaga pendidikan. Program ini baru bisa direalisasikan setahun kemudian tepatnya diresmikan pada 1 Juli 1927 dengan

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 81.

¹⁴⁰ Marjohan dkk, *op. cit.*, hlm. 3.

¹⁴¹ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 107.

¹⁴² Mochammad Ali Shodiqun, *op. cit.*, hlm. 48.

nama *Hollandsche Inladers School* (HIS) Med de Quran. Sedangkan proses belajar mengajarnya dimulai pada 2 Juli 1927 dengan dasar belasan murid. Sedangkan gurunya dikirim dari Pengurus Besar Muhammadiyah Yogyakarta, di antaranya Prawoto Adiwijoyo.¹⁴³

Lembaga pendidikan ini mengadopsi dua sistem pendidikan yang sedang berjalan di Indonesia pada umumnya, yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kepentingan persyarikatan Muhammadiyah sendiri. Pada sekolah yang dikelola pemerintah umumnya mengajarkan bidang-bidang ilmu pengetahuan umum tanpa memasukan ilmu agama di dalamnya. Sebaliknya, sistem pendidikan yang diterapkan ulama atau tokoh pendidikan Islam yang berlaku pada madrasah dan pesantren sama sekali pun tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Oleh sebab itu, Muhammadiyah mengadopsi keduanya, di mana pendidikan umum dan pendidikan agama disejalkan tanpa mengkotomi kedua disiplin ilmu tersebut. Kemudian bahasa Belanda pun diajarkan di sekolah ini, yang oleh pihak pesantren atau madrasah diharamkan. Di sinilah kelebihan sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Sekolah yang dimaksud di tempatkan di belakang penjara, tanah milik orang Belanda, Roks. Pada mulanya tanah tersebut disewa sejumlah f75 perbulannya.¹⁴⁴

Kemudian pada 1930, tanah sewaan tersebut dibeli seharga F.300,-. Lokasi ini sekarang lebih dikenal dengan Kauman Padang Panjang. Kauman kedua setelah Kauman di Yogyakarta.¹⁴⁵ Dari perkampungan kauman ini pulalah selanjutnya Muhammadiyah dikembangkan baik dalam konteks keorganisasian maupun pembibitan sumber daya manusia, yang menyebarkan Muhammadiyah hampir keseluruhan pelosok

¹⁴³ Marjohan dkk, *op. cit.*, hlm. 3.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm.107. Perbedaan Kauman Padang Panjang dengan Kauman Yogyakarta terletak pada ikatan. Masyarakat Kauman Yogyakarta terbentuk oleh adanya ikatan keagamaan, pertalian darah, dan jabatan kepegawaian sebagai abdi dalem. Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 18. Sedangkan masyarakat Kauman Padangpanjang terbentuk bukan karena pertalian darah dan jabatan kepegawaian melainkan murni karena ikatan persyarikatan Muhammadiyah.

tanah air bahkan ke negara-negara lain. Dalam bentuk keorganisasian Muhammadiyah Minangkabau melakukan perluasan bukan hanya terbatas pada wilayah Minangkabau saja melainkan sampai ke provinsi tetangga seperti Sumatra Utara dan Aceh.

Begitu pula dalam perluasan dan pengembangan organisasi, pimpinan Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang, dalam artian cabang dari Muhammadiyah Pusat Yogyakarta, bukan seperti cabang-cabang sebelumnya yang berarti cabang Muhammadiyah di Sungai Batang di Maninjau.¹⁴⁶ Walaupun merupakan cabang, tetapi memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas dan mengambil kebijaksanaan pemilihan pimpinan cabang selama tidak bertentangan dengan pedoman pokok Muhammadiyah Pusat.¹⁴⁷

Di antara cabang yang berhasil dibentuk pada periode ini antara lain; *Pertama*, cabang Muhammadiyah Simabur resmi didirikan pada 27 Juli 1927 dipelopori oleh Dt. Bungsu, Mulkan St. Maradjo, H. Mukhtar, Dt. Simarajo dan lain-lain. Kemudian menetapkan M. Zain sebagai ketua cabang yang pertama. *Kedua*, cabang Muhammadiyah Bukittinggi sudah mulai dibentuk sekaligus organisasi 'Aisyiyah dan Kepanduan Hizbul Wathan, pada mulanya mengambil tempat di surau Inyiek Jambek, di bawah pimpinan Hitam Sutan Mudo. Kemudian resmi dapat pengakuan pada 20 Juli 1928 dengan pimpinan pertamanya M. Kamil, H. M. Shiddiq, H. Abu Samah, Dt. Mangulak Basa, Dt. Rajo Dilangik, TM. Mantari dan lain-lain. *Ketiga*, cabang Muhammadiyah Haru Andalas Padang didirikan pada 20 Mei 1928 dengan dipelopori oleh Pakieh Shaleh, Syukur Bakri dan Ismail Syamsuddin. *Keempat*, Cabang Muhammadiyah Kuraitaji pada 25 Oktober 1929 dipelopori oleh Oedin, S.D. M. Ilyas, HM. Noer, H. Harun el-Ma'aniy, M. Luth Hasan, H. Umar Ganti, dan lain-lain. *Kelima*, Cabang Muhammadiyah Lintau Buo, Tanah Datar didirikan pada 17 Mei 1932 dengan dipelopori oleh M. Said Dt. Bandaro Ratieh, M. Yazid dan lain-lain. *Keenam*, Cabang Muhammadiyah Payakumbuh sudah mulai didirikan sejak 21 Desember 1928.¹⁴⁸ Kemudian disusul

¹⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 83.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 83.

dengan cabang Suliki didirikan pada 5 Desember 1932 dipelopori oleh H.M. Khalil, Darwa Muin. H. Mansur, H. Darwas dan lain-lain. *Ketujuh*, Cabang Muhammadiyah Payakumbuh didirikan pada 5 Desember 1932. Dipelopori oleh Syaikh Mohammad Arsyad, St. Mancayo dan lain-lain. *Kedelapan*, Cabang Muhammadiyah Rao, Pasaman didirikan pada 14 Desember 1932 dipelopori oleh H. Moehammad Husin, H. Oesmar Moehammad, H. Zoelkifli, Syafril, H. Djamaris, Hj. Nurliasdi dan lain-lain. *Kesembilan*, Cabang Muhammadiyah Sulit Air, Solok didirikan pada 14 Desember 1932 dengan diprakarsai oleh Dt. Boengsoe, Kahar Thaher, Manda Ali, Imam Arifin dan lain-lain. *Kesepuluh*, Cabang Muhammadiyah Koto Tengah, Padang Luar Kota didirikan pada 17 November 1935 dengan dipelopori oleh A. Gani Dt. Rajo Alam dan lain-lain. *Kesebelas*, Cabang Muhammadiyah Matur, Luhak Agam didirikan pada 22 September 1936 dipelopori oleh H. Idris, Imam Marajo dan lain-lain. *Kedua belas*, Cabang Muhammadiyah Kubung, Solok didirikan pada 4 Februari 1937 dipelopori oleh Imam Arifin, Khahar Thaher. M. Idris dan lain-lain. *Keempat belas*, cabang Muhammadiyah Limo Kaum, Batusangkar pembentukannya sudah dimulai sejak 13 Desember 1928¹⁴⁹ dan baru dapat pengakuan sejak 1937 yang diprakarsai oleh RI. Dt. Sinaro Panjang, AM. Burhani dan lain-lain.¹⁵⁰ Sedangkan perluasan ke provinsi tetangga secara organisasi dilakukan Pimpinan Muhammadiyah Minangkabau ke Sumatra Utara. Berdirinya Muhammadiyah Sumatra Utara berawal dari berdirinya Muhammadiyah Cabang Padang Panjang di Medan sekitar 1929.¹⁵¹ Di samping itu, Muhammadiyah Minangkabau juga mengirim para aktivisnya untuk mengembangkan Muhammadiyah ke berbagai pelosok tanah air.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Muhammadiyah Minangkabau berkembang dengan baik dan semarak di berbagai daerah di Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan Muhammadiyah terus mengalami kemajuan dan perkembangan meskipun tantangan yang dihadapi semakin kuat. Ini tentunya, berbanding terbalik dengan yang diungkapkan Pusat Penelitian

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 109-110.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 107.

Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Muhammadiyah di Sumatra Barat sejak 1930 terjadi kemunduran. Penilaian kemunduran ini ditandai dengan dipecatnya beberapa orang anggota Muhammadiyah yang bersemangat dan aktif, karena terlibat politik dan mereka mendapat penampungan dalam PSII, Sumatra Thawalib dan Permi.¹⁵² Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa Muhammadiyah tidak mengalami kemunduran pada 1930-an, Hamka pernah pula mengkritisi tulisan M.D. Mansoer yang juga menyatakan bahwa Muhammadiyah sejak 1930 mengalami kemunduran. Menurut Hamka, Muhammadiyah pada masa itu tidak mengalami kemunduran karena Muhammadiyah pada masa itu, apalagi sejak dilaksanakannya kongres di Bukittinggi semakin berkembang ke nagari-nagari. Bahkan karena begitu berkembangnya muncul istilah “memuhammadiyahkan nagari dan menagarikan Muhammadiyah”. Dalam pada itu, tidak ada pula dalam Muhammadiyah budaya pecat memecat. Hamka dalam tulisannya mengungkapkan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak ada orang atau pimpinan Muhammadiyah yang dipecat¹⁵³ meskipun kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Muhammadiyah itu sendiri.

Meskipun begitu, bukan berarti Muhammadiyah tidak mengalami tantangan berat dari berbagai pihak terutama dari orang atau kelompok yang antipati terhadap Muhammadiyah baik secara kultural maupun struktural. Muhammadiyah yang dikembangkan melalui jalur Padang Panjang menghadapi tantangan berat terutama dari kelompok komunis karena beberapa komunitas dan pada daerah-daerah tertentu, komunis memiliki pengaruh kuat di dalamnya sehingga perjalanan Muhammadiyah tidak lancar dan sering tersendat. Bukan hanya di Padang Panjang, penumbuhan dan perjalanan Muhammadiyah pada awalnya penuh dengan tantangan dan rintangan.¹⁵⁴ Kadangkala tantangan tersebut sulit diatasi. Akan tetapi, masalah tersebut tidak

¹⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 81.

¹⁵³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 62.

¹⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 79.

menjadi penghambat bagi aktivis Muhammadiyah untuk bergerak bahkan semakin berat tantangan yang datang semakin kukuh pula perjuangan untuk membesarkan Muhammadiyah.

Berbeda dengan di Padang Panjang dan daerah lainnya, Muhammadiyah melalui jalur Sungai Batang terus bergerak dan berkembang ke arah yang semakin menggembirakan. Tantangan yang dihadapi tidak seberat daerah-daerah lainnya. Di sini Muhammadiyah jangkauannya tidak hanya kepada laki-laki melainkan diperluas kepada perempuan dengan mendirikan 'Aisyiyah, yaitu suatu organisasi wanita yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Anggota-anggotanya yang pertama adalah para istri dari pemimpin-pemimpin Muhammadiyah Sungai Batang sendiri. Kemudian sekembali istri AR. Sutan Mansur pada pertengahan 1927 dari Pekalongan, 'Aisyiyah mulai berdiri sendiri dan banyak membantu Muhammadiyah selanjutnya.¹⁵⁵Sedangkan Hizbul Wathan sebagai organisasi kapanduan didirikan sebelum 'Aisyiyah berdiri diawal 1927 dengan tujuan memajukan pendidikan pemuda-pemuda dan anak-anak di luar sekolah agar berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara yang didasarkan pada ajaran Islam.¹⁵⁶ Organisasi sayap Muhammadiyah ini pada masa itu menjadi tulang punggung pergerakan di mana anggotanya lebih banyak orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak meskipun dalam anggaran dasarnya menitikberatkan pada pemuda-pemuda yang berumur 18 tahun kebawah.

Sebelum pembentukan Hizbul Wathan pada 1926 Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan di Muara Pauh dekat Bandar Air Sungai Ligin. Bangunan sekolah tersebut berada dilahan harta pusako tinggi suku Caniago yang diizinkan penggunaannya oleh Muhammadiyah dengan membayar ganti rugi sejumlah 700 Gulden.¹⁵⁷Harta pusako tinggi sebagaimana diketahui bahwa dalam adat tidak boleh dipindahtanggankan karena merupakan hak bersama hak seluruh anggota kaum. Masing-masing anggota kaum tidak boleh memilikinya secara hak pribadi, tetapi masing-masing

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁵⁷ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 81.

dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh penghulu dari kaum itu.¹⁵⁸ Berdasarkan pada fatwa Abdul Karim Amrullah yang menyatakan bahwa harta pusako tinggi yang digunakan untuk kepentingan umum bagi kegiatan belajar agama dengan tidak memakai batas waktu dapat dibenarkan dalam agama. Pemindahan tangan itu dipersyaratkan selama Muhammadiyah masih bergerak untuk kepentingan agama Islam. Jika sudah tidak demikian lagi, maka aset tersebut kembali kepada suku Caniago. Dengan demikian hak tanah tetap menjadi milik pusako tinggi Caniago, sedangkan pemanfaatannya digunakan oleh Muhammadiyah.¹⁵⁹ Dalam adat diistilahkan dengan adat diisi, lembaga dituang, adat tetap berdiri agamapun maju. Hal ini tidak bertentangan dengan penggunaan harta pusako di Minangkabau yang menyatakan bahwa penggunaannya hanya untuk keperluan rumah gadang kebocoran, gadis besar belum bersuami, mayat terbujur di tengah rumah dan pembangkit batang terendam.¹⁶⁰

Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi Muhammadiyah di Sungai Batang. Misalnya, ketika Madrasatul Mubalighin tersebut sudah dalam proses pembangunan dan masa untuk pendaftaran siswa akan dimulai, persoalannya muncul setelah pengumuman disebarakan kepada seluruh kenagarian X Koto Maninjau, Matur dan Lawang. Pengumuman tersebut dipersoalkan ninik mamak karena terdapat bahasa yang dipandang kurang tepat dan kurang santun bahkan ninik mamak menilainya merendahkan martabat ninik mamak sendiri dengan menggunakan kata-kata “diserukan kepada sekalian engku-engku ninik mamak, cerdai pandai dan orang-orang terkemuka, supaya mengirimkan anak-anak muda dinegeri mereka untuk belajar di Madrasatul Mubalighin.¹⁶¹ Istilah “sekalian” dipandang oleh ninik mamak merendahkan dan menghina martabatnya karena itu pengumuman dipersoalkan dan

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 219.

¹⁵⁹ Hamka, *Muhammadiyah...*, *Ibid*, hlm. 82.

¹⁶⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 223.

¹⁶¹ Hamka, *Muhammadiyah...*, *op. cit.*, hlm. 82.

sampai disidangkan di balai-balai adat. Namun, persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara-cara ninik mamak yang lebih bijak sehingga lembaga pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam sejarahnya, sekolah ini pada awal membukanya memiliki murid sejumlah 235 orang yang dididik oleh guru terutama yang sudah selesai dari Sumatera Thawalib seperti Muhammad Yatim Sutan Basa.¹⁶² Sejalan dengan itu, di nagari-nagari Minangkabau mulai pula merintis sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga pepatah adat yang menyatakan bahwa adat sepanjang jalan. Menurut jalan lama tanda adanya sebuah nagari adalah dengan adanya balairung nan saruang, masjid nan sebuah dan ditambah dengan jalan baru sekolah nan selokal. Dalam hal ini Muhammadiyah menyempurnakan adat dalam susunan nagarinya selama setengah abad.¹⁶³

Pengurus Besar Mengunjungi Minangkabau

Muhammadiyah di luar Jawa pasca diakuinya cabang di Padang Panjang semakin berkembang. AR. Sutan Mansur, Datuk Bareno dan Fathimah yang ditugaskan secara khusus oleh Pengurus Besar Muhammadiyah terus melaporkan perkembangannya termasuk pada beberapa kali pada kongres Muhammadiyah. Laporan itu, membuat Pengurus Besar Muhammadiyah merasa perlu mendapatkan perhatian khusus karena perkembangannya begitu cepat melebihi daripada di Yogyakarta sendiri. Dalam hal itu, Pengurus Besar menugaskan Fachrodin untuk melihat secara dekat perkembangan yang terjadi termasuk daerah di sekitarnya seperti Aceh, Medan dan seterusnya. Kunjungan Fachrodin tersebut dilaksanakan pada bulan April 1927. Ia pertama kali tiba di Padang pada 25 April 1927. Ketika sampai di Padang, Fachrodin dijemput di Hotel Islam oleh Sutan Mansur, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Sutan Muda dari Padang Panjang dan H.M. Mukhtar dari Ranting (groep) Sibayur.¹⁶⁴ Selain itu, juga dijemput

¹⁶² RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 99.

¹⁶³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 82.

¹⁶⁴ Verslag dengan Ringkasan Djalan Oetoesan H.B. Moehammadijah Saudara Fachrodin, Hindia Timur, dikutip dari Soerat-Soeratnya H. Fachrodin, yang dikirim pada H.B. Moehammadijah, *Suara Muhammadiyah*, No. 5/IX/1927, 32-35.

oleh Patih Dt. Tumenggung, tokoh Minang yang sudah kenal baik ketika di Jawa. Kemudian pada sore Rabu, Fachrodin didampingi oleh semua tokoh tersebut menghadap kepada Resident Padang untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke Sumatra Barat sehubungan dengan permintaan cabang dan ranting-ranting Muhammadiyah di Sumatra Barat kepada H.B. Muhammadiyah Hindia Timur.¹⁶⁵Selain memberitahukan kedatangannya, Fachrodin juga meminta agar pemerintah dapat mengizinkan rapat-rapat di cabang dan ranting-ranting supaya tidak ada gangguan dari militer yang sedang menjaga. Permintaan itu izin tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial yang bertindak lebih represif terhadap organisasi-organisasi yang hidup dalam masyarakat dipicu oleh pemberontakan Silungkang sebelumnya yang didalangi oleh pihak komunis. Begitu pula ketika tiba di Padang Panjang, sebelum melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu melaporkan dan menyampaikan kedatangannya dan surat dari Residen Padang kepada Asisten Residen Padang Panjang. Selama di Padang Panjang Fachrodin menginap di rumah Sergeant Djamia.¹⁶⁶

Setelah mendapat izin dari pemerintah kolonial, Fachrodin di bawa oleh AR. Sutan Mansur dan pimpinan lainnya berkeliling melihat secara dekat perkembangan cabang-cabang Muhammadiyah yang tersebar di nagari-nagari. Pimpinan cabang yang dikunjungi umumnya dipimpin oleh para ulama dan ninik mamak, yang tentunya merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di nagari-nagari. Hal ini, secara nyata memiliki pengaruh bukan hanya membukakan jalan bagi perkembangan Muhammadiyah, tetapi memperkuat pengaruh Muhammadiyah pada nagari-nagari tersebut. Muhammadiyah dijadikan tempat atau media berkumpulnya para tokoh lintas suku dan generasi dalam nagari sehingga pergerakan Muhammadiyah tampak berpengaruh dan kuat.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Fachrodin di pusat Muhammadiyah Minangkabau ini adalah terkait dengan penjelasan kepada ranting-ranting tentang hal-hal yang mendasar dalam

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Muhammadiyah seperti asas, tujuan, keorganisasian, aktivitas dan mensosialisasikan rapat-rapat.¹⁶⁷ Kegiatan seperti ini pada awalnya dilaksanakan kecabangan dan ranting Padang Panjang dimulai pada pukul 08.00 malam di rumah Engku Datuk Besar, Pasar Baru Padang Panjang.¹⁶⁸

Selain kegiatan itu, Fachroedin dalam laporannya sebagaimana dikutip Suara Muhammadiyah melakukan berbagai agenda dalam pembinaan ranting dan cabang sebagai berikut:

Pada hari Minggu pagi tanggal 1 Mei 1927 djam 9, diadakan ledenvergadering perempoen, goena membijtarakan propaganda Aisyiyah, bertempat di Soerau Gadang di Laras nan Pandjang. Pada malem Senin tanggal ½ Mei 1927, moelai djam 8, diadakan leden vergadering boat leden lelaki, bertempat di Soerau Gadang di Laras dan Pandjang, oentoek membijtarakan propaganda Moehammadijah. Pada hari malam Selasa tanggal 3 Mei 1927, diadakan leden vergadering boeat perempoen, moelai djam 9 pagi, bertempat di Soerau Engkou Sjeeh Moehammad Djamil di Djao membijtarakan propaganda Aisjijah. Pada malam Rebo tanggal ¾ Mei 1927, diadakan leden vergadering lelaki, bertmpat di roemah Datoek Saidi Malano, di Batipoeh Baroe, goena membijtarakan propaganda Moehammadijah. Pada hari Rebo diadakan leden bergadering perempuan, moelai djam 8 pagi goena membijtarakan propaganda Aisjijah bertempat di roemah Datoek Saidi Malano, di Batipeoh Baroe. Pada malem Chemis tanggal 4/5 Mei 1927 diadakan leden vergadering boeat lelaki, moelai djam 8, bertempat di roemah di Goena do Boengo Tanjoeng, oentoek membijtarakan propaganda Moehammadijah.

Pada Chemis tanggal 5 Mei 1927 diadakan leden vergadering oentoek lede perempoen, moelai djam 8 bertempat di roemah Goena di Boengo Tandjoeng oentoek membijtarakan propaganda Aisjijah.¹⁶⁹

Dalam rapat-rapat dan musyawarah yang sudah diagendakan tersebut dihadiri oleh ranting-ranting Muhammadiyah, di antaranya; Ranting Laras nan Panjang, Jaho, Batipuh Baru, Bungo Tanjung, Simabur, Labuh, Gunung Rajo Kapul dan cabang Padang Panjang.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Program Vergadering Moehammadijah di Padang Panjang, *Suara Muhammadiyah*, No. 5/IX/ 1927, 32-35.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

Semua kegiatan dan agenda tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, kecuali di Bungo Tanjung karena ada persoalan dengan kepala negeri. Agenda yang disebutkan terakhir terpaksa pelaksanaannya diundur.

Dalam hal itu, Muhammadiyah di Sungai Batang ketika Fachrodin datang berhasil pula mendirikan Majelis Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) yang berfungsi mengorganisir pekerjaan sosial dan kesehatan masyarakat. Selain pendirian PKU, pada saat itu Muhammadiyah di Sungai Batang juga menyampaikan keinginan untuk mendirikan HIS Muhammadiyah dengan harapan akhir 1927 sudah memiliki dua sekolah agama dan dua sekolah kelas II.¹⁷¹ Hal lain, yang menjadi misi Fachrodin datang ke Minangkabau adalah menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi 'Aisyiyah di Muhammadiyah, di mana perempuan dalam masyarakat dan persamaan hak antara wanita dan laki-laki.¹⁷²

Setelah kunjungan Pengurus Besar Muhammadiyah, pada 16 Oktober 1927 berdiri pula Cabang Muhammadiyah Fort de Kock di Bukittinggi. Adapun susunan kepemimpinan cabang ini, di antaranya; A. Kamoës B.S dan A. Koedoes sebagai pemuka (ketua), A. Malik Sidik dan Ahmad Chatib sebagai pemuka muda (wakil ketua), M. Saleh Djambe dan Datuk Raja Api, A. Moenaf dan Abdoellah sebagai juru surat (Sekretaris), Sarbi Raja Muda dan Ali Imrom Djanait sebagai juru periksa (bendahara).¹⁷³

Kemudian Fachrodin melanjutkan perjalanannya ke Medan¹⁷⁴ dan Aceh bersama dengan AR. Sutan Mansur guna melakukan konsolidasi dan melihat perkembangan Muhammadiyah pada kedua daerah tersebut secara dekat. Apalagi di Medan Muhammadiyah sudah mendirikan pula amal usaha berupa lembaga pendidikan. Begitu pula di Aceh, sudah berdiri pimpinan cabang Muhammadiyah yang

¹⁷¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 79.

¹⁷² *Ibid*, hlm. 81.

¹⁷³ Programma Vergadering Moehammadijah di Padang Panjang, Suara Muhammadiyah, No. 5/IX/ 1927, hlm. 42-43.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 32-35.

diinisiasi dan dipimpin oleh Abdul Mu'ti, adik M. Jamil Jambek.¹⁷⁵ Di sini Muhammadiyah sudah berdiri di Kurataja sejak 1923 yang dipimpin oleh tokoh Minang sampai 1929. Pengaruh kepemimpinan orang Minang di Muhammadiyah begitu sangat kuat.¹⁷⁶ Perjalanan Muhammadiyah di sini mendapat tantangan hebat dari “ulama” Aceh sendiri karena dipandang sebagai ancaman baru. Sebagai reaksi dari pergerakan Muhammadiyah bermunculan sejumlah madrasah untuk menggantikan *dayah* (pesantren) pada 1928-1929.¹⁷⁷ Meskipun dapat tantangan hebat dari ulama Aceh, tetapi pengaruh modernisasi pemahaman keagamaan berhasil menyusup ke dalam masyarakat Aceh. Hal itulah yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), yaitu tempat berhimpunnya ulama Aceh yang memiliki corak pemikiran yang reformis.¹⁷⁸

Hasil kunjungannya menunjukkan kesan yang mendalam terutama perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau. Dalam hal itu, ia melaporkan kepada Pengurus Besar bahwa perkembangan dan kemajuan Muhammadiyah di Minangkabau di luar dugaan sebelumnya dan lebih berkembang daripada di Jawa sendiri. Hal itu, disebabkan karena unsur-unsur yang terdapat pada masyarakat Minangkabau sangat terbuka terhadap Muhammadiyah. Mereka bukan hanya sekadar menerima secara pasif, tetapi justru digerakan secara aktif sehingga dalam rentang waktu yang singkat Muhammadiyah sudah menyebar di seluruh nagari-nagari di Minangkabau. Keadaan perkembangannya, jauh lebih menggembirakan daripada laporan yang disampaikan utusan cabang-cabang dalam dua kali kongres sebelumnya, yaitu Surabaya dan Pekalongan. Begitu pula di daerah-daerah lainnya, umumnya dikembangkan oleh orang Minangkabau.

Sebelum Fachroddin berkunjung ke Minangkabau, pada 1927 tersebut terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah

¹⁷⁵ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 41.

¹⁷⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 16.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Ti Aisyah, Subhani, Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia, 1953-1964* (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2008), hlm. 361.

Indonesia, yaitu terjadinya pemberontakan buruh tambang Batubara di Silungkang. Pemberontakan ini dalam berbagai literatur sejarah diungkapkan bahwa yang mendalangi peristiwa tersebut adalah komunis. Pada 1926, pemberontakan ini sudah direncanakan di Padang dan Sawahlunto bersamaan dengan pemberontakan di Banten. Akan tetapi, gagal dilaksanakan dan tidak terjadi apa-apa sebagaimana pemberontakan yang benar-benar meletus di Banten. Oleh sebab itu, mulai pada bulan November 1926 para pemimpin komunis ditangkapi oleh pemerintah kolonial karena mereka dipandang menghasut pengikutnya memanggul senjata. Penangkapan ini dilakukan sebagai tindakan prefentif oleh pemerintahan Hindia-Belanda.¹⁷⁹ Said Ali sendiri sebagai pemimpinnya dijebloskan ketahanan Belanda. Pemberontakan tersebut baru terlaksana pada 1927 dengan cara memanfaatkan buruh tambang. Sebagai diketahui bahwa nasib para buruh tambang khususnya buruh paksa ketika itu diperlakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda secara tidak manusiawi. Para buruh sebenarnya, ingin keluar dari nasib seperti itu dan memberontak tetapi karena berada dalam posisi yang sangat lemah sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya pasrah menerima keadaan. Dalam keadaan yang demikian, komunis mampu memobilisasi dan memengaruhi para buruh hingga mereka memiliki semangat baru dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal itulah terjadi pemberontakan di Silungkang. Sebenarnya, walaupun tidak didalangi, mereka umumnya sudah bosan dengan perlakuan yang semena-mena oleh penjajah. Komunis saat itu hanya menyalakan api pada kayu bakar yang sudah disirami minyak tanah sehingga pemberontakan di kalangan buruh meletus.¹⁸⁰ Namun, pemberontakan tersebut dengan mudah digagalkan oleh pemerintah kolonial karena persiapannya yang tidak matang.¹⁸¹ Akibat dari pemberontakan tersebut Belanda

¹⁷⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 126.

¹⁸⁰ Zaiyardam dalam Alfan Miko (Ed.), "Nasionalisasi atau Bukan, Apa Bedanya? Studi tentang Buruh Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Sumatra Barat," *Dinamika Kota Sawahlunto dari Ekonomi Kapitalisme ke Ekonomi Rakyat* (Padang: Andalas University, 2006), hlm. 6.

¹⁸¹ Pemberontakan ini berawal dari ketidakpuasan dan diskriminasi

melakukan penindakan di seluruh daerah Sumatra Barat¹⁸² sehingga hampir semua pemimpin komunis sudah ditangkap semuanya¹⁸³ dan buang ke Digul.¹⁸⁴

Sejak peristiwa pemberontakan rakyat yang didalangi oleh komunis tersebut baik di Banten maupun Silungkang, pemerintah kolonial Belanda selain melakukan tindakan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat secara langsung ataupun tidak, juga melakukan perubahan politik yang mendasar dan melakukan pengawasan ketat dan represi.¹⁸⁵ Seluruh kekuasaan diambil alih oleh pemerintah kolonial tanpa kecuali. Kepala nagari meskipun masih berasal dari orang pribumi, tetapi nasibnya tidak dapat memperjuangkan, membela dan mempertahankan hak-hak rakyat pribumi. Apalagi untuk mengayomi rakyat semakin jauh dari harapan. Justru, yang terjadi adalah sebaliknya, kepala nagari tunduk sepenuhnya kepada kemauan dan kepentingan politik kolonial karena mereka berada tekanan. Akibatnya, masyarakat tidak nyaman terhadap kepemimpinan kepala nagari. Dalam hal itu, kepala nagari menjadi kaki tangannya Belanda untuk menjaga dan memelihara

pemerintah Hindia-Belanda terhadap buruh kontrak dengan buruh paksa. Perbedaannya tidak hanya pada tingkat upah, tapi juga pada pelayanan untuk mendapatkan jaminan kesehatan, perumahan dan makanan. Buruh paksa mereka eksploitasi sebagai bagian dari hukuman yang seharusnya mereka jalani di penjara, sehingga dipahami banyak buruh paksa yang mencoba melarikan diri, dan bagi yang tertangkap akan mendapatkan hukuman lebih berat, pengurangan jatah makanan, dikurung dan dicambuk. Kekecewaan mereka atas semua perlakuan tersebut diwujudkan dalam keterlibatan mereka dalam pemberontakan. Alfian Miko (Ed.), *op. cit.*, hlm. xxvi.

¹⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 99.

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 126.

¹⁸⁴ Daerah ini tertelak di pedalaman selatan Irian, ditepi Sungai Digul yang jauhnya sekitar 600 km dari tepi laut. tempat ini dibangun oleh Belanda sebagai tempat buangan orang-orang PKI yang memberontak taun 1926/1927 di Sumatra Barat. Oleh karena itu, sebagaimana dikutip Anwar Abbas sejumlah besar penghuninya adalah orang Minangkabau. Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi Islam* (Jakarta: Kerjasama Multi Pressendo, LP3M STIE Ahmad Dahlan dan FH UMI, 2008), hlm. 95.

¹⁸⁵ Jeffrey Hadler, *op. cit.*, hlm. 172.

kepentingannya. Kebebasan berkumpul dan berpendapat nyaris tidak ada lagi dalam masyarakat. Organisasi sebagai tempat masyarakat membicarakan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada di lingkungannya ruang geraknya dibatasi hingga menjadi lumpuh.¹⁸⁶

Tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bukan hanya terhadap mereka yang terlibat dalam pemberontakan tersebut, tetapi juga terhadap mereka yang diduga masuk bagian dari komunis atau siapa saja di antara pribumi yang bekerja sama dengan komunis meskipun mereka tidak di tanah air. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastroamodjojo dan Abdul Kadir Joyodiningkrat ikut terkena dari tindakan represif tersebut. Mereka ditangkapi di negeri Belanda karena dituduh melakukan kerja sama dengan komunis. Mereka memang memiliki kedekatan dengan Semaun dan Tan Malaka karena sama-sama pelajar dari Indonesia. Sama-sama belajar berorganisasi dan kadang mereka berdebat tentang masa depan Indonesia. Dalam hal itu, Hatta dan kawan-kawan pernah dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam,¹⁸⁷ karena melakukan perjanjian dengan Semaun. Perjanjian itu sendiri menurut Anwar Abbas disadari oleh gerakan komunis internasional sebagai kemenangan atas kaum nasionalis terutama Perhimpunan Indonesia sehingga Semaun di panggil oleh pimpinan tertinggi partai komunis di Moskow.¹⁸⁸ Akan tetapi, oleh pemerintah kolonial dinilai justru mendukung dan terlibat dalam skenario pemberontakan di dua tempat tersebut.

¹⁸⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm.128.

¹⁸⁷ Penangkapan Hatta oleh Belanda sebagaimana dikutip Anwar Abbas dari penelitian LP3ES karena memang Hatta terkait dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Semaun pada 5 Desember 1926, yang isinya antara lain; pertama, PKI mengakui kepemimpinan perhimpunan Indonesia dalam melakukan gerakan massa rakyat Indonesia, Perhimpunan Indonesia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan gerakan tersebut. Kedua, PKI sepenuhnya mendukung Perhimpunan Indonesia dalam gerakan rakyat selama hal itu menguntungkan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaannya. Ketiga, seluruh perkabaran dan penerbitan perlu diserahkan oleh PKI kepada Perhimpunan Indoensia. Anwar Abbas, *op. cit.*, hlm. 84.

¹⁸⁸ *Ibid.*

Mavis Rose sebagaimana dikutip Anwar Abbas melihat hal itu terjadi karena Belanda ingin mencari kaitannya dengan pemberontakan komunis pada 1926 di Banten karena penguasa Belanda menganggap bahwa Hatta sebagai ketua Perhimpunan Indonesia, adalah pucuk pimpinan kelompok aktivis mahasiswa yang diilhami oleh ajaran Marxis yang merencanakan untuk mengusir Belanda dari koloninya yang paling bergengsi, yaitu Hindia-Belanda.¹⁸⁹ Hatta selain ditangkap juga diperhadapkan kepada pengadilan. Ketika itu, ia dibela oleh Mr. Mobach dan Mr. Duys. Keduanya adalah pengacara yang berideologi sosialis. Dalam persidangan itu, Hatta dan kawan-kawannya dinyatakan oleh hakim tidak terbukti bersalah. Oleh sebab itu, ia dibebaskan 5,5 bulan kemudian.¹⁹⁰

Bagi Muhammadiyah, tentunya pemberontakan Silungkang yang berujung pada penangkapan pentolan komunis membawa harapan segar karena gerakan komunis selama ini terus berupaya melakukan propaganda dan menghalangi gerakan Muhammadiyah.¹⁹¹ Menariknya, peristiwa ini menyadarkan umat Islam yang selama ini sudah terlanjur termakan oleh pengaruh komunis dan kembali kepada jalan yang benar. Dalam hal itu, Muhammadiyah menjadi tempat perlindungan bagi pelarian politik setelah terjadinya pemberontakan dan penumpasan.¹⁹²

Setahun kemudian dari kunjungan Fachroedin ini (1928) Pengurus Besar Muhammadiyah berkunjung lagi ke Minangkabau. Kunjungan kedua kali ini ditugaskan kepada Mohammad Yunus Anis. Tujuannya selain melihat dari dekat perkembangan Muhammadiyah juga terkait secara langsung dengan usul dan saran dari Fachroedin kepada Pengurus Besar agar kongres ke-19 Muhammadiyah dilaksanakan di Minangkabau. Artinya, kehadiran Yunus Anis ke Minangkabau merupakan kunjungan dalam rangka peninjauan kesiapan Muhammadiyah Minangkabau menjadi tuan rumah kongres. Sebagaimana diketahui bahwa kongres

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm.157.

¹⁹⁰ Rowdland Bismark, *www.goodreads.com/pdf*, "Hatta Jejak yang Melampui Zaman", diakses 18 Februari 2016, hlm. 43.

¹⁹¹ Alfian, *op. cit.*, hlm. 246.

¹⁹² Jeffrey Hadler, *op. cit.*, hlm. 282.

ke-19 ini merupakan kongres pertama di luar Jawa dan ini tentunya pengalaman pertama dan sangat berharga bagi Muhammadiyah secara keseluruhan. Apalagi anggota dan peserta kongres yang akan datang berasal dari berbagai daerah di mana jaraknya sangat berjauhan dan bahkan antar pulau. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan yang betul-betul matang. Di Minangkabau, Yunus Anis sama halnya dengan Fachrodin sebelumnya dibawa keliling mengunjungi cabang-cabang Muhammadiyah yang terdapat pada nagari-nagari guna melihat dan mendengarkan respons langsung dari warga dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan kongres nantinya. Secara nyata, Yunus Anis melihat dengan dekat bahwa denyut pergerakan Muhammadiyah sangat menggembirakan sebagaimana juga disampaikan pada laporan Fachrodin ketika kunjungannya pada setahun yang lalu. Adapun cabang-cabang yang dikunjunginya antara lain Maninjau, Padang Panjang, Simabur, dan Bukittinggi.

Bersamaan dengan kunjungan Yunus Anis, di Minangkabau juga dilangsungkan konferensi ketiga Muhammadiyah tepatnya pada bulan Agustus 1928. Dalam rangka konferensi itu, dilaksanakan beberapa kegiatan yang menunjang kepada kegiatan konsolidasi dan penguatan persyarikatan berupa pelatihan keorganisasian, administrasi, kepanduan, Hizbul Wathan, sekolah, dan 'Aisyiyah¹⁹³ dengan instruktur dan pelatihnya Yunus Anis sendiri. Selain itu, ketika ia sedang berada di Minangkabau, seluruh ulama Minangkabau berkumpul melaksanakan rapat akbar yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1928 di Surau Inyiek Jambek guna melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang akan menerapkan "Ordonansi Guru" di Minangkabau.¹⁹⁴ Kebijakan ordonansi dimaksud antara lain menyatakan bahwa seseorang yang hendak memberikan pelajaran agama kepada orang lain harus terlebih dahulu minta izin secara tertulis kepada pejabat yang telah ditetapkan.¹⁹⁵ Kebijakan ini telah menimbulkan reaksi keras dan hebat dari kalangan ulama baik

¹⁹³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 41.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 41.

¹⁹⁵ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 102.

ulama modernis maupun tradisional¹⁹⁶ karena akan dikhawatirkan bahwa orang Minang akan kehilangan kebebasan dalam melaksanakan aktivitas agamanya.¹⁹⁷ Jauh dari itu, kebijakan tersebut dipandang akan memberikan ruang yang lebih luas dan bebas kepada umat Kristen untuk menyebarkan agamanya.

Ordonansi tersebut sebenarnya sudah lama ada dan akan diterapkan oleh Belanda di seluruh nusantara. Akan tetapi dalam penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pada 1905 telah dikeluarkan ordonansi pertama dengan pengaturan bahwa setiap guru agama Islam diwajibkan untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya 1925 pemerintah kolonial kembali mengeluarkan ordonansi yang kedua dengan ketentuan bahwa guru agama diwajibkan untuk melaporkan diri.¹⁹⁸ Ordonansi yang kedua agak lebih ringan daripada yang pertama karena pada ordonansi pertama guru agama wajib mendapat izin daripada pejabat berwenang sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi kedua cukup hanya dengan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Meskipun demikian, keduanya tetap sangat merugikan umat Islam karena adanya pembatasan melaksanakan ajaran agama. Hal ini tidak sama dengan umat agama lain yang tidak ada pengaturannya. Jadi, pengaturannya bersifat diskriminatif terhadap umat Islam. Sedangkan bagi pemerintah kolonial, pengaturan ini dipandang sebagai media untuk pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di negeri ini.¹⁹⁹

Sementara itu, sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta jauh lebih diminati oleh masyarakat ketimbang sekolah yang didirikan oleh pihak Belanda. Oleh sebab itu, kebijakan ini oleh Muhammadiyah dan kelompok umat Islam lainnya ditentang untuk tidak diterapkan

¹⁹⁶ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Tiara Kencana, 2008), hlm.73.

¹⁹⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia-Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 56.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹⁹ *Ibid*.

di Minangkabau. Reaksi terhadap ordonansi tersebut berhasil menggugah para ulama dan guru agama dan menyadarkan untuk kembali bersatu yang selama ini sulit dipersatukan karena terjadinya perbedaan dalam pemahaman agama antara ulama kaum muda dan kaum tua. Tambah lagi, pihak kolonial memang tidak menghendaki adanya penyatuan umat Islam karena akan merugikan kepentingan mereka sendiri. Perbedaan tersebut tetap dipelihara oleh Belanda dan bahkan untuk mempertahankannya, Belanda berupaya untuk menerapkan politik *divide et impera*, model politik belah bambu.

Para ulama, tokoh-tokoh pendidikan di nagari dan organisasi-organisasi induk dari sekolah yang ada di Minangkabau bersatu padu dalam menentang kebijakan tersebut meskipun sebelumnya mereka sulit untuk dipersatukan. Akan tetapi, dengan semangat dan tujuan yang sama semuanya dapat dikondisikan dalam bentuk satu barisan menentang kebijakan pemerintah. Abdul Karim Amrullah yang memimpin pergerakan tersebut secara nyata melakukan penggalangan kekuatan dan massa dengan melibatkan semua pihak termasuk memobilisasi ulama dan tokoh-tokoh yang berada di berbagai nagari.²⁰⁰ Dalam rapat akbar tersebut dalam catatan sejarawan dihadiri oleh sekitar 800 orang ulama dan guru agama, ditambah 200 orang utusan dari 115 organisasi Islam di Minangkabau.²⁰¹ Kemudian dalam memimpin aksi penolakan ordonansi tersebut, Darwis Datuk Majolelo, demang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat tersebut telah memberikan informasi kepada Abdul Karim Amrullah agar menunda pergerakan atau aksi tersebut karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar terutama posisi Abdul Karim Amrullah sendiri sebagai pemimpin aksi tersebut. Meskipun sudah dinasihatkan oleh demang itu, namun Abdul Karim Amrullah dan panitia lainnya tidak bergeming terhadap informasi setengah mengancam tersebut. Artinya, Abdul Karim Amrullah dan tokoh lainnya tetap dalam pendiriannya dan tidak tergoyahkan. Justru, ia meminta kepada pihak pemerintah kolonial agar menarik ordonansi itu kembali.²⁰² Menurut laporan

²⁰⁰ Zulqayyim, *op. cit.*, hlm.125.

²⁰¹ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 102.

²⁰² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah

resmi pemerintah Belanda sebagaimana dikutip Aqib Suminto bahwa dalam pertemuan tersebut tampil 23 pembicara, yakni 17 orang dari kaum muda dan 5 orang dari kaum kuno, serta seorang dari golongan netral.²⁰³ Kemudian pidato H. Rasul berhasil menguasai sidang sehingga semuanya sepakat untuk menolak Ordonansi Guru²⁰⁴ dan akan disampaikan kepada Gubernur Jederal melalui dua tokoh Minangkabau, yaitu Hasanudin Dt. Singomangkuto dan H. Abdul Majid Abdullah.²⁰⁵ Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah, dinyatakan oleh Gubernur Jenderal bahwa pemerintah Belanda “belum berniat berketetapan hendak menjalankan ordonansi itu di Minangkabau.²⁰⁶ Suksesnya pelaksanaan rapat akbar ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi tokoh Muhammadiyah. Meskipun Abdul Karim Amrullah dan Jamil Jambek bukan anggota Muhammadiyah, tetapi keduanya adalah penganjur Muhammadiyah di Sumatra Barat.²⁰⁷ Menantunya Abdul Karim Amrullah, AR. Sutan Mansur dan anaknya Hamka, Abdullah Kamil dan Zain Jambek, anak dari Jamil Jambek merupakan aktivis Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam kepanitiaan tersebut.

Setelah Yunus Anis pulang kembali ke Yogyakarta, ia melaporkan hasil kunjungannya ke Pengurus Besar Muhammadiyah bahwa pergerakan Muhammadiyah di Minangkabau melaju lebih kencang dan hampir merata di seluruh Minangkabau. Dalam hal itu, Pengurus Besar Muhammadiyah tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa Minangkabau sebagai tuan rumah kongres. Hal ini semakin memperkuat usulan yang pernah disampaikan Fachroedin setelah pulang dari Minangkabau. Begitu pula reaksi keras yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau terhadap Ordonansi Guru. Yunus Anis membawa kesan terhadap

dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 147.

²⁰³ Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm. 56.

²⁰⁴ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 57.

²⁰⁵ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 103.

²⁰⁶ Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm. 57.

²⁰⁷ Zulqayyim, *op. cit.*, hlm.125.

mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatra Barat di bawah pimpinan ulama kharismatik.

Kongres Muhammadiyah Pertama di Luar Jawa

Kongres Muhammadiyah pertama di luar Jawa ini merupakan titik awal bagi pengembangan dan pergerakan Muhammadiyah di nusantara. Kemudian kesuksesan kongres tersebut merupakan jawaban terhadap tuduhan dan opini yang dibangun oleh pihak yang antipati bahwa Muhammadiyah hanya dapat hidup di Yogyakarta.²⁰⁸ Penunjukan Minangkabau sebagai tuan rumah pelaksanaan kongres diawali dengan kunjungan Fachroedin di 1927 dan M. Yunus Anis pada 1928 telah membawa opini baru bagi pemetaan kekuatan bahwa Muhammadiyah tidak lagi sebatas hanya ada di Jawa melainkan sudah menyebar ke ranah Minang. Hal ini menjadi kekuatan kedua setelah di Yogyakarta. Percepatan dan perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau dalam pandangan Fachroedin—setelah melihat secara dekat pergerakannya di Minangkabau—mendorongnya untuk membawa kongres Muhammadiyah ke Minangkabau. Dalam rangka memperkuat dan menghilangkan keragu-raguan Pengurus Besar Muhammadiyah terhadap perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau sebagaimana yang dilaporkan Fachroedin, maka Pengurus Besar kembali menugaskan M. Yunus Anis ke Minangkabau.

Dengan adanya kunjungan kedua tokoh tersebut semakin yakin Pengurus Besar Muhammadiyah bahwa kongres akan dilaksanakan di Minangkabau. Perkembangan itu tergambar dari pidato “pemandangan tentang kemajuan agama Islam dan pergerakan Muhammadiyah”, yang disampaikan sekretaris Pengurus Besar pada pembukaan Kongres XVII 1928 sebagaimana dikutip Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, menyatakan antara lain:

Tersiernya Muhammadiyah di Sumatra Barat hebat, belum pernah terdapat bandingannya di dalam dunia Muhammadiyah. Meskipun dengan sukar dan banyak susahannya, akan tetapi berhasil juga dan dapat berdiri cabang-cabangnya. Kami berpengharapan: Apabila di Minangkabau dan tanah Aceh yang terkenal dengan pusat pemegang

²⁰⁸ Congres Moehammadijah ke-19 di Minangkabau, Bintang Islam, No. 3,/VIII/1930, hlm. 130-137.

agama Islam dengan teguh sudah sama mendirikan Muhammadiyah, tentulah akan mudah saja tersiarnya di lain-lain tempat sekeliling Sumatra. Juga sekarang ini sudah mulai bertambah-tambah banyak negeri yang meminta didirikan cabang Muhammadiyah itu.²⁰⁹

Kemudian keinginan untuk melaksanakan kongres Muhammadiyah di Minangkabau kembali dipertegas pada Kongres ke-18 di Solo pada 1929. Pada saat itu, dari Minangkabau diikuti oleh Cabang Sungai Batang, Padang Panjang, Simabur, Bukittinggi, Padang (luar kota), Pariaman (Kuraitaji) dan Lakitan (Bandar Sepuluh)²¹⁰ dengan menggunakan pakaian adat Minangkabau sebagaimana yang dianjurkan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah untuk memakai pakaian kebesaran daerah masing-masing.²¹¹ Dalam pada itu, beberapa utusan luar Minangkabau juga diikuti oleh orang Minangkabau karena mereka memimpin cabang Muhammadiyah di luar Minangkabau, seperti Ilyas Sutan Perpatih, ketua Cabang Muara Aman dan Abdul Wahid ER, ketua cabang Pagar Alam. Keduanya itu berasal dari Sungai Batang.²¹²

Pada saat berlangsungnya kongres, khusus ketika membahas tentang agenda dan tempat pelaksanaan kongres ke-19 yang akan dilaksanakan pada 1930, Fachrodin yang sudah melihat secara dekat perkembangan Muhammadiyah, mengusulkan kepada anggota kongres supaya dilaksanakan di Minangkabau. Pada kongres yang dihadiri banyak cabang dari Minangkabau, Hamka menggambarkan bagaimana Fachrodin meyakinkan anggota kongres agar kongres yang akan datang dilaksanakan di Minangkabau. Ia menggambarkan bahwa

Ketika Fachrodin naik kepodium mengemukakan alasan usulnya, Beliau telah menilai Minangkabau yang membuat hatiku terharu. "Itulah negeri yang dicita-citakan Muhammadiyah," kata beliau. Beliau sebut kekayaan Minang dengan para ulama, tetapi bukan ulama yang mempertahankan paham agama yang jumud. Beliau

²⁰⁹ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op. cit.* 83.

²¹⁰ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 42.

²¹¹ AR. Fakhruddin, *Menyongsong Tanwir Muhammadiyah di Sala, Surakarta, Menjelang akan dilaksanakannya Mukhtamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh*, hlm. 1.

²¹² Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 42.

terangkan kethaatan rakyat beragama, masjid-masjid yang bertebaran di setiap kampung dan desa, dan begitu cepat orang dapat menerima Muhammadiyah. Beliau meramalkan bahwa dalam masa yang tidak lama lagi, Muhammadiyah Minangkabau akan menjadi pelopor pengembangan Muhammadiyah di seluruh Sumatra, mungkin di seluruh Hindia Timur.²¹³

Kemudian usulan Fachroedin tersebut dapat dukungan pula dari Mohammad Yunus Anis, yang juga sudah melihat secara dekat perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau. Usulan tersebut disambut baik oleh anggota kongres karena di Jawa sendiri perkembangan Muhammadiyah terasa agak lamban. Dalam pada itu, AR. Sutan Mansur baru saja kembali dari Alabio dan Banjarmasin dalam rangka mendirikan dan memimpin Muhammadiyah di daerah tersebut. Pada saat itu, menurut Hamka dilaksanakan rapat istimewa selain menyambut pulangnya AR. Sutan Mansur, juga sekaligus membicarakan tentang usulan kongres yang akan dilaksanakan di Minangkabau.²¹⁴ Ketika usulan tersebut sudah sampai pada permintaan pendapat kepada utusan Minangkabau sendiri, semuanya sepakat akan dibawa terlebih dahulu kekonferensi daerah. Ketika jawaban disampaikan kepada sidang kongres, secara spontan Fachroedin tampil dan menyampaikan sebagaimana ditulis Hamka bahwa “Kalau Muhammadiyah Minangkabau tidak sanggup mengadakan Kongres ke-19, Pengurus Besar akan mengadakan juga Kongres di Minangkabau, dan minta bantu kepada saudara-saudara di Minangkabau untuk jadi panitia!”²¹⁵

Kemudian putusan kongres tersebut dibicarakan Muhammadiyah Minangkabau pada bulan Juli 1929 ketika dilaksanakannya Konferensi Daerah Muhammadiyah keempat di Simabur. Para anggota konferensi secara aklamasi menerima putusan kongres tersebut yang akan di tempatkan di Bukittinggi. Penyampaian penerimaan sebagai tuan rumah ini langsung disampaikan oleh utusan, yaitu Mohammad Saleh bin Haji Abdurrahim Sutan Mahmud, murid AR. Sutan Mansur

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

²¹⁵ *Ibid.*

ketika di Nurul Islam Pekalongan asal Sungai Batang.²¹⁶ Pada masa itu, Muhammadiyah di Minangkabau baru memiliki tujuh cabang, yaitu Sungai Batang, Padang Panjang, Simabur, Bukittinggi, Payakumbuh, Kuraitaji Pariaman dan Simpang Haru Padang Luar Kota.²¹⁷ Sedangkan untuk konteks Indonesia jumlah cabang telah mencapai 112 dengan 24.000 orang anggota.²¹⁸ Pelaksanaan kongres di luar Jawa ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah atas perkembangan Muhammadiyah yang tumbuh secara pesat dibanding di Jawa sendiri.

Setelah positif pelaksanaan kongres Muhammadiyah ke-19 akan dilaksanakan di Bukittinggi pada 14-21 Maret 1930. Para pimpinan Muhammadiyah dari tingkat konsul sampai ke ranting (groep) bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya. Salah satu di antaranya adalah komitmen pengembangan gerakan. Dalam hal itu, hampir setiap bulan berdiri ranting baru terutama di kampung-kampung sekitar danau Maninjau mulai dari Tanjung Sani, Pandan, Galapung, Batu Nanggai, Muko Jalan, Sigiran, terus naik ke Airikir Koto Panjang dan seluruh nagari-nagari di Bukittinggi. Muhammadiyah Bukittinggi sendiri mendirikan Muhammadiyah Sibolga dan Sipirok. Sedangkan Muhammadiyah di Lakitan, Pesisir Selatan didirikan oleh Haji Abdul Malik.²¹⁹ Selain pergerakan pengembangan ranting dilakukan secara masif, syiar kongres juga semakin gencar dilakukan oleh kepanitiaan yang sudah terbentuk baik di Minangkabau sendiri maupun di perantauan. Dalam rangka kongres itu juga, para perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia juga membangun aliansi untuk pulang bersama sehingga arus informasi perhelatan akbar ini semakin membahana di mana-mana. Kemudian saat-saat akan dilaksanakan kongres dalam catatan Hamka Muhammadiyah sudah berdiri pada 27 tempat, cabang dan groep.²²⁰ Dalam hal itu, ada

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 44.

²¹⁷ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 111.

²¹⁸ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 89.

²¹⁹ Hamka, *Muhammadiyah...*, *op. cit.*, hlm. 44.

²²⁰ *Ibid*.

yang menyebutnya tidak lagi kongres Muhammadiyah melainkan kongres Minangkabau. Kota Bukittinggi betul-betul menjadi ramai dikunjungi tidak hanya oleh anggota kongres melainkan oleh masyarakat Minangkabau sendiri melihat jalannya perhelatan Muhammadiyah terbesar tersebut.

Kepanitiaan kongres ini terdiri M. Zain Jambek (ketua), Abdullah Kamil (Sekretaris), dan anggota Abdul Malik Karim Amrullah dan Abdul Malik Shiddiq. Kongres yang dilaksanakan pada 14-21 Maret 1930 tersebut merupakan kongres Muhammadiyah yang terbesar hingga saat itu. Pada rapat umum yang diselenggarakan pada 15 Maret 1928 dihadiri oleh sekitar 15.000 hingga 20.000 orang. Kongres ini dihadiri oleh 24 wakil dari 99 cabang di Jawa, satu di Kalimantan, dan satu dari Sulawesi. Sedangkan dari Minangkabau sendiri hadir 15 cabang. Setelah itu hadir pula 158 utusan dari 30 seksi 'Aisyiyah.²²¹ Peserta kongres datang dari berbagai daerah dengan menggunakan kapal laut dan mobil, di mana sebagian besarnya berasal dari Minangkabau sendiri.

Menurut catatan RI. Dt. Sinaro Panjang sebagaimana dikutip Rb. Khatib Pahlawan Kayo, para utusan kongres jumlahnya dari Pulau Jawa dan Madura itu sebanyak 800 orang. Mereka datang dengan mencarter sebuah kapal Belanda, sehingga kapal yang bermerk KPM ini isinya 90% adalah para peserta kongres (congresisten) yang terdiri dari utusan dan penggembira dari Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan ikut juga di dalamnya wakil-wakil dari pemerintah 5 orang, pimpinan pusat 20 orang dan wakil wartawan surat kabar. Di anjungan kapal tersebut berkibar pula bendera Muhammadiyah di samping bendera kapal itu sendiri.²²²

Sedangkan dari Pengurus Besar hadir antara lain KH. Ibrahim, KH. Mukhtar, KH. Hisyam, M.Y. Anis, Raden H. Hajid, Haji Aslam dari Majelis Tarjih, Mohammad Turki, Mas Sukabdi, Mohammad Wahib, Motoco anggota Hizbul Wathan, Haji Wazir Nuri. Sedangkan dari 'Aisyiyah hadir Nyi Dahlan (istri Ahmad Dahlan), Siti Mujiah, Siti Hayyinah dan semua Pengurus Besar 'Aisyiyah. Kemudian dari

²²¹ Zulqayyim, *op. cit.*, hlm. 119.

²²² RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 111.

daerah dan konsul hadir antara lain; KH. Mas Mansur, Kiyai Usman dari Surabaya, Fakih Usman dari Gresik, KH. Abdul Mu'ti dari Madiun, Mas Citrosuwarno, Haji Abdul Hadi dan Raden Haji Iskandar Idris dari Pekalongan, KH. Idris dan RM. Mulyadi Joyomartono dari Solo, Mas Kartosudarmo dari Jakarta, Haji Yahya Daeng Magasing dari Makassar. Utusan dari Jawa lebih dari 50 orang.²²³

Medan kongres dibuat di lapangan atas Ngarai Bukittinggi berbentuk rumah adat Minang bergonjong dengan ukuran 19 x 75 meter, luas 1425m² dengan kapasitas tampung 7124 orang di dalamnya. Sedangkan di luar medan kongres ada lapangan luas di sekelilingnya.²²⁴ Pelaksanaan kongres berjalan dengan penjagaan keamanan selain dari pasukan Pandu Hizbul Wathan yang disiplin dan teratur, juga dibantu oleh polisi dan pendekar-pendekar orang bagak berpakaian hitam.²²⁵ Menurut RB. Khatib dari peristiwa inilah munculnya adagium bahwa Muhammadiyah dilahirkan di Kauman Yogyakarta dan dibesarkan Kauman Padang Panjang. Kemudian dari kongres ini pula muncul istilah “memuhammadiyahkan nagari dan menagarikan Muhammadiyah”.²²⁶

Kemeriahan pelaksanaan kongres ini tergambar dalam laporan dan liputan “Bintang Islam” bahwa bukan hanya dihadiri oleh anggota Muhammadiyah dari kalangan laki-laki melainkan dari kalangan perempuan. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Bukittinggi melainkan hampir seluruh daerah Minangkabau. Dalam hal itu, Bintang Islam melaporkannya bahwa

Mereka beloem sama poeas dengan adanya Openbaar Aisjijah, sehingga mereka sama menghadiri openbaar Moehammadijah jang sebenarnja choesoes oentoe koe laki-laki. Dan kalau mereka akan ditolak oleh HW, jang mendjaga pesidangan, maka dijawabnja: “sebab apakah kami todal boleh masoek. Toch ini vergadering, persidangan oemoem”. Dijawab oleh HW, dengan tegas: “Betoel ini persidangan oemoem, akan tetapi oemoem boeat koem laki-laki, sedang koeom perempuanen tidak kami sediakan tempat.”. Maka didjawablah oleh

²²³ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 46.

²²⁴ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *loc. cit.*

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

mereka: “Biarlah, maksoed kami datang ini, boekanlah oentoe doedoek dikoersi, akan tetapi hendak mendengarkan choetbah-choetbah jang memang penting itoe. Dan kalau Comite tidak menjediakan tempat, baiklah nanti kami berdiri dibawah pohon, asal bisa mendengar soera speaker” dan teroes masoek kemedan persidangan.²²⁷

Kutipan di atas menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah sangat antusias mengikuti jalannya agenda-agenda kongres, bahkan kalau dicermati lagi persidangan-persidangan tersebut bukan hanya diikuti oleh peserta yang menjadi utusan dari cabang-cabang Muhammadiyah melainkan juga warga umumnya. Apalagi sebelumnya, pembukaan yang diselenggarakan dilapangan tersebut diiringi dengan arak-arakan dan pawai di sekitar kota Bukittinggi. Begitu pula dengan pemberitaan pers, di mana wakil-wakil pers datang karena kongres untuk meliput kegiatan tersebut.

Selain meriahnya suasana kongres, di dalam arena kongres terdapat materi-materi yang sangat hangat dan aktual dibicarakan oleh anggota kongres termasuk persoalan yang sesungguhnya tidak diagendakan untuk memahasnya dalam arena kongres tersebut. Yang disebutkan terakhir ini pedebatannya lebih sengit lagi karena yang berdebat bukanlah sesama anggota kongres melainkan para elite ulama antara ulama Minangkabau dengan Pengurus Besar Muhammadiyah. Yang diperdebatkan itu adalah tentang fikih perempuan terkait dengan kasus Siti Rasyidah dari ‘Aisyiyah Padang Panjang yang akan tampil di depan anggota kongres untuk berpidato sebagaimana juga sudah dilaksanakan pada waktu kongres sebelumnya di Solo. Masalah ini dipersoalkan oleh ulama Minangkabau seperti Abdul Karim Amrullah dan Jamil Jambek karena dalam pandangannya haram hukumnya perempuan tampil di depan publik karena bisa mendatangkan fitnah. Selain Abdul Karim perdebatan tersebut juga diikuti oleh Syaikh Abdul Wahab Amrullah, Syaikh Daud Rasyidi, Syaikh H. Abbas Abdullah Padang Japang, AR. Sutan Mansur, Hamka dan beberapa tokoh lainnya. Sedangkan dipihak Pengurus Besar Muhammadiyah diwakili oleh KH. Mas Mansur, KH. Abdul Mu’ti, KH. Ibrahim, KH.

²²⁷ *Congres Moehammadijah ke-19 di Minangkabau, Bintang Islam*, No. 3,/VIII/1930, hlm. 130-137.

Mukhtar, KH. Hisyam, Mohammad Yunus Anis, Raden H. Hajid, H. Aslam, Muhammad Toerki, Mas Soebandi, Muhammad Wahib dan Moetoeco. Sementara itu, dari pihak 'Aisiyah dihadiri oleh Nyai Dahlan, Siti Murji'ah, Siti Hayyinah, dan Siti Rasyidah sendiri.²²⁸



Nyai Dahlan pada Arena Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi
Sumber: Koleksi Pusat Data, Penelitian-Pengembangan Suara Muhammadiyah

Perdebatan tentang fikih perempuan tersebut tidak dapat dielakkan karena dalam pandangan Muhammadiyah perempuan berbicara di depan publik dapat dibenarkan. Sedangkan bagi ulama Minangkabau hal itu termasuk bagian yang terlarang. Akhirnya, perdebatan tersebut dapat diselesaikan sebelum pembukaan kongres dengan kearifan sehingga tidak menimbulkan ekses yang merugikan baik bagi Muhammadiyah maupun ulama Minangkabau. Meskipun Hamka menyebutnya bahwa Muhammadiyah berada di pihak yang menang. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya kedua pihak sama-sama sepakat bahwa perempuan berbicara di depan publik hukumnya makruh dan makruh itu dapat hilang kalau ada suatu

²²⁸ *Ibid.*

kepentingan.²²⁹Adanya kesepahaman dari sisi istinbat hukum ini, maka disimpulkan bahwa Rasyidah yang sudah diagendakan untuk berpidato di depan publik pada waktu pembukaan kongres urung dilaksanakan.

Bagi Muhammadiyah Minangkabau selain dapat melaksanakan kongres ini dengan sukses, beberapa tokoh ulama dan cendikiawan Minangkabau dapat pula ditampilkan sebagai narasumber. Selain Abdul Karim Amrullah, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan Abdul Malik dipercaya pula untuk menjadi narasumber dalam kongres tersebut. Kongres di Minangkabau ini melahirkan beberapa putusan yang sangat fundamental bagi penguatan dan perkembangan Muhammadiyah sesudah kongres tersebut, di antaranya; *Pertama*, penolakan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah kolonial berkaitan dengan hari libur sekolah dari bulan puasa menjadi bulan Juli. *Kedua*, pembentukan “konsul” sebagai perwakilan Pengurus Besar yang diangkat oleh Pengurus Besar atas usul dari kompresi daerah.²³⁰ Kongres ini menjadi sangat penting bagi perkembangan Muhammadiyah karena dari sini muncul para mubaligh-mubaligh Muhammadiyah Minangkabau yang menyiarkan paham Muhammadiyah keseluruh pelosok tanah air Indonesia bersama pemimpin lainnya di dalam membentuk cita dan geraknya.²³¹ Mubaligh-mubaligh tersebut telah mewarnai perjalanan panjang Muhammadiyah sampai saat ini. Pembentukan konsul Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi mediasi bagi Pengurus Besar dengan Muhammadiyah yang ada di cabang-cabang. Pembentukan konsul ini agaknya memiliki hubungan dengan insiden yang terjadi di Minangkabau, di mana pada 1930 kepala nagari melarang dan menutup kegiatan Muhammadiyah di Kubang, Payakumbuh. Kejadian larangan dan penutupan tersebut oleh Muhammadiyah Kubang dilaporkan kepada Pengurus Besar, kemudian dilanjutkan protes tersebut kepada *Adviseur Voor Inlandsche Zaken* di Batavia. Akhirnya, tuntutan Muhammadiyah diterima dan *Adviseur Voor Inlandsche Zaken* menghubungi Pimpinan

²²⁹ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 53.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 57-58.

²³¹ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Panjimas, 1984), hlm. 227.

Pusat Muhammadiyah, agar membuka konsulnya di Sumatra Barat.²³² Anjuran ini oleh Pengurus Besar diterima dan realisasikan dalam putusan Kongres ke-19 di Minangkabau karena dengan konsul tersebut akan dapat membantu konsolidasi persyarikatan. Sedangkan bagi kolonial pembentukan konsul tersebut memiliki tujuan tersendiri pula, yaitu; agar dapat menjinakan sikap Muhammadiyah di Minangkabau terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan keras dan kurang akomodatif terhadap pemerintah sebagaimana yang diungkap Aqib Suminto bahwa “dengan demikian bisa diharapkan bahwa watak radikal Muhammadiyah setempat menjadi loyal semacam pimpinan pusatnya di Jawa.”²³³ Ketiga, Kongres juga memutuskan berkaitan dengan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah tentang pemindahan hari libur sekolah dari bulan puasa kepada bulan Juli.

Di balik kesuksesan pelaksanaan kongres tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas, tentunya tidak bisa lepas dari fungsi dan peran ulama Minangkabau seperti Abdul Karim Amrullah dan Jamil Jambek dalam memberikan dorongan dan dukungannya. Penilaian tersebut bukan hanya datang dari kalangan internal Muhammadiyah melainkan pihak luar juga memandangi seperti itu. Pemerintah kolonial misalnya, menilai bahwa agenda-agenda yang terdapat di dalam arena kongres tersebut merupakan pengaruh dari ulama tersebut. Hal itu, dibuktikan ketika kongres sudah selesai dan semua peserta termasuk Pengurus Besar sudah kembali ke tempat masing-masing. Syaikh Jamil Jambek misalnya, sempat dipanggil oleh Asisten Residen Bukittinggi guna mengklarifikasi terhadap pelaksanaan kongres tersebut terutama terkait dengan putusan kongres dan kritikan tajam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah. Persoalan di atas dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menekan Jamil Jambek sebagaimana dikemukakan Alfian dalam penelitiannya bahwa “pemanggilan Jamil Jambek tersebut tidak lepas dari pidato yang disampaikan oleh para narasumber yang bersifat kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat.” Jauh dari itu, kritikan tersebut dinilai anti terhadap pemerintah. Selain

²³² Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm. 196-197.

²³³ *Ibid.*

itu, Jamil Jambek juga dimintai klarifikasi sekitar perwakilan atau pejabat pemerintah yang ditugasi untuk menghadiri kongres merasa tidak dihargai menurut sepatasnya dan tidak pula didudukan pada tempat sewajarnya. Akibatnya, mereka merasa tersinggung dan kurang dihargai karena kurang di tempatkan pada posisinya yang terhormat. Padahal, ulama ini tidak memiliki hubungan secara organisatoris dengan Muhammadiyah maupun dengan pelaksanaan kongres. Akan tetapi oleh pihak pemerintah tetap menilai bahwa pelaksanaan kongres tersebut merupakan dukungan yang sangat kuat dari Jamil Jambek. Apalagi ketua pelaksananya adalah Muhammad Zain Jambek yang merupakan anak dari Jamil Jambek sendiri.

Selain pemanggilan terhadap Jamil Jambek, secara organisasi Muhammadiyah di Minangkabau juga mendapat intimidasi dan tekanan kuat dari pemerintah. Pemanggilan ulama tersebut juga berimbas kepada penghentian bantuannya kepada Muhammadiyah terhitung sejak hari pemanggilan Jamil Jambek tersebut karena dipandang telah menentang kebijakan pemerintah. Bukan hanya penghentian bantuan, kebijakan politik yang diambil pemerintah semakin mempersempit ruang gerak dakwah Muhammadiyah dengan memperlakukan pengawasan yang ketat.²³⁴ Kebijakan dan sikap penguasa pemerintah ini diturunkannya sampai kepada eselon pemerintah di bawahnya serta kepada penguasa-penguasa pribumi. Semua pertemuan dan tabligh-tabligh dilarang sehingga banyak terjadi insiden di cabang-cabang Muhammadiyah.²³⁵ Meskipun demikian, Muhammadiyah tetap bergerak dan menjalankan aktivitasnya tanpa terpengaruh oleh kebijakan politik pemerintah kolonial tersebut. Bahkan semakin kuat tekanan dari pemerintah dan kaki tangannya, Muhammadiyah semakin kuat dan kukuh. Kesuksesan kongres itu menjadi momentum bagi penanaman Muhammadiyah di ranah Minang. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Saalah, kian subur dan berkembang di mana-mana. Pada masa ini semboyan “Muhammadiyah di nagarikan, nagari dimuhammadiyahkan” semakin kukuh di dalam pergerakan persyarikatan. Hal ini bergulir

²³⁴ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 103-104.

²³⁵ *Ibid.*

dan memompa semangat jihad bagi semua aktivis Muhammadiyah hingga keranting-ranting. Tekad dan semangat tersebut menghasilkan terbukanya akses dalam memperluas wilayah Muhammadiyah sampai ke Pesisir Bandar Sepuluh Selatan (Pesisir Selatan), sampai kebekas Kerajaan Indra Pura dan Tapan, sampai mendaki ke Kerinci memenuhi setiap dusun negeri itu. Selain itu, organisasi reformis dan modernis ini juga menjalar dengan cepat ke daerah Lintau, Payakumbuh, Sulit Air, Tilatang Kamang, Matur, Solok, Pulau Punjung dan di Koto Tangah Padang.²³⁶ Ke Utaranya, Muhammadiyah merambah ke Talu, Cubadak, Simpang Empat, Sukomananti, Katigan, Sungai Aur Silaping dan Air Bangis. Pada daerah yang disebutkan terakhir, menurut Syahrudji Tanjung sebagaimana dikutip Mhd Ilham Muhammadiyah sudah mulai eksis sejak 1930-an yang dibawa oleh beberapa orang putra Air Bangis yang sekolah di Thawalib Padang Panjang.²³⁷

Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan Muhammadiyah ditandai dengan pertambahan jumlah anggota Muhammadiyah yang semakin meningkat. Pertumbuhan tersebut hampir merata di seluruh Sumatra Barat, dan menurut Hasan Byk Dt. Marajo sebagaimana dikutip Obert Fernando bahwa organisasi yang paling banyak anggotanya terutama sampai Jepang masuk ke Sumatra Barat adalah Muhammadiyah.²³⁸ Perkembangan dan pertumbuhan itu, tentunya merupakan atas kepiawaian pimpinan, tokoh dan warga Muhammadiyah di dalam mengembangkan pada berbagai komunitas. Sehubungan dengan hal itu, Majlis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah mengemukakan bahwa faktor yang telah membantu mempercepat proses perkembangan Muhammadiyah di Sumatra Barat selain pengaruh gerakan pembaruan sebelumnya juga faktor para pemimpin Muhammadiyah Minangkabau yang terdiri dari

²³⁶ St. Zaili Asril dkk (Ed.), *Menyemangati Kembali Peran Muhammadiyah di Minangkabau* (Padang: Yayasan Alam Jadi Takambang& PW Muhammadiyah Sumatra Barat, 2000), hlm. 36.

²³⁷ Mhd Ilham, "Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) di Kecamatan Sungai Beremas 1958-1965", *www.pasca.unand.ac.id/gerakan-wanita-indonesia.pdf*, diakses 20 Februari 2016, hlm. 3.

²³⁸ Obert Fernando, *Ahmad Kasim Dt. Gunung Hijau; Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat (1930-1977)*, Skripsi (Padang: UNAND, 200), hlm. 35.

ulama-ulama Minangkabau asli dan mereka memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat. Kemudian para pemimpin tersebut pada umumnya memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat akrab satu sama lain, baik karena hubungan daerah maupun hubungan perkawinan.²³⁹

Memuhammadiyahkan Nagari dan Menagarikan Muhammadiyah

Salah satu keputusan penting yang dilahirkan kongres dalam memperkuat konsolidasi ke dalam adalah pembentukan konsul Muhammadiyah sebagai kelanjutan dari pergerakan Muhammadiyah yang mewakili Pengurus Besar di daerah-daerah. Beberapa bulan kemudian keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pemilihan pimpinan konsul. Dalam konferensi daerah kelima yang dilaksanakan di Payakumbuh pada 1930, terpilih AR. Sutan Mansur sebagai konsul pertama. Konferensi tersebut dihadiri oleh KH. Mukhtar, wakil ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Konsul ini dipimpin oleh AR. Sutan Mansur hingga jatuhnya pemerintah Belanda dan masuknya tentara Jepang pada 1942.²⁴⁰ Anggotanya terdiri dari SY. Sutan Mangkuto, Hitam St. Mudo, Abdullah Kamil, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Rasyid Datuk Sinaro Panjang dan Udin serta seorang dari 'Aisyiyah.²⁴¹

Pada masa kepemimpinannya ini, AR. Sutan Mansur lebih kepada memperteguh hubungan terutama dengan para ulama yang memiliki kesejajaran dengan tujuan dan misi Muhammadiyah. Oleh karena sebelumnya terjadi hubungan yang agak kurang sejalan dengan beberapa pimpinan cabang Muhammadiyah terutama cabang Muhammadiyah Padang Panjang dan Simabur. Kedua pimpinan cabang ini sempat dipimpin oleh ulama yang paham kaum tua dalam rentang waktu yang relatif singkat. Pengaruh dan dorongan kuat dari para ulama tersebut tidak hanya dirasakan di Minangkabau, tetapi hampir seluruh Indonesia merasa sangat diuntungkannya terutama kehadiran Abdul Karim Amrullah dan M. Jamil Jambek. Oleh karena keduanya telah memberikan ruang dan jalan yang

²³⁹ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op. cit.* 82.

²⁴⁰ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 39.

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 63.

cukup bagi gerak pengembangan Muhammadiyah. Kedua ulama tersebut juga melakukan pembelaan di kala ada yang menyerang Muhammadiyah. Hal ini sekaligus menutup pintu bagi pihak yang berniat menghadang dalam menyebarkan propagandanya. Bagi kedua ulama itu, tentunya dengan harapan bahwa pemikiran dan gerakan Islam yang sudah diupayakan dan didakwahkan selama ini tidak akan mungkin bisa dilanjutkan dan dipertahankan jika tidak didukung oleh organisasi Islam yang teratur dan rapi sebagaimana halnya Muhammadiyah. Begitupun bagi Muhammadiyah sendiri, dengan masuknya ke Minangkabau tentunya dapat dukungan dari para ulama yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Apalagi, kultur orang Minang yang suka merantau dan tersebar di mana-mana semakin membuka ruang bagi Muhammadiyah dapat berkembang sejalan dengan tersebarnya orang Minang di berbagai tempat. Selain itu, soal bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di tanah air juga sangat menentukan diterimanya Muhammadiyah secara merata di seluruh Indonesia.

Selain persoalan hubungan yang sedikit tersendat dengan kedua ulama tersebut, persoalan krusial lain yang dihadapi Muhammadiyah pada masa ini adalah adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan ulama dan guru agama dalam mengajarkan agama kepada masyarakat. Pemerintah Belanda semakin mempersempit ruang gerak pendidikan agama dan aktivitas masyarakat. Perkumpulan dibatasi dan rapat-rapat tidak boleh dilaksanakan kecuali terlebih dahulu dapat izin dari pejabat yang berwenang. Dalam hal itu, pemerintah Belanda di Minangkabau mengeluarkan aturan bahwa setiap pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh para pimpinan masyarakat dapat dihentikan oleh pihak penguasa (Belanda) melalui polisi rahasia (PID) yang selalu menghadiri setiap pertemuan atau rapat. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan mengurangi kegiatan gerakan kemerdekaan yang makin lama makin meningkat.²⁴²

Dalam pada itu, untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah

²⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm.138.

memperluas wilayah dakwahnya melalui ekspansi dengan memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan. Hal itu, diupayakan dengan mensejajarkan pendidikan umat Islam dengan pendidikan yang diterapkan Belanda dengan memformulasi ulang sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan zamannya.²⁴³Bersamaan dengan semangat memperbanyak sekolah, pada 1932 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan “Ordonansi Sekolah Liar” (*Wilde Scholden Ordinnantie*). Meskipun pada 1928 ordonansi yang membatasi ruang gerak ulama dan guru agama tersebut diprotes keras oleh seluruh ulama dan guru agama di Minangkabau dengan melakukan rapat akbar di Bukittinggi. Ordonansi dimaksud oleh pemerintah akan diberlakukan secara efektif mulai pada 19 September 1932. Isi dari ordonansi tersebut antara lain menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengajar pada sekolah swasta yang tidak mendapat izin dari pemerintah Belanda, harus mendapat izin terlebih dahulu dari kantor penguasa setempat, pelamar harus mempunyai sertifikat pemerintah atau sertifikat dari sekolah yang bersubsidi pemerintah dan harus dapat meyakinkan pemerintah setempat bahwa mereka tidak akan melanggar ketentuan pemerintah Belanda.²⁴⁴Bagi Muhammadiyah kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak menguntungkan sama sekali bahkan akan berakibat fatal bagi umat Islam. Ordonansi itu hanya sebagai topeng bagi kelapangan bagi gerak maju sekolah misi Kristen karena belajar dari pengalaman bahwa pemerintah sepertinya menggunakan teori belah bambu. Umat Islam berada pada kondisi yang ditekan sedangkan Nasrani di tempat pada posisi atas.

Dalam hal itu, pada 1932 Muhammadiyah memimpin protes terhadap ordonansi kolonial tentang “peraturan untuk pengawasan pendidikan swasta, yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah swasta liar.”²⁴⁵Hal itu, dilakukan Muhammadiyah karena bersikap tidak adil. Pemerintah Hindia-Belanda memberikan banyak fasilitas dan bantuan kepada kegiatan

²⁴³ Samsul Nizar, *op. cit.*, hlm. 81.

²⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 145.

²⁴⁵ Syarifuddin Jurdi, *op. cit.*, hlm. 97.

Nasrani bahkan dana-dana yang berlebih. Pada hal dana-dana tersebut mestinya dapat dipergunakan untuk kepentingan umum bukan hanya terbatas kepada kepentingan kelompok Nasrani saja. Sedangkan umat Islam nyaris dianaktirikan terutama dalam konteks politik dan pemerintah membatasi dan menghalangi perkembangan sekolah-sekolah yang didirikan oleh umat Islam. Oleh sebab itu, Muhammadiyah dalam rapat tahunannya pada 12-28 Februari 1928 mempersoalkan ketidakadilan pemerintah tersebut termasuk ordonansi yang akan dilaksanakan di Minangkabau.²⁴⁶ Muhammadiyah menilai bahwa penerapan Ordonansi Guru tersebut sebagai suatu tindakan yang keterlaluan dan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial terhadap rakyat. Dalam hal itu, Muhammadiyah bersikap bahwa tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus diperjuangkan sehingga tidak jadi diberlakukan. Sikap tegas tanpa kompromi yang diperlihatkan Muhammadiyah itu tentunya merupakan perwujudan dari prinsip perjuangannya yang mentahbiskan kepada amar makruf nahi mungkar. Namun demikian, Muhammadiyah dalam menyampaikan protes tersebut tetap tidak mengambil jalan yang frontal melainkan dilakukan melalui jalan dialog dengan menemui Gubernur Jendral.²⁴⁷

Ordonansi yang akan diterapkan di Minangkabau tersebut bermaksud untuk menghabiskan sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat dan diganti dengan sekolah yang di bawa kekuasaan pemerintah. Dalam pandangan pemerintah kolonial Belanda, sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat tersebut sulit untuk dikendalikan dan bahkan menanamkan kebencian kepada pemerintah. Jauh dari itu, sekolah-sekolah itu menyemaikan ide dan cita-cita untuk merdeka serta memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah Belanda. Misalnya, sekolah yang dikelola Muhammadiyah bertujuan untuk meluaskan agama Islam dan memupuk perasaan agama dari anggota-anggotanya.²⁴⁸ Hal ini, tentu orientasinya berbeda jauh dengan pemerintah.

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 95.

²⁴⁷ *Ibid*.

²⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 143.

Dalam pada itu, di Minangkabau sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat dan ulama termasuk cukup besar bahkan jumlahnya melebihi daripada sekolah di bawah kekuasaan pemerintah. Misalnya, sekolah di bawah naungan Muhammadiyah pada periode 1932-1933 sekitar 122 unit dengan jumlah murid 5835 orang.²⁴⁹Tambah lagi sekolah yang dikelola oleh Taman Siswa dan INS (*Indonesische Nationale School*). Ketiga jenis sekolah ini (Muhammadiyah, Taman Siswa dan INS) cukup menonjol di Minangkabau. Selain dengan memperbanyak jumlah sekolah, Muhammadiyah pada masa ini terus melakukan gerakan yang lebih masif sehingga berkembang dengan pesat dengan menelusuk ketengah-tengah nagari. Pada masa ini pula persebarannya hampir merata keseluruh alam Minangkabau; Luhak nan Tigo, Darat dan Rantau, sampai ke Pesisir Bandar Sepuluh (Pesisir Selatan), Tapan sampai mendaki gunung Kerinci. Keutaranya sampai ke Talu, Cubadak, Simpang Empat, Sukomananti, Katigan, Suangi Aur dan Silaping dan kampung-kampung di Pasaman.²⁵⁰Akan tetapi, perkembangannya hanya sampai pada akhir-akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat-saat Jepang akan masuk, gerak organisasi-organisasi kemasyarakatan semakin diperketat dan dibatasi. Permi dan PSSI misalnya, tidak boleh lagi melakukan aktivitas, rapat-rapat tidak diizinkan lagi. Hal yang sama juga diberlakukan di seluruh wilayah Minangkabau. Namun demikian, Muhammadiyah masih tetap diberikan ruang untuk bergerak meskipun dalam pengawasan yang ketat.²⁵¹

Meskipun Muhammadiyah dihadapkan oleh berbagai persoalan dan tantangan seperti Ordonansi Guru tersebut, namun Muhammadiyah terus bergerak menyusup ke nagari-nagari. Apalagi setelah kongres sukses dilaksanakan. Kesuksesan tersebut bukan hanya dalam konteks pelaksanaan melainkan mampu memompa semangat jihad warga Muhammadiyah untuk terus menyebarkan Muhammadiyah. Hal itu terlihat dari semangat pembentukan cabang dan ranting di akar rumput. A.K. Dt. Gunung Hijau misalnya, merintis pembentukan Cabang

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 145.

²⁵⁰ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 59.

²⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 81.

Muhammadiyah Pasaman bersama tokoh lainnya hingga resmi didirikan pada 4 Desember 1932. Pada mulanya tokoh ini dikirim oleh Pimpinan Muhammadiyah untuk membantu mengelola dan mengajar sekolah yang sudah didirikan Muhammadiyah di Pasaman. Nama sekolah tersebut adalah Mortais yang sudah dirintis pendiriannya pada 1932.²⁵² Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh warga Muhammadiyah yang ada di Malalo. Ranting Muhammadiyah di sini didirikan pada 1935. Meskipun dalam proses pembentukannya menghadapi tantangan dan rintangan hebat, baik dari pihak sebagian masyarakat lebih-lebih dari yang sedang berkuasa di saat itu, yaitu kepala nagari.

Dalam konteks itu, Hamka menulis bahwa pembentukan itu ia datang sendiri bersama Yaman Thaher, muridnya. Ia selain sebagai pimpinan Muhammadiyah, sekaligus sebagai Direktur Khuliyatul Mubalighin pertama yang baru pula didirikannya pada 1935 sekembalinya dari Makasar.²⁵³ Pada waktu proses pembentukan ranting dimaksud kepala nagari paling kuat menentang kehadiran Muhammadiyah. Begitu antipatinya terhadap Muhammadiyah sampai-sampai ia mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat banyak akan memotong kelingkingnya jika pendirian Muhammadiyah jadi dilaksanakan. Sikap arogan kepala nagari tersebut sebenarnya dapat dilihat dari sisi psikologis bahwa dua hari sebelumnya ia dipanggil oleh Asisten Demang²⁵⁴ terkait dengan perkembangan mutakhir terhadap kehidupan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Pada saat itu, suasana politik masih hangat dan dalam keadaan yang belum kondusif karena setahun sebelumnya (1934) dua organisasi masa dicekal dan tidak dapat lagi melakukan aktivitas secara lebih leluasa di nagari Malalo tersebut. Rapat-rapat pun tidak bisa lagi dilaksanakan kecuali tanpa sepengetahuan dari pemerintah nagari setempat. Organisasi yang dimaksud adalah Permi dan PSSI.²⁵⁵ Kedua organisasi ini sesungguhnya memiliki basis yang kuat di nagari tersebut.

²⁵² Obert Fernando, *op. cit.*, hlm. 37.

²⁵³ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 57.

²⁵⁴ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 89.

²⁵⁵ *Ibid.*

Suasana yang tidak kondusif bagi pembentukan ranting, Hamka yang direncanakan meresmikan ranting tersebut hampir saja batal karena beberapa orang tokoh masyarakat yang akan dijadikan sebagai pimpinan merasa ragu dan khawatir terhadap keselamatan jiwa dan keluarganya. Apalagi adanya ancaman kepala nagari yang tidak tanggung-tanggung. Hamka tidak menyerah dengan kondisi yang seperti demikian, maka dicari jalan lain agar keluar dari perangkap tersebut. Pembentukan yang direncanakan dilaksanakan di surau pada malam harinya oleh Hamka setelah mendapat kesepakatan dengan anggota Muhammadiyah yang akan menjadi pimpinan dipindahkan pada siang harinya. Kemudian tempat yang semula dilaksanakan di surau, dipindahkan ke rumah anggota Muhammadiyah. Sedangkan pada malam harinya diisi dengan pengajian umum dan tidak lagi menyinggung-nyinggung masalah pembentukan ranting Muhammadiyah. Hal itu, membuat situasi yang aman untuk mengembangkan Muhammadiyah.²⁵⁶

Beban Berat pada Pendudukan Jepang

Perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau sejak di perkenalkan oleh Abdul Karim Amrullah dan kemudian dituntun jalannya oleh AR. Sutan Mansur dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang pesat. Dari Sungai Batang Muhammadiyah terus berkembang menyusup masuk kenagari-nagari yang ada diselingkaran danau Maninjau dan menjalar kedaerah sekitarnya. Pada sekitar daerah ini, Muhammadiyah bukan hanya sekadar diterima tetapi sekaligus dengan bangunan struktur organisasinya seperti terbentuknya ranting di berbagai nagari. Begitu pula melalui jalur Padang Panjang meskipun tantangan yang dihadapi lebih berat, tetapi Muhammadiyah lebih berkembang dan menjalar daerah-daerah sekitarnya bahkan sampai melebar ke provinsi tetangga. Dari dua jalur ini pula tumbuh dan berkembangnya kader-kader Muhammadiyah yang militan dan tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air. Hal ini, tentunya ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat dan solid. Pada fase ini kepemimpinan Muhammadiyah ada di tangan tiga tokoh

²⁵⁶ *Ibid.*

besar secara berkelanjutan mulai dari AR. Sutan Mansur, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, dan Hamka sampai 1949. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh berikutnya hingga sekarang.

Jauh sebelum Jepang menduduki Indonesia, tentara Nazi Jerman telah melakukan invasi ke Hindia-Belanda. Invasi tersebut telah mengubah peta perang dunia baik di Eropa maupun di Pasifik. Pada front Eropa, Belanda mempertahankan sekuat tenaga daerah jajahannya, namun tidak kuat menghadapi gempuran dan serangan tentara Nazi. Pertahanannya hanya bertahan selama beberapa hari. Dalam hal itu, pemerintah Belanda menyatakan menyerah. Namun demikian, pihak Belanda tetap mengendalikan koloni-koloninya terutama di Asia Tenggara karena perang belum lagi selesai. Ketika itu, pihak Belanda masih tetap berharap agar dapat merebut kembali wilayahnya dengan bantuan sekutu. Oleh karena Belanda di negerinya sudah menyerah dan pemerintahnya diungsikan ke Inggris, maka otoritas Belanda di Hindia-Belanda menetapkan status darurat perang.²⁵⁷

Salah satu kebijakan strategis pasca dinyatakan sebagai darurat perang adalah memperketat perdagangan Hindia-Belanda dengan musuh-musuhnya termasuk Jepang. Tindakan otoritas Belanda pada 1940 menghentikan seluruh ekspornya ke Jepang, karena Jepang dalam perang masuk ke dalam blok Nazi. Tindakan Belanda ini mengundang reaksi keras dari Jepang sendiri. Oleh sebab itu, Jepang mengirim delegasinya, yaitu Kobasyi untuk melakukan negosiasi dengan pihak otoritas Belanda hingga perdagangan kembali dapat dibuka. Proses demikian, tidak bertahan dalam waktu yang cukup lama karena pada Januari 1941, Jepang di bawah pimpinan Yoshizawa memaksa otoritas Belanda agar menyerahkan Hindia-Belanda kepadanya untuk bergabung dengan Asia Timur Raya.²⁵⁸ Akan tetapi, pihak otoritas Belanda tidak mau menyerahkannya dan bahkan Van Mook menolaknya dengan tegas dan keras. Hal ini menjadi faktor pendorong Jepang melakukan ekspansi ke Hindia-Belanda. Terhitung sejak itu, Jepang secara beruntun menginvasi dengan mendaratkan

²⁵⁷ Dodik Ariyanto, "Tentara Nasional Indonesia dalam Evolusi Negara Republik Indonesia," *Jurnal Negarawan*, No. 25 Tahun 2012, hlm. 134.

²⁵⁸ *Ibid.*

masukannya di pantai selatan Thailand dan pantai utara Malaysia. Pada bulan itu juga Jepang menyerang Filipina berhadapan dengan tentara Inggris di Kuching Serawak.²⁵⁹ Jepang hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan dalam menaklukkan Amerika, Inggris dan Belanda di wilayah Malaya, Manila, Sabah, Brunei dan sampai menduduki Hindia-Belanda kecuali Papua Barat. Pada akhir 1941, Jepang dengan kekuatan militernya berhasil sepenuhnya mengambil alih wilayah Hindia-Belanda.²⁶⁰ Bersamaan dengan masuknya Jepang ke Hindia-Belanda, Muhammadiyah Minangkabau pada sebagian cabang tidak terpengaruh dengan keadaan demikian. Bahkan pada 1941 ini, Muhammadiyah Pasaman, berhasil mendirikan sekolah Muhammadiyah pertama untuk daerah Pasaman tepatnya di Rumbai dengan gurunya pertama adalah AK. Dt. Gunung Hijau. Tokoh ini, selain berposisi sebagai guru ia juga sekaligus memfungsikan diri sebagai aktivis Muhammadiyah sehingga pengaruhnya sampai ke daerah-daerah sekitarnya seperti Panti, Tapus, Bonjol, dan Lubuk Sikaping. Salah satu model dan strategi untuk dapat diterimanya Muhammadiyah oleh daerah-daerah tersebut, AK. Dt. Gunung Hijau lebih banyak mendekati kelompok muda. Kemudian mereka yang direkrut dilibatkan secara aktif di dalam Hizbul Wathan.

Pada 7 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia-Belanda secara resmi menyatakan menyerah kepada Jepang. Dua hari kemudian, tepatnya 9 Maret 1942 terjadi penandatanganan penyerahan tanpa syarat kekuasaan atas Hindia-Belanda kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati, Subang.²⁶¹ Dari pihak Hindia-Belanda hadir Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh dan Letnan Jenderal Ter Poorten sedangkan Jepang diwakili oleh Panglima Bala Tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.²⁶² Sejak penandatanganan itu, berakhir sudah penguasaan Hindia-Belanda oleh pemerintah kolonial dan digantikan oleh Jepang. Selanjutnya, keesokan harinya, tentara Jepang melucuti

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Wahyono.S.K, "Berakhirnya Kekuasaan Belanda di Hindia-Belanda", *Majalah Veteran*, Vol. 2 No.7 Maret 2012, hlm. 12.

²⁶² *Ibid.*

semua senjatanya tentara Belanda termasuk Konenlijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Dalam pada itu, sebagian dari tentara Belanda ada yang melarikan diri ke Australia, dan sedangkan yang lainnya ditawan oleh tentara Jepang. Hari itu Jepang mulai menggantikan peranan Belanda sebagai penjajah. Sumatra dan Jawa dikuasai Angkatan Darat Jepang (*Rikugun*), Tentara ke-25 dan ke-16, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dikuasai Armada Selatan II Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*).²⁶³ Meskipun demikian, perang belumlah usai karena di tempat lain sekutu masih menguasai banyak daerah koloninya. Bukan tidak mungkin, serbuan Belanda akan kembali bersamaan dengan kebergabungannya dengan tentara sekutu. Dalam rangka itu, Jepang sudah memiliki perencanaan dan skenario sendiri dalam menghadapi situasi perang tersebut dengan memobilisasi semua sumber daya dari daerah jajahnya. Walaupun pada awalnya masuk lebih memperlihatkan akomodatifnya dan bahkan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia.²⁶⁴ Begitu pula dalam bidang keagamaan yang menjadi konsennya organisasi-organisasi Islam, mereka menyatakan tidak akan ikut campur di dalamnya.²⁶⁵

Tentunya, peralihan kekuasaan ini, menjadi babak baru bagi sejarah Hindia-Belanda. Pada awal-awal pendudukannya disambut hangat oleh masyarakat dan dianggap penting dalam memecahkan hubungan sosial tradisional pada tingkat lokal, serta menyiapkan tradisi bagi terciptanya latar belakang revolusi nasional dan sosial 1945-1949. Di masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi pedesaan secara langsung dihubungkan dengan dunia luar dalam pengertian politik, ekonomi, dan spiritual. Dalam hal ini diperkenalkannya lembaga-lembaga sosial yang baru kepada masyarakat desa atau setidaknya-tidaknya bagaimana Jepang dapat memanfaatkan lembaga-lembaga sosial politik yang telah ada bagi kepentingan politik Asia Timur Raya.²⁶⁶

Dalam hal itu, Jepang melakukan upaya-upaya yang dipandang

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ Siti Fatimah, "Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau pada Masa Pendudukan Jepang", *Tingkap*, Vol. VII No. 1 Th. 2011, hlm. 83.

strategis, di antaranya membangun opini kepada masyarakat yang ditaklukkannya bahwa kedatangannya bukanlah sebagaimana penjajah Barat melainkan untuk membebaskan Asia dari cengkeramannya. Opini tersebut secara umum berhasil dilakukan Jepang sehingga nyaris ketika menduduki Hindia-Belanda tidak ada perlawanan dari masyarakat. Oleh sebab itu, Jepang dengan strateginya melakukan pertemuan dengan para tokoh yang mewakili seluruh komponen yang terdapat pada Hindia-Belanda, di antaranya Soekarno, Hatta, Syahrir dan KH. Mas Mansur dengan maksud untuk membentuk kekuatan melawan sekutu. Kekuatan itulah yang kemudian dalam bentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Tentunya, pembentukan organisasi ini oleh para pejuang dimanfaatkan untuk persiapan memerdekakan negeri dari kekuatan asing.

Kemudian Jepang membentuk pasukan cadangan yang akan diperbantukan dalam mempertahankan pasukannya di Indonesia melawan musuh-musuhnya termasuk akan dijadikan sebagai pasukan tempur ke Vietnam. Pasukan tersebut pada mulanya disebut dengan PETA. Akan tetapi pembentukannya tidak serentak untuk seluruh Indonesia melainkan dilakukan secara bertahap tergantung kepada kebijakan penguasa militer pada masing-masing daerah. Hal itu, disebabkan penguasa Jepang hanya dapat melakukan komunikasi yang sangat terbatas karena wilayahnya sangat luas dan jaraknya sangat berjauhan. Masing-masing pusat pemerintahan lebih banyak menjalankan tugas sendiri-sendiri.²⁶⁷

Sebelumnya, AR. Sutan Mansur, konsul Muhammadiyah Minangkabau terlibat dalam perundingan dengan Vander Plas sebagai *Vice Voorzitte Radlan Indie* tentang pembatalan peraturan-peraturan Belanda bagi pribumi putra dan lain-lain terutama di dalam menghadapi perang dunia kedua. Tidak lama kemudian setelah perundingan tersebut, pada 17 Maret 1942, Jepang mulai masuk di Padang²⁶⁸ dan mendudukinya mulai pada 9 Agustus 1942, yang dipimpin oleh Kenzo Kano bersama bersama dengan 68 orang pegawai sipil lainnya.²⁶⁹

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 80.

²⁶⁸ *Ibid*, hlm. 81.

²⁶⁹ *Ibid*, hlm. 83.

Ketika itu, para tokoh dan pimpinan Minangkabau menunjukkan pendapat dan sikap yang berbeda di dalam menyikapi masuknya Jepang di Minangkabau. Masyarakat umumnya menyambut baik kedatangan tentara Jepang ini karena opini yang terbangun di masyarakat sebelumnya Jepang akan datang untuk mengusir Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa Belanda dalam waktu yang lama memperlakukan masyarakat tidak secara manusiawi dan selalu berada dalam ancaman dan intimidasi. Jadi, kedatangan Jepang ini bagaikan sebuah kekuatan yang akan mengeluarkan masyarakat dari keadaan ketertindasan. Pada saat itu, kekuatan masyarakat dengan para tokohnya belum mampu melawan kekuatan Belanda. Jauh dari itu, Jepang dalam persepsi masyarakat akan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dan memberikan kemakmuran. Bukan hanya Indonesia, opini yang berkembang justru Jepang akan membebaskan Asia dari cengkeraman penjajahan dunia Barat. Meskipun berita ini ketika Belanda masih menduduki sudah beredar tetapi kegembiraan yang dimaksud masih disembunyikan dengan tujuan tidak diketahui oleh pihak Belanda. Opini seperti inilah yang menelusup masuk sehingga ketika Jepang betul-betul sudah datang ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau menyambutnya dengan antusias bagaikan sang penyelamat. Wujud dari kegembiraan tersebut diperlihatkan dengan memasang bendera merah putih disandingkan dengan bendera hinomaru, yaitu bendera Jepang. Hal itu terjadi atas kesadaran masyarakat sendiri sehingga Jepang tidak memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan masyarakat.

Sedangkan pendapat dan sikap yang ditunjukkan oleh para politisi tidak satu arah. Pada satu sisi ada yang berpendapat dan bersikap skeptis terhadap Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pendapat ini menurut Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah didasarkan pada fakta bahwa di Manchukuo dan Formosa, di mana dalam waktu beberapa tahun saja kedua daerah itu sudah hampir kehilangan integritas dan kepribadiannya.²⁷⁰ Selain itu, ada pula pendapat lain yang

²⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 181.

mengemukakan bahwa masuknya Jepang, tidak akan dapat mengubah nasib masyarakat dari keadaan semasa Belanda. Hal ini didasarkan pada sifat dan kenyataan dari penjajahan yang dikuasai oleh fasis-militer. Dalam praksisnya, dapat dipastikan bersifat otoriter, diktator dan tidak ada istilah demokrasi. Tambah lagi dengan kenyataan perlakuan dan kekejaman Jepang di medan perang.²⁷¹

Selain pendapat di atas, ada pula yang berpandangan bahwa kedatangan Jepang secara nyata memang memberikan kebaikan karena kekuatan imprealisme Belanda dapat diusir. Pada saat-saat itu, bangsa Indonesia dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menyusun kekuatan sendiri guna mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Menurut Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah mereka yang beranggapan begini termasuk pemimpin-pemimpin rakyat yang betul-betul sadar bahwa nasib rakyatnya harus diperjuangkan supaya lebih baik dengan jalan bagaimanapun juga, kalau perlu kerja sama dengan Jepang buat sementara jalan kesempatan ada akan dipergunakan sebaik-baiknya. Mereka inilah pemimpin-pemimpin rakyat yang militan.²⁷² Misalnya, Jamil Jambek dan Khatib Sulaiman termasuk ke dalam kelompok ini. Jamil Jambek adalah sosok ulama kaum muda yang berpengaruh di kalangan umat Islam. Begitu pula Khatib Sulaiman, ia merupakan tokoh nasionalis yang juga memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Bersamaan dengan pendapat di atas, terdapat pula sikap dan pendapat masyarakat yang ketakutan dengan kedatangan Jepang karena akan mengacaukan keadaan mereka yang relatif sudah baik. Mereka ini termasuk orang-orang yang menjadi pegawai Belanda yang lebih Belanda daripada Belanda sendiri. Mereka tidak mengharapkan kedatangan Jepang sama sekali.²⁷³

Kemudian militer Jepang membubarkan dan membekukan semua partai politik dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, kecuali Muhammadiyah yang masih tetap diberikan untuk bergerak. Meskipun demikian, Muhammadiyah harus menyesuaikan dengan

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibdi*, hlm.183.

kebijakan penguasa militer Jepang sambil tidak terpengaruh dengan agama Shinto yang menjadi keyakinan tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang Muhammadiyah nyaris tidak dapat pula bergerak secara lebih leluasa sebagaimana sebelumnya. Hal itu, disebabkan suasana perang. Komunikasi dan transportasi yang menghubungkan dengan daerah luar sangat sulit. Belum lagi, tekanan psikologis akibat dari penculikan yang dilakukan oleh tentara dan kaki tangannya terutama di kalangan anak-anak gadis.

Dalam hal itu, Jepang merekrut besar-besaran pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai tenaga pembantu tentara Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dalam hal itulah lahir Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) dengan kekuatan kurang lebih 80 Batalion.²⁷⁴ Setelah PETA di Jawa diresmikan, maka Gunseibu Sumatra yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan pengumuman untuk membentuk Giyugun. Pembentukan pasukan inipun untuk daerah Sumatra tidak serentak dengan alasan yang sama. Khusus di Minangkabau pendaftaran tahap pertama dimulai pada bulan November 1943, kemudian diikuti oleh Aceh, lalu Sumatra Timur dan seterusnya baru keresidenan atau *Shu* lainnya.²⁷⁵ Jauh sebelum Giyugun terbentuk, pada bulan Juli 1943 di Minangkabau sudah terbentuk organisasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi dalam proses peralihan kekuasaan. Perkumpulan ini dipimpin oleh Muhammad Syafe'i dan Chatib Sulaiman.²⁷⁶ Gerakan yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut memilih pengaruh yang cukup kuat karena rakyat telah memberikan dukungan positif terhadap Giyugun Sumatra sebelum Sumatra Gunseikanbu mengumumkan secara resmi.

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa penguasa tentara Jepang dalam memobilisasi rakyat tidak melakukannya secara serentak, apalagi dengan hubungan komunikasi yang sangat terbatas sangat dimungkinkan terjadi pola yang berbeda antara satu dengan daerah yang lainnya. Meskipun demikian, dalam gerakannya tetap memiliki corak

²⁷⁴ Wahyono.S.K, *op. cit.*, hlm. 12.

²⁷⁵ Siti Fatimah, *op. cit.*, hlm. 80.

²⁷⁶ *Ibid.*

yang serupa terutama dalam pengaturannya seperti pola rekrutmen pemuda untuk dijadikan sebagai militer. Di Jawa sebagaimana dikemukakan *Siti Fatimah* rekrutmennya dilakukan melalui pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama melalui kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama), maka di Sumatra juga berlaku cara seperti ini.²⁷⁷

Dikatakan demikian karena jauh sebelum pengumuman resmi Giyugun dikeluarkan, para pejabat militer Jepang yang mengurus pemerintahan untuk masing-masing Shu, telah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin agama setempat. Tidak mengherankan bilamana pembentukan Giyugun ini di Sumatra Barat mendapat sambutan positif oleh masyarakat, di mana para pemimpin agama yang berpengaruh dan para tokoh nasionalis memprogandakan tujuan pembentukan tentara suka rela dalam berbagai dakwah dan tempat umum.²⁷⁸ Ajaran-ajaran agama yang terkait dengan dorongan dan motivasi perjuangan, seperti jihad dan sejenisnya menjadi materi pokok yang paling ampuh di dalam propaganda memengaruhi pemuda. Jamil Jambek dan Khatib Sulaiman merupakan dua tokoh yang cukup dikenal dalam membangun hal ini. Diketahui bahwa Jamil Jambek adalah sosok ulama kaum muda yang sangat berpengaruh di kalangan umat Islam. Begitu pula Khatib Sulaiman, ia merupakan tokoh nasionalis yang juga memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Bagi Jepang, tentunya pembentukan pasukan ini merupakan proses mencapai tujuan, yaitu menjepangkan pemuda Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya Jepang menilai tidak banyak bisa diharapkan karena semangat membela tanah air yang ditanamkan Jepang justru memperkuat perasaan nasionalisme di kalangan pemuda.²⁷⁹

Dalam hal itu, pemerintahan telah bekerja sama dengan golongan adat, ulama dan kaum terpelajar. Tiga komponen tersebut dicoba dimobilisasi oleh Jepang dalam rangka membangun kekuatan politiknya di daerah bekas jajahan Belanda. Pada lembaga adat dicoba mendirikan suatu lembaga yang bernama "Balai Penyelidikan Masyarakat Minangkabau" pada 1943 dengan anggota terdiri dari

²⁷⁷ *Ibid*, hlm. 81.

²⁷⁸ *Ibid*.

²⁷⁹ *Ibid*.

orang dengan penguasa-penguasa adat dari berbagai daerah agar dapat mempelajari seluk beluk adat bagi kepentingan pemerintahan administrasi Jepang. Begitu juga memberi kesempatan bagi golongan terpelajar khususnya para pemuda memasuki pendidikan di bidang militer seperti Muhammad Syafe'i dan Khatib Sulaiman. Di sisi lain, Jepang juga memberikan kebebasan terhadap umat Islam untuk memperingati hari-hari besarnya, puasa pada bulan Ramadhan dan sebagainya, walaupun pada awalnya agak dibatasi.²⁸⁰

Sedangkan bagi kaum ulama, Jepang memperlihatkan keinginan kuatnya untuk mempersatukan ulama tidak hanya yang ada di Sumatra tetapi juga meliputi wilayah-wilayah di luar Hindia-Belanda. Langkah kongrit Jepang tampak dengan memediasi terselenggaranya Konferensi Islam I di Singapura. Konferensi yang dimaksud dilaksanakan pada 5 sampai 6 Maret 1943 dengan utusan Sumatra sebanyak 44 orang wakil, sementara Malaya mengirim 47 orang wakil. Konferensi tersebut bertujuan untuk; *Pertama*, menjelaskan gambaran tentang dunia Jepang. *Kedua*, menjadikan orang Islam supaya memahami pentingnya bekerja sama dengan Jepang. *Ketiga*, meyakinkan bahwa perkumpulan tersebut semata-mata untuk kepentingan umat Islam.²⁸¹ Dalam konferensi tergambar bahwa Jepang seolah-olah sangat memberikan perhatian kepada golongan Islam dan bagaimana hendaknya dengan bekerja sama dengan pihak Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Gambaran tersebut diungkapkan Marquisto Tokugawa dalam konferensi tersebut sebagaimana dikutip Siti Fatimah bahwa

Allah telah menciptakan 13 juta orang muslim untuk bekerja sama dengan Jepang. Orang-orang Islam baik hidup maupun matinya adalah bersama Jepang demi membangun Asia Baru dan orang-orang Islam hendaklah menerima uluran tangan yang demikian. Hendaklah disampaikan kepada penduduk yang beragama Islam oleh para tokoh Agama.²⁸²

Sebagai lanjutan dari pertemuan tersebut, pada bulan September 1943 dibentuk Majelis Islam Tinggi Minangkabau, yang anggotanya

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁸² *Ibid.*

terdiri dari para ulama Sumatra Barat. Kemudian atas gagasan Yano lembaga ini digabung ke dalam Lembaga Studi Adat yang bernaung di bawah satu wadah Kebudayaan Minangkabau. Dalam pada itu, Jepang berusaha pula menghimpun kaum terpelajar dan pemuda untuk dilatih jadi Giyugun dan tentara sukarela, lewat inisiatif dari para penghulu kaum. Pada awal Oktober 1943 para penghulu membuka kantor Barisan Sukarela di Padang atau kantor Giyugun yang pertama di Sumatra Barat. Pergerakan Jepang dalam rekrutmen pemuda menjadi militer jauh lebih maju daripada di Jepang. Pada waktu yang bersamaan para ulama yang di Bukittinggi juga mendirikan kelompok-kelompok yang sama.²⁸³

Dorongan yang besar bagi perkembangan Giyugun diberikan oleh Yano dalam suatu rapat besar pada 20 November 1943 di Bukittinggi. Terakhir ia mampu memengaruhi para penghulu, yang setidak-tidaknya telah dapat merekrut 20.000 prajurit dari setiap anggota sukunya. Seruan penghulu ini mendapat sambutan yang baik dari kelompok kaumnya. Propaganda Jepang semakin intensif dalam 1944. Berbagai macam kelompok yang ada disatukan dalam Hokokai, yang dipimpin oleh Muhammad Syafe'i dan Khatib Sulaiman dari golongan gerakan Nasionalis atau terpelajar. Datuk parpatih Baringek dan Datu Majo Uang dari kelompok adat dan Sech Djamil Djambek dan Sutan Mansur dari kelompok agama. Sedangkan Muhammad Syafe'i merupakan figur sentral dari keseluruhan kelompok gabungan ini. Di samping itu para kepala kampung diberikan latihan militer yang intensif dengan menanamkan semangat Asia Timur Raya.

Bila dihubungkan dengan pola kepemimpinan tradisional yang dikemukakan pada bagian terdahulu, jelas bahwa pemerintahan Jepang berusaha untuk memanfaatkan ketiga saluran tersebut, seperti halnya pemerintahan Hindia-Belanda dalam kepentingan politik daerah jajahan mereka. Sekalipun Jepang, secara ideal telah berusaha membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan dan melatih para pemuda dalam pendidikan militer dengan dalih demi kepentingan Asia bersama, namun dalam kenyataannya semua praktik-praktik yang dilakukan Jepang tidak kurang pahitnya dari apa yang pernah dilaksanakan

²⁸³ *Ibid.*

oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ternyata lembaga-lembaga tradisional yang ada telah merupakan saluran-saluran yang digunakan dan dimanfaatkan Jepang untuk kepentingannya. Penderitaan rakyat sungguh sangat luar biasa selama masa pendudukan Jepang.

Sifatnya penjajah tentu menguasai dan melakukan eksploitasi terhadap semua sumber daya yang ada. Kondisi yang merdeka, hanya dapat dirasakan masyarakat sekitar tiga bulan setelah Jepang masuk. Setelah itu, Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang ada di Hindia-Belanda. Bukan hanya itu, Jepang mulai melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan pemaksaan terhadap masyarakat bahkan terakhir kekejamannya melebihi daripada penjajahan Belanda. Kerja paksa yang diterapkannya adalah bagian yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah penjajahan Jepang baik untuk keperluan perang di dalam negeri maupun untuk menghadapi perang di Burma.²⁸⁴ Sama dengan penjajah Belanda, tentara Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa dalam hal memperbaiki jalan maupun membuat kebun untuk kepentingan dan penyediaan bahan pangan dan bahan industri untuk kepentingan perang bagi Jepang. Rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan Jepang.²⁸⁵

Para penghulu, kepala-kepala kampung/desa, dipaksa untuk merekrut para tenaga-tenaga kerja paksa untuk pembuatan-pembuatan jalan raya, jalan kereta api, dan jembatan-jembatan. Praktik-praktik demikian dikenal dengan *Romusha*.²⁸⁶ Kemudian hasil panen masyarakat dipaksa oleh pemerintah untuk dikumpulkan dan ditumpuk pada tempat-tempat tertentu²⁸⁷ sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil panennya. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi miskin dan bahkan kelaparan terjadi di mana-mana. Di sisi lain, pemerintahan militer juga membanjiri Indonesia dengan sejumlah mata uang. Akibatnya, pada masa selama pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya Minangkabau mengalami penderitaan yang luar biasa,

²⁸⁴ Wahyono.S.K, *op. cit.*, hlm. 12.

²⁸⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 181.

²⁸⁶ Siti Fatimah, *op. cit.*, hlm. 83.

²⁸⁷ *Ibid.*

inflasi, kekerasan, pencatutan, korupsi, pasar gelap dan tingkat kematian yang paling tinggi.²⁸⁸Belum lagi kekerasan dan kekejaman tentara Jepang terhadap kaum perempuan. Gadis-gadis di pedesaan direkrut untuk dijadikan wanita-wanita penghibur terutama di kamp-kamp atau markas-markas tentara Jepang. Keadaan demikian, memaksa orang tua mengawinkan anak gadisnya pada usia yang masih sangat muda (11-15 tahun) dan diberhentikan dari sekolah karena orang tua dihantui dengan ketakutan oleh tentara Jepang.²⁸⁹Meskipun hanya tiga setengah tahun, namun kurban menjadi romusha baik harta benda, maupun putra-putri Indonesia tidak terhitung jumlahnya.²⁹⁰

Jadi, sikap dan opini yang terbangun pada masyarakat bahwa Jepang akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat tidak terbukti sama sekali. Justru yang terjadi adalah penzaliman dan penyiksaan. Tentunya, situasi demikian memunculkan rasa takut dan tidak nyaman bagi masyarakat. Dalam hal itu, pemimpin-pemimpin masyarakat yang militan selalu berusaha bergerak kearah tercapainya tujuan Indonesia merdeka. Karena keadaan memaksa mereka pada satu sisi terpaksa kerja sama dengan Jepang, kalau tidak kemungkinan keadaannya akan semakin memburuk. Dalam kerja sama itulah mereka berusaha membina kader-kader pemuda dengan berkedok untuk menjaga keamanan, melatih pemuda-pemuda supaya dapat membantu Jepang di medan perang dan sebagainya.²⁹¹Misalnya, AR. Sutan Mansur sebagai pimpinan Muhammadiyah menunjukkan sifat akomodatif terhadap penguasa militer Jepang. Dalam hal itu, ia melakukan perundingan dengan Syuco Kang (penguasa wilayah) Jepang di Padang agar Jepang tidak mengganggu gerak agama²⁹² sesuai dengan janji pemerintah Jepang sebelum masuk ke Indonesia. Pada ranah demikian, beberapa tokoh Minang berupaya untuk menyatukan sikap dan menyusun strategi baru menghadapi tentara Jepang yang sudah menduduki Minangkabau.

²⁸⁸ *Ibid*, hlm. 84.

²⁸⁹ *Ibid*.

²⁹⁰ AR. Fakhruddin, *Menyongsong Muktamar Muhammadiyah*, hlm. 4.

²⁹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm. 182.

²⁹² Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 57.

Tokoh-tokoh yang dimaksud mewakili semua komponen, di antaranya; kalangan intelektual dan ulama diwakili oleh Moh Syafi'i, Syaikh Jamil Jambek, Sulaiman ar-Rasuli, AR. Sutan Mansur, Sirajuddin Abbas dan Khatib Sulaiman. Sedangkan dari komponen ninik mamak, di antaranya M. Rusyad Dt. Parpatiah Baringek dan Dt. Majo Urang. Yang disebutkan terakhir merupakan mantan pegawai Belanda dengan harapan dapat mengimbangi ketika berhadapan dengan Jepang. Kemudian dari kalangan cerdik pandai ada Harun al-Rasyid, al-Rahim Usman, St. Muhammad Rasyid, Rasyidin dan seterusnya. Jadi, semuanya mewakili seluruh komponen yang ada di Minangkabau.²⁹³

Meskipun pada mulanya, umat Islam memiliki secercah harapan dengan masuknya Jepang untuk dapat diberikan kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan keberagamaan. Apalagi sebelum masuk ke Indonesia ada janji yang dinyatakan Jepang yang menguntungkan bagi umat Islam. Kebijakan yang dimaksud menyatakan Jepang tidak akan membunuh agama Islam dan tidak memusuhi orang-orang Islam.²⁹⁴ Hal ini, tentunya memberikan angin segar bagi umat Islam untuk dapat bergerak lebih leluasa. Oleh karena pada zaman Belanda terutama diakhir-akhir penjajahannya umat Islam berada dalam tekanan berat dan intimidasi dari pemerintah kolonial. Begitu pula di zamannya Jepang, Muhammadiyah secara nasional nyaris tidak dapat bergerak sebagaimana dikemukakan AR. Fakhruddin bahwa

Muhammadiyah hampir tidak dapat berjalan, dalam arti gerak melaksanakan ajaran Islam. Anggaran Dasar Muhammadiyah dirobah menurut maunya Jepang. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah K.H. Mas Mansur diambil oleh Pemerintah Jepang dijadikan anggota Empat Serangkai (Bung Kamo, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur). Pusat Tenaga Rakyat di bawah Pemerintah Balatentara Jepang, K.H. Mas Mansur sampai menderita sakit dan pada 1945 diganti oleh Ki Bagus Hadikusumo. Empat Serangkai Pusat Tenaga Rakyat barulah bubar setelah Jepang dibom atom oleh Amerika.²⁹⁵

Situasi yang demikian, membuat Muhammadiyah tidak dapat melaksanakan roda organisasi dengan baik. Kongres yang mestinya

²⁹³ *Ibid*, hlm. 59.

²⁹⁴ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 119.

²⁹⁵ AR. Fakhruddin, *op. cit.* 4-5.

berjalan setiap tahunnya guna mengevaluasi pergerakan dan termasuk pergantian kepemimpinan tidak dapat dilaksanakan, kecuali hanya sebatas silaturahmi Muhammadiyah terbatas hanya pada Jawa. Menyikapi kondisi yang semakin sulit itu, pada awal 1942 Pengurus Besar (Hoofd Bestuur) Muhammadiyah melakukan pertemuan silaturahmi dan konsul diberikan kewenangan untuk bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan daerah masing-masing sekiranya keadaan semakin sulit dan terputus.²⁹⁶ Dalam hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta terpaksa mengubah strategi perjuangan dengan tidak membubarkan diri melainkan mengubah sebutan Muhammadiyah menjadi “Persyarikatan Agama Islam Muhammadiyah” (PAI Muhammadiyah).²⁹⁷

Dalam pada itu, otoritas Jepang melihat bahwa kelompok-kelompok Islam adalah kekuatan penting di masyarakat dan kemudian mencoba mengendalikannya dengan mendirikan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).²⁹⁸ Hal itu, ditunjukkan dengan sikap akomodatifnya Jepang terhadap kelompok Islam dibandingkan dengan kelompok nasionalis. Sikap akomodatif itu bukan hanya kepada Muhammadiyah saja melainkan juga pada kelompok Islam lainnya seperti Perti. Terhadap organisasi Islam ini Jepang membiarkan dan memberikan keleluasaan untuk melaksanakan aktivitas baik dalam bentuk pengelolaan pendidikan maupun pengajian. Oleh karena Jepang menyadari bahwa Islam merupakan agama yang dianut dan diyakini oleh seluruh penduduk Minangkabau dan memiliki pengaruh yang menentukan dalam kehidupan masyarakat²⁹⁹ termasuk dalam persoalan adat. Hal itu, dibuktikan dengan kegigihan masyarakat melakukan perlawanan terhadap Belanda meskipun dalam waktu yang cukup lama. Dalam konteks demikian, Jepang menilai bahwa Islam dan adat yang begitu kuat dapat dijadikan sebagai alat yang

²⁹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

²⁹⁷ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 119.

²⁹⁸ Muhammad AS Hikam (Ed.), *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah* (Jakarta: Rumah Buku, t.th), hlm.101.

²⁹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm.179

sangat baik untuk menanamkan pengaruhnya di Minangkabau dan bahkan jauh dari itu Jepang berobsesi akan memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan Japanisasi.

Sedangkan dalam konteks administrasi pemerintahan pada mulanya Jepang agak lebih maju daripada sikap Belanda. Pada masa kolonial, jabatan-jabatan pemerintah secara keseluruhan diisi dan dikendalikan oleh pihak Belanda. Sedangkan pada kependudukan Jepang jabatan-jabatan pemerintah yang dipegang oleh Belanda diserahkan kepada tokoh masyarakat termasuk jabatan-jabatan tinggi atau strategis. Kondisi ini bukan hanya pada waktu awal Jepang menduduki Indonesia, ketika tenaga ahlinya masih dalam keterbatasan, melainkan hal itu terus berlangsung sampai akhir penjajahannya. Semua istilah-istilah Belanda yang digunakan dalam struktur politik dan pemerintah diganti dengan istilah atau bahasa Jepang termasuk mengganti nama Hindia-Belanda menjadi Indonesia secara resmi.³⁰⁰ Sementara itu, struktur pemerintahan tidak dirubah dan tetap mengikuti struktur yang sudah ada pada masa penjajahan Belanda. Yang diganti hanyalah istilah dan orang-orangnya. Istilah-istilah yang selama ini digunakan dengan menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Jepang sebagaimana ditulis *Siti Fatimah* bahwa

Sumatra Barat yang bernama *Sumatra West Kust* diganti dengan nama *Sumatra Neishi Kaigun Shu*. *Afdeeling* yang dikepalai oleh Asisten Residen diganti dengan nama *Bun*, yang dikepalai oleh *Bun Shu Cho*. *Onder Afdeeling* yang dikepalai oleh kontroler dirubah menjadi *Baku Bun Cho*. Distrik yang dikepalai oleh demang dirubah menjadi *Gun* dan dikepalai oleh *Gun Cho*. *Onder District* yang dikepalai oleh Asisten Demang diganti dengan nama *Fuko Gun* (Kecamatan) yang dikepalai oleh *Fuko Gun Cho* unit pemerintahan yang terkecil yaitu negara tetap dikepalai oleh seorang kepala nagari.³⁰¹

Hal itu, disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Jepang sendiri. Militer yang sampai ke Indonesia dan

³⁰⁰ Agustina Magdalena Djulianti Suroyo, *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia Sebuah Proses yang Belum Selesai, Pidato Pengukuhan*, Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro di Semarang, 9 Februari 2002, hlm. 11.

³⁰¹ *Siti Fatimah, op. cit.*, hlm. 83.

khususnya di Minangkabau adalah militer yang tidak memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup dalam mengelola pemerintah sipil sebagaimana halnya kolonial Belanda. Keadaan demikian, tidak mengherankan bilamana corak pemerintahan yang dibangun oleh Jepang bercorak militer dan tidak sipil. Sekalipun pemerintah Jepang pernah mengirimkan tenaga ahlinya dalam bidang pemerintahan sipil, tetapi tidak pernah sampai ke Indonesia karena di perjalanan kapal yang mengangkutnya ditenggelamkan oleh serdadu sekutu.³⁰² Dalam konteks itulah, di Minangkabau pada awal pendudukan Jepang mempergunakan orang-orang Minangkabau sendiri yang sebelumnya telah duduk juga dalam administrasi pemerintahan Hindia-Belanda, dengan syarat tidak melanggar otoritas Jepang.³⁰³

Selain lembaga administrasi pemerintahan terdapat lagi beberapa lembaga administrasi yang bergerak di bidang lainnya. Di antara koperasi bentuk baru tersebut adalah *Kumiai* dan *Rukun tetangga Tonariguni*. kemudian pada 1 Oktober 1942 Yano mendirikan majelis Kerukunan Minangkabau yang bertujuan bagi Jepang untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya bagi wilayah tersebut. Anggotanya kadang-kadang terdiri dai 10 sampai 20 orang, yang diwakili dari setiap distrik, subdistrik, kepala nagari, kepala adat, para ulama, pemuda dan kaum terpelajar.³⁰⁴

Meskipun demikian, para tokoh Minangkabau secara khusus dan Indonesia umumnya tetap berada dalam pengawasan yang ketat dari para ahli dan penguasa Jepang terutama posisi-posisi strategis. Dalam hal itu, penguasa Jepang dalam keadaan dan waktu-waktu tertentu dapat saja mencampuri dan mengambil alih sesuai dengan yang dikehendaknya. Pada sisi ini, Minangkabau masih sangat diuntungkan terutama ketika kemerdekaan telah diumumkan, banyak di antara tokoh-tokoh Minang yang memberikan kontribusi dalam penyusunan prinsip-prinsip dasar negara dan dalam pemerintahan Republik Indonesia.³⁰⁵ Dalam sejarahnya, sikap toleransi dan akomodatif itu

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah

memberikan ruang bagi tokoh Minang. Misalnya, pada saat itu Syekh Jamil Jambek dan Haji Mansur Daud serta Datuk Palimo Kayo dapat mendirikan Majelis Tinggi Islam Minangkabau.³⁰⁶ Sedangkan AR. Sutan Mansur pada 1942-1945 itu diangkat menjadi anggota Syu Sa Ngi Kai dan Syu Sa Ngi In.³⁰⁷ Begitu pula ketika militer Jepang membuka ruang untuk mendirikan partai politik di Minangkabau, pimpinan Muhammadiyah mendirikan Hizbullah dan Sabilih Muslimat. Hampir semua pimpinan aktif pada dua organisasi tersebut sedangkan yang sebagian lagi aktif pada anggota komite nasional KNIP. AR. Sutan Mansur sebagai anggota KNIP, selain mengurus parlemen ia juga sekaligus mengurus Muhammadiyah dalam menghubungkan komunikasi antara pimpinan pusat dengan daerah.

Dalam pada itu, Jepang menginisiasi pertemuan ulama Sumatra dan Malaya di Singapura yang oleh Jepang dinamai Syionanto. Pada pertemuan tersebut dari Minangkabau diutus syaikh Sulaiman ar-Rasuli, AR. Sutan Mansur, H. Sirajuddin Abbas dan Mahmud Yunus. Dalam pertemuan tersebut AR. Sutan Mansur bertemu dengan empat konsul Muhammadiyah di antaranya H. Abdul Mun'in, konsul Tapanuli, H. Abdul Malik Karim Amrullah, konsul Sumatra Timur dan M. Hasbi as-Shiddiqiy, konsul Aceh.³⁰⁸ Selanjutnya, AR. Sutan Mansur diangkat menjadi anggota (Gi In) saat-saat Jepang akan jatuh. Dalam pada itu, di zaman Jepang ini tepatnya 1942 pula Duski Samad, adik AR. Sutan Mansur yang sebelumnya bergabung dengan komunis masuk ke dalam Muhammadiyah dan menjadi ujung tombak dalam Muhammadiyah.³⁰⁹ Namun, sikap akomodasi tersebut hanya terjadi di awal-awal kedatangan Jepang. Kebijakan ini hanya berjalan dalam waktu yang singkat.

Dalam perkembangannya, Jepang ternyata mencampuri soal agama pula terutama dalam seluruh bidang pendidikan agama. Hal

dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hlm.180.

³⁰⁶ *Ibid.*, hlm.179.

³⁰⁷ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 57.

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ *Ibid*, hlm. 59.



Suasana Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi

Sumber: Koleksi Pusat Data, Penelitian-Pengembangan Suara Muhammadiyah

ini merupakan salah satu beban terberat yang dipaksakan kepada umat Islam Indonesia.³¹⁰ Suasana seperti ini kembali ke zamannya Belanda dalam bentuk ordonansi bahkan dalam perjalanannya, kebijakan politik Jepang sama sekali tidak memberikan ruang kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk bergerak secara bebas termasuk Muhammadiyah. Jepang bertindak lebih brutal lagi dan di luar batas prikemanusiaan. Semua partai dan organisasi kemasyarakatan termasuk pandu sebagaimana halnya Hizbul Wathan dibubarkan oleh Jepang. Satu-satunya gerakan kepemudaan yang dibolehkan hanyalah “Pemuda Nippon Raya” yang dibentuk sendiri oleh Jepang di bawah pimpinan Letnan Jepang Sakaguci. Semua organisasi-organisasi kepemudaan yang sebelumnya eksis, kemudian seluruhnya dipaksa masuk ke dalamnya. Selain itu, Jepang memerintahkan kepada pemuda untuk masuk ke dalam Gyu Gun, yaitu tentara sukarela. Dalam kenyataannya banyak anggota Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathan yang bergabung di dalamnya. Meskipun demikian, Muhammadiyah di Minangkabau hampir tidak dapat bergerak maju, kecuali hanya bertahan memelihara apa yang telah ada.

Oleh sebab itu, pimpinan Muhammadiyah mengambil strategi lain sejalan dengan perubahan dan pergantian kekuasaan. AR. Sutan

³¹⁰ Samsul Nizar, *op. cit.*, hlm. 73.

Mansur yang memimpin Muhammadiyah berkomitmen untuk tetap menjaga dan merawat Kulliyatul Mubalighin dan Tsanawiyah di Padang Panjang karena inilah aset satu-satunya yang bisa dikembangkan untuk ke depannya. Dalam situasi yang sulit dan pelit itu, pimpinan Muhammadiyah masih bisa menambah dan mendirikan satu lembaga pendidikan lagi di masa ini, yaitu SMP Muhammadiyah setingkat dengan Tyogokko di bawah pimpinan Raden Sulaiman. Pada masa ini, pimpinan Muhammadiyah lebih banyak bersifat pasif dan menunggu.³¹¹ Dalam hal itu, Muhammadiyah mencari ruang yang tidak terlalu berisiko terutama bagi anak-anak sekolah. Pada mulanya, militer Jepang hendak memaksakan pula kepada lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk memperbaiki jalan kereta api. Dengan alasan bahwa murid-murid sekolah Muhammadiyah sebagian besar masih berada di bawah umur, maka pimpinan Muhammadiyah akhirnya dapat dispensasi dari militer Jepang untuk memindahkannya kepada pembuatan kebun perang seluas tiga hektar di Sungai Andok.³¹² Dengan itu, Muhammadiyah mendapatkan peralatan pertanian dan kebun dari militer Jepang seperti cangkul, tembilang, sekop, sabit, dan alat-alat pertanian lainnya. Ketika itu, murid dan guru Muhammadiyah sudah berjumlah sekitar 2500 orang.³¹³ Pengerahan kerja paksa itu bukan hanya murid dan guru melainkan juga dilibatkan para orang tua murid. Gotong royong yang dimaksud dilaksanakan setiap Kamis sekali dalam seminggu. Kemudian kebun tersebut ditanami tanaman muda seperti ubi, lada, pelo dan lain-lain. Meskipun hal itu dipaksa oleh militer Jepang, tetapi menurut RB. Khatib Pahlawan Kayo para murid, guru dan orang tua dalam mengerjakannya secara bergembira sambil menyanyikan bait-bait lagu Muhammadiyah bergotong royong ciptaan Hakim. Bait lagu-lagu yang dimaksud, di antaranya:

Bekerjalah membanting tulang
 Digarisan belakang
 Setetes yang terbuang
 Setitik darah di medan perang

³¹¹ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 58.

³¹² RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 140.

³¹³ *Ibid.*

Bergembira memanggul cangkul
Supaya tanah subur
Bahan bertambah lipat ganda
Masyarakat makmur sentosa

Marilah kita bergotong royong
Mencangkul tanah yang masih kosong
Siapa menyemai tentu akan menuai
Kemenangan akhir tercapai³¹⁴

Pada zaman penjajahan Jepang ini, lembaga pendidikan Muhammadiyah seperti dikemukakan Rasyidah Rasyid tetap jalan sebagaimana masa penjajahan Belanda sebelumnya. Akan tetapi, murid HIS Muhammadiyah semakin berkurang dari 2000 lebih, sampai pada 1943 hanya tinggal terakhir lima orang saja, yaitu Aisyah Rasyid, Rasyidah Rasyid, Hasan Basri Said, asal Lubuk Basung, Nursimah Kasim dan Jusnidar, asal Silaing Padang Panjang. Semua murid ini berada pada kelas tujuh. Kemudian pada tahun itu juga dapat ditamatkan anak-anak kelas enam dengan ijazah sekolah dasar Muhammadiyah.³¹⁵

Pertahanan dari Agresi Belanda

Perang antara sekutu melawan tentara Nazi terutama di Asia, hampir dimenangkan oleh pihak Nazi. Beberapa daerah jajahan dan koloni yang dikuasai oleh blok sekutu sudah banyak dikuasai oleh blok Nazi. Malaya, Singapura dan Hindia-Belanda misalnya, sudah dikuasai oleh Jepang bahkan serdadu Amerika, Inggris dan Belanda tidak berkutik ketika digempur oleh Jepang. Serdadu sekutu, selain senjatanya dilucuti oleh tentara Jepang sebagian ada yang lari dalam rangka menyelamatkan diri dan yang lainnya ditawan oleh tentara Jepang. Sekutu terpaksa membiarkan dan menyerahkannya kepada Jepang untuk menguasai daerah-daerah koloninya. Akan tetapi, perang itu ternyata berbalik arah ketika kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai jantungnya negara Jepang dilumpuhkan oleh Amerika dengan cara pemboman. Peristiwa itu, membuat Jepang tidak bisa banyak berbuat apa-apa untuk melawan keadikuasaan sekutu karena

³¹⁴ *Ibid*, hlm. 140.

³¹⁵ *Ibid*, hlm. 63.

negaranya sendiri sebagai pusat kekuatan sudah hancur berantakan. Dalam pada itu, tentara Jepang sendiri sebelumnya lebih banyak tersedot dikerahkan untuk melakukan invasi kenegara-negara yang dikuasai oleh sekutu. Peristiwa yang bersejarah dan menentukan itu terjadi pada pada 14 Agustus 1945. Keesokan harinya, 15 Agustus 1945 Kaisar Tenno Heika menyatakan menyerah kepada Sekutu.³¹⁶ Hal ini sekaligus menandai kekuatan militer Jepang menguasai di Asia Tenggara sudah berakhir. Sedangkan pemerintahan ketika itu berada dalam keadaan kekosongan. Oleh para pejuang terutama yang selama ini tergabung dalam Seinendan, Heiho, Keibodan, dan Giyugun berbalik arah menyerang Jepang dan Sekutu. Sebagian besar di antara mereka ini pada 15 Oktober 1945 bergabung ke dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan dipercaya untuk menduduki pada posisi-posisi strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi kemerdekaan. Misalnya, Sjarief Usman, Dahlan Ibrahim, dan Ismail Lengah. Semuanya berasal dari Giyugun Padang, sedangkan Hasan Basri dan Abdul Halim dari Giyugun Bukittinggi.³¹⁷

Informasi Jepang menyerah kepada Sekutu cepat ditangkap oleh para pejuang terutama yang berada pada barisan pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno-Hatta pada mulanya enggan dan menolak untuk melaksanakannya karena sudah terikat perjanjian dengan Jenderal Terauchi, Panglima Bala Tentara Jepang untuk Asia Tenggara di Saigon yang ditandatangani 9 Agustus 1945 tentang kemerdekaan bangsa Indonesia.³¹⁸ Lantas, para pejuang yang berada di bawa gerakan PETA, terpaksa membawa Soekarno-Hatta ke Markas PETA di Rengasdengklok untuk meyakinkan kedua tokoh tersebut supaya segera diproklamirkan. Akhirnya, Soekarno dan Hatta mengalah dan bersedia memenuhi tuntutan pemuda tersebut. Naskah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Peristiwa itu, tentunya merupakan babak baru sejarah bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan dari negara manapun.

³¹⁶ Wahyono.S.K, *op. cit.*, hlm. 12.

³¹⁷ Siti Fatimah, *op. cit.*, hlm. 81.

³¹⁸ Wahyono.S.K, *op. cit.*, hlm. 12.

Kemerdekaan tersebut disambut gembira oleh masyarakat di seluruh pelosok tanah air termasuk di Minangkabau sendiri. Dalam hal itu, konsul Muhammadiyah memerintahkan kepada seluruh pimpinan dalam setiap tingkatan untuk mengibarkan bendera merah putih.

Walaupun Indonesia sudah menyatakan merdeka yang ditandai dengan diproklamirkannya 17 Agustus 1945. Berita kemerdekaan itu di nagari-nagari di Minangkabau informasinya banyak yang terlambat meskipun sudah tersebar melalui radio. Informasi kemerdekaan tersebut diterima oleh sebagian besar masyarakat dinagari-nagari melalui mulut kemulut. Hal itu, dapat dimaklumi bahwa sebagian nagari-nagari keberadaannya masih banyak yang terisolasi seperti nagari-nagari di kabupaten Solok. Apalagi radio ketika itu masih menjadi barang yang elite dan langka dimiliki oleh masyarakat banyak. Dalam hal itu, pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta berupaya untuk menata pemerintahan. Untuk sementara pemerintah pusat membagi Indonesia menjadi 8 provinsi dan 10 Keresidenan. Sedangkan keresidenan Sumatra Barat membawahi 8 Luhak dan 21 Kewedanaan. Di tengah usaha penataan pemerintahan Agresi Militer II datang mengacaukan kembali suasana bangsa Indonesia. Pada konteks demikian, DPRST dalam sidang yang dilaksanakan pada 18 Desember memutuskan untuk membekukan sementara pemerintahan sipil di Sumatra Barat.

Dalam perjalanannya bangsa Indonesia menghadapi tantangan berat terutama dari Belanda yang ingin kembali menduduki Indonesia. Informasi keinginan Belanda itu cepat tersiar kepada seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, upaya-upaya Belanda semakin nyata dan jelas baik melalui langkah-langkah diplomasi maupun militer. Kedua jalur ini ditempuh Belanda dengan cara menekan pemimpin Indonesia dengan tujuan agar mau menyerahkan kembali dan mengakui keberadaannya sebagai penguasa negeri jajahan. Akan tetapi, keinginan Belanda tersebut tidak serta merta dapat diterima oleh pemimpin Indonesia. Para pemimpin berjuang dengan berbagai upaya menolak keinginan Belanda tersebut dengan saling membahu dengan rakyat. Muhammadiyah misalnya, menyikapinya dengan mengerahkan kekuatan yang dimilikinya. Salah satu langkah kongritnya adalah dengan membentuk pasukan Hizbullah dan Sabil Muslimat. Kedua pasukan ini merupakan ujung

tombak gerakan Muhammadiyah yang berkerja keras menyebarkan dan melaksanakan perintah Muhammadiyah. Dalam hal itu, keduanya sangat berperan bersama dengan tentara. Pasukan ini keanggotaannya lebih banyak di bawah umur 17 tahun meskipun dipersyaratkan mesti lebih dari 17 tahun, tetapi keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan semangat tersebut tidak dapat dibendung untuk masuk dalam pasukan Hizbullah tersebut. Selain dua pasukan inti tersebut, Muhammadiyah dalam perang mempertahankan kemerdekaan juga mengerahkan badan “Penolong Kesengsaraan Oemat (PKO) yang berfungsi dalam membantu korban perang. Misalnya, mengumpulkan dan menguburkan jenazah, mengobati dan memberikan bantuan kepada keluarga dan korban perang.

Salah satu lagu yang paling populer dan sering menyertai pasukan ini adalah “Semangat Jihad”. Lagu ini diciptakan oleh Raden Saleh, Haskim dan Syarbaini Karim, guru Muhammadiyah. Bait lagu tersebut, antara lain

Mana pahlawan satria Islam
Yang ingin tewas diujung pedang
Mari berjihad membela wathan
Karena tewas artinya menang

Sudah lembaga anak lelaki
Berpantang surut ke belakang
Esa hidup kedua mati
Esa hilang kedua terbilang

Apa guna hidup mewah
Kalau bangsa terjajah
Baik syahid berkuah darah
Asal negara tetap merdeka

Apa guna uang beribu
Kalau pemuda tidak berjasa
Baik menjadi umpan peluru
Mati di dalam menuntut bela

Biar leher dipenggal putus
Badan hancur bersimbah darah
Biar dicencang dan ditembus
Asal negara tidak terjajah

Musuh tidak dicari-cari
 Bertemu pantang dielakan
 Berani mati tidak mati
 Namun yang hak tetap tegakkan

Kalau tak mati karena pedang
 Mati juga akhirnya nanti
 Beragam sebab yang menantang
 Namun mati hanya sekali

Apa artinya negeri merdeka
 Kalau agama dirusak binasa
 Masi sabil untuk negara³¹⁹

Kemudian pada 23-24 Agustus 1945 dalam rapat Pimpinan Muhammadiyah ditetapkan Buya AR. Sutan Mansur menjadi imam perjuangan dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diperoleh. Dalam rangka memperteguh sikap tegas dan komitmen perjuangan, maka pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada seluruh cabang dan ranting agar berjuang dengan segala kekuatan yang ada baik tenaga, pikiran dan harta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat dimaksud, di antaranya maklumat I tertanggal 28 Agustus 1945, maklumat II tertanggal 30 Agustus 1945 dan maklumat III tertanggal 3 Oktober 1945.³²⁰ Selain sebagai imam perjuangan, pada tahun yang sama AR. Sutan Mansur juga diangkat menjadi anggota komite pusat.³²¹

Beberapa bulan diproklamirkan kemerdekaan, tepatnya awal Oktober 1945 tentara sekutu memaksa masuk menduduki kembali Indonesia. Tentara sekutu terdiri dari tentara Inggris ditugasi untuk menduduki Sumatra dan Jawa. Sedangkan tentara Australia ditugasi untuk menguasai Indonesia bagian Timur. Tugas utama tentara sekutu ini adalah memulangkan tentara Jepang dan tentara Belanda serta orang Eropa yang ditawan oleh Jepang. Khusus di Jawa tugas Sekutu itu dilaksanakan oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) karena tentara

³¹⁹ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 142.

³²⁰ *Ibid*, hlm. 140.

³²¹ *Ibid*, hlm. 63.

Inggris tidak dapat mencapai daerah pedalaman.³²²Sedangkan di Sumatra Barat tentara sekutu (Inggris) dengan kelengkapan persenjataan mendarat pada 13 Oktober 1945, di Teluk Bayur. Kedatangannya disambut dengan perlawanan oleh rakyat. Akibatnya, perang tidak bisa dihindari. Meskipun dari sisi peralatan yang dimiliki oleh rakyat di Sumatra Barat tidak sebanding dengan persenjataannya tentara sekutu. Pasukan sekutu, sedianya hanya tentara Inggris, tetapi dalam kenyataannya tentara Belanda disusupkan ke dalamnya. Hal itu terbukti ketika penarikan tentara Inggris kembali kepangkalannya ternyata ada tentara sekutu yang tetap bertahan dan tinggal. Pasukan itu adalah serdadu Belanda yang disusupkan ke dalam yang kembali menguasai Hindia-Belanda. Dalam hal itu, pertempuran terus meletus di mana-mana termasuk di ranah Minang.

Bagi Muhammadiyah, penjajahan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, wajib hukumnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman tersebut. Dalam rangka itu, pada 12 November 1945 konsul Muhammadiyah—ketika itu dipimpin oleh SY. St. Mangkuto—dalam rapatnya memutuskan untuk membentuk barisan Hizbullah sebagai pasukan tempur Muhammadiyah. Pasukan tempur ini dipimpin oleh Syamsuddin Ahmad dan dibantu oleh Anwar Bey, Agus Salim, Maksum, dan Syuaib Ibrahim dengan tugas utamanya adalah melawan pihak yang mencoba melemahkan semangat kemerdekaan dan juga menentang musuh-musuh yang hendak menggagalkan kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tersebut selain menghasilkan putusan pembentukan Hizbullah, dalam catatan Rb. Khatib Pahlawan Kayo juga berhasil mengumpulkan uang dan benda-benda berharga sebagai persiapan perang berupa arloji, pulpen, gelang liontin, cincin mas, dan lain-lain. Modal yang terkumpul tersebut ditaksir bernilai Rp. 50.000,-. Kemudian di setiap cabang didirikan pula markas perbekalan untuk Hizbullah menghimpun beras dan keperluan lainnya.³²³ Kemudian pada Januari 1946 Muhammadiyah membentuk pasukan Sabil Muslimat di bawah komando Syamsiah Syam. Pasukan ini dibentuk pada Januari 1946 dengan tugas dan

³²² Wahyono.S.K, *Ibid*, hlm. 12.

³²³ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Ibid*, hlm. 141.

tanggung jawab membela dan mempertahankan kemerdekaan. Kedua pasukan inti Muhammadiyah ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhasil memompa semangat kejuangan.

Masih pada tahun yang sama, AR. Sutan Mansur diangkat menjadi penasihat Komandan Sumatra, yang selanjutnya 1947, Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia mengangkatnya sebagai guru agama Islam bagi tentara Indonesia di Sumatra Bagian Tengah dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler,³²⁴ sedangkan Malik Ahmad diberi tugas sebagai Wakil Kepala Jawatan Sosial Sumatra Barat. Menjelang Agresi Militer II, dilantik sebagai Wakil Bupati Militer 50 Kota, mendampingi Saalah Yusuf Sutan Mangkuto.³²⁵

Pada 20 Juli 1947 pihak Belanda mengingkari perjanjian yang sudah ditandatangani bersama dalam bentuk perjanjian Linggarjati. Mereka menyatakan tidak terikat lagi pada perjanjian tersebut. Selama masa berlakunya perjanjian, diam-diam pihak Belanda menghimpun kekuatan militer untuk menyerbu dan menghancurkan Republik Indonesia. Informasi itu sesungguhnya sudah ditangkap oleh pimpinan Indonesia.³²⁶ Dalam hal itu, Mohammad Hatta pulang kampung dengan misi memberikan penjelasan kepada rakyat agar menyiapkan segala hal karena negara dalam keadaan bahaya berupa penyerangan dari Belanda. Hatta pada kunjungan tersebut meminta semua pihak agar bersatu padu dalam menghadapi Belanda dan kepada para pejabat pemerintah dan militer. Hatta memberikan pengarahan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan. Dalam perjalanan ke Medan Hatta mendapatkan informasi bahwa Belanda sudah melakukan penyerangan. Penyerangan yang dimaksud sudah dimulai pada 21 Juli 1947. Pada Juli ini serangan serdadu Belanda merata di seluruh tempat yang sudah diduduki oleh tentara sekutu sebelumnya. Serangan Belanda tersebut dalam sejarah Indonesia lebih dikenal dengan istilah Agresi Militer Belanda I. Agresi ini merupakan

³²⁴ Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 63.

³²⁵ Fikrul Hanif, Penolakan Abdul Malik Ahmad terhadap Asas Tunggal Pancasila di Organisasi Muhammadiyah (1982-1985), *www.pasca.sarjana.unand.ac.id/pdf*, diakses 20 Februari 2016, hlm. 7.

³²⁶ Erfin Yuliani, "Agresi Militer Belanda I di Bondowoso, AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No. 1, Maret 2014, hlm. 2.

salah satu tindakan Belanda untuk memaksakan kehendaknya dalam bentuk militer karena gagal dalam pelaksanaan Perundingan Linggarjati yang dipandang tidak sejalan dengan harapan Belanda. Belanda memandang bawa Indonesia belum sepenuhnya memiliki pemerintahan yang memiliki legitimasi dan berdaulat.³²⁷ Oleh sebab itu, tujuan sesungguhnya adalah menghancurkan keberadaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan menduduki daerah-daerah Indonesia yang dipandang penting, baik dari segi ekonomi maupun politik.³²⁸ Oleh sebab itu, Hatta dan rombongan kembali ke Bukittinggi dan ternyata juga sudah dimasuki oleh Belanda.³²⁹ Pada waktu itu, Hatta memimpin perjuangan dari Bukittinggi untuk seluruh Sumatra ketika sudah sampai kembali ke Bukittinggi pada 27 Juli 1947.³³⁰

Selain masih sedang menghadapi ancaman dari pihak Belanda, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta terus melakukan konsolidasi. Secara administratif Sumatra Barat mendapat status administratif setingkat keresidenan. Kemudian pada 1948 Sumatra Barat digabung menjadi Provinsi Sumatra Tengah melalui UU No. 10/1948. Muhammad Nasrun dipercaya sebagai gubernurnya yang pertama.

Pada tahun itu juga terjadi Agresi Militer Belanda II, tepatnya pada 19 Desember 1948. Belanda memang dapat menduduki ibu kota Republik kembali, tetapi hal itu hanya bersifat sementara. Beberapa jam sebelum kejatuhan Yogyakarta, sidang darurat kabinet berhasil mengambil keputusan yang sangat menentukan perjalanan Republik. Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik (PDRI) di Sumatra. PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai pemerintah alternatif bagi Republik yang tengah menghadapi koma.³³¹ Pada hari yang sama, DPRST memutuskan

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ *Ibid.*

³²⁹ Anwar Abbas, *op. cit.*, hlm. 119.

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ M.Bahrul Amig, dkk, *Jejak Sidoarjo dari Jenggala ke Suriname (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006)*, hlm. 50.

untuk membekukan provinsi Sumatra Tengah termasuk lembaga legislatifnya. Seluruh perangkat pemerintahan dari gubernur hingga wali nagari dilakukan militerisasi karena dalam suasana perang. Pada saat itu, jabatan gubernur militer dipegang oleh Sutan Muhammad Rasyid, sedangkan Muhammad Nasrun diungsikan ke Lubuk Sikaping.

Pada Agresi Belanda II ini, Soekarno dan Hatta, masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya ditawan dan dibawa ke Bangka.³³² Sebelumnya, Hatta telah mengirim telegram kepada Syafruddin Prawiranegara yang diisinya memberi kuasa untuk membentuk pemerintahan darurat sementara. Meskipun kedua pimpinan tersebut dan yang lain ditawan oleh Belanda, namun perlawanan terhadap agresi Belanda terus berjalan tanpa henti. Perlawanan gerilya di luar kota dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Sedangkan Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi bersama dengan tokoh-tokoh Republik yang ada di Sumatra. Syafruddin berhasil membentuk PDRI pada 22 Desember 1948 pada jam 03.40 WIB dan memproklamkan berdirinya PDRI. Pemerintahan ini berlangsung secara *mobile* dimulai dari Halaban Payakumbuh dan berakhir di Bidar Alam, Kabupaten Solok. Ketika PDRI terbentuk Malik Ahmad sebagai tokoh Muhammadiyah mendampingi Mr. Moh. Rasjid, Gubernur Militer Sumatra Barat. Begitu pula ketika rombongan PDRI masuk hutan keluar hutan hingga ke Bidar Alam, Malik Ahmad juga setia mendampingi Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pada masa ini dua kekuatan besar, yaitu rakyat dan militer menjadi satu kekuatan yang sangat efektif dalam melawan agresi Belanda terutama dalam mempertahankan kemerdekaan. Ketika pemerintah darurat menjadikan Bidar Alam sebagai pusat pemerintahan, Syafruddin dan rombongan dikawal oleh Resimen III/Kuranji yang bermarkas di Alahan Panjang di bawah komando Mayor Ahmad Husein. Dalam perkembangannya, seluruh institusi pemerintah dilakukan militerisasi³³³ dan Sumatra di pecah

³³² Anwar Abbas, *op. cit.*, hlm. 119.

³³³ Dokumen pribadi Muhammad Yatim, dituliskannya pada 12 April 1968

menjadi tiga provinsi yaitu, Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Dalam struktur baru tersebut, Sumatra Barat, bersama Riau dan Jambi, menjadi bagian dari Sumatra Tengah. Sedangkan Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi dengan gubernurnya Mr. M. Nasrun.³³⁴ Sedangkan Malik Ahmad ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Sosial Sumatra Tengah.³³⁵

Pertempuran menghadapi pasukan Belanda dengan menggunakan doktrin dan strategi perang gerilya cukup efektif dan mampu melindungi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan pasukan Belanda di Yogyakarta. Menurut Saafroedin Bahar ada dua hal yang khas dalam operasi Perang Gerilya di Sumatra Barat ini, yaitu (1) keseluruhan peperangan ini dirancang berdasar doktrin dan strategi perang gerilya yang disusun oleh Tan Malaka yang selain memuat petunjuk perang gerilya, juga memuat arahan dalam bidang politik dan ekonomi; dan (2) pimpinan gerilya tidaklah terletak di tangan komandan militer, tetapi dijabat oleh pamong praja yang diangkat sebagai bupati militer, camat militer, dan wali nagari perang.³³⁶

Dalam situasi demikian, Pimpinan Muhammadiyah mengerahkan seluruh kekuatan di seluruh tingkatan bersama dengan komponen bangsa lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain mengerahkan dua pasukan, Muhammadiyah juga menjadikan lembaga pendidikan dan layanan sosialnya sebagai pusat dan gerakan gerilya. Akibatnya, aktivitas sekolah Muhammadiyah dan panti asuhan menjadi terhenti. Pada konteks itu pula, sekolah dan aset Muhammadiyah lainnya banyak yang hancur akibat agresi Belanda tersebut. Harta dan aset yang terdapat di dalamnya habis dihancurkan dan dimusnahkan oleh serdadu Belanda, sedangkan dokumen-dokumenpun dibawa tanpa diketahui di mana rimbanya. Belum lagi,

di Payakumbuh.

³³⁴ <http://www.sumbarprov.go.id/> diakses pada 6 Februari 2016.

³³⁵ Fikrul Hanif, *op. cit.*, hlm. 7.

³³⁶ Saafroedin Bahar, Pemberontakan PRRI Ditafsirkan Kembali: Sebuah Renungan Awal Filsafat Sejarah Lokal, <http://www.mantagibaru.com/2015/05/pemberontakan-prri-ditafsirkan-kembali.html>. Diakses 16 Februari 2016.

beban psikis yang dialami oleh tokoh dan guru-guru Muhammadiyah karena diintimidasi dan disiksa oleh pihak serdadu Belanda.

Keadaan semakin rumit dan sulit, di mana perhubungan dengan pusat yang terputus. Dalam situasi yang amat dan sangat sulit tersebut, Pimpinan Muhammadiyah mengambil kebijakan untuk memindahkan posisi jabatan AR. Sutan Mansur kepada SY. St. Mangkuto sebagai konsul Muhammadiyah Sumatra Bagian Tengah. Kemudian AR. Sutan Mansur sendiri ditarik menjadi wakil Pengurus Besar untuk seluruh Sumatra. Sedangkan tokoh dan warganya terlibat secara aktif dalam mempertahankan kemerdekaan seperti Saalah Yusuf St. Mangkuto, Malik Ahmad, Oedin, Marzuki Yatim, Abdullah Kamil, Duski Samad dan lain-lain. Sementara itu, A. Malik Ahmad, RI. Dt. Sinaro Panjang, H. Idris Manaf dan Hasan Ahmad berjuang bergerilya dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Buya RI. Dt. Sinaro Panjang sebagaimana dikutip RB. Khatib Pahlawan Kayo, ketika meninggalkan markas perwakilan di Kauman, Padang Panjang ia masih sempat menyelamatkan kendaraan roda empat dan beberapa peralatan kantor lainnya milik Muhammadiyah, tetapi akhirnya juga tidak dapat diselamatkan sebagaimana yang dikemukakannya.

Kami sempat menyelamatkan kantor; mesin tulis 5 buah (satu buah mesin ketik bahasa Arab), pengeras suara 1 buah, mesin stensil Gestetner 2 buah dan beberapa rim kertas untuk persiapan. Dalam pengungsian ini pertama kami berkantor di Surau Pincuran Rajo Sumanik (kampungnya Buya Malik Ahmad). Setelah Batusangkar dikuasai Belanda kantor dipindahkan ke Lintau. Kendaraan roda 4 kami tinggalkan di parak Pisang Nagari Sumanik. Setelah patroli, Belanda masuk Sumanik, kendaraan itu diserahkan kepada Wali Nagari Rao-Rao dan kemudian hilang. Sedangkan peralatan kantor yang ditiptip pada Wali Nagari Lintau juga mengalami nasib yang sama. Semuanya ludes dipereteli oleh Belanda.³³⁷

Begitu pula dengan barang-barang inventaris yang ditinggalkan di Kauman nyaris hilang dan tidak ada lagi sama sekali sebagaimana yang ia gambarkan di bawah ini/

Sementara barang-barang inventaris yang ditinggalkan di markas Kauman seperti meja, kursi, piano, gambar-gambar dan sebuah lemari

³³⁷ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 142

besi berisi surat-surat berharga dan uang habis dibawa entah ke mana oleh petugas militer Belanda bersamaan dengan hari pembongkaran dan pembakaran arsip-arsip Muhammadiyah pada 26 Desember 1948. Data ini disampaikan oleh komisi barang-barang Muhammadiyah tanggal 31 Desember 1949 yang terdiri dari Adam Ibrahim, H. Ibrahim, H. Haroen el-Ma'any, A. Kamil dan Zainuddin Zen.³³⁸

Selain itu, kehidupan ekonomi masyarakat sangat sulit terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.³³⁹ Semua orang mengungsi dari Kauman termasuk keluarga AR. Sutan Mansur sendiri mengungsi ke Maninjau. Situasi itu digambarkan Aisyah Rasyid dengan menyatakan bahwa "Pada saat pengungsian di agresi ke-2 kehidupan sangat kritis, kami hanya makan lontong dua kali sehari, siangnya makan kue-kue saja yang dibuat umi dari bahan tepung galepi, di mana semua diserang malaria berganti-ganti saja yang kedinginan."³⁴⁰ Selain kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat selama penyerbuan itu, dari 1945 sampai 1949, banyak sekali terjadi kekejaman dan kekejian, seperti pembantaian terhadap penduduk sipil.

Semua aktivitas Muhammadiyah pada masa ini nyaris terhenti sama sekali, baik dalam bentuk organisasi maupun amal usaha karena seluruh kekuatan yang dimiliki Muhammadiyah dikerahkan untuk mempertahankan dan memelihara amal usaha yang ada. Kenyataan itu, digambarkan Malik Ahmad, "Di saat perjuangannya kemerdekaan sampai clash kedua semua usah-usaha itu terhenti lagi karena seluruh tenaga dipusatkan kepada perjuangan dan memelihara 'amal yang ada."³⁴¹ •

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ Dokumen Pribadi Moehammad Yatim.

³⁴⁰ 'Aisyah Rasyid, "dari Sungai Batang Maninjau", dalam Bakhtiar (Ed.), *op. cit.*, hlm. 65.

³⁴¹ Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah Sumatra Tengah, *Pembukaan Falsafah dan Hukum Muhammadiyah* (t.tp: Pengurus Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah Sumatra Tengah, t.t), hlm. 15.

Bab III

Muhammadiyah dan Pergolakan Politik

Revolusi yang Belum Selesai

SETELAH Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, pemerintahan militer yang ditetapkan pada hari dan tanggal ketika Agresi Belanda II dilancarkan, pemerintahan militer dihapuskan. Dengan kata lain, pemerintahan provinsi dikembalikan kepada semula, yaitu Sumatra Tengah. Salah satu penyebabnya adalah ditugaskannya Sutan Muhammad Rasyid menjadi delegasi Indonesia di *central joint board* dalam rangka penuntasan perundingan Indonesia-Belanda yang sudah dilaksanakan pada 1949. Perubahan yang dimaksud dimulai sejak 1 Januari 1950. Dengan dikembalikannya Provinsi Sumatra Tengah dari gubernur militer, maka jabatan kepala daerah kembali dipercayakan kepada Muhammad Nasrun.

Sementara itu, kondisi Muhammadiyah belum dapat dikonsolidasikan setelah perjuangan itu karena masih dalam suasana sulit. Masing-masing pimpinan Muhammadiyah masih mengurus persoalan keluarga masing-masing sebab selama perang hampir semuanya terpisah-pisah. Sedangkan amal usaha Muhammadiyah

hampir semuanya dihancurkan oleh militer Belanda. Keadaan demikian sebagaimana digambarkan Malik Ahma, “Di waktu masuk kota lagi tahun 1950 sesudah penjerahan kedaulatan Muhamadiah kita hanya menemui puing-puing sekolah sadja lagi, guru-guru berserak habis, medja-medja habis diperkaju-apikan oleh Belanda.”¹

Sejak merdeka, berbagai peristiwa masih terus menerpa bangsa Indonesia baik dalam bentuk bencana alam, kemanusiaan maupun politik. Bencana politik setelah dinyatakan merdeka, Belanda kembali bernafsu menjajah Indonesia. Jalur politik dilakukannya dengan memaksa Indonesia untuk kembali ke meja perundingan dengan target tetap menancapkan kukunya. Maka dari itu, terjadilah beberapa perjanjian Roem-Royen, perjanjian Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar sebagai beberapa upaya kuat dari pihak Belanda untuk kembali menjajah. Merasa tidak berhasil lewat diplomasi, Belanda berupaya masuk melalui operasi militer dengan menyerang beberapa wilayah Indonesia yang dipandang strategis dengan memboncengi tentara sekutu. Bersamaan dengan itu, para pimpinan Indonesia pun tidak luput dari penangkapan dan incarannya untuk ditahan dan dikarantina bahkan dibuang ke tempat lain. Hal itulah yang dialami misalnya oleh Soekarno, Hatta, dan M. Yamin. Meskipun demikian, perjuangan bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh penangkapan dan penahanan. Pimpinan dan pejuang yang lain tidak tergoyahkan dan meneruskan perjuangan, seperti yang dilakukan Syafruddin Prawiranegara meskipun gempuran dan serangan serdadu Belanda datang secara bertubi-tubi ke pusat-pusat kota dalam rangka pengambilalihan negara kembali. Begitu pula dengan Jenderal Sudirman. Ia memimpin gerilya di luar kota tanpa ada kata menyerah, meskipun badannya dalam kondisi sakit.

Setelah melalui perang fisik melawan agresi Belanda, dalam rangka untuk memilih dan menentukan jalannya negara, maka pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta mengagendakan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengisian parlemen maupun konstituante. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak mudah untuk dilaksanakan. Beberapa kali pelaksanaan pemilu sudah

¹ *Ibid.*

diagendakan, tetapi urung dilaksanakan dan selalu tertunda. Pemilihan umum pertama yang akan dilaksanakan pada 1946 terpaksa ditunda karena dalam situasi revolusi fisik (1945-1949). Kemudian baru bisa dilaksanakan pada 1955, ketika kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.² Menurut sebagian pengamat, ketertundaan pemilihan umum tersebut disebabkan bukan hanya karena faktor situasi revolusi fisik, melainkan adanya kekhawatiran sekelompok elite terhadap kekuatan Islam yang akan melakukan mobilisasi rakyat guna merealisasikan gagasan negara Islam. Mengingat potensi dan peluangnya sangat besar melalui kemenangan suara mayoritas pada pemilu. Hal itu, sangat dimungkinkan akan melampirkan jalannya melalui Majelis Konstituante.³

Dalam kenyataannya, partai-partai Islam memang mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilu 1955. Khusus di Sumatra Barat, pemilu tersebut dimenangkan oleh Masyumi, baik untuk parlemen maupun konstituante. Dalam sejarahnya, di pemilu anggota parlemen, Masyumi memperoleh 797.692 suara, dan untuk pemilu anggota konstituante sebanyak 797.897 suara.⁴ Dari perolehan suara tersebut, Masyumi mendapat 6 kursi di parlemen dan 11 kursi di konstituante. Enam orang yang duduk di parlemen itu antara lain, H. Mansjur Daut Dt. Palimo Kayo, Saalah J. St. Mangkuto, Dokter H. Ali Akbar, Rahmah ElYunusiyah, Zainal Abidin Ahmad, dan M.O. Bafadhal. Sedangkan yang duduk di kursi Dewan Konstituante antara lain, AR. Sutan Mansur, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Ruslan Mulyohardjo, Z.A. Ahmad, Ratna Sari, H. Ilyas Ya'kub, M. Djafar Bin Ali Djilil, A. Malik Ahmad, Duski Samad, Muchtar Husin, dan Zamzami Kimin.⁵ Selain sebagai anggota konstituante, Malik Ahmad tetap menjalankan rutinitasnya sebagai Kepala Jawatan Sosial Sumatra Tengah, di samping Ketua Muhammadiyah Daerah Sumatra Tengah. Sampai munculnya persoalan hubungan pusat dan daerah pada akhir 1950-an. Semakin meruncingnya persoalan antara pusat-daerah juga ikut menyeret

² Ti Aisyah, Subhani, *op. cit.*, hlm.9.

³ *Ibid.*

⁴ Fikrul Hanif, *op. cit.*, hlm. 7.

⁵ *Suara Masjumi*, tanggal 1 Agustus 1956, hlm. 5.

Muhammadiyah Daerah Sumatra Tengah dalam kancah politik praktis.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Masyumi menjadi pemenang mutlak di Sumatra Barat pada pemilu pertama ini. Dalam hal itu, KH. Mukhtar dalam suatu perkumpulan orang-orang Masyumi di gedung Muhammadiyah di Ngabean pernah mengungkapkan bahwa “yah, sudah! Negeri kita bukan di sini. Di Minangkabau negeri kita! Mari kita pindah saja ke sana!”⁷

Bila dilihat dari sisi Muhammadiyahnya, hampir dapat dikatakan semua tokoh-tokoh yang terpilih tersebut umumnya berlatar belakang dan bersentuhan dengan gerakan Muhammadiyah, baik pada tingkat ranting, cabang, dan daerah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah sesungguhnya secara tidak langsung memberikan andil yang besar bagi bangunan demokrasi pada periode ini, terutama dalam pemasokan tokoh untuk dijadikan sebagai perwakilan Sumatra Barat. Begitu pula dalam keterpilihan terhadap tokoh-tokoh yang dimaksud tentunya selain dipengaruhi oleh struktur organisasi partai, wacana, dan respons aktif partai ini terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Muhammadiyah terutama warganya dalam memberikan suara dan tokohnya memobilisasi masa. Apalagi ketika itu, tokoh Muhammadiyah sekaligus Masyumi berada di posisi eksekutif yang menentukan, mulai dari jabatan sebagai gubernur, bupati, kepala-kepala jawatan (dinas), camat, hingga kepala nagari. Misalnya, Ruslan Mulyohardjo seorang kader Muhammadiyah dan sekaligus sebagai Masyumi. Begitu pula dengan Saalah Jusuf Sutan Mangkuto yang menjadi pejabat sementara Gubernur Sumatra Tengah menggantikan M. Nasroen pada 1950.⁸ Yang disebutkan terakhir, semua orang sangat tahu bahwa ia adalah ketua Muhammadiyah Daerah Minangkabau. Ia adalah tokoh yang dari awal mengembangkan Muhammadiyah di Minangkabau dan sekitarnya.

Sedangkan Partai Perti berada pada posisi kedua setelah Masyumi.

⁶ Fikrul Hanif, *loc. cit.*

⁷ Hamka, *Muhammadiyah...op. cit.*, hlm. 324.

⁸ Lindo Karsyah, *Dari Gubernur M. Nasroen Sampai Zainal Bakar* (Padang: PT Genta Singgalang Press, 2005), hlm. 10.

Partai ini memperoleh 351.768 suara untuk parlemen dan 337.081 suara konstituante. Dengan jumlah suara yang didapatkan Perti tersebut, maka tokoh yang berhasil didudukkan dalam parlemen sebanyak 3 kursi dan 5 kursi di konstituante. Tiga orang tokoh Perti yang duduk menjadi anggota parlemen antara lain, H. Sirajuddin Abbas, Ma'rifat Marjani, dan H. Rusli. A. Wahid, sedangkan 5 orang lainnya yang terpilih menjadi anggota konstituante adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, H. Mansyur Dt. Nagari Basa, Ummi Syamsiah, Tengku Baibin Tengku Mahmud, dan Umar Bakri.⁹

Partai Masyumi dan partai Perti merupakan dua kompetitor yang bersaing di Sumatra Barat. Keduanya adalah representasi dari Islam modernis dan tradisional, atau sebelumnya lebih dikenal dengan Kaum Muda dan Kaum Tua. Kompetisi tersebut di Sumatra Tengah berjalan secara terbuka, *fair*, adil, sehat dan dewasa untuk memenangkan pertarungan. Meskipun diakui di beberapa tempat terdapat gesekan-gesekan, tetapi tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan secara fundamental. Kedua belah pihak memang menggunakan strategi yang bercorak identitas sejalan dengan *maenstream* masing-masing, terutama dalam mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat sebagai basis kekuatannya. Partai Masyumi menampakkan pengaruh ulama modernis karena faktanya partai ini lebih banyak digerakan oleh ulama-ulama modernis. Dalam pergerakan memperebutkan suara pun tampak lebih progresif dan agitatif agar mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dibandingkan dengan kompetitornya. Pembuktiannya, dapat dilihat dari keberhasilannya dalam mendulang suara dari masyarakat.¹⁰

Keberhasilan Masyumi di tingkat nasional dalam meraup suara dan menjadi pemenang di Sumatra Tengah membuktikan bahwa basis dukungan tentulah sangat penting dan menentukan. Akan tetapi, kemenangan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sangat ditentukan oleh sejauhmana tokoh-tokoh yang terpilih tersebut dapat

⁹ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regeonalisme: Sumatra Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hlm. 81-82.

¹⁰ Hary Efendi, "Berebut Suara Rakyat: Perseteruan Partai Masyumi dengan Perti Dalam Pemilu 1955 di Sumatra Tengah", dalam *Jurnal Analisis Sejarah*, Volume 03 Tahun 2013, hlm. 71.

menjalankan amanah konstituennya sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Apalagi politik adalah sebuah proses dinamis dan berkelanjutan, di mana persaingan ataupun pertemanan bisa saja berakhir atau tetap berlanjut sangat bergantung kepada agenda-agenda politik selanjutnya.¹¹

Bersamaan dengan keberhasilan Masyumi dalam memperoleh suara pada Pemilu 1955, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana bangunan kabinet sering jatuh bangun karena eksistensinya dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, konstitusi yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Oleh karena sifatnya yang sementara, maka tugas utama dari Majelis Konstituante adalah merumuskan dan menetapkan rancangan konstitusi yang bersifat permanen. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas itu mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak terutama kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam sama-sama bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Kelompok nasionalis sekuler memperjuangkan dasar negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, sedangkan kelompok nasionalis Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara sebagaimana yang terdapat dalam "Piagam Jakarta".

Meskipun demikian, Majelis Konstituante sudah merampungkan 90% dari tugas-tugasnya termasuk berbagai ketetapan seputar masalah-masalah substantif konstitusi. Misalnya, prinsip tentang hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara, dan bentuk pemerintahan. Memang, kedua belah pihak sama-sama kokoh dan bersikukuh di dalam memperjuangkan dan mempertahankan gagasan dan idealisme yang dibawa masing-masing, tetapi menurut sebagian peneliti dan pengamat masih dimungkinkan adanya peluang untuk diselesaikan melalui negosiasi dan lobi. Polarisasi ini menghasilkan kebuntuan dalam konstituante dan membukakan jalan bagi Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959¹² karena dalam pandangannya konstituante telah mengalami kegagalan dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad AS Hikam (Ed.), *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah* (Jakarta: Rumah Buku, t.th), hlm. 101.

melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, jalan keluarnya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal itu, Soekarno membekukan Majelis Konstituante dengan mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Kemudian dekrit tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Kabinet Karya I yang langsung dipimpin oleh presiden. Sedangkan Perdana Menteriya adalah Ir. H. Djuanda. Dalam perkembangannya, kabinet ini juga tidak kuat dan mengalami kerapuhan hingga 18 Februari 1960 terjadi *reshuffle* dengan pembentukan Kabinet Karya II, di mana perdana menteriya tetap adalah Dr. Leimena, dan Dr. Subandrio sebagai wakil perdana menteri.¹³

Adapun akar perdebatan dasar negara itu paling tidak, bagi kelompok nasionalis-Islam gagasan dan idealisme yang diperjuangkannya didasarkan atas watak holistik Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain. Di samping itu, secara fakta sosiologis menunjukkan bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam. Fakta ini oleh kelompok lain justru dikhawatirkan akan melapangkan jalan bagi kembalinya perjuangan Islam sebagai dasar negara. Dalam hal itu, kelompok lain ini berupaya untuk terus menggagalkan pelaksanaan pemilihan umum sambil mereka menyiapkan instrumennya. Kelompok nasionalis Islam ini di antaranya diperjuangkan oleh Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin Ahmad, Isa Anshari, dan KH. Masjukur. Sedangkan bagi kelompok nasionalis-sekuler kokoh dan bersikukuh pula memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara dengan pertimbangan dalam sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Kelompok ini di antaranya diperjuangkan oleh politisi PNI dan aktivis Kristen seperti Arnold Mononutu. Perdebatan tentang Islam dan Pancasila ini sebagai ideologi dan dasar negara kembali terkonsentrasi pada rentang waktu 1957 sampai 1959¹⁴.

Selain tajamnya perdebatan ideologis dalam menentukan dasar negara di dalam konstituante, perbedaan yang sama tajamnya juga terjadi di internal pemimpin bangsa, yaitu antara M. Hatta dan Soekarno.

¹³ Chiara Formichi, *Islam and the Making of the Nation Kartosuwiryo and Political Islam in 20th century Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2012), hlm. 164.

¹⁴ *Ibid.*

Masing-masing sebagai wakil presiden dan presiden. Kalau pada masa revolusi (1945-1949), kedua pemimpin ini dilekatkan istilah dwitunggal untuk menyebut kepemimpinan presiden Soekarno dari Jawa dan wakil presiden Mohammad Hatta dari Minangkabau. Dwitunggal ini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara Jawa dan kepulauan luar. Oleh sebab itu, jika terjadi perpecahan di antara dua pemimpin tersebut, hal itu berarti menciptakan suatu keterbelahan nasional.¹⁵

Sejalan dengan perpecahan itu, Presiden Soekarno sebagai Penguasa Perang Tertinggi pada 14 Maret 1957, menyatakan negara dalam keadaan darurat perang. Kemudian Presiden Soekarno juga memaksakan terbentuknya Kabinet Juanda sebagai kabinet karya yang bersifat non-partai politik. Namun demikian, dalam kabinet tersebut juga duduk wakil-wakil partai politik sebagai menteri, kecuali dari Masjumi, Partai Katolik, dan PSI.¹⁶ Pembentukan kabinet tersebut justru menimbulkan kekecewaan, baik di pusat maupun di daerah-daerah, khususnya yang menjadi basis massa partai politik yang tidak terlibat dalam kabinet. Muncul tuntutan agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu lima hari serta membentuk kabinet baru dengan Sultan Hamengkubuwono IX dan Mohammad Hatta sebagai formatur. Gejolak tersebut juga menimbulkan pemberontakan, misalnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukit Tinggi dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Pemberontakan PRRI diduga melibatkan sejumlah pimpinan Masjumi dan PSI seperti M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Soemitro Djojohadikoesoemo.¹⁷

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia yang semakin tidak menentu juga menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia ketika itu. Ditambah lagi, perhatian pemerintah hanya terpusat di Jawa dan terkhusus di Jakarta membuat daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan. Berbagai aspirasi daerah tidak

¹⁵ Jeffrey Hadler, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁶ Muhammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004)* (Jakarta: Disertasi Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia), 2009, hlm. 144.

¹⁷ Muhammad Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 144.

digubris dan disahuti oleh pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakpuasan dan menimbulkan protes dari berbagai daerah. Akibatnya, pembangunan daerah terhambat. Bukan hanya tokoh dan pimpinan daerah, pejabat militer pun juga sangat merasakan akibat kebijakan tersebut. Hal itu, menyebabkan mereka tidak mampu membangun asrama yang lebih representatif bagi pasukannya. Begitu pula dalam bentuk kesejahteraan, kondisinya lebih memprihatinkan.

Selain itu, dalam birokrasi sedang terjadi apa yang diistilahkan oleh Muhammad Yamin dengan neo-ningratisasi. Menurutnya, ketidakadilan juga terjadi akibat dominasinya kaum neo ningratisasi sejak 1950. Seluruh perlengkapan pemerintah pusat didominasi oleh kelompok ini. Bersamaan dengan itu pula, mereka berhasil pula menduduki jawatan-jawatan di beberapa pusat provinsi. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Tengah.¹⁸ Kemudian gerakan di daerah-daerah ini mendapat dukungan dari beberapa panglima militer dengan membentuk dewan-dewan daerah. Dewan yang pertama adalah Dewan Banteng di Padang, disusul oleh Dewan Garuda di Palembang, Dewan Gajah di Medan, Dewan Manguni di Manado, dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar. Semua protes tersebut di atas menuntut otonomi yang lebih luas bagi daerah dalam berhadapan dengan pemerintah pusat, pembubaran kabinet yang ada, dan mengembalikan kekuasaan Mohammad Hatta.¹⁹

Menyikapi protes tersebut pemerintah Pusat memprakarsai adanya Musyawarah Nasional di Jakarta yang berlangsung pada 9 hingga 11 Desember 1957. Sebagai lanjutan musyawarah tersebut, pada Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah-musyawarah ini ternyata juga tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah-daerah yang melakukan protes tersebut. Kegagalan ini antara lain disebabkan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono, tidak

¹⁸ Muhammad Yamin, *Dewan Banteng Contra Neo Ningrat* (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2009), hlm. 9.

¹⁹ John Rosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, diterj. oleh Hersri Setiawan, dari *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008), hlm. 254.

diikutsertakan dalam pimpinan pemerintahan. Beberapa tawaran yang dikemukakan pemerintah pusat tidak dapat memuaskan daerah seperti keadilan ekonomi. Apalagi respons pemerintah pusat terkesan bukan dalam konteks mengayomi daerah, melainkan diposisikan sebagai yang dipersalahkan. Apalagi pemerintah pusat sudah dominan dipengaruhi oleh komunis. Semua protes yang disponsori oleh perwira tersebut pada dasarnya mengingini suatu pemerintahan pusat yang direformasi, bukan pecahan negara-negara merdeka yang berserakan.²⁰

Sementara itu, Muhammadiyah pada 1955 atas prakarsa Malik Ahmad dalam kesibukannya di pemerintahan berhasil menginisiasi pendirian Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah.²¹ Kemudian dalam suasana hingar bingarnya politik dalam negeri, mulai dari perdebatan ideologis yang berujung lahirnya Dekrit 5 Juli 1959, perselisihan dua pimpinan, pembangunan yang hanya berpusat pada Jawa, persaingan tidak sehat di militer, sampai pada pengaruh kuat komunis di jantung pemerintahan, Malik Ahmad secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Daerah Sumatra Tengah (1956-1958).²²

Gerakan Muhammadiyah pada dekade ini mulai kembali menguat terutama karena adanya dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat, meskipun sebelumnya lembaga pendidikan yang dibangun dengan bersusah payah dihancurleburkan oleh pihak kolonial Belanda. Akan tetapi, semangat untuk membangun kembali tidak pernah pudar dari anggota Muhammadiyah. Bahkan pada tahun ini, Muhammadiyah Sumatra Barat berhasil mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah pertama di Indonesia. Kemudian di Sumatra Barat universitas yang dikelola oleh masyarakat juga termasuk salah satu yang berdiri lebih awal. Perguruan tinggi yang dimaksud itu diresmikan pada 18 November 1955 dengan nama Fakultas Falsafah dan Hukum. Hal itu ditandai dengan pembubuhan tandatangan diprasati oleh ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, AR. Sutan Mansur. Dalam sejarahnya, fakultas ini kelak menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Universitas Muhammadiyah

²⁰ John Rosa, *op. cit.*, hlm. 255.

²¹ Fikrul Hanif, *op cit*, hlm. 7.

²² *Ibid.*

Sumatra Barat. Adapun presidium pertama adalah Dr.H. Ali Akbar (Jakarta). Kemudian dibantu oleh anggota seperti Dr. J. Sjamsuddin (Jogja), H. Rasyidi (Yogyakarta), dan Hamka (Jakarta). Dengan pimpinannya pertama dipercayakan kepada Drs. Danoehoesodo, sedangkan dekan ditugasi kepada Hamka.²³

Konflik Pusat-Daerah

Perjuangan melawan pendudukan asing belum lagi selesai, tetapi sudah muncul masalah yang pelit dari dalam negeri sendiri. Beberapa daerah melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat sebagai protes terhadap beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah pusat yang merugikan kepentingan daerah. Protes tersebut berlanjut kepada perlawanan bersenjata dengan menelan korban tidak sedikit, baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat. Pemerintah dan elite dalam hal itu belum memiliki kemampuan menggali dan memberdayakan potensi sumber daya terutama dalam hubungannya dengan berbagai kelompok sosial-politik, termasuk “mendistribusikan” sumber daya ekonomi yang berkeadilan. Keadaan demikian menyulut dan menjadi penyebab munculnya beberapa gejolak sosial dan politik yang amat merepotkan semua komponen bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa peristiwa konflik antara daerah dan pusat menunjukkan adanya dialog-dialog yang berakhir dengan jalan buntu. Peristiwa proklamasi PRRI di Padang 1958, dan proklamasi Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Makassar pada 1957 adalah contoh gerakan daerah yang bersumber pada konflik daerah dengan pusat. Pergolakan daerah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal di antaranya, *pertama*, masalah “pusat”. Beberapa kebijakan pemerintah pusat kurang memperhatikan kebutuhan daerah. Tambah lagi dengan kuatnya pengaruh PKI di jantung pemerintah. *Kedua*, pemerintah mengabaikan pembangunan dan ekonomi daerah. *Ketiga*, keinginan untuk menerapkan “dwifungsi” ABRI karena pemerintahan partai-partai politik hanya terfokus kepada persaingan partai menduduki pemerintahan. Kebuntuan dialog yang didasari prasangka buruk terpaksa berakhir dengan kekerasan senjata, yang meninggalkan luka

²³ RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *op. cit.*, hlm. 149.

menyakitkan dalam rakyat di daerah yang dikalahkan.²⁴ Perlawanan bersenjata itu kemudian menimbulkan dampak psikologis bagi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Perang senjata tersebut pada umumnya dipimpin oleh para militer, terutama perwira Angkatan Darat seperti Kolonel Sumual, Letkol Barlian, Letkol Ahmad Husein, termasuk Kolonel Zulkifli Lubis (wakil kepala staf). Semua perwira tersebut tidak memperlihatkan kepatuhannya kepada Nasution bahkan terlibat dalam perjuangan daerah menuntut pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan memperjuangkan terlaksananya pemilihan Presiden Republik Indonesia yang baru. Oleh pemerintah pusat, keaktifan dan tindakan beberapa orang petinggi Angkatan Darat tersebut dinilai sebagai upaya merebut kekuasaan dan pemberontakan. Beberapa perlawanan bersenjata yang dimaksud ialah sebagai berikut.

Pertama, Darul Islam di Aceh. Aceh sebagaimana diketahui merupakan pusat kerajaan Islam Samudera Pasai terbesar di Asia. Pada masa pendudukan penjajahan Barat, daerah ini termasuk salah satu yang sangat gigih merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Benih perpecahan dengan pemerintah pusat sudah dimulai sejak penggabungan provinsi ini dengan Sumatra Utara. Hal ini ditentang keras bahkan tidak diterima oleh rakyat Aceh, tetapi pemerintah pusat tetap dengan kebijakannya dan tidak peduli dengan aspirasi masyarakat Aceh. Walaupun dalam kepanitaan penggabungan provinsi Sumatra Utara, Teuku Daud Syah oleh pemerintah dipandang sudah menjadi representatif masyarakat Aceh. Sebaliknya, masyarakat Aceh memandang bahwa tokoh tersebut bukanlah representasi rakyat Aceh dan tidak akan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh. Dalam kenyataannya memang seperti itu, sehingga masyarakat Aceh tetap berada dalam kekecewaan. Dalam ungkapan yang disampaikan sepertinya “habis manis sepah dibuang”, yang mengkritik pemerintah pusat dan para pemimpin, menjadi populer dalam masyarakat Aceh.²⁵

²⁴ Agustina Magdalena Djulianti Suroyo, *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia Sebuah Proses yang Belum Selesai*, Pidato Pengukuhan, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro di Semarang, 9 Februari 2002, hlm. 20.

²⁵ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 41-42.

Kedua, Dewan Gajah. Dewan Gajah dibentuk oleh Maluddin Simbolon, pada 22 Desember 1956, dua hari sesudah terbentuknya Dewan Banteng dan pengambilalihan pemerintahan di Sumatra Tengah oleh Dewan Banteng dengan basis daerahnya berada di Medan. Ia merupakan Panglima Komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan. Dalam hal itu, ia mengumumkan pembentukan Dewan Gajah di Medan dan menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Perdana Menteri Djuanda. Lalu menyatakan wilayah teritorialnya dalam keadaan darurat perang (SOB). Dalam pidato di Radio Republik Indonesia (RRI) Medan, Simbolon menyatakan bahwa Dewan Gajah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Ia hanya mau berhubungan dengan Presiden Soekarno karena situasi dan kondisi pada waktu itu sangat kritis sebab keadaan bangsa dan negara dalam keadaan kacau.² Lebih lanjut dikatakannya, meskipun keadaan kota Medan agak kacau, undang-undang dan hukum yang ada masih tetap berlaku.² Pernyataan Simbolon ini ternyata membingungkan masyarakat. Di satu pihak ia tetap taat kepada kepala negara, tetapi di pihak lain ia menguasai beberapa instansi pemerintah yang vital di kota Medan. Aksi Kolonel Maluddin Simbolon itu mendapat reaksi keras dari pemerintah pusat. Soekarno dalam hal itu menyerukan kepada Simbolon agar kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh anggota tentara. Seruan Presiden Soekarno tersebut ternyata tidak dihiraukan dan bahkan sebaliknya. Ia menuntut agar kerukunan Dwitunggal Soekarno-Hatta dipulihkan kembali.² Tindakan Simbolon juga ditentang beberapa perwira dan pejabat yang lain di Sumatra Utara. Misalnya, Letkol Djamin Ginting, Kepala Staff TT-1 dan Letkol Wahab Makmur. Dalam hal itu, KSAD Jenderal A.H. Nasution memecat dan menggantinya dengan Letnan Kolonel Djamin Ginting terhitung sejak 27 Desember 1956. Kemudian Djamin Ginting dan Wahab Makmur berhasil memukul mundur pasukan Simbolon dari kota Medan yang berjumlah sekitar 300 orang. Ia dan pasukannya mengundurkan diri ke Tanjung Morawa. Di daerah tersebut pasukannya mendapat perlindungan dari pasukan yang berada dibawah pengaruh Dewan Banteng. Pengunduran diri Simbolon dari kota Medan menurut Muhammad Yamin bukan karena faktor takut menghadapi tentara pusat dan bukan pula karena

kekuatannya yang lemah, melainkan menghindari banyaknya korban jatuh dari masyarakat karena ia masih memiliki kesusilaan Kristen. Secara gamblang Yamin dalam sidang parlemen ia menyatakan:

Kolonel Simbolon pasti akan dapat bertahan di kota Medan, jika sekiranya dia bersedia menumpahkan darah atau menjalankan kekerasan. Perbuatan sedemikian tidak dilakukan dan saya yakin juga pada hari yang akan datang dia tidak akan menjalankan atau mengerahkan kekerasan atau menumpahkan darah bangsa sendiri. Sebabnya, tidak akan bertindak demikian karena dalam dada pejuang itu menyala api kesusilaan Kristen.²⁶

Secara pribadi Nasution memang mengalami konflik pribadi pula dengan Simbolon, terutama terkait dengan posisi jabatan sebagai kepala staf dan dalam hal pemutasian. Simbolon menentang rencana Nasution untuk memutasikannya. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, ada tiga alasan mengapa ia bersikap demikian. *Pertama*, kepindahan itu akan menyebabkan dia terpisah dari sumber dukungannya. *Kedua*, kabarnya dia akan di tempatkan di jabatan yang kurang penting di Markas Besar Angkatan Darat. *Ketiga*, ada kemungkinan bahwa kepala stafnya, Letnan Kolonel Djamin Ginting yang berasal dari suku Karo, akan diangkat untuk menggantikannya. Kemungkinan yang terakhir ini sangat tidak menyenangkan Simbolon karena hubungan antara suku Batak dan Karo sangat tidak harmonis. Jadi, penggantian Simbolon dengan Ginting akan merugikan kepentingan orang-orang Batak di provinsi itu, padahal mereka adalah basis etnis pendukung Simbolon.²⁷ Ternyata dugaan Nazaruddin benar bahwa ketika Simbolon dipecat dari militer, Djamin Ginting diangkat menggantikannya sebagai komandan TT-I Bukit Barisan. Nasution sendiri sebagai KSAD sesungguhnya menghadapi kesulitan dalam memutasikan Simbolon. Oleh sebab itu, Nasution berupaya untuk mencari alasan dan momentum yang pas untuk memutasikannya. Hal itulah yang terjadi pada 1956, di mana koran lokal, *Waspada*, mengungkap keterlibatan Simbolon dalam penyelundupan ribuan ton karet dan kopi, bernilai lebih dari Rp 90 juta, dari sebuah pelabuhan kecil Sumatra Timur, Teluk Nibung kerja sama

²⁶ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 36.

²⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.* 268.

dengan bawahannya dan sebuah perusahaan Cina.²⁸ Kasus ini oleh koran tersebut diberitakan secara besar-besaran, sehingga informasinya cepat menyebar ke mana-mana. Hal ini mengakibatkan reputasi Simbolon turun secara drastis, baik di tengah masyarakat maupun pada lingkaran militer. Meskipun ada pembelaan diri bahwa kasus tersebut dilakukan atas keprihatinan pimpinan militer setempat terhadap kesejahteraan anak buahnya yang disebabkan tidak memadainya dana dari Jakarta. Keuntungan dari penyelundupan demikian akan dibagi-bagikan kepada semua sub-komando di TT-I, termasuk Aceh dan Sumatra Tengah, untuk membiayai perbaikan asrama dan kesehatan.²⁹ Akan tetapi, pembelaan tersebut tidak mampu meyakinkan banyak orang termasuk Nasution. Nasution sendiri dapat dipastikan tidak akan melakukan pembelaan terhadap Simbolon karena ia sudah lama menunggu momentum pas untuk mendepakinya. Keadaan demikian, telah menyulitkan Simbolon baik dalam berhadapan dengan masyarakat maupun dalam menjelaskannya kepada atasannya. Ditambah lagi, menurut Nazaruddin Sjamsuddin, fakta menunjukkan bahwa pembagian keuntungannya itu tidak merata dan bahkan sama sekali tidak dimaksudkan untuk perbaikan kesejahteraan prajurit.³⁰ Nazaruddin dalam hal itu, mengungkapkan:

Kegiatan penyelundupan itu telah menyusahkan Simbolon sendiri. Hal ini *pertama*, karena rusaknya reputasi Simbolon di luar lingkaran militer sebagai akibat dari kerja samanya dengan para pengusaha Cina. *Kedua*, pembagian keuntungan yang tidak merata menyebabkan hubungan Simbolon dengan bawahannya jadi tersendat. Hal ini khususnya terjadi pada hubungannya dengan Gaharu, yang memang tidak menyukai kebijaksanaan Simbolon di Aceh, dan karena itu diam-diam mendukung rencana Nasution untuk menarik Simbolon dari Sumatra Utara.³¹

Dengan dua alasan itu, tidak ada alasan lagi bagi pihak Nasution, pimpinan Angkatan Darat untuk tidak memutasikan Simbolon dan bahkan mengganti posisinya dengan tokoh militer lainnya. Tokoh yang

²⁸ *Merdeka*, 16 September 1956.

²⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.* 269.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

dipandang layak oleh Nasution adalah Djamin Ginting sebagaimana yang tidak disukai oleh Simbolon sendiri. Hal itu, menunjukkan bahwa tekanan kepada Simbolon semakin kuat. Bukan hanya datang dari elite militer saja, melainkan juga datang dari bawahannya bahkan beberapa satuan pimpinan di bawahnya secara diam-diam memberikan dukungan kepada rencana Nasution untuk menarik Simbolon dari Sumatra Utara. Begitu pula tekanan dari pihak luar, yang selama ini sudah menunjukkan antipati terhadap perilaku dan tindakan Simbolon. Tekanan tersebut ternyata mampu mencitukan nyali Simbolon. Apalagi pada akhir November, tekanan itu semakin kuat datang dari Markas Besar dengan memerintahkan agar KSAD mengganti Simbolon. Dengan posisi demikian, bagi Nasution adalah waktu dan momentum yang pas untuk memutasikannya yang selama ini ditunggu-tunggunya. Pada waktu itu, ia sedang berada di Jakarta. Ketika dihadapkan kepada mereka agar meninggalkan komandonya, ia tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk bertahan, sehingga dengan segala keterpaksaan harus diterimanya. Meskipun ia masih merasa mendapatkan dukungan dari kebanyakan perwira, termasuk Letnan Kolonel Ahmad Husein, komandan resimen di Sumatra Tengah.

Pencopotannya dari komando militer, agaknya tidak dapat diterimanya. Hal itu, ditandai dengan digagasnya konferensi pada 4 Desember di Medan. Konferensi tersebut dirancang untuk menggagas dan merumuskan struktur negara".³² Peristiwa tersebut dalam sejarah dikenal sebagai "Ide 4 Desember". Tentunya, peran Simbolon sangat penting dan menentukan dalam konferensi tersebut karena ialah yang menggagas dan menggerakannya. Dalam hal itu, Nazaruddin Sjamsuddin mengungkapka, "Perwira-perwira ini merekomendasikan suatu perubahan revolusioner dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah-daerah di lingkungan TT-I."³³ Gerakan ini, akhirnya berujung pada pembentukan "Dewan Gajah" pada 22 Desember 1956 dengan basisnya di Medan. Dewan tersebut bergerak dalam rangka pembenahan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan sikapnya sangat keras terhadap kebijakan terhadap pemerintah pusat. Sikapnya

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 290.

itu antara lain menyatakan lepas diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintah pusat.

Ketiga, Dewan Garuda. Dewan Garuda terbentuk pada Januari 1957 di Palembang dengan mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno. Dewan Garuda ini bermula dari kongres adat yang pernah diselenggarakan di Palembang. Ketika itu sekelompok politikus berhasil meyakinkan pimpinan militer untuk mencetuskan piagam pembangunan sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi daerah, kemudian mereka membentuk suatu dewan dengan nama Dewan Garuda. Akan tetapi, setelah mereka menyalurkan berbagai persoalan di Sumatra Selatan dan menyampaikan beberapa tuntutan ke Jakarta. Mereka memandang bahwa pemerintah pusat tidak dapat diharapkan dalam memperbaiki suasana Sumatra Selatan. Menurut Muhammad Yamin, keadaan di sana seperti api dalam sekam.³⁴

Sebagai tindak lanjut dari pembentukannya itu, dewan ini menuntut kepada pemerintah pusat agar memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Sumatra Selatan. Selain itu, mereka juga meminta agar Dwitunggal Soekarno-Hatta kembali mengendalikan pemerintah Republik Indonesia. Dengan dalih untuk kepentingan keamanan dan ketentraman, Letkol Barlian selaku pejabat Panglima TT II mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatra Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya. Gubernur Sumatra Selatan Winarno Danuatmojo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dalam rangka memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatra Selatan.⁴ Aktivitas Dewan Garuda yang dipimpin oleh wakil kepala staf TT II Mayor Nawawi mendapat perlindungan dari panglimanya sendiri. Hubungan antara pimpinan Dewan Banteng di Sumatra Tengah dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan dilakukan melalui seorang kurir, yaitu Sidi Bakaruddin, Kepala Eksploitasi Djawatan Kereta Api (DKA) Daerah Sumatra Selatan. Sidi Bakarudin adalah tokoh Dewan Banteng yang aktif di Sumatra Selatan, khususnya di kalangan kaum adat.⁵ Dalam mengatasi ketegangan itu, parlemen mengirim delegasi untuk membicarakan keinginan masyarakat Sumatra Selatan. Delegasi tersebut dipimpin oleh Sumarman, S.H.

³⁴ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 38.

Delegasi ini berhasil mengadakan pembicaraan dengan para tokoh militer maupun sipil setempat.⁷ Akan tetapi, gagal mencari jalan keluar dari perbedaan antara pusat dan daerah.

Keempat, Permesta. Perlawanan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat bukan hanya muncul di Sumatra, tetapi juga datang pula dari Sulawesi. Kemunculannya ini tidak lama setelah Dewan Garuda di bawah pimpinan Simbolon yang diproklamkan di Medan. Pada 2 Maret 1957 di Makassar Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade memproklamasikan Piagam perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).³⁵ Wilayahnya meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian Timur. Guna memperlancar pelaksanaannya, Letkol Sumual menyatakan daerah Indonesia Timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintah daerah diambil alih oleh militer. Sebelum Permesta terbentuk, pada akhir 1956 di Manado sudah terbentuk Dewan Manguni atas inisiatif Kapten G. K. Montolalu dan kawan-kawannya. Dewan ini kemudian bergabung dengan Permesta. Di Sulawesi Selatan, Mayor M. Jusuf berinisiatif pula untuk membentuk Dewan Hasanuddin, tetapi batal direalisasikan karena Permesta sudah terbentuk terlebih dahulu. Gerakan ini dipusatkan di Manado. Sama dengan Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda, gerakan ini bertujuan untuk menentang kebijakan pemerintah pusat,³⁶ bahkan gerakan ini menyatakan dukungan dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta.

Pergolakan PRRI

PRRI berawal dari keprihatinan terhadap kehidupan masyarakat yang semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Pemerintah pusat yang mestinya mendistribusikan pembangunan secara berkeadilan kepada seluruh daerah, tetapi justru yang terjadi hanyalah terpusat di pulau Jawa. Nasib kehidupan masyarakat semakin jauh dari kemakmuran

³⁵ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 3.

³⁶ Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa: Periode 1950-1960* (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005), hlm. 372.

dan berkeadilan. Begitu pula dengan ideologi negara yang semakin digerogoti oleh ideologi komunisme. Dalam hal itu, muncul berbagai protes daerah dan tidak ketinggalan dari Sumatra Tengah, terutama Sumatra Barat dengan PRRI-nya. PRRI adalah satu bagian tidak terpisahkan dari irama sejarah tersebut. Gerakan ini dimulai dari Dewan Banteng, yaitu suatu dewan yang dibentuk oleh beberapa orang tokoh militer seperti mantan pimpinan dan anggota Komando Divisi IX Banteng yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Misalnya, Kolonel Ismail Lengah, yaitu mantan Panglima Divisi IX Banteng.³⁷ Selain mantan militer, dewan ini juga dibentuk oleh tokoh sipil yang berasal dari Sumatra Tengah pada 20 Desember 1956 dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.

Terbentuknya dewan tersebut bermula dari keprihatinan mereka terhadap nasib para prajurit yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dalam perang melawan Belanda pada 1945-1950. Anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian. Asrama sebagai tempat tinggal mereka yang ditinggalkan oleh KNIL (tentara Belanda) selain tidak mencukupi, kebanyakan tidak lagi layak huni. Dalam hal itu, beberapa orang perwira pensiunan mantan anggota Divisi IX Banteng di Sumatra Tengah menginisiasi pengumpulan eks Divisi Banteng di Jakarta sebagai rasa tanggung jawab mereka terhadap nasib kebanyakan dari prajurit tersebut.

Kemudian pembubaran korps divisi dalam revolusi yang belum selesai adalah suatu tindakan yang menimbulkan kecurigaan dan banyak pertanyaan.³⁸ Sedangkan keterlibatan Ahmad Husein dengan Dewan Banteng ini didasarkan atas keprihatinannya terhadap kehidupan para mantan tentara dan keluarganya yang menjadi "korban" perang.

³⁷ Divisi IX Banteng adalah suatu divisi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1950 untuk melawan kolonialis Belanda, dan membawahi teritorial Sumatra Tengah, yang terdiri dari Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau serta Jambi sekarang ini. Divisi IX Banteng memiliki pasukan dalam jumlah yang banyak karena adanya Sekolah Pendidikan Opsir di Bukittinggi, bahkan salah satu pasukannya yaitu Resimen 6 dianggap sebagai pasukan terbaik di Sumatra.

³⁸ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 26.

Pada mulanya simpati itu terlihat dari kesediaannya menjabat menjadi ketua Dewan Banteng, kemudian Ketua Daerah Sumatra Tengah, selanjutnya ultimatum atau proklamasi PRRI yang disampaikannya pada 10 Februari 1958 dan terakhir kesediaannya memimpin perlawanan daerah terhadap pusat.³⁹

Kemudian pada 20-24 November 1956 di Padang kegiatan ini ditindaklanjuti dengan mengumpulkan para perwira aktif dan pensiunan eks Divisi Banteng. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kolonel (Pensiunan) Ismail Lengah dan menyetujui pembentukan Dewan Banteng, yang diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Territorium I Bukit Barisan.⁴⁰ Kemudian Angkatan Perang memberikan reaksinya. Pada 9 Desember 1956, KSAD mengeluarkan pengumuman yang melarang perwira-perwira Angkatan Darat melakukan kegiatan politik.⁴¹

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu membicarakan persoalan perkembangan mutakhir tentang politik dan sosial terutama yang ada di lingkungan Sumatra Tengah. Persoalan-persoalan itu, di antaranya; pembangunan daerah dan potensi ekonomi, sejarah dan identitas perjuangan Sumatra Tengah, pembangunan museum perjuangan, masalah veteran, persoalan panji, masalah janda dan yatim piatu, serta persoalan makam pahlawan. Semua masalah itu akan ditangani dan diselesaikan oleh anggota eks Divisi Banteng yang di daerah Sumatra Tengah. Dari situlah terungkap bahwa ekonomi hanya terpusat di pulau Jawa, sehingga nasib masyarakat dan prajurit yang semakin memprihatinkan. Jauh dari itu, pengaruh komunisme juga semakin kuat pada jantung pemerintahan. Sedangkan masalah yang menyangkut tentang pemerintah pusat akan diperjuangkan secara bertahap. Berbagai makalah yang ditampilkan dalam pertemuan pada 21-24 November 1956 di Balai Prajurit Padang tersebut umumnya bermuara pada kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan

³⁹ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 14.

⁴⁰ Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 327.

⁴¹ *Ibid.*

pemerintah. Pada pertemuan tersebut hadir para alumni dari berbagai daerah seperti Jakarta, Aceh, Medan, Palembang, Bandung, dan dari Sumatra Tengah sendiri.

Pertemuan reuni tersebut melahirkan beberapa pokok pikiran dan sekaligus tuntutan kepada pemerintah pusat, di antaranya;

- a. Pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
- b. Dihapuskannya segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah, serta kontrol.
- c. Pembentukan kembali Komando Pertahanan Daerah dalam arti teritorial, operatif, dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.
- d. Ditetapkannya eks. Divisi IX Banteng Sumatra Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.⁴²

Menindaklanjuti keputusan reuni tersebut, pertemuan itu menyepakati pula membentuk Dewan Banteng dan dinyatakan resmi berdiri 20 Desember 1956.⁴³ Dewan ini memiliki tugas dan tanggung

⁴² *Ibid*, hlm. 346.

⁴³ Nama dari Dewan Banteng ini diambil dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan oleh pemerintah pusat. Dalam sejarahnya, ketika Belanda kembali melakukan agresinya 1945 -1950 pemerintah membentuk sebuah komando militer yang dinamakan dengan Komando Divisi IX Banteng. Jumlah anggotanya terbilang banyak karena membawahi empat wilayah, yaitu; Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Setelah Belanda menyerahkan kembali kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1950 pemerintah pusat melakukan penyederhanaan teritorial komando militer dengan cara mengirim anggota pasukannya ke Pontianak, Ambon, Aceh dan Jawa Barat. Sejalan dengan kebijakan itu, pasukan yang dikirim ke luar Sumatra Tengah mengalami nasib yang sangat memprihatinkan. Batalion Pagaruyung misalnya, selesai melaksanakan tugas di Ambon, lima dari delapan kompi nya dipindahkan dan dilebur ke dalam Divisi Siliwangi, Jawa Barat. Akibatnya, batalion ini, tidak lagi memiliki hubungan atau terputus dari divisi induknya

jawab untuk merealisasikan dan mengkomunikasikan putusan tersebut dengan semua pihak dan akan dilaporkan kembali pada reuni kedua. Dalam perjalanan sejarahnya, situasi politik membawa dewan ini kepada situasi yang mengharuskan bergerak lebih jauh lagi. Ahmad Husein yang diberikan mandat untuk memimpin dewan ini berupaya untuk melakukan pendekatan kepada semua komponen masyarakat yang terdapat pada Sumatra Tengah. Ternyata ia berhasil membawa berbagai komponen baik tokoh masyarakat, birokrat maupun militer sendiri masuk ke dalam dewan tersebut sebagaimana yang tergambar dalam kepengurusan yang sudah dipaparkan di atas.

Hasil pertemuan reuni ini kemudian dilaporkan ke Jakarta oleh delegasi yang terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi Bakaruddin, dan Ali Lubis. Pada 28 November 1956 delegasi ini berhasil menemui beberapa orang pejabat penting, di antaranya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, M. Hatta, dan Mr. A.G. Pringgogdo, tetapi tidak berhasil menemui presiden Soekarno. Kemudian untuk mengatasi tuntutan Dewan Banteng tersebut pemerintah pusat mengiriskan misi ke Sumatra Tengah yang disebut Komisi Penyelidik Keadaan (*Fact Finding Commission*) yang terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Abdul Latief, dan Soelaeman Effendi dari Kepolisian Negara. Tugas utamanya mengadakan penjajakan dan penyelidikan tentang dasar-dasar tuntutan daerah yang disalurkan melalui Dewan Banteng. Tugas tim tersebut menghadapi hambatan karena Achmad Husein selaku ketua Dewan Banteng dan pimpinan daerah Sumatra Tengah tidak bersedia mengadakan pembicaraan dengan para anggota misi tersebut. Ahmad Husein hanya mau berbicara dengan delegasi yang resmi dari kepala negara. Oleh karena itu, memang

yaitu Divisi Banteng di Sumatra Tengah. Bukan hanya itu, penyederhanaan ini terus terjadi sehingga menyisakan satu brigade, yaitu "Brigade Banteng", dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Selanjutnya brigade itupun dicituk lagi menjadi resimen yaitu Resimen Infanteri 4 yang kemudian dilebur ke dalam Komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan (TT I BB) yang berkedudukan di Medan. Ahmad Husein-pun hanya menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB. Perlakuan pemerintah pusat ini dengan cara membubarkan Divisi IX Banteng telah menimbulkan persoalan bagi kalangan perwira dan anggota pasukan lainnya dari Divisi Banteng yang telah berjuang mati-matian dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dahlan Djambek tidak membawa surat kuasa dari kepala negara.⁴⁴

Bila dilihat dari keputusan dan tuntutan pertemuan tersebut di atas—kemudian menjadi tuntutan Dewan Banteng—tidak ada yang menunjukkan terhadap pengingkaran atau keluar dari pemerintah yang sah. Artinya, Dewan Banteng dalam pendiriannya tetap mengakui Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda serta Jenderal A.H. Nasution sebagai KSAD. Tuntutan tersebut berisi tentang koreksian terhadap empat kebijakan pemerintah pusat yang dirasakan tidak sejalan dengan cita-cita bersama dalam membangun bangsa. Pemerintah yang tersentralisasi di Jakarta telah membuat daerah-daerah merana dan menderita karena pembangunan hanya terpusat di pulau Jawa. Begitu pula nasib para prajurit yang sudah mati-matian membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, keadaannya sangat memprihatinkan. Sementara kesatuan militer di mana mereka selama ini bernaung dibonsai dan diperlemah dan bahkan dibubarkan. Hal-hal ini oleh pemerintah pusat dikendalikan secara dramatis, sehingga membuat kekecewaan para eks divisi banteng. Sebagian besar dari perwira Divisi IX Banteng ini tidak menerima penciutan divisi tersebut. Ada beberapa di antaranya yang mengambil sikap keluar dari dinas ketentaraan. Kemudian yang lain lagi memilih tetap berada pada barisan tersebut meskipun ditugaskan pada tempat yang lain. Perwira yang mengambil sikap mundur itu antara lain, Kolonel Ismael Lengah, Letkol Dahlan Ibrahim, dan Letkol Abdul Halim. Ada sebagian lain pulang ke kampung masing-masing dan banyak juga yang akhirnya memilih mengadu nasib di perantauan dengan daerah tujuan utamanya adalah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam perkembangannya, Dewan Banteng ini bukan hanya didukung oleh para perwira militer mantan anggota Divisi Banteng melainkan mendapat dukungan kuat dari semua partai politik yang ada di Sumatra Tengah kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan semua elemen masyarakat yang ada di Sumatra Tengah seperti ulama, intelektual, pemuda, dan kaum adat. Hal itu ditandai dengan masuknya semua komponen masyarakat Sumatra Tengah ke dalam kepemimpinan

⁴⁴ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 31.

Dewan Banteng, yang terdiri dari 17 orang dengan rincian lima orang tentara, dua orang polisi, dua orang pamongpraja, tiga orang veteran, satu orang alim ulama, satu orang ninik mamak, dua orang dari daerah Riau dan satu orang dari daerah Jambi, dan diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein, komandan resimen infanteri 4 dari T.T 1.⁴⁵ Komponen kepengurusan tersebut di antaranya; letkol Ahmad Husein (ketua) dari unsur Komandan Resimen Infanteri IV, Mayor (purn) Suleman (sekretaris jenderal) dari Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatra Tengah, Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa (anggota) dari Kepala Polisi Sumatra Tengah, Sutan Muis (anggota) dari kepala polisi kota Padang, Mayor Anwar Umat (anggota) dari Komandan Batalion 142 Resimen IV, Kapten Nurmatias (anggota) dari Komandan Batalion 140, Resimen Infanteri IV, H. Darwis Taram Dt. Tumanggung (anggota) dari Bupati Limapuluh Kota, Ali Luis (anggota) dari bupati d/p di kantor Gubernur Sumatra Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek (anggota) dari ulama, Datuk Simarajo dari ketua LKAAM, Kolonel (purn) Ismael Lengah (anggota) perwira, letkol (purn) Hasan Basri (anggota) dari perwira, Letkol (purn) Hasan Basri (Riau) (anggota) dari perwira, Saidina Ali (anggota) dari kepala jawatan sosial kabupaten Kampar Riau, Letnan Sebastian (anggota) dari Perwira Distrik Militer 20 Indragiri Riau, A. Abdul Manaf (anggota) dari Perwira Distrik Militer 20 Indragiri Riau, Kapten Yusuf Nur (anggota) dari Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib (anggota) dari Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.⁴⁶

Gambaran dari kepengurusan yang dibentuk oleh Dewan Banteng di atas menunjukkan dukungan dari berbagai komponen masyarakat yang ada di Minangkabau. Hanya sedikit masyarakat yang tidak memberikan dukungan kepadanya. Para tokoh Minang mendukung PRRI secara *all out* termasuk tokoh politik partai Masyumi di tingkat pusat asal Minangkabau. Berbeda halnya dengan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan tokoh Partai Sosialis Indonesia Djoeir Muhammad yang memang dari awal tidak setuju dengan perlawanan PRRI tersebut.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁶ *Ibid*.

Dukungan yang sama juga diberikan oleh partai politik termasuk Masyumi sebagai pemenang dalam pemilu pertama pada 1955, kecuali PKI. Pada saat itu, Duski Samad sebagai pimpinan partai Masyumi secara terang-terangan melalui berbagai media memberikan dukungan terbentuknya Dewan Banteng. Begitu pula partai politik lainnya seperti PSI, Partai Adat Rakyat (PAR) di bawah pimpinan Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang. Partai lain yang turut memberikan dukungannya terhadap Dewan Banteng adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Empat tuntutan Dewan Banteng tersebut oleh pemerintah pusat tidak direspons dan tidak dihiraukan sama sekali. Dalam pada itu, Ruslan Muljohardjo sebagai gubernur menyerahkan tugas tersebut kepada Dewan Banteng pada 20 Desember 1956 di Gubernurnan Padang. Dalam hal itu, Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa

Tetapi dewan yang 17 orang jumlahnya itu tidaklah menyalahgunakan kedudukannya, maka malah bersiap menjalankan tugas yang dipikulkan dan diserahkan oleh saudara Ruslan Muljohardjo sebagai gubernur kepada mereka. Mereka duduk tidak sebagai opsir, polisi atau pamong praja dalamnya, melainkan sebagai petugas pembaruan revolusi yang belum selesai. Dan juga mereka tidak duduk sebagai orang partai, malahan Dewan Banteng berdiri di atas segala partai. Keanggotaan partai politik tidak dibawa-bawa dewan.⁴⁷

Kuatnya dukungan dari komponen yang ada di Sumatra Tengah terutama dari tokoh-tokoh Sumatra Barat karena demokrasi dalam konteks lokal "Sumatra Tengah" dimatikan selama gubernur Ruslan Muljoharjo berkuasa, dewan provinsi dibekukan tanpa ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah provinsi untuk menghidupkan kembali. Hal itu, tentunya berlawanan dengan susunan dan sistem yang berlaku pada masyarakat Sumatra Tengah yang selalu mengenal kata mufakat dalam rapat musyawarah. Keadaan demikian menurut Muhammad Yamin, sudah bertahun-tahun menusuk perasaan rakyat, dan tidak ada upaya mempersiapkan dasar demokrasi, untuk suatu tindakan yang nyata untuk mengganti gubernur dan menyusun dewan provinsi kembali.⁴⁸

Begitu pula pembangunan di Sumatra Tengah tidaklah

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 16.

berlangsung, baik yang berjangka pendek ataupun berjangka panjang selama kepemimpinan Ruslan Muljoharjo. Dalam hal itu ada keinginan kuat untuk membangun memimpin nasib sendiri dengan rasa tanggung jawab penuh.⁴⁹ Ketidakseimbangan pembangunan antara pulau Jawa dan daerah lain di luar pulau Jawa, Pulau Jawa dianak-emaskan dalam segi pembagian pembangunan dan kesejahteraan oleh pemerintah pusat. Hal ini akan selalu bermasalah selama pembangunan ekonomi tidak dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Semua ini pada akhirnya telah mengarah kepada sentimen etnis, yakni suku bangsa Jawa menjadi semacam penjajah baru bagi suku-suku lainnya.⁵⁰ Solok misalnya, masih banyak daerahnya dalam keadaan terisolasi, disebabkan belum adanya jalan yang bisa ditempuh roda kendaraan bermotor jenis apapun. Jalan raya tidak lebih dari jalan kerbau pulang dari sawah. Tentu keadaannya berbeda dengan di Jawa sampai ke dapur jalanpun telah diaspal. Oleh sebab itu, muncul istilah pada masyarakat Minangkabau *aie gadang di nagari awak, tapi urang subarang nan basah dek mandi*. Maksudnya, air besar di negeri kita, tapi orang di seberang yang basah karena bisa menikmati air kita untuk mandi.

Sejak itu, pemerintah pusat merasa sangat terganggu, sehingga timbul ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dan pemerintah pusat. Bagi pemerintah pusat tindakan Dewan Banteng tersebut dipandang sebagai tindakan yang keterlaluan dan menyalahi hukum. Namun demikian, pemerintah pusat tidak melakukan reaksi keras. Hal itu, ditandai dengan tidak adanya teguran dan pemecatan terhadap Ahmad Husein yang masih aktif sebagai militer. Justru, pemerintah pusat lebih cenderung melunak terhadap tuntutan tersebut dengan membentuk Komando Militer di Sumatra Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatra Tengah (KMDST) yang terlepas dari Komando Tentara Teritorium (TT) I Bukit Barisan yang berkedudukan di Medan. Sementara itu, Ahmad Husein sendiri diangkat menjadi Panglima KMDST dengan pangkat Kolonel.

Sedangkan berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah pusat

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Zahrofa Hermiwahyoeni, dkk, *Dampak Migrasi terhadap Politik* (Jakarta: BKKBN, 2011), hlm. 31.

tidak memberikan responnya yang positif. Dalam hal itu, memicu ketidaksenangan dan kekecewaan tokoh-tokoh daerah atau tokoh nasional yang berasal dari daerah. Tindakan yang sudah dilakukan oleh Dewan Banteng dengan mengambil alih pemerintah daerah dari tangan Ruslan Mulyoraharjo dilanjutkan dengan tidak lagi mengirimkan penghasilan daerah Sumatra Tengah ke pemerintah pusat. Penghasilan daerah yang sebagiannya selama ini diserahkan kepada pemerintah pusat seluruhnya digunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Jauh dari itu, Dewan Banteng berinisiatif melakukan hubungan dengan luar negeri, bukan hanya hubungan diplomatik, melainkan juga dalam bidang ekonomi. Dalam bidang yang disebutkan terakhir ini, Dewan Banteng melakukan transaksi barter dengan pihak luar negeri terutama berkaitan dengan hasil-hasil alam Sumatra Tengah. Seluruh dana yang didapatkan dari hasil alam tersebut digunakan Dewan Banteng untuk pembangunan daerah. Dalam beberapa bulan saja dilakukan secara efektif dan efisien pengaruhnya terhadap pembangunan daerah sangat nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Tentunya, berbeda dengan yang selama ini, di mana pemerintah pusat tidak mengembalikan hasil yang disetorkan kepada pemerintah daerah, bahkan pembangunan Sumatra Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap sebagai yang terbaik di Indonesia pada waktu itu. Langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Banteng ini tentunya menimbulkan persoalan bagi pihak pemerintah pusat. Maka dari itu, terjadilah hubungan yang semakin tegang antara kedua belah pihak.

Hubungan yang semakin tegang ini, oleh parlemen, dipandang sudah sangat kritis. Oleh sebab itu, parlemen pada 4 Januari 1957 mengirimkan delegasinya bukan hanya ke Sumatra Tengah, melainkan juga ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan. Delegasi yang ditugasi ke Sumatra Tengah dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad. Delegasi ini berhasil mengadakan pertemuan dengan segenap pimpinan Dewan Banteng. Zainal Abidin sekembalinya ke Jakarta menyatakan telah mendapatkan titik temu pandangan antara tokoh-tokoh masyarakat, Dewan Banteng, dan pemerintah pusat. Ia juga mengatakan bahwa posisi Dewan Banteng tidak membahayakan pemerintah.⁷ Para pemimpin Masjumi pada saat itu telah mencoba untuk menyelesaikan

permasalahan sebelum diproklamirkannya PRRI. Pergerakan Dewan Banteng ini mendapat simpati dari beberapa orang tokoh nasional terutama yang basisnya berasal dari Sumatra Barat, seperti Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan kemudian ikut bergabung dengan perjuangan PRRI.⁵¹

Kemudian pada 9 Januari 1958 terjadi pertemuan beberapa tokoh militer dan sipil, di antaranya; pihak militer hadir waktu itu adalah Letnan Kolonel Ahmad Husen, Letkol Sumual, Kolonel Maludin Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis, sedangkan dari pihak sipil hadir M. Natsir, Syarif Usman, Mr. Burhanuddin Harahap, Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan lain-lain. Mereka semua membicarakan tentang kemungkinan pembentukan pemerintah baru. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, sebulan setelah pertemuan itu, tepatnya pada 10 Februari 1958, di Padang diselenggarakan sebuah rapat luar biasa dengan tiga putusan penting yaitu:

1. Dalam waktu 5 x 24 jam, Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Djuanda.
2. Presiden menugaskan Drs. M. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk *zaken* Kabinet.
3. Meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.⁵²

Keputusan ini merupakan titik kulminasi dari ketegangan pusat dan daerah. Ultimatum ini oleh *Harian Penerangan*, menurut Umar Said —pimpinan *Harian Penerangan*—, dimuat secara besar-besaran.⁵³ Menyikapi tuntutan dan ultimatum Dewan Banteng tersebut maka Dewan Menteri pada 11 Januari 1958 mengadakan sidang darurat. Dalam sidang itu diputuskan bahwa pemerintah menolak ultimatum tersebut, dan memecat dengan tidak hormat Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel

⁵¹ Chiara Formichi, *op. cit.*, hlm. 166.

⁵² Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 346.

⁵³ Umar Said, *Perjalanan Hidup Saya* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), hlm. 84-85.

Maludin Simbolon, sedangkan Komando Daerah Sumatra Tengah dibekukan dan di tempatkan langsung di bawah KSAD.⁵⁴ Dalam situasi politik yang menegangkan itu, pemerintah mengirim delegasi ke Sumatra Tengah untuk melakukan perundingan. Delegasi tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian Eni Karim. Akan tetapi, delegasi tersebut mengalami kegagalan karena tidak berhasil mengadakan pendekatan dengan pimpinan Dewan Banteng. Hal itu sudah diprediksi oleh Muhammad Yamin sebelumnya dan ketika sidang di parlemen disampaikannya secara gamblang.

Tetapi saya mempunyai pandangan yang tidak optimistis terhadap pancingan udang dengan udang, karena saudara Menteri Pertanian tidak mempunyai kekuasaan menolak atau menerima tuntutan-tuntutan Dewan Banteng, yang mungkin oleh karena itu lalu berdiam diri sambil berkata ataulah pengajaran, ekonomi, lalu lintas dan lain-lain secara interwoven, yang tidak dapat dipenuhi atau ditolak begitu saja oleh Saudara Eni Karim yang tidak berkuasa.⁵⁵

Kutipan pernyataan Muhammad Yamin tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Banteng yang berlanjut dengan PRRI bukanlah dimotivasi oleh perebutan kedaulatan, melainkan efek dari ketidakadilan pemerintah saat itu, yaitu telah terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah yang cenderung mengutamakan kepentingan Jakarta serta campur tangan komunis. Pastinya, memang pergerakan PRRI menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Selain itu, kemunculan PRRI juga dapat diartikan sebagai upaya penyelamatan Republik Indonesia dari ancaman komunisme yang sudah begitu sangat kental pengaruhnya di jantung pemerintahan Soekarno. Selain itu, kekecewaan masyarakat kepada pemerintah pusat juga terkait dengan kebijakan yang memaksakan Ruslan Mulyohardjo sebagai Gubernur Sumatra Tengah. Empat orang calon gubernur hasil pilihan DPRST, yaitu Iljas Jakoeb, dr. M.Jamil, dr. A. Rahim Usman, dan Mr. St. Mohammad Rasjid tidak satupun yang diterima pusat. Kebijakan ini oleh DPRST ditolak dan dikembalikan kepada Menteri Dalam Negeri. Jauh dari itu, pemerintah menilai bahwa

⁵⁴ Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 347.

⁵⁵ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 33.

sikap dari DPRST tersebut merupakan bagian “pembangkangan” yang dilakukan oleh elite daerah kepada pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tanggal 15 Januari 1951 membekukan DPRST. Tentunya, pembekuan ini dimaksud bertujuan agar gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan aman tanpa ada gangguan dari parlemen. Sejak itu, sistem demokrasi di Sumatra Tengah nyaris tidak ada sama sekali karena unsur-unsur dari demokrasi tersebut sudah tidak ada lagi. Hal ini bertolak belakang dengan kultur Minangkabau sendiri yang sejak sudah lama hidup dalam kultur musyawarah. Masalah ini sudah menjadi persoalan yang semakin menggunung hingga titik puncaknya terjadi kekecewaan dari berbagai komponen masyarakat yang terdapat di Sumatra Tengah, seperti ketidakpuasan di kalangan perwira, kemacetan sistem politik, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat membawa daerah semakin berpeluang mengambil inisiatif sendiri dalam memperbaiki keadaan.

Selanjutnya, Muhammad Yamin mengkritik perutusan Eni Karim tersebut sebagaimana yang ia nyatakan secara tegas bahwa

Perutusan Eni Karim mungkin bermaksud akan membuka langkah pertama untuk perundingan yang akan datang, tetapi langkah pertama mungkin sekali akan berarti langkah menuju penyelesaian yang berlarut-larut memakan waktu. Pokok pangkalnya kemungkinan itu ialah karena di belakang perutusan Eni Karim dalam kabinet tak ada menteri yang diyakini mempunyai kewibawaan pada rakyat Indonesia di Sumatra Tengah.⁵⁶

Ketegangan politik yang semakin kritis tersebut semakin tidak menemukan titik temu antara pimpinan Dewan Banteng dengan pemerintah pusat. Justru, yang terjadi adalah kebuntuan karena masing-masing sama-sama kokoh mempertahankan sikapnya. Oleh sebab itu, Ahmad Husein sebagai ketua Dewan Banteng 15 Januari 1958, memaklumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kemudian diikuti pula oleh beberapa daerah lain seperti Letkol D. J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah pada 17 Januari 1958, mengumumkan mendirikan Permesta (Perjuangan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 32.

Rakyat Semesta).⁵⁷ Bersamaan dengan itu, di Sumatra Tengah terjadi demonstrasi-demonstrasi massa dan pelajar secara besar-besaran sebagai dukungan moral terhadap pergerakan PRRI.⁵⁸

Proklamasi pendirian PRRI ini oleh pemerintah pusat direspons dengan kekuatan senjata bukan lagi melalui perundingan karena sudah dipandang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Pemerintah pusat pada 12 Februari 1958 membekukan Kodam Sumatra Tengah dan menempatkan langsung di bawah KSAD, ketika itu KSAD di bawah pimpinan A.H. Nasution.⁵⁹ Tiga hari kemudian sejak pembekuan kodam tersebut, tepatnya pada 15 Februari 1958, Dewan Banteng mendeklarasikan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang sebagai “ibu kota negara”. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, Natsir sebagai juru bicara, dan Burhanudin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Kehakiman, sedangkan Sumitro Djohadikusumo dari PSI menjabat sebagai Menteri Perhubungan.⁶⁰ Perlawanan yang dilakukan PRRI merupakan semangat tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas, bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada upaya menjalankan konstitusi. Apalagi saat itu, bangsa Indonesia baru saja menghadapi masalah besar, yaitu agresi Belanda. Dalam hal itu, tentunya negara belum dalam kondisi yang stabil. Oleh sebab itu, diperlukan penataan yang lebih komprehensif dan pendistribusian pembangunan yang lebih merata agar tidak terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Protes ini pada prinsip dasarnya mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menyimpang dari cita-cita bersama. Berbeda dengan itu, Soekarno menilai bahwa gerakan tersebut, pemberontakan PRRI Permesta, sebagai stadium puncak penyelewengan dan pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Terutama karena dipandang telah bekerja sama dengan pihak asing yang reaksioner dan pihak kolonial yang hendak menghancurkan

⁵⁷ Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 347.

⁵⁸ Umar Said, *op. cit.*, hlm. 84-85.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Muhammad Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 164 dan Umar Said, *op. cit.*, hlm.85.

republik.⁶¹ Walaupun keterlibatan partai Masyumi dan PSI serta asing ini dibantah oleh Muhammad Yamin dengan mengungkapkan bahwa “tidak akan mungkin Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi terlibat dalam pergerakan tersebut termasuk keterlibatan orang Nederlands Civil Administration (NICA) dalam gerakan Dewan Banteng.”⁶²

Menyikapi ketegangan politik ini pemerintah pusat meresponnya dengan operasi militer gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. *Pertama*, Letkol Kaharudin Nasution dikirim ke Riau dengan tugas utamanya mengamankan instansi pemerintah. Ia berhasil menguasai kota Pekanbaru pada 12 Maret 1958. *Kedua*, Kolonel Ahmad Yani ditugasi ke Sumatra Barat dan berhasil menguasai dua kota penting, yaitu kota Padang dan Bukittinggi. Kota Padang berhasil dilumpuhkan dan dikuasai pada 17 April 1958,⁶³ sedangkan kota Bukittinggi dapat dikuasai pada 21 Mei 1958. *Ketiga*, Brigjen Jatikusumo ditugasi ke Sumatra Utara dengan operasi Saptamarga. *Keempat*, Letkol Dr. Ibnu Sutowo ditugasi ke Sumatra Selatan dengan operasi sadar. Untuk menghadapi Permesta di Sulawesi pemerintah menugasi Letkol Rukminto Hendraningrat. Daerah Sulawesi Utara Bagian Tengah dipimpin oleh Letkol Sumarsono dengan Operasi Saptamarga I, sedangkan Sulawesi Utara Bagian Selatan dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono dengan operasi Saptamarga II. Kepulauan Sebelah Utara Manado dipimpin oleh Letkol Magenda dengan Operasi Saptamarga III dan Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dengan Operasi Saptamarga IV.⁶⁴

Pada 25 Januari 1958 Masyumi mengirim Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan Fakhri Usman dengan sepengetahuan Perdana Menteri Djuanda⁶⁵ untuk melakukan perundingan mencari berbagai alternatif terhadap kemelut yang semakin kritis tersebut. Namun, upaya itu gagal dilaksanakan karena tidak ada kesatuan pemahaman. Sementara itu, PSI juga mengirim utusan Imam Bok

⁶¹ *Ibid*, hlm. 166.

⁶² Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 13.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 347.

⁶⁵ Muhammad Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 166.

Slamet dan Djoeir Mohammad untuk menemui Sumitro agar tidak melibatkan diri dalam PRRI/Permesta. Namun Sumitro menolak saran tersebut. Selain itu, juga dikirim Soerdarpo Sastrosatomo, namun juga tidak dapat mengubah pilihan Sumitro.⁶⁶

Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimulai pada 21 dan 22 Februari 1958. Saat itu pesawat-pesawat tempur pemerintah pusat mulai melakukan penyerangan secara beruntun. Operasi militer ini tercatat salah satu operasi gabungan terbesar ABRI yang terbesar ketika itu. Dalam sejarahnya, tidak kurang dari enam kapal perang dan 19 kapal pengangkut dikerahkan untuk memindahkan 6500 personel dari pangkalan di Jawa ke Sumatra. Termasuk di dalamnya pasukan infanteri dari Divisi Diponegoro dan Brawijaya dan satu batalion pasukan KKO-AL (Marinir). Sedangkan, Divisi Siliwangi tidak diturunkan. Angkatan Udara membom sasaran-sasaran penting PRRI dan menerjunkan dari udara batalion-batalion dari Jawa di Sumatra. Sedangkan di pihak PRRI tidak memiliki peralatan tempur selengkap sebagaimana pemerintah pusat. Apalagi senjata untuk menangkis gempuran senjata dari tentara pusat seperti kapal selam. Oleh sebab itu, PRRI memang sangat rentan terhadap pemboman melalui udara dan laut. Kekurangan lainnya adalah moral. Banyak di antara pasukan PRRI yang tidak mau berperang melawan tentara Indonesia.⁶⁷

Kolonel Ahmad Yani dan pasukannya mulai melakukan penyerbuan melalui laut pada 16 April 1958 tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan PRRI. Kemudian pada 17 April 1958 tentara pusat melancarkan operasi gabungan dari arah darat, laut, dan udara. Pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 seluruh staf komando Operasi 17 Agustus sudah menduduki kota Padang dan sebelum senja —pada hari pertama penyerbuan— ibu kota PRRI sudah dapat ditaklukan. Kemudian pada 21 April 1958 seluruh kota Padang sudah dikuasai oleh tentara pusat. Pendudukan ini tidak mendapat perlawanan yang berarti karena pasukan PRRI sudah mundur ke daerah pedalaman. Akibatnya, satu demi satu kota-kota penting di Sumatra Tengah jatuh ketangan tentara pusat dalam rentang waktu bulan Maret dan April.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 166.

⁶⁷ Chiara Formichi, *op. cit.*, hlm. 166.

Bukittinggi yang menjadi kota pertahanan PRRI juga dapat dikuasai tanpa perlawanan berarti. Kota tersebut dapat diduduki oleh tentara pusat pada 4 Mei 1958.⁶⁸ Namun demikian, pemerintah pusat tetap saja belum bisa menguasai sepenuhnya wilayah-wilayah yang ada di Sumatra Tengah terutama basis-basis PRRI karena strategi perang yang dijalankan oleh PRRI adalah strategi gerilya. Pasukan PRRI lebih banyak berperang bergerilya dari hutan ke hutan. Jadi, tidak mudah bagi tentara pusat untuk membersihkan perang gerilya sporadis yang dilakukan oleh pasukan PRRI. Untuk itu, tentara pusat menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun dalam membersihkannya.⁶⁹

Walaupun demikian, operasi militer ini tetap saja memakan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit, baik di pihak pemerintah maupun masyarakat. Di pihak pemerintah misalnya, korbannya sebanyak 983 orang dan luka-luka 1.695 orang. Sementara dari pihak PRRI, korban meninggal sebanyak 6.373 orang, 1.201 luka-luka atau tertawan, dan 6.057 orang menyerah.⁷⁰ Untuk memulihkan dan menormalkan situasi keamanan, Ahmad Yani sebagai pimpinan militer yang berkuasa di wilayah Sumatra Barat berupaya melakukan pendekatan dan pembauran dengan masyarakat bahkan pasukan PRRI yang menyerah di lapangan udara Tabing pun, tidak ditahan. Mereka diperbantukan menjadi pasukan pengawal tambahan. Kemudian intensitas pembauran dengan masyarakat semakin ditingkatkan, bahkan Ahmad Yani tidak merasa ragu melakukan Shalat Jumat bersama di masjid-masjid. Bukan hanya itu, pemerintah pusat dapat menangkap pimpinan dan tokoh PRRI, sedangkan sebagiannya menyerahkan diri dengan sendirinya. Misalnya, Sjafrudin Prawiranegara, Moh. Natsir, Letkol Ahmad Husein dan lain-lain. Dari sisi militer, kekalahan PRRI ini tentunya semakin mendorong bersatunya Angkatan Darat yang sebelumnya terkesan terjadi polarisasi. Dalam pada itu, secara psikologis juga memberikan kekuatan yang lebih besar kepada pasukan militer pemerintah guna menghadapi perlawanan bersenjata lainnya. Keberhasilan pemerintah pusat dalam menghantam PRRI dalam waktu yang relatif singkat

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ John Rosa, *op. cit.*, hlm. 256.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 302.

telah menumbuhkan keyakinan dan semangat baru bagi tentara untuk memelihara pasukan militernya,⁷¹ terutama Angkatan Darat.

Bersamaan dengan itu pula pemerintah pusat memperoleh pengalaman militer yang sangat berharga, terutama dalam menyusun operasi-operasi militer berskala besar, selain bisa membangun kekuatan militer dengan senjata-senjata modern yang direbut dari PRRI.⁷² Hal ini, sekaligus dapat mengurangi terjadinya gerakan-gerakan gerilya yang mencoba untuk melawan pemerintah pusat. Dalam pada itu, gerakan PRRI juga diiringi dengan dukungan hingga kerja sama dengan gerakan Permesta di Sulawesi dan Darul Islam di Aceh.⁷³ Kerjasama dengan DI di Aceh terbangun sejak Mr. Burhanuddin Harahap, secara khusus menemui Teungku Muhammad Daud Beureueh di Cangek untuk membicarakan hal-hal yang sangat penting bagi perlawanan dengan pemerintah pusat. Pada saat itu Sjamaun Gaharu memimpin militer di daerah Aceh sedang berupaya melakukan perundingan dengan pihak Darul Islam di Aceh. Ia sendiri memang tidak sependapat dengan sikap Simbolon dan Ahmad Hussein serta beberapa perwira lainnya tentang menghadapi pemerintah pusat. Namun dengan meletusnya perlawanan senjata ini perundingan tersebut sempat terhenti karena harus melakukan konsolidasi agar PRRI tidak meluas sampai ke Aceh terutama pertemuan dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam pandangannya jika hal itu terjadi, akan semakin membahayakan. Gambaran suasana itu diungkapkan Sjamaun Gaharu bahwa

Pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta, telah mengakibatkan perundingan antara saya dengan pihak DI/ TII terhenti sejenak. Kami mengkonsolidasikan diri sambil menjaga agar PRRI tidak menjalar ke Aceh. Ini bisa menjadi bahaya yang lebih gawat lagi.⁷⁴

Kekhawatiran Gaharu tersebut ternyata memang menjadi suatu kenyataan bahwa pengaruh PRRI sampai juga ke Aceh. Pada waktu itu, Gaharu dalam hal itu mengungkapkan bahwa

Apa yang saya khawatirkan itu terjadi. Utusan PRRI pun datang

⁷¹ Muhammad Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm. 306.

⁷² *Ibid*, hlm. 302.

⁷³ Chiara Formichi, *op. cit.*, hlm. 166.

⁷⁴ Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 347.

menghadap Teungku Muhammad Daud Beureueh di Cangek, yang terletak antara Pante Raja dengan Trieng Gadeng. Utusan mereka itu adalah Mr. Burhanuddin Harahap. Tokoh PRRI ini disambut oleh Hasan Aly dan Teungku Sulaiman Daud. DI/TII membuat hubungan lanjut dengan pihak PRRI.⁷⁵

Pertemuan tokoh PRRI dan DI/TII tersebut memiliki kesepahaman untuk saling membantu dan memperkuat perjuangan melawan pemerintah pusat. Dalam hal itu, Teungku Sulaiman Daud diberangkatkan ke Sumatra Barat dan sebulan kemudian ia kembali ke Aceh dengan membawa senjata. Hal ini membawa pengaruh yang besar bagi kekuatan DI/TII dan menurut Gaharu mereka berada di atas angin.⁷⁶ Sekembalinya Teungku Sulaiman Daud dari Sumatra Barat, Hasan Saleh yang menjabat Menteri Peperangan DI/TII menyusun satu unit pasukan baru untuk menyerang Kutaraja. Pasukan ini dinamakan Korps Cadangan.⁷⁷

Kemenangan militer ini juga sangat memiliki pengaruh besar dalam bidang diplomasi sehingga kemungkinannya untuk memenangkan tantangan bersenjata lebih besar daripada sebelumnya.⁷⁸ Begitu pula dalam bidang diplomasi, pemerintah pusat terus menggalang kekuatan untuk membangun hubungan kerja sama dengan negara-negara lain sehingga kekuatan PRRI semakin lemah dan tidak berdaya. Negara-negara lain yang selama ini mendukung perjuangan PRRI bahkan negara yang ikut memberikan bantuan secara berangsur-angsur pun meninggalkannya. Misalnya, Singapura dan Malaya. Setelah PRRI mengalami kekalahan, dua negara ini membangun hubungan kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah pusat. Kemudian, pada tahun yang sama, lebih kurang tiga puluh penyelundup PRRI ditangkap pula di sana.⁷⁹ Penangkapan ini tentunya tidak terlepas dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh dua negara tersebut.

Setelah perang dalam bentuk operasi militer dipandang berhasil, maka pemerintah pusat mengirim misi normalisasi di bawah pimpinan

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 347.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 347.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 302.

⁷⁹ *Warta*, 26 Januari 1959 dan 8 Januari 1960.

Wakil Perdana Menteri I, Hardi, dengan anggotanya terdiri dari beberapa menteri, pejabat-pejabat tinggi dari departemen-departemen dan beberapa perwira tentara Indonesia-Angkatan Darat. Semua yang ditugasi oleh Juanda ini sampai di Padang, satu hari setelah operasi militer dianggap berhasil. Dengan begitu ketegangan-ketegangan antara pusat dan daerah-daerah mulai mereda. Meskipun demikian, pemerintah pusat waktu itu masih menghadapi banyak persoalan-persoalan sulit lainnya. Keadaan ekonomi Indonesia makin memburuk dan operasi militer dalam menghadapi pergolakan daerah-daerah telah memakan biaya yang amat besar.⁸⁰

Dalam pada itu, AH. Nasution sebagai Kepala Pepelra juga mengeluarkan perintah penangkapan kepada Syahrir, Subandrio, Mohammad Roem, Prawoto, serta Anak Agung Gde Agung. Mereka dituduh ikut dalam Gerakan Cendrawasih yaitu, gerakan yang ingin membunuh Soekarno ketika berkunjung ke Makasar pada 7 Januari 1962. Sebuah tuduhan yang sebenarnya belum pernah terbukti, apalagi melihat prinsip sejarah perjuangan Syahrir ataupun Roem yang tidak pernah melakukan perbuatan teror. Ini menyusul penangkapan tokoh tokoh Masyumi sebelumnya seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harapan, Kasman Singodimedjo, Isa Anshary, dan Buya Hamka.

Menurut Saafroedin Bahar, peristiwa PRRI tersebut disebabkan oleh lima faktor, yaitu 1) solidaritas terhadap politisi partai Masyumi asal Minangkabau, yang oleh karena mengalami intimidasi dan terror di Ibu Kota, memutuskan untuk pulang kampung ke Sumatra Barat; 2) tekanan dan dukungan dari beberapa perwira senior tentara Angkatan Darat yang membangkang kepada pemerintah pusat; 3) kurangnya wawasan strategis dari Panglima Komando Daerah Miiter Sumatra Tengah (KDMST), Kolonel Ahmad Husein; 4) euforia yang timbul dari adanya dukungan logistik dari dinas intelijen Amerika Serikat, dan 5) tidak dimilikinya kemampuan berpikir filsafat oleh para tokoh pimpinan masyarakat Minangkabau pada saat itu.⁸¹

⁸⁰ Umar Said, *op. cit.*, hlm. 87.

⁸¹ Saafroedin Bahar, Pemberontakan PRRI Ditafsirkan Kembali: Sebuah Renungan Awal Filsafat Sejarah Lokal, Makalah ini disajikan dalam

Muhammadiyah Nyaris Dibubarkan

Muhammadiyah sejak dari awal pendiriannya oleh Ahmad Dahlan memang tidak dinyatakan sebagai partai politik melainkan organisasi Islam yang bergerak secara kultural. Pilihan ini tentunya juga merupakan pilihan politik yang kadangkala membuat kelabakan pihak lain juga. Namun, dalam perkembangannya persinggungannya dengan partai politik tidak dapat dihindari karena memang kehadirannya tidak berada dalam ruang yang hampa. Oleh sebab itu, pada beberapa periode Muhammadiyah pernah bersinggungan secara aktif dengan partai politik. Ketika pergerakan ini masih dalam usia yang relatif muda (1925-1930) pernah dicap oleh kelompok lain terutama komunis sebagai ambigiu, banci, penjilat, menerima subsidi, serikat hijau, dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, para tokohnya pada masa-masa ini pernah terlibat secara aktif dengan partai politik, terutama Sarekat Islam. Pada masa itu, partai ini dipimpin oleh Cokrominoto. Ahmad Dahlan misalnya, menjadi penasihat Sarekat Islam. H. Fachroedin adalah Penningmeester, bendahara Central Sarekat Islam. KH. Syuja' pun demikian. Begitu pula dengan KH. Mas Mansur di Surabaya.

Keterlibatan para tokoh ini membuat kelompok lain kelabakan karena pengaruh ketokohnya melebihi daripada yang lain. Dalam hal itu, tidak mengherankan bilamana di dalam Sarekat Islam sendiri muncul upaya untuk membatasi gerak tokoh-tokoh Muhammadiyah bahkan, jauh dari itu, ingin mengeluarkannya dari partai ini. Misalnya, pada 1926 muncul usulan dari Sarekat Islam cabang Randublatung untuk mendisiplinkan partai dari Muhammadiyah.⁸² Harry J. Benda dalam hal ini mengungkapkan bahwa sejak 1920-an dan seterusnya, Muhammadiyah menjadi kekuatan dominan dalam Islam Indonesia dan menjadi persyarikatan Indonesia yang terbesar dan paling mampu bertahan, jauh melampaui organisasi-organisasi agama dan politik lainnya.⁸³

seminar sehari yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Tungku Tigo Sajaringan Minangkabau (LKTSM) di Universitas Yarsi Jakarta, pada bulan Desember 2014 yang lalu, dimuat di <http://www.mantagibaru.com/2015/05/pemberontakan-prri-ditafsirkan-kembali.html>.

⁸² Hamka, *Muhammadiyah...*, *op. cit.*, hlm. 77.

⁸³ Harry j. Benda, *op. cit.*, hlm. 71.

Pada periode ini, Muhammadiyah sempat menginisiasi berdirinya partai politik sendiri “Partai Islam Indonesia”. Dari 11 orang anggota Pengurus Besar, adalah lima orang dari Pengurus Besar Muhammadiyah, yakni (1) KH. Mas Mansur, (2) H. Farid Ma’ruf, (3) Abdul Hamid BKN, (4) H. Abdul Kahar, dan (5) HM. Rasyidi.⁸⁴ Akan tetapi, partai ini tidak bertahan lama hilang ditelan sejarah. Begitu pula Sesudah proklamasi kemerdekaan, inisiatif untuk mendirikan partai terbuka kembali. Oleh sebab itu, Muhammadiyah berinisiatif kembali mendirikan partai dengan menggandeng kelompok yang lain terutama tokoh-tokoh yang dari sisi corak pemikirannya mirip dengan Muhammadiyah. Inisiasi itu menjadi suatu kenyataan setelah 7 November 1945 para tokoh Islam dari berbagai corak dan aliran sepakat untuk membentuk partai “Masyumi”. Partai ini didirikan di gedung Mualimin Muhammadiyah di Ketanggungan, Yogyakarta. Dalam perkembangannya, partai tersebut berkembang dengan cepat karena selain didukung oleh jaringan Muhammadiyah juga mendapat dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat Islam lainnya.

Dalam masa yang amat cepat Masyumi tersebar merata di seluruh Indonesia. Perkembangan ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari jaringan yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh tanah air. Apalagi bangunan Muhammadiyah yang cukup rapi dan tertib dibandingkan dengan organisasi lainnya. Dalam hal itu, Pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan instruksi kepada seluruh tingkatan pimpinannya yang memiliki jiwa politik supaya berjuang dalam Masyumi. Meskipun sejarah kembali berulang bahwa dalam situasi perjuangan terdapat golongan yang menarik diri dari Masyumi dengan alasan pengaruh orang Muhammadiyah terlalu besar dalam Masyumi.⁸⁵

Dengan sikap dan corak perjuangan yang dibangun Muhammadiyah, selain ada pihak lain yang merasa kelabakan, tetapi dalam lingkup yang lebih luas dalam sejarahnya Muhammadiyah pernah menyelamatkan Soekarno dari ancaman maut akibat yang dituduhkan kepadanya karena telah membuat kekacauan pada masyarakat oleh pemerintah kolonial. Peristiwa itu terjadi pada 1930.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 77-78.

⁸⁵ *Ibid.*

Muhammadiyah dengan moralnya memberikan jaminan kepada pemerintah kolonial, sehingga Soekarno dapat terselamatkan. Akhirnya, ia hanya dipindahkan ke Bengkulu. Dalam konteks itu, Soekarno dengan terbuka menyampaikan bahwa Muhammadiyah sangat berjasa kepada dirinya. Begitu pula TNI yang dilahirkan oleh Panglima Besar Soedirman dan juga Ir. Juanda.⁸⁶ Kemudian setelah Indonesia merdeka AR. Sutan Mansur sebagai pembentuk karakter dan kepribadian Muhammadiyah utamanya di Minangkabau dijadikan sebagai guru agama Islam bagi tentara Indonesia di Sumatra, dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler.⁸⁷

Perkembangan Muhammadiyah sangat ditopang oleh amal usaha yang melekat di dalamnya. Berbeda dengan organisasi Islam lain, yang tidak memiliki ketahanan dalam memobilisasi gerakan. Dalam hal itu, Muhammadiyah di mana-mana berkembang sejalan dengan “amal usaha”nya. Begitu pula di Sumatra Barat, ketahanannya sangat ditopang oleh berbagai lembaga pendidikan dan layanan sosial yang didirikan sejak dari awal. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah di Padang Panjang sebagai pusatnya di Sumatra Barat telah mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan Muhammadiyah di tanah air. Salah satunya adalah pendirian sekolah yang terdapat di Kauman, Padang Panjang. Begitu pula dakwahnya yang dikembangkan melalui jalur perorangan yang sejalan dengan corak dan pola Muhammadiyah. Misalnya, melalui lembaga pendidikan yang didirikan oleh Abdul Karim Amrullah, yaitu Sumatra Thawalib. Lembaga pendidikan ini dalam sejarahnya cukup banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan Muhammadiyah, meskipun pada waktu tertentu terjadi hubungan yang kurang baik terutama ketika sekolah ini di bawah bayang-bayang pengaruh komunis.

Setelah terjadi pemberontakan di Silungkang pada 1927, sekolah ini mengalami kevakuman karena para pimpinan dan gurunya, termasuk murid-muridnya mengalami ketakutan terhadap tindakan represif pemerintah kolonial. Sebagaimana diketahui bahwa dalam fase ini pengaruh komunis sangat dominan, sehingga pemerintah menanggapi

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan komunis. Akibatnya, sekolah ini mengalami kesepian dan bahkan dalam rentang waktu tertentu sekolah ini berhenti melakukan aktivitas. Oleh sebab itu, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan Hamka kembali aktif membangkitkan sekolah ini meskipun pernah diancam oleh pemerintah kolonial akan diasingkan ke Digul oleh *Asisten Residen Van Deur Meulen*. Mereka keduanya tidak peduli, walaupun waktu itu masih ramai profokasi bahwa Muhammadiyah itu perkumpulan penjilat Belanda.⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah pada saat itu berupaya untuk menyelamatkan Sumatra Thawalib yang sudah mengalami kematian dari aktivitas.

Dalam hal itu, kehadiran Muhammadiyah sejak dari awal di Minangkabau tidak dalam ruang yang hampa, melainkan berada di tengah denyut kehidupan masyarakat. Perubahan dan perkembangan masyarakat selalu mengiringi perkembangan dan dinamika Muhammadiyah. Begitu pun sebaliknya, mundur dan majunya Muhammadiyah selalu memengaruhi kehidupan masyarakat Minangkabau. Tentunya, hal itu suka ataupun tidak akan bersinggungan dengan politik sebagai konsekuensi logis organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang terbuka dan egaliter. Apalagi, fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang tergabung kemudian memimpin Muhammadiyah di tingkat nagari maupun tingkatan yang lebih tinggi, umumnya berasal dari kelompok elite masyarakat. Sebagai dipahami bahwa di nagari masyarakat dipimpin oleh orang empat *jinih* yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan *manti-dubalang* sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ninik mamak memimpin suku dan kaumnya dalam urusan-urusan kehidupan anak dan kemenakannya, seperti harta pusaka, jual beli, gadai, perkara, pendidikan, dan sebagainya. Alim ulama memimpin masyarakat dalam soal-soal keagamaan. Cerdik pandai memimpin masyarakat dalam hal kehidupan masyarakat termasuk pada konteks kepemimpinan politik dan kecendekiawanan. Kedua elite nagari ini bukan hanya milik satu kaum, tetapi milik seluruh masyarakat, walaupun secara adat ia termasuk dan anak

⁸⁸ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 77.

kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu.⁸⁹ Begitu pula manti-dubalang merupakan elite nagari yang bertanggung jawab pada keamanan nagari.

Dengan masuknya berbagai komponen elite masyarakat nagari di Muhammadiyah lintas suku dan profesi tentunya dinamika yang terjadi akan lebih tinggi. Begitu pula kepedulian dan solidaritas terhadap lingkungan akan lebih terasa karena orang-orang yang berada di dalamnya adalah elite nagari yang aktif. Dalam hal itu, tentunya Muhammadiyah, baik secara langsung maupun tidak, akan terlibat dengan denyut perkembangan masyarakat di masing-masing nagari tersebut. Apalagi para tokohnya adalah orang-orang yang disegani dan tempat bertanya oleh masyarakat umumnya baik dalam soal agama, adat, maupun soal-soal aspek kehidupan lainnya. Dalam hal itu, fakta menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang memiliki korelasi dengan politik di Minangkabau, Muhammadiyah selalu turut terutama dalam menggerakannya. Kalaupun tidak membawa dan mengatasnamakan Muhammadiyah secara organisasi secara pribadi tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat aktif di dalamnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir mungkin dengan pertimbangan akan bermaslahat kepada organisasi dengan tidak dilibatkannya secara kelembagaan.

Pada masa penjajahan sering rakyat Minangkabau melakukan protes dan bereaksi terhadap kebijakan pemerintah karena dipandang merugikan. Pemimpin Muhammadiyah secara organisasi maupun pribadi turut aktif, bahkan turut menonjol dalam gerakan-gerakan protes itu. Menolak Guru Ordonansi 1925 misalnya, pemerintah kolonial ingin menerapkannya di Minangkabau dengan mendekati beberapa ulama tua agar mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut pada 1928 ditolak oleh rakyat Minangkabau pada rapat besar di surai Inyiek Jambek, Bukittinggi. Pada saat itu, Hamka menjelaskan bahwa Muhammadiyah belum lagi memiliki pimpinan daerah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah bergerak secara rahasia mengerahkan agar para ulama datang ke Bukittinggi untuk menghadiri rapat tersebut. Jama'an Sidi Sutan, guru Muhammadiyah di Sungai batang dan Hamka ditugasi ke

⁸⁹ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau* (Jakarta: Kartika Insan, 2003), hlm. 73.

Kerinci menemui para ulama dan tokoh agar hadir dalam rapat besar itu.⁹⁰

Begitu pula penolakan terhadap “*Wilde Scholen Ordonantie*” atau ordonansi sekolah liar. Muhammadiyah dalam hal ini menolak secara terbuka bersama-sama dengan Perti dan Sumatra Thawalib yang telah berada di bawah kepemimpinan Permi.⁹¹ Pihak Belanda dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh gerakan-gerakan agama semuanya dipandang liar (*wild*) karena sulit dikontrol dan hampir tidak ada yang mau diperalat,⁹² termasuk sekolah yang didirikan Muhammadiyah. Beberapa sekolah Muhammadiyah yang sudah berdiri di Padang Panjang, Simabur, dan Pariaman dengan nama HIS (*Hollandsche Inlandsche Shool*), mirip dengan sekolah yang dikelola pemerintah, tidak mendapat subsidi dari pemerintah sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah. Di sekolah HIS tersebut diajarkan bahasa Belanda, sedangkan gurunya didatangkan dari Jawa.⁹³ Dalam hal itu, penolakan guru ordonansi di Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi dilakukan di seluruh Indonesia, yang disampaikan dalam khotbah iftitah (pembukaan) kongres oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besarnya sendiri, M. Y. Anis.⁹⁴

Penilaian pihak-pihak tertentu kepada Muhammadiyah Minangkabau yang berpolitik sudah muncul dari sejak masa pemerintah Belanda. K.K. Berg misalnya, sebagaimana diungkapkan Hamka bahwa Muhammadiyah di Minangkabau tidak semata-mata gerakan sosial melainkan juga gerakan politik.⁹⁵ Bila dihubungkan dengan komponen yang terlibat aktif di Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan di atas tentunya tidak bisa dipungkiri sebagai konsekuensi logis dari gerakan keagamaan yang berpaham tajdid. Hamka sendiri juga tidak menampik kenyataan itu. Hal itu, dilihat dari fakta bahwa penggerak Muhammadiyah rata-rata adalah orang-orang yang memiliki posisi strategis di nagari baik sebagai ninik mamak, alim

⁹⁰ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 72.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hamka, Muhammadiyah..., *op. cit.*, hlm. 71.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

ulama, cerdas pandai, maupun *manti-dubalang*. Budaya politik yang terbangun di nagari bersifat kata mufakat. Misalnya, pimpinan cabang Muhammadiyah pada periode pertumbuhan di Sungai Batang. Di dalamnya ada Dt. Siri Bandaro, wakil ketua Pimpinan Cabang. Dia adalah kepala nagari. Ketika terjadinya proses pemilihan mayoritas dari warga nagari tersebut adalah anggota Muhammadiyah, sehingga keterpilihannya dengan suara yang mayoritas pengaruh dari Muhammadiyah. Begitu pula Haji Yusuf Amrullah sebagai Wakil Ketua II. Ia adalah Kadi Nagari di Sungai Batang. Hal yang sama juga M. Amin Dt. Pangulu Basa adalah ninik mamak yang paling berpengaruh di nagari Sungai Batang.

Selain itu, pimpinan Muhammadiyah di awal pertumbuhannya tidak satupun yang berlatar belakang pegawai negeri, sehingga dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dilakukan secara lantang. Memang berbeda dengan Muhammadiyah di Jawa yang umumnya dipimpin oleh pegawai negeri sehingga merasa perlu menyampaikan pendapat dalam pembatasan tertentu. Begitu pula di Medan, anggota dan pimpinan Muhammadiyah umumnya berasal dari saudagar yang menjadi perantau. Mereka tidak memiliki akses untuk berada pada posisi strategis dalam menentukan kebijakan suatu masyarakat.

Di samping itu, para kader yang mengelilingi AR. Sutan Mansur merupakan sosok didikan surau, kecuali Abdullah Kamil yang pernah sempat sekolah di sekolah Belanda, tetapi tidak sampai tamat karena pindah ke Sumatra Thawalib. Budaya kebebasan berpikir yang ditanamkan para ulama kaum muda menyebabkan mereka juga berpikir kritis dan bebas, sehingga tidak merasa segan dan takut terhadap orang yang berpangkat. Tambah lagi sebelum Muhammadiyah masuk ke Minangkabau, propaganda komunis sudah berjalan. Dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan penjilat, menerima subsidi, takut pada politik, dan sebagainya. Hal itu menurut Hamka dapat dimaklumi bahwa provokasi yang demikian akan menimbulkan semacam tekanan ke dalam sikap pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang masih muda-muda hendak memperlihatkan bahwa Muhammadiyah bukan penjilat.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 65.

Dalam hal itu, kesan pemerintah kolonial bahwa Muhammadiyah di Minangkabau berpolitik, berlainan dengan di Jawa, besar kemungkinan juga disebabkan karena beberapa peristiwa tokoh muda Muhammadiyah yang melakukan kritik terhadap pemerintah kolonial. Di samping itu, ada juga faktor pemerintah kolonial Belanda sendiri yang pantang tersinggung dan mesti disembah atau ditaati terus. Peristiwa-peristiwa tersebut mereka kumpulkan kemudian disimpulkan bahwa Muhammadiyah Minangkabau lain dari di Jawa, yaitu Muhammadiyah yang berpolitik dan agak kiri. Dengan kesan bahwa Muhammadiyah di Jawa lebih loyal atau lebih taat dan setia kepada pemerintah.⁹⁷ Sejalan dengan itu, organisasi yang ditolerir oleh pemerintah Hindia-Belanda di Minangkabau sampai kekuasaannya digantikan oleh Jepang waktu itu adalah Muhammadiyah dan Perti. Dalam hal tidak duduknya atau tidak ada orang Muhammadiyah yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia-Belanda dalam *Minangkabau Raad* adalah karena telah menjadi keputusan seluruh Indonesia, di kongres Muhammadiyah ke-25 di Betawi (Jakarta) pada 1936 bahwa Muhammadiyah tidak memasuki dengan aktif segala dewan-dewan perwakilan yang diadakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Kalau ada orang Muhammadiyah terpilih menjadi anggota *raad-raad* itu, bukan atas nama atau membawa nama Muhammadiyah.⁹⁸ Di pihak yang berkuasa ketika itu ada menghubungi pemimpin Muhammadiyah yang memiliki kapabilitas di sisi pemerintahan, yaitu AR. Sutan Mansur, namun dengan segala kerendahan hati beliau menolak.⁹⁹

Kemudian pergolakan pada 1958 yang ditandai dengan kelahiran PRRI, telah menyeret sebagian aktivis Muhammadiyah ikut dalam kancah perang saudara tersebut. Dasar rasionalitas keikutsertaan sebagian dari tokoh dan aktivis Muhammadiyah dalam gerakan itu dilandasi karena tidak ada tanda-tanda pemerintah pusat akan melakukan pembenahan dan perbaikan kehidupan bangsa ini ke arah yang lebih mendasar, sebagaimana tuntutan daerah. Pembangunan daerah nyaris tidak mendapat perhatian pemerintah pusat karena

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 70.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 75-76.

⁹⁹ *Ibid*.

pembangunan lebih terkonsentrasi di Jawa. Jauh lebih mendasar lagi, campur tangan komunis terhadap pengelolaan pemerintah sudah sangat kental, sehingga sulit untuk diselamatkan dan bahkan komunis sering melancarkan teror kepada masyarakat.¹⁰⁰

Ketika pergolakan itu melanda Sumatra Barat, banyak menyeret tokoh-tokoh besar, seperti Syafruddin Prawiranegara, M. Natsir, Burhanuddin Harahap, dan sederetan nama tokoh lainnya, tetapi tetap saja gerakan ini goyah dan lemah. Gempuran-gempuran yang dilancarkan oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) tidak dapat tertahan oleh PRRI. Padang sebagai ibu kota PRRI ketika diduduki nyaris tidak ada perlawanan sehingga Ahmad Yani yang memimpin operasi tersebut heran karena dengan mudahnya menundukan basis PRRI.¹⁰¹ Dengan sendirinya Padang pada 17 April 1958 dapat dikuasai.¹⁰² Menurut pengamatan Umar Said, ketika ia bertugas sebagai pimpinan *Harian Penerangan* milik orang Tionghoa bahwa pada waktu itu pasukan PRRI sebelumnya sudah ditarik ke pedalaman.¹⁰³ Meskipun tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, suasana kota Padang tetap berada dalam keadaan sangat mencekam dan panik karena pasukan tempur Ahmad Yani melalui kapal-kapal perangnya dari pantai laut kota Padang menembaki beberapa bagian tertentu kota Padang. Ditambah lagi ketika pasukan tersebut berhasil mendarat dan mendudukinya, banyak masyarakat yang ditangkapi oleh tentara. Tindakan tentara itu semakin membuat suasana yang runyam bagi masyarakat sebagaimana digambarkan Umar Said di bawah ini.

Saya merasa beruntung waktu itu, karena ketika kapal-kapal perang ALRI sudah menunggu di kejauhan dari pantai laut kota Padang, saya tidak mengalami penangkapan. Mungkin, karena pada waktu itu pasukan-pasukan dan aparat-aparat lainnya yang mendukung PRRI sudah ditarik mundur jauh ke pedalaman. Memang kelihatan ada kepanikan waktu itu, terutama setelah kapal-kapal perang itu menembaki bagian-bagian tertentu kota Padang.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Fikrul Hanif, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Umar Said, *op. cit.*, hlm. 86.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

Pendudukan ini, membawa pasukan Ahmad Yani semakin mudah memasuki dan menyerang basis-basis PRRI secara masif. Sama dengan pendudukan kota Padang, daerah-daerah lain dengan sangat mudah dapat pula diduduki dan dikuasai tanpa perlawanan yang berarti. Kayu tanam jatuh pada 27 April 1958, Padang Panjang diduduki 1 Mei, dan 4 Mei Bukittinggi yang termasuk basis kuat PRRI bertekuk lutut tanpa perlawanan sedikitpun juga.¹⁰⁵ Hal ini menunjukkan bahwa APRI bukan tandingan bagi PRRI.¹⁰⁶

Sedangkan di luar negeri pada September 1958 terjadi pertemuan dengan pendukung PRRI. Pertemuan yang diselenggarakan di Frankfurt dan dihadiri oleh sekitar tiga puluh peserta itu menyerukan agar semua musuh Soekarno bersatu. Konferensi tersebut sepakat meningkatkan kerja sama antara PRRI dan Darul Islam melalui penyatuan kekuatan mereka dalam satu pimpinan. Untuk maksud itu, para peserta merekomendasikan federalisme sebagai basis persatuan, dan didasarkan atas prinsip-prinsip keagamaan.¹⁰⁷ Namun, pergerakan pemerintah pusat telah bergerak dengan cepat untuk menggagalkannya. Tindakan pertama yang diambil pemerintah adalah menyebarkan kabar tentang “Negara Sumatra” yang bertepatan dengan tibanya Hasan Ali Malaya pada November. Diberitakan bahwa pemimpin-pemimpin PRRI dan NBA sedang merencanakan untuk memproklamasikan berdirinya Negara Sumatra pada pertengahan Desember, dan bahwa gerakan PRRI dan Darul Islam di Sumatra akan bersatu dalam gerakan baru ini. Tetapi jadwal yang diberitakan itu lewat begitu saja tanpa ada pengumuman tentang negara baru tersebut. Hal itu disebabkan kegagalan para penggerak PRRI dalam memperoleh dukungan pemerintah Singapura dan Malaya, di samping penentangan yang kuat dari gerakan PRRI di Sulawesi Utara, Permesta.¹⁰⁸

Setelah Sjafruddin dan yang lainnya turun dari hutan dalam

¹⁰⁵ Firdaus, AN, *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde baru yang tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 20.

¹⁰⁶ Umar Said, *op c it*, hlm. 20.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 290.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 291.

rangka menyahuti himbuan pemerintah pusat untuk kembali ke pangkuan pertiwi, dan ia menyahuti hal itu. Akan tetapi, faktanya berbalik arah bahwa para tokoh dan pendukung PRRI justru ditahan dan dikarantina oleh pemerintah pusat bertahun-tahun lamanya.¹⁰⁹ Dalam pada itu, secara fisik suasana kehidupan berangsur-angsur dipulihkan dan dinormalkan kembali. Hubungan lalu lintas yang sempat terputus diperlancar dan sekolah-sekolah mulai dibuka kembali. Akan tetapi, pengaruhnya sangat luar biasa bagi rakyat Minangkabau. Dari peristiwa ini terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Secara psikologis peristiwa ini telah membuat banyak masyarakat berada dalam keadaan trauma yang mendalam. Apalagi stigma pemberontak dilekatkan oleh pemerintah dalam waktu yang cukup lama. Hal ini secara sosiologis memengaruhi budaya masyarakat yang semakin lama semakin terkikis dari akar budayanya. Apalagi kekuasaan pusat begitu sangat kental terutama di dalam menginfiltrasi budaya etnis tertentu setelah peristiwa PRRI tersebut, meskipun Minangkabau sebelumnya termasuk etnis dan wilayah yang sangat gigih di dalam menentang kekuasaan kolonial. Bersamaan dengan itu, daerah ini melahirkan banyak tokoh yang membawa Indonesia menjadi merdeka. Selain mengalami trauma, masyarakat juga diguncang dengan kekerasan yang dilakukan baik oleh tentara maupun pihak komunis. Bersamaan dengan itu, peristiwa ini juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihindangi *psychology of the losers* (psikologi orang kalah) serta trauma atas kekalahan PRRI. Hal itu terjadi karena PRRI dianggap sebagai pemberontak, meskipun yang peristiwa ini sesungguhnya adalah penyelamatan negara terhadap pengaruh komunis sebagaimana diungkapkan Salim Said.

PRRI haruslah dilihat sebagai usaha menyelamatkan RI yang terancam oleh komunisme. PRRI bukanlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, melainkan gerakan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia. Selama ini Mr Sjafruddin Prawiranegara seolah tenggelam dan atau ditutupi dari percaturan negeri ini.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hamka, *Dari Hati...*, *op. cit.*, hlm. 56.

¹¹⁰ Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah SWT*:

Meskipun pemerintah pusat telah berhasil mengalahkan PRRI dengan tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, tetapi tidak serta merta tentara pusat dapat menguasai Sumatra Barat secara keseluruhan. Dalam pemulihannya ke arah yang lebih aman memerlukan waktu yang cukup lama sebagaimana yang dikemukakan Umar Said.

Walaupun perlawanan PRRI tidaklah begitu kuat waktu itu, tetapi operasi gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara (Komando Operasi 17 Agustus dengan dipimpin oleh Kolonel A. Yani ini memakan waktu yang agak lama. Sebab, pasukan-pasukan PRRI dan pemimpin-pemimpin mereka telah ditarik mundur ke daerah-daerah pedalaman yang jauh, untuk melakukan gerilya.¹¹¹

Situasi Muhammadiyah setelah terjadinya pergolakan politik itu, menurut Ilyas Maksum, tokoh Muhammadiyah Pesisir Selatan, nasibnya bagaikan "bika", di atas panas di bawah panas.¹¹² Muhammadiyah, oleh elite terutama oleh penguasa dari tingkat atas sampai kepenguasa tingkat paling bawah, dipandang bagian dari Masyumi, terlibat dengan pergerakan PRRI. Hal yang sama juga dikemukakan Syarifuddin Jaya, tokoh Muhammadiyah Solok dan Nurmiyati, putri alm Muhammad Yatim, bahkan menurutnya Muhammadiyah dipandang oleh pihak lain sebagai pemberontak.¹¹³ Dalam hal itu, Muhammad Yatim sebagaimana dikemukakan Nurmiyati dengan tegas menolak pandangan yang demikian, "Muhammadiyah bukanlah pemberontak sebagaimana dipersepsikan oleh pihak lain, yang terlibat dalam PRRI adalah individual sebagai anggota Muhammadiyah."¹¹⁴

Oleh sebab itu, Muhammadiyah dipandang lawan oleh pihak yang sedang berkuasa. Dalam hal itu, faktanya sebagian besar dari tokoh Muhammadiyah ikut bergerilya masuk hutan keluar hutan sebagaimana halnya Ilyas Maksum sebagai tokoh Muhammadiyah

Biografi (Jakarta:Pustaka Jaya, 2011), hlm. 406.

¹¹¹ Umar Said, *op. cit.*, hlm.87.

¹¹² Ilyas Maksum, *Wawancara*, 8 Januari 2016 di Kambang, Pesisir Selatan.

¹¹³ Syarifuddin Jaya dan Nurmiyati, *Wawancara*, 3 Desember 2016 di Sumani, Solok.

¹¹⁴ Nurmiyati, *Wawancara*, 3 Desember 2016 di Sumani, Solok.

Pesisir Selatan.¹¹⁵ Begitu pula oleh masyarakat lainnya, karena berbeda secara ideologis, Muhammadiyah dipandang sebagai musuh yang harus dibersihkan. Oleh sebab itu, walaupun ada tokoh Muhammadiyah yang tidak ikut pergi, mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mempertahankan dan menggerakkan Muhammadiyah. Misalnya, di Koto Baru, Kambang Pesisir Selatan, Haji Manan sebagai ketua Cabang Muhammadiyah tidak berdaya melakukan pembelaan terhadap anggota Muhammadiyah yang secara konsisten mempertahankan Muhammadiyah dipukuli oleh tentara. Kasus Bachtiar Ihsan dan kawan-kawannya adalah bukti yang sulit untuk dilupakan bagi pimpinan Muhammadiyah di Kambang Pesisir Selatan. Dalam keadaan demikian, sekolah Muhammadiyah oleh masyarakat sekitar yang antipati terhadap Muhammadiyah dijadikan sebagai kandang sapi dan tempat parkir sepeda ketika hari pasar.

Keluarga tokoh dan warga Muhammadiyah yang tidak ikutpun harus menanggung risikonya. Ancaman dan intimidasi yang datang dari berbagai pihak selalu menjadi persoalan yang dihadapinya. Misalnya, Muhammad Yusuf, putra Moehammad Yatim dan adik-adiknya yang masih kecil, hampir setiap hari merasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada orang tuanya. Ia sering melihat orang tuanya selalu dikawali oleh tentara sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa

Waktu papa membangun Muhammadiyah kami sering kaget dan stress yang sangat berkesan sebab tak mungkin melupakan. Papa sering dijemput oleh tentara, papa dijemput ke kantor dan dibawa pulang ke rumah dengan mobil dinas tentara sampai di depan rumah kaca mobil dibuka dan papa melihat keluar kepada kami tidak bicara apa-apa. Langsung pergi.¹¹⁶

Kondisi traumatis tersebut hampir dialami oleh seluruh tokoh dan warga Muhammadiyah. Hal itu, disebabkan karena sebagian perangkat pemerintah masih mempersepsikan bahwa Muhammadiyah adalah Masyumi. Lagi pula, komunis yang menjadi musuh bebuyatannya semakin melakukan penggangyangan terhadap

¹¹⁵ Ilyas Maksum, *Wawancara, op.cit.*,

¹¹⁶ Muhammad Yusuf, putra ke-9 dari Moehammad Yatim, *Dokumen Pribadi*

Muhammadiyah. Bahkan komunis mendesak pemerintah untuk melarang Muhammadiyah. Sedangkan di Sumatra Barat, desakan yang sama bukan hanya dilakukan oleh komunis melainkan oleh sesama umat Islam lainnya, bahkan dalam rapat besar masyarakat Sumatra Barat direkomendasikan kepada pemerintah agar Muhammadiyah dilarang karena mereka menilai bahwa Muhammadiyah telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Selain itu, rapat tersebut juga mendesak kepada pemerintah agar membongkar masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah karena mereka menganggapnya sebagai bangunan liar di tengah kota. •

Bab IV

Moehammad Yatim dan Misi Penyelamatan Muhammadiyah

Situasi Sulit di tengah Pergolakan

MELETUSNYA perang bersenjata yang tidak berimbang antara pemerintah pusat dengan PRRI membuat kehidupan masyarakat berada dalam keadaan mencekam. Begitu pula aktivitas pendidikan yang nyaris mengalami lumpuh. Semua sekolah rata-rata tutup karena takut terhadap bahaya perang. Sejalan dengan itu pula kebanyakan dari para pelajar banyak yang melibatkan diri bergabung dengan pasukan PRRI sebagai tentara pelajar (The Second Army). Tentara pelajar ini mendapat bermacam tugas. Bagi yang memiliki kekuatan fisik kuat dan keahlian ditugaskan bergabung dalam pasukan, sedangkan yang fisiknya biasa-biasa saja berperan sebagai mata-mata dan ada juga di antaranya yang dijadikan sebagai pembantu dalam tugas-tugas administrasi dan sebagai kurir. Proses belajar mengajar mulai kembali berjalan efektif setelah tentara pusat menguasai kota-kota di Sumatra Barat terutama ketika pimpinan PRRI, seperti Ahmad Husein, M.



Muhammad Yatim dan Mahdaniar ke mana pun bertugas dirikan ranting dan cabang Muhammadiyah dan 'Aisyiyah
Sumber: koleksi pribadi penulis

Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan pengikutnya menyatakan kembali ke ibu pertiwi.

Namun, belum sepenuhnya proses belajar mengajar berjalan dengan mulus dan nyaman. Sebab, para pelajar yang sebelumnya bergabung atau mendukung gerakan PRRI berada dalam situasi yang dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan karena mereka dicap sebagai pemberontak. Apalagi bagi mereka yang oleh tentara diduga keterlibatannya secara langsung dalam perlawanan menghadapi tentara pusat. Oleh sebab itu, belum semua pelajar kembali ke sekolah.

Kalaupun di antaranya sudah kembali, tetapi tetap belum merasa nyaman karena bisa-bisa dipanggil, dijemput, dan dicegat paksa oleh tentara pusat. Jadi, mereka berada dalam keadaan trauma dan ketakutan. Apalagi sebagian dari mereka itu mengalami interogasi dari militer. Proses pemulihan bagi mereka yang memang bergabung dalam waktu pergolakan dengan PRRI, diharuskan berhubungan dengan pihak militer. Hal itu terjadi sampai kondisi politik betul-betul sudah kembali normal terutama setelah terjadinya pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru. Pada sebagian yang lain masih tetap bertahan di hutan-hutan atau daerah-daerah pedalaman sebagai kesetiiaannya kepada pimpinan, meskipun Ahmad Husein sendiri sudah menyatakan menyerah dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Kemungkinan pertahanan itu disebabkan informasi menyerahnya tokoh-tokoh PRRI yang belum sampai kepada mereka karena masih berada di lapangan.

Sejak peristiwa itu kemunduran yang sangat dramatis terjadi dalam semua tatanan kehidupan di Minangkabau. Penurunan dalam berbagai kehidupan tidak dapat terhindarkan, termasuk dalam dunia pendidikan, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal itu disebabkan karena mengalami fase kehidupan yang sulit dan rumit. Tekanan dan intimidasi begitu sangat kuat. Sebagian di antara tokoh adat, agama, dan laki-laki dewasa Minangkabau tidak tahan terhadap tekanan dan intimidasi militer dan PKI. Ditambah lagi dengan tindakan sewenang-wenangan dari pihak Operasi Perlawanan Rakyat (OPR) di kampung-kampung. Suasana itu, masih sangat kuat terjadi setelah adanya amnesti dan abolisi terhadap PRRI oleh pemerintah untuk menghentikan gerakannya baik tekan sosial, budaya maupun politik. Oleh komunis suasana tersebut betul-betul dimanfaatkan secara leluasa untuk memperluas pengaruh dan menghancurkan lawan-lawannya. Tentara pelajar yang dulunya menjadi bagian dari PRRI, setelah kembali dari hutan tidak dapat lagi berbuat terhadap kampungnya karena mereka adalah pihak yang kalah. Pasca kalah perang itu adalah masa yang paling sulit dan mencekam. Orang Minang umumnya merasa menjadi bagian orang kelas dua di kampungnya sendiri karena dikuasai oleh militer dan Jawa. Kerusakan

akibat tekanan tentara pusat (Jawa) terhadap kehidupan sosial-budaya Sumatra Barat tidak saja berdampak pada psikologis masyarakat semata, tapi juga infrastruktur. Nagari-nagari hancur atau terbakar, dan prasarananya rusak parah. Jalan dan jembatan hancur.¹ Umumnya, generasi di zaman itu hidup dan dibesarkan dalam suasana ketakutan yang mendalam sebagai akibat dari kekalahan PRRI. Mereka tidak bisa “menegakan kepala” ketika bertemu atau menghadapi tentara yang sedang berkuasa. Hal itu terjadi dalam waktu yang lama dan bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menjadi tentara itu sendiri.

Keadaan demikian membawa sebagian generasi Minang dalam situasi yang harus meninggalkan kampung halaman dengan pergi merantau untuk mengadu nasib. Tempat pelarian mereka adalah ke kota yang sudah dikuasai oleh tentara itu sendiri. Sebab, penumpasan PRRI sudah dipusatkan di daerah-daerah pedalaman karena pertahanan PRRI lebih kuat di daerah-daerah tersebut, di mana model perang yang digunakannya adalah dengan cara gerilya. Selain eksodus ke kota-kota di Sumatra Barat, sebagian ada pula yang pergi meninggalkan Sumatra Barat sendiri dengan tujuan utamanya adalah pulau Jawa. Pada saat itu, muncul istilah “*takuik di ujuang badia, pai kapangka badia*”. Sebagian di antaranya ada yang sukses dan banyak pula yang hidupnya terlunta-lunta. Dalam hal itu, nagari-nagari menjadi lengang dan sepi karena hampir semua tenaga produktif eksodus. Yang tinggal di nagari sebagian besar hanyalah perempuan dan anak-anak. Dibalik banyaknya eksodus itu, terjadi suatu fenomena budaya menyelamatkan diri dengan tidak berani mengaku sebagai orang Minang termasuk melakukan penggantian nama dengan nama identitas etnis lain. Pada perkembangannya, yang merantau bukan hanya lagi laki-laki, tetapi diikuti oleh pihak perempuan baik dengan dibawa suaminya atau ikut saudaranya. Jumlahnya semakin makin bertambah dan meningkat. Di antara mereka yang merantau tersebut ada yang kembali ke kampung dan ada yang tetap tinggal di rantau dan kemudian mendapat pekerjaan.

Begitu pula kepemimpinan masyarakat di nagari—disebut

¹ Abrar Yusra, *Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang*, (Jakarta: Kompas, 1997), hlm. 127.

dengan Angku Palo Nagari—banyak yang beralih tangan kepada kader PKI. Kalaupun tidak kader, tokoh yang bersimpatipun jadi untuk ditunjuk sebagai angku palo atau anggota masyarakat yang dapat mereka atur dan kendalikan meskipun tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin. Dalam mengendalikan keamanan di kampung-kampung pemerintah membentuk organisasi lokal “Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR)”, di mana anggotanya direkrut dari rakyat sendiri yang digunakan untuk menghadapi PRRI. Organisasi ini disusupi oleh kelompok PKI. Dalam perjalanannya tidak mengherankan bilamana dilapangan mereka bersikap dan bertindak di luar batas perikemanusiaan. Bagi tentara sendiri OPR ini digunakan untuk mengamankan dan mempertahankan kota dan kabupaten yang mereka “bebaskan” dari PRRI, sehingga sangat memungkinkan tentara maju untuk menguasai daerah baru.

OPR merekrut lebih dari 6.000 orang pemuda dengan dua tugas utama. *Pertama*, memelihara keamanan dan fungsi pembangunan. *Kedua*, mengamati dan menahan orang yang dicurigai sebagai pendukung PRRI.² Dalam pelaksanaan tugas itu, mereka bersikap arogan dan angkuh. Terkait dengan hal itu, muncul istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjuk kepada organisasi tersebut dengan julukan “tukang tunjuk”. Sebagai organisasi yang menjadi kaki tangan komunis dan mendapat dukungan dari tentara mereka merasa memiliki kekuasaan yang dapat digunakan setiap saat untuk menunjuk sesukanya dan membuat orang masuk dalam penjara. Bukan hanya itu, mereka memiliki kekuatan untuk menghilangkan orang termasuk membunuh orang yang dianggap musuhnya. Umumnya mereka berbicara dengan bahasa Indonesia seperti tentara, tetapi logatnya tetap tidak bisa tergantikan karena mereka berasal dari Minang. Hal ini membuat masyarakat kehilangan akal dan daya kreativitas.

Sebagian dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, dan laki-laki dewasa Minang tidak tahan dengan tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh PKI serta tindakan kesewenang-wenangan OPR di kampung-kampung, bahkan tekanan itu masih kuat setelah

² *Ibid.*

adanya amnesti dan abolisi terhadap PRRI oleh pemerintah untuk menghentikan gerakannya.³ Suasana kehidupan di Sumatra Barat terus menerus dalam keadaan tertekan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Suasana ini dimanfaatkan oleh komunis untuk menekan dan menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan berbagai tekanan dan intimidasi. Para tentara pelajar yang sebelumnya menjadi pelaku utama dalam melakukan perlawanan terhadap tentara pusat ketika bergabung dengan PRRI, mereka tidak lagi bisa banyak berbuat terhadap kampungnya. Mereka adalah pihak yang kalah dalam perang. Pada masa ini adalah masa-masa gelap, di mana mereka merasa menjadi bagian orang kelas dua di kampungnya sendiri. Akibatnya, sebagian dari pemuda meninggalkan kampung dan daerahnya, sehingga nagari-nagari menjadi lengang. Bahkan banyak orang Minang yang lari itu tidak mengaku sebagai orang Minangkabau dan mengganti namanya dengan nama lain guna menyembunyikan identitasnya sebagai orang Minangkabau.⁴

Setelah berakhirnya operasi pembersihan aktivis dan simpatisan PRRI di berbagai daerah muncul kegamangan dan ketakutan. Di Kecamatan Sungai Beremas dan Sasak misalnya, kondisi psikologis masyarakat di daerah ini menurut Mhd Ilham seperti "anak ayam kehilangan induk".⁵ Tokoh masyarakat yang menjadi anutan selama ini terpaksa melarikan diri keluar daerahnya dalam rangka penyelamatan diri. Jauh dari itu, beberapa tokoh menjadi incaran untuk dihilangkan atau dibunuh oleh OPR dan tentara. Dalam sejarahnya, kecamatan ini menjadi basisnya Muhammadiyah sekaligus basis partai Masyumi, tetapi setelah pergolakan politik tersebut usai Partai Masyumi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat di kecamatan tersebut. Keadaan ini membuat masyarakat kehilangan pegangan terutama bagi perempuan, baik yang aktif berorganisasi maupun tidak. Mereka kehilangan suami, bapak, mamak dan saudaranya karena pergi keluar meninggalkan mereka.

Sebagian besar dari masyarakat yang pergi meninggalkan

³ *Ibid*, hlm. 110.

⁴ *Ibid*, hlm. 111.

⁵ Mhd Ilham, *op. cit.*, hlm. 8.

daerahnya adalah warga Muhammadiyah. Menurut penelitian Mhd Ilham sebagian besar di antaranya melarikan diri ke Sumatra Utara dan bahkan lari ke Malaysia.⁶ Dengan keadaan demikian, nyaris aktivitas Muhammadiyah dan 'Aisiyah terhenti dan mengalami kelumpuhan. Kalaupun ada di antaranya yang tidak ikut melarikan diri, tetapi mereka tidak berani untuk menyebut dirinya sebagai orang Muhammadiyah atau 'Aisiyah. Padahal, kegiatan dan aktivitas masyarakat di sini satu-satunya adalah Muhammadiyah dan 'Aisiyah. Dengan tidak adanya kegiatan Muhammadiyah, maka kegiatan di masyarakat secara langsung pun terhenti dan mengalami kevakuman. Dalam keadaan demikian, nyaris tidak ada lagi kegiatan organisasi yang berbasis pada sosial dan keagamaan berpengaruh dan memiliki basis yang kuat. Apalagi yang mengusung isu-isu kewanitaan sebagaimana halnya Aisyiah nyaris tidak ada lagi. Dalam hal itu, Gerwani hadir dalam menggantikan kekosongan tersebut sebagai organisasi yang mengusung kemandirian dan pemberdayaan potensi wanita, bisa berkembang dengan baik.⁷ Momentum ini dimanfaatkan oleh PKI, yang selama ini tidak bisa masuk ke kecamatan tersebut karena di situ pengaruh Muhammadiyah cukup kuat. Dalam waktu yang lama PKI berupaya keras untuk memengaruhi masyarakat di daerah ini, tetapi tidak juga berhasil, kecuali hanya di beberapa komunitas masyarakat seperti buruh dan petani. PKI masuk memengaruhi dua komunitas tersebut melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) ataupun Barisan Tani Indonesia (BTI). SOBSI lebih berkonsentrasi menggarap kaum buruh pelabuhan, sedangkan BTI terkonsentrasi pada petani. Meskipun kurang berhasil, tetapi PKI di daerah ini setidaknya sudah memiliki massa riil sebagaimana halnya Masyumi dan Perti.⁸

Operasi pembersihan dari PRRI hampir terjadi di seluruh Sumatra Barat dan telah meninggalkan trauma psikologis mendalam terutama bagi kaum perempuan. Trauma yang sama juga dialami masyarakat Sungai Beremas. Hal ini telah menjadikan masyarakat kehilangan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

pegangan. Selama ini mereka dikondisikan menjadi wanita-wanita sadar politik dan sadar organisasi.⁹ Apalagi rasa traumatis-psikologis pasca penumpasan simpatisan dan sisa-sisa pengikut PRRI di Air Bangis-Sasak, masih meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat, khususnya aktivitas 'Aisyiyah yang kemudian berkecimpung dalam Gerwani.¹⁰

Peristiwa ini memberikan dampak yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat maupun di birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintah ketika itu hampir dapat dikatakan mengalami kelumpuhan. Menurut Saifroedin Bahar sebagaimana dikutip Obert Fernando, para pegawai pemerintah banyak yang terlibat, masyarakat juga percaya dengan desas-desus bahwa tentara pusat yang datang mendarat adalah tentara komunis. Isu tersebut membuat pegawai melarikan diri.¹¹

Di pentas politik nasional kurang terdengar lagi tokoh-tokoh Minang yang menjadi lokomotif Indonesia sebagaimana tokoh-tokoh sebelumnya, seperti M. Hatta, Sutan Syahrir, Abdul Rivai, Bahder Djohan, Abdul Muis, Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiah, Idrus, dan Marah Rusli dan seterusnya. Bukan hanya sekadar tidak muncul lagi, peran dan kontribusi tokoh-tokoh Minang pada masa kemerdekaan ataupun sebelumnya nyaris tidak muncul dalam buku-buku bacaan sekolah.

Perubahan pasca PRRI bukan hanya terjadi dalam kultur birokrasi, secara sosiologis dampak dari peristiwa tersebut sangatlah besar. Perubahan tatanan kehidupan berkeluarga menjadi persoalan mendasar. Banyak di antara keluarga dan anggota kaum yang "*centang perenang*". Sebab, terjadi saling tidak percaya antara anggota keluarga dengan keluarga yang lain. Dalam sebuah rumah tangga, *urang sumando* tidak lagi berbaikan dengan *tunggana*-nya karena salah seorang di antaranya menjadi pendukung atau memihak kepada PRRI atau sebaliknya ada yang berpihak kepada pemerintah pusat ataupun komunis. Bagi para pendukung PRRI usaha untuk menyelamatkan diri

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

¹¹ Obert Fernando, *op. cit.*, hlm. 41.

dari ancaman tentara pusat jelas menjadi upaya yang mesti dilakukan termasuk komunis yang memang mendapatkan angin segar dari kekalahan PRRI tersebut. Selain saling tidak percaya antara anggota keluarga, kerapuhan rumah tangga juga terjadi karena perlakuan tentara terhadap perempuan yang tidak ikut mengungsi. Ada sebagian istri dari pendukung dan pejuang PRRI tinggal dalam waktu yang lama. Ketika perang sudah usai dan mereka berupaya untuk kembali ke rumah keluarga masing-masing didapatinya ada di antara istrinya yang dalam keadaan hamil karena korban kekerasan seksual selama perang. Suami yang pada awalnya berniat kembali dapat hidup bersama istri dan keluarga, tetapi yang terjadi justru sebaliknya mereka tidak mau menerima kenyataan itu hingga terjadi perceraian. Di samping itu, perceraian juga sangat mudah terjadi disebabkan fitnah yang mungkin sengaja disebarkan oleh pihak ketiga dengan maksud agar mereka tidak kembali berkumpul dalam keluarga. Salah satu fitnah yang menjadi masalah di antaranya terkait dengan istri yang dinodai oleh tentara semasa mereka tinggalkan. Hal ini menyebabkan perceraian mudah terjadi. Pada masa itu, keteguhan dan kesabaran dalam berkeluarga betul-betul sangat diuji.

Ditambah lagi keadaan kehidupan yang semakin sulit. Ekonomi menjadi mandek, sehingga kemiskinan dan kebodohan tidak dapat dihindarkan dan suasana demikian terjadi di mana-mana. Bagi mereka yang merantau, jika mengalami kesuksesan tentunya, sedikit ataupun banyak, akan dapat membantu keluarganya yang ditinggalkan di kampung, tetapi bagi mereka yang belum bernasib baik keadaannya memprihatinkan. Hidup di rantau sangat sulit dan akan pulang kampung pun tidak mungkin. Situasi demikian, membawa suatu perubahan baru dalam tatanan budaya dan sosial, dan ada upaya untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri, meskipun dengan tidak disadari perubahan itu mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai budaya sendiri. Fenomena itu dimulai dari perubahan dan pemberian nama bagi anak-anak yang tidak lagi mengikatnya kepada identitas ke-Minang-an, melainkan mengadopsi nama-nama lain yang sesungguhnya sangat aneh dan asing bagi masyarakat Minang sendiri. Meskipun sebagian ahli berpendapat bahwa pergeseran itu adalah

dalam rangka kreasi penciptaan identitas baru untuk keluar dari keadaan-keadaan sulit. Agaknya, ketundukan terhadap penyebutan orang yang kalah dalam perang mereka terima dengan apa adanya dengan tujuan agar dapat bertahan dan lebih *survive*.

Fenomena itu, memunculkan nama kejawa-jawaan atau kebarat-baratan. Misalnya, ada nama Parmanto. Nama ini kedengarannya Jawa sekali dengan adanya huruf “o” di belakangnya. Meskipun huruf “o” sendiri di Minang untuk nama dan gelar sering pula digunakan, tetapi dihubungkan dengan alam, seperti nama Sutan Mangkuto, Datuk Rajo Indo, Datuk Bijo Anso, Datuk Palimo Kayo, dan seterusnya. Kembali ke nama Parmanto yang kejawa-jawaan itu, ternyata bagi yang memberi nama tersebut memiliki arti sendiri untuk mengindentikan dengan ke-Minang-annya. Parmanto itu, ternyata memiliki hubungan dengan asal dan kampung ayah dan ibunya sendiri, yaitu Parik Malintang dan Toboh. Contoh lain misalnya, ada nama Surianto. Nama ini juga tidak kalah penting kedengarannya sangat Jawa. Akan tetapi, bagi yang memberi nama ternyata dimaksudkan bahwa anak tersebut berasal dari Surian, Kabupaten Solok dengan sukunya Koto. Fenomena ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakan dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan diri. Secara fakta, hal itu digunakan untuk kepentingan memasuki budaya baru yang memang selalu berubah. Nama-nama yang dimaksud memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi yang berhubungan dengan negara maupun memasuki dunia kerja terutama yang dikelola oleh negara, seperti memudahkan dalam pengurusan akte kelahiran, masuk polisi, AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan sebagainya.

Fenomena itu bukan hanya terjadi pada perubahan identitas secara perorangan melainkan secara kolektif. Tekanan politik dan budaya tertentu begitu sangat kuat sehingga budaya yang sudah hidup selama ini harus tunduk dengan kekuasaan baru. Hal itu, dimulai dari perubahan nama-nama daerah yang harus menyesuaikan dengan bahasa Indonesia meskipun kedengarannya sangat aneh, baik dalam bahasa Minang sendiri maupun dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Padang Laweh diganti menjadi Padang Lawas, Kubu Karambie menjadi Kubu Kerambil, Padang Lua menjadi Padang Luar

dan sejenisnya. Begitu pula dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintah yang berlaku di Minangkabau menggunakan sistem nagari dengan struktur dan model yang berbeda dengan daerah lain di luar Sumatra Barat. Pada sistem pemerintah seperti ini termasuk di dalamnya perlindungan terhadap budaya dari arus perubahan. Akan tetapi, sistem ini yang dilemahkan oleh birokrasi dan diupayakan untuk menghilangkannya dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Jawa. Perubahan ini menyebabkan budaya Minang banyak yang hilang dan tergerus. Tentunya, hal itu sangat wajar karena sistem desa yang dipaksakan itu efektif dan cocok untuk luar Sumatra Barat sendiri karena memang berasal tidak dari kultur Minang. Akibatnya, terjadi ketergerusan budaya yang sangat sempurna. Peran ninik mamak, ulama, dan cerdik pandai secara sistemik mulai hilang dengan dominannya peran kepala desa, yang dikendalikan oleh militer. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu, Minangkabau betul-betul dikuasai oleh tentara dan Jawa dalam berbagai bidang kehidupan. Penetrasi budaya tertentu juga terjadi secara besaran-besaran terhadap budaya Minang. Hal itu terjadi dengan berlindung dibalik program transmigrasi. Hubungan dengan luar sangat terbatas sebagaimana diungkapkan Umar Said bahwa selama berlangsungnya pergolakan itu, hubungan antara Padang dan Jakarta terputus, demikian juga hubungan lainnya.¹²

Saat itulah periode pahit kehidupan sebagai warga negara harus dihadapi oleh sebagian besar penduduk Sumatra Barat dalam keadaan gamang menjalani kehidupan yang serba sulit itu. Mereka harus bisa menyasati kehidupan yang tidak menentu tersebut. Ditambah lagi dengan komunis yang semakin mendapat ruang atas kekalahan PRRI dalam melawan pemerintah pusat. Kawan dan lawan kadang tidak bisa dibedakan. Masyarakat saling mencurigai. Bahkan akibat dari keganasan dari komunis, rumah-rumah masyarakat diberi tanda sebagai isyarat akan dihilangkan. Di satu sisi, masyarakat harus berpihak kepada PRRI karena perjuangan PRRI merupakan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kehidupan di daerah. Pembangunan hanya terpusat di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Di

¹² Umar Said, *op. cit.*, hlm.86.

pihak lain, pemerintah pusat melalui tentara “menggasak” masyarakat untuk berpihak kepadanya. Masyarakat ketika itu, dalam istilah Ilyas Ma’shum seperti “kue bika”.¹³ Maksudnya, dari atas masyarakat tertekan dan intimidasi oleh tentara pusat dan komunis, dan dari bawah muncul pula desakan dari pasukan PRRI. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar pimpinan dan tokoh masyarakat Sumatra Barat terlibat dalam perang gerilya itu.

Nasib seperti “kue bika” itu juga dialami oleh aktivis Muhammadiyah. Ketika gejolak politik ini meletus, yang menjadi sasaran utamanya adalah warga Muhammadiyah. Komunis yang menjadi musuh bebuyutan sejak lama merasa mendapat kesempatan untuk membalas dan menghabisi Muhammadiyah. Bukan hanya komunis, pihak-pihak yang selama ini antipati terhadap perjuangan Muhammadiyah juga mengambil kesempatan yang sama. Apalagi Muhammadiyah selama ini diidentikkan dengan partai Masyumi. Fakta sejarah memang menunjukkan bahwa sebagian besar dari tokoh yang tergabung dalam PRRI dari pusat hingga ke kampung-kampung adalah tokoh dan aktivis Muhammadiyah. Mereka itu termasuk ke dalam orang yang ikut masuk-keluar hutan. Hal itu, bukan hanya karena memang aktif terlibat dalam perjuangan melawan keotoritarian pemerintah pusat, tetapi juga karena tidak tahan terhadap tekanan baik fisik maupun psikis, baik yang dilakukan oleh tentara maupun komunis. Kalaupun di antara pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang tidak ikut mengungsi keluar kota, mereka ketakutan dan tidak berani untuk menghidupkan dan menggerakkan Muhammadiyah termasuk amal usahanya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan pada masa itu Muhammadiyah mengalami kevakuman karena pimpinannya meninggalkannya atau takut menggerakannya. Hal yang sama juga terjadi dengan amal usahanya. Aset Muhammadiyah yang terdiri dari lembaga pendidikan, pelayanan sosial seperti panti dan sejenisnya ditinggalkan begitu saja. Murid dan gurunya pun meninggalkan sekolah karena ketakutan menghadapi tentara dan pihak yang selama ini memusuhi Muhammadiyah.

Hal itu menyebabkan Muhammadiyah secara langsung

¹³ Ilyas Ma’shum, *Wawancara..., op. cit.*

yang menanggung dampak dari peristiwa tersebut, meskipun keterlibatannya dari Masyumi jauh sebelumnya sudah dinyatakan secara tegas tidak memiliki hubungan organisatoris lagi. Akan tetapi, bagi komunis dan musuh Muhammadiyah lainnya tidak ambil pusing karena waktu itu dipandang sebagai momentum untuk menghancurkan Muhammadiyah yang sudah lama direncanakan, tetapi sangat dan amat sulit untuk direalisasikan. Kesulitan itu disebabkan faktor kekuatan yang ada padanya, seperti memiliki kader yang berlapis.

Kemudian, tentara pusat pun menjadikan sebagian aset Muhammadiyah sebagai sasaran untuk diduduki termasuk pihak komunis. Pada masa-masa yang sulit tersebut, pimpinan Muhammadiyah menjadi kosong dan tidak bergerak. Sekolah dan aset lainpun diduduki dan dihancurkan. Dalam situasi yang demikian, tidak seorangpun yang berani untuk kembali menggerakkan Muhammadiyah terutama di tingkat wilayah atau provinsi. Memang, hanyalah satu-satunya tokoh yang melakukan itu adalah Moehammad Yatim. Kemudian ia dibantu oleh seorang *rohis* tentara, Mayor Burhani.¹⁴ Di samping itu, Muhammad Yatim dalam menggerakkan dan mengkonsolidasikan kembali Muhammadiyah dibantu oleh para saudagar, terutama saudagar yang berada di pasar raya Padang, di antaranya; H. Sidi Zainuddin (pemilik toko Mas Mutiara Padang), H. Azis Burhan (pemilik Toko Serayu Padang), St. Nurdin (berasal dari Kurai Taji), H. Abd. Rahman (berasal dari Kurai Taji), H. Abd. Djalil (berasal dari Bukittinggi), H. St. Darwis (pemilik Grosir Bada Kampung Jawa). H. Armaini Gampo Alam (berasal dari Cupak). Selain anggota tentara aktif dan pengusaha pasar raya Padang tersebut, dalam hal-hal yang bersifat teknis administratif, Muhammad Yatim di bantu juga oleh Syarifuddin Jaya, ketika itu ia masih remaja.¹⁵ Menurut Syarifuddin Jaya, ia sering dibawa ikut rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan di Masjid Taqwa yang masih berlantaikan kayu maupun yang diadakan di rumah Muhammad Yatim sendiri.¹⁶

¹⁴ Syarifuddin Jaya, *Wawancara*, 3 Desember 2016 di Sumani, Solok.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Tokoh ini sebelumnya, tidak berada dalam lingkaran kepemimpinan Muhammadiyah pada tingkat wilayah. Oleh sebab itu, jika dirunut ke belakang, Moehammad Yatim tidak memiliki rekam jejak dengan proses kepemimpinan dan perkaderan Muhammadiyah di tingkat Sumatra Barat. Pada saat itu, ia hanya menjadi warga Muhammadiyah yang aktif di tingkat ranting Kampung Jawa dan kemudian juga daerah kota Padang. Selain itu, ia selama ini tidak termasuk ke dalam deretan aktivis yang tersohor baik dalam politik maupun gerakan keagamaan sebagaimana halnya tokoh Muhammadiyah yang lain. Ia lebih dikenal sebagai pegawai kantor pos dan telegram. Pada waktu itu, ia sebagai kepala Kantor Pos dan Telegraf Kota Besar Padang. Pada waktu itu, Kantor Pos dan Telegraf Padang, dipimpin Moehammad Yatim. Sebagaimana diketahui bahwa semua perkantoran baik swasta maupun pemerintah ditutup karena suasana dalam keadaan kacau. Satu-satunya kantor yang masih dibuka di kota Padang sejak meletusnya peristiwa PRRI ini hanyalah kantor pos dan telegraf. Kantor buka seolah tidak ada masalah sebagaimana hari-hari biasanya. Pada hal situasinya ketika itu sangat mencekam dan berisiko terhadap pribadinya baik itu datang dari pihak tentara maupun dari PRRI sendiri. Akan tetapi keberanian dan komitmen Moehammad Yatim terhadap kemaslahatan dan kepentingan masyarakat luas, ia tetap membuka kantornya dengan meyakinkan anak buahnya. Dalam hal itu, masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap PRRI dapat mengakses informasi dan menjalin hubungan dengan pihak luar. Melalui kantor pos inilah satu-satunya komunikasi jarak jauh dapat dilakukan.

Situasi demikian, tentunya membutuhkan keuletan dan keberanian pimpinan. Hal itulah yang dilakukan Moehammad Yatim sebagai pimpinan kantor pos dan telegraf. Pada saat itu, satu-satunya Pos dan Telegraf yang dapat menjadi andalan masyarakat luas untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Jejak rekamnya ini, tentunya sangat menguntungkan Muhammadiyah dalam situasi yang amat dan sangat sulit itu. Oleh karena ia orang yang tidak termasuk dicurigai terlibat dalam pergolakan politik tersebut oleh pemerintah pusat. Begitu pula oleh PRRI, ia tidak dikategorikan sebagai mata-matanya pemerintah pusat. Apalagi Moehammad Yatim sendiri sudah terlatih

dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu sejak zamannya pemerintah kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Hampir bersamaan dengan itu, oleh komunispun tidak menjadi incaran untuk dihabisi karena selama ini ia tidak terlibat dalam pergumulan perang ideologis sebagaimana tokoh Muhammadiyah yang lain. Jadi, dengan kefigurannya itu, ia agak leluasa kembali untuk menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai serangan. Sebagaimana dapat diduga bahwa perang yang tidak begitu dipersiapkan dengan matang pada suatu saat akan mengalami kekalahan dari lawan yang lebih tangguh. Kekalahan itu menyebabkan ketergerusan dan kemunduran bahkan keruntuhan baik dari sisi militer dan politik, maupun segi psikologi sosial berupa runtuhnya martabat dan harga diri. Keruntuhan rasa harga diri ini tentunya dipastikan memiliki dampak yang sangat buruk baik terhadap mereka yang terlibat maupun keturunannya.

Meskipun demikian, masyarakat Minang sesungguhnya telah dapat mengatasi trauma yang mendalam tersebut. Dari peristiwa kekalahan itu pula muncul rasioanalisis bahwa meskipun kalah dalam melawan keotoritarian pemerintah pusat tetapi dari sisi politik PRRI mengalami kemenangan. Hal itu, ditandai dengan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dianutnya sistem desentralisasi yang luas di seluruh Indonesia, yang merupakan tuntutan PRRI.

Kehidupan Keluarga dan Karier

Moehammad Yatim merupakan tokoh Muhammadiyah yang corak dan karakternya berbeda dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya. Ia merupakan ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatra Barat —sekarang disebut Pimpinan Wilayah— Sumatra Barat pada dua periode, yaitu; 1958-1961 dan 1961-1964.¹⁷ Secara administratif Konsul I, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatra Barat menjadi wakil Pimpinan Pusat diangkat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal surat 28 Juli 1960 Nomor: 837/II-B/60.¹⁸

Ia sejak dari mudanya bekerja pada kantor Pos dan Telegraf

¹⁷ Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatra Barat, *Surat Turut berlangsungkawa*, Nomor: A.6/329/1976 10 Shafar 1396H/11 Pebruari 1976 M.

¹⁸ Moehammad Yatim, *dokumen pribadi*



**Penulis bersama saksi sejarah peran Muhammad Yatim terhadap penyelamatan Muhammadiyah di masa PRRI (Nurmiyati, Syarifuddin Jaya dan istri)
Sumber: koleksi pribadi penulis**

berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak hanya di Sumatra Barat, tetapi juga daerah lainnya seperti di Sigli, Tapanuli, Rengat dan lain-lain. Sebagai seorang pegawai kantor pos, Moehammad Yatim tidak banyak terlibat dalam aktivitas gerakan politik maupun terjun ketengah masyarakat dalam pembinaan keagamaan dalam bentuk ceramah ke masjid-masjid sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam lainnya. Hal itu, dapat dimaklumi karena ia bukanlah seorang dai sebagaimana yang dipersepsikan dalam masyarakat. Namun demikian, ia tetap memberikan waktu dan perhatian terhadap perjalanan dan perkembangan dakwah Islam di manapun bertugas sesuai penugasan yang diberikan oleh pimpinan kantor pos dan telegraf.¹⁹ Dalam hal itu, Moehammad Yatim memilih Muhammadiyah sebagai tempat beraktivitas keagamaannya. Hal itu, ditandai dengan komitmennya sebagai kader Muhammadiyah di mana ditugasi oleh pimpinannya di kantor pos dan telegraf, di situ mengaktifkan diri menjadi warga Muhammadiyah dan bahkan

¹⁹ Nurmiyati, *Wawancara*, 12 Agustus 2015 di Padang.

menjadi pimpinan persyarikatan. Berbeda tokoh Muhammadiyah Sumatra Barat lainnya seperti Buya AR. Sutan Mansoer, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Buya Malik Ahmad, Hamka, Dt. Gunung Hijau, H. Amir Ali, Harun el-Maani, ZAS, Radhin Rahman, Idris Manaf dan seterusnya, Moehammad Yatim tidak terlibat secara aktif dalam pergerakan politik maupun kegiatan ceramah atau “dai”.

Ia dilahirkan pada 22 April 1901 di Korong Panjang, Jorong Parit Ranting, Koto Nan IV, Payakumbuh dalam keadaan ibu dan mamaknya berharap-harap cemas. Dalam sejarahnya, ibu Moehammad Yatim sebelumnya secara psikis pernah mengalami gangguan berupa putus asa, disebabkan kematian dua orang anaknya dengan suaminya yang pertama. Saking putus asanya itu, ia tidak lagi menghiraukan suaminya, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Selain itu, ibunya memiliki lima orang saudara laki-laki dan satu-satunya dalam keluarga tersebut ialah yang perempuan. Situasi yang demikian, tidak mengherankan bilamana ibunya sedikit agak dimanjakan daripada saudara laki-laknya. Gadih, begitu sapaan akrab keluarga dan lingkungan pada ibu Moehammad Yatim, ketika kematian kedua anaknya itu tidak lagi memiliki semangat hidup, bosan, dan mengalami putus asa. Setelah kematian anak keduanya itu, ia sangat berkeinginan pergi ke Mekkah. Untuk itu, ia meminta kepada saudara laki-laknya untuk dikawani atau ditumpangkan dengan orang lain pergi ke Mekkah. Akan tetapi, pihak saudara-saudaranya itu sangat berkeberatan dan menolak permintaan tersebut karena ia adalah satu-satunya adik perempuan. Tambah lagi, ia sendiri masih dalam keadaan muda pula, di mana saudara-saudaranya itu masih tetap memiliki harapan agar ia memiliki keturunan yang akan meneruskan keturunan sukunya. Penolakan saudara-saudaranya itu, bukan melemahkan keinginannya untuk pergi ke Mekkah. Justru, yang terjadi adalah semakin nekat dan sikapnya yang semakin keras tanpa mepedulikan permintaan dan saran dari saudara-saudaranya itu.

Begitu ia nekat, pada suatu hari pergi tanpa seizin saudara-saudaranya meninggalkan rumah atas keinginan kuat pergi ke Mekkah dengan “menjung” bungkusan kainnya dengan hati yang risau dan galau. Tanpa sepengetahuannya pula, kakaknya yang paling tua

mengikuti di belakang dari kejauhan. Kakaknya sambil mengikuti dari belakang terus memperhatikan gerak-gerik serta tujuan ke mana ia akan pergi. Pada pertengahan jalan, kakaknya memperhatikan ada seorang laki-laki yang mencegatnya dan berhasil membawanya pulang ke rumah. Ternyata, laki-laki itu mampu melunakan dan melumpuhkan kenekatan Gadih tersebut. Informasi dari manuskrip yang ditulis Moehammad Yatim menginformasikan bahwa laki-laki tersebut ketika menanyakan kepada ibunya hendak ke mana, maka secara santun dan menyentuh laki-laki itu mengatakan "*indak mungkin seorang pai, samo-samo kito nanti.*" Maksudnya, "tidak mungkin sendirian akan pergi, nanti sama-sama kita pergi." Jawaban singkat dan padat tersebut ternyata tepat pada sasarannya sehingga ibunya cepat tersadarkan dan hatinya dapat dilunakan seketika itu. Ibunya terseenyum sambil menjawab "*Iyo lai sabananyo kato datuk tu?*". Maksudnya, "apakah benar-benar yang dikatakan datuk ini?" Tentunya, dengan mendengar jawaban Gadih itu, laki-laki tersebut lebih meyakinkan jawabannya sehingga ibu Moehammad Yatim dapat kembali dengan tenang ke rumah.²⁰ Di balik ungkapan "sama-sama kita pergi nanti" bagi orang Minang tentunya tidak sekadar meyakinkan seseorang dalam bahasa yang sederhana apa adanya melainkan memiliki makna yang dalam. Maksud hati yang diutarakan laki-laki tersebut adalah hendak menikahi Gadih tersebut. Sedangkan bagi perempuan dengan jawaban "*lai sabananyo*", dimaksudkan apakah ungkapan itu sebenarnya memberikan makna penegasan dari ucapan ingin menikahi. Laki-laki itu adalah Datuk Lelo Diradjo, ayahandanya Moehammad Yatim.²¹

Kakak tertua dari Gadih yang mengiringinya dalam kejauhan merasa gembira dan tenang melihat adiknya kembali pulang ke rumah dengan dibawa oleh Datuk Lelo Diradjo. Kejadian yang disaksikan kakaknya itu, disampaikan kepada keempat adik-adiknya yang berempat. Akhirnya, mereka semuanya bersepakat untuk setuju menikahkan adiknya dengan Datuk Lelo. Perkawinan tersebut membuahkan kebahagiaan bagi keluarganya ini. Pada satu sisi, saudara laki-laki dari Gadih tidak lagi menjadikan beban pemikiran dan psikis karena suaminya. Datuk Lelo

²⁰ Moehammad Yatim, *dokumen..., op. cit.*

²¹ *Ibid.*

dapat mengayomi dan menenangkannya sehingga tidak ada lagi rasa kekhawatiran akan terganggunya psikis adiknya itu. Begitu pula bagi Gadih sendiri, Datuk Lelo menjadikan hatinya tenang, tidak lagi merasa gelisah dan resah. Apalagi tidak lama setelah berlangsungnya pernikahan, Gadih kembali mengandung. Tentunya, hal ini memberikan harapan baru bagi keluarganya yang selama ini betul-betul diharapkan. Janinnya itu tumbuh dan berkembang dengan sehat hingga lahir dengan sehat dan selamat. Itulah yang kemudian diberi nama dengan Moehammad Yatim. Kelak menjadi tokoh Muhammadiyah Sumatra Barat sebagai pelaku sejarah yang mempertahankan Muhammadiyah di kala Sumatra Tengah “*bagolak*” dan Kepala Kantor Besar Pos dan Telegraf Padang.

Tentunya, kelahiran Moehammad Yatim membawa suasana yang tenang dan gembira bagi keluarganya itu karena sudah lama masa penungguan untuk mendapatkan keturunan. Rasa kegembiraan terutama bagi Gadih sendiri, diwujudkan dengan selalu menggendong anaknya ke pasar. Hanya saja, ungkapan ibunya kepada teman-teman kadang mengandung rasa pesimistis. Penuturan Moehammad Yatim dalam tulisannya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ibunya sering keluar dengan mengatakan “*liek anak den, lai kaiduiknyo*” (lihat anak saya, apakah akan tetap hidup). Ungkapan-ungkapan ini muncul kemungkinan ibunya mengalami traumatis karena setiap ia melahirkan anak tersebut selalu meninggal²² Moehammad Yatim tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya. Ibunya semakin tenang tidak lagi merasa gundah dan resah. Begitu pula mamak laki-lakinya, saudara laki-laki dari ibu Moehamma Yatim pun ikut berbahagia karena tidak lagi terbebani dengan persoalan yang dihadapi oleh adiknya. Kelahiran Moehammad Yatim betul-betul menjadi cahaya terang bagi ibu dan mamak laki-lakinya. Tambah lagi sesudah Moehammad Yatim tumbuh dengan baik, ibunya kembali hamil dan dikaruniai Allah dua orang perempuan. Hanya saja, adik dari Moehammad Yatim tidak sampai besar karena kembali dipanggil Allah. Adik bungsunya meninggal dalam usia setahun. Akan tetapi, peristiwa meninggal adik-adiknya tidak memengaruhi kejiwaan ibunya sebagaimana kejadian yang dialami sebelumnya.

²² *Ibid.*

Sejalan dengan janji ayah terhadap ibunya, ketika komitmen di masa ibunya dalam keadaan putus asa, Moehammad Yatim pada 1923 membiayai ibu bapaknya pergi naik haji. Oleh karena di tahun itu ia telah dapat mengumpulkan sejumlah uang untuk ongkos ibu bapaknya hasil pekerjaannya di kantor pos dan telegraf.²³ Hanya saja yang membuat hatinya tidak nyaman dan tenang ketika orang tuanya pergi naik haji lantaran sejak berangkat tidak ada kabar sedikitpun di mana dan bagaimana keadaan orang tuanya. Pada suatu malam sebagaimana yang ia tulis bahwa ia bermimpi yang sangat mengejutkan bahwa “kami bermimpi, rasanya duduk di Stasiun, Payakumbuh, Kereta Api masuk dan turunlah bapak dengan ketawa dan berkata, “*Tin, mandeh anglah den tinggakan.*” Maksudnya, Tin ibumu sudah saya tinggalkan. Sesudah itu beliauapun menghilang.²⁴ Sebulan jaraknya dari mimpi tersebut, ternyata menjadi kenyataan yang harus diterima Moehammad Yatim. Bukan hanya ibunya yang ditinggalkan bapaknya, melainkan dengan bapaknya sendiri pun meninggalkan Moehammad Yatim.

Pada saat ia sedang sibuk bekerja di kantor pos dan telegraf, tiba-tiba informasi *strook* yang ia terima mengabarkan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal diMekkah. Ketika ia membaca *strook* tersebut tiba-tiba ia tidak sadarkan diri dan tertelungkup dimejanya. Sedangkan *strook* itu terus berjalan “*terjelo-jelo*”. Tentunya, rekan sekerjanya merasa terkejut atas kejadian itu karena belum pernah terjadi sebelumnya. Lantas, teman-temannya menyelamatkan Moehammad Yatim dan sebagian lainnya menggulung *strook* dan membacanya sehingga rekan sekerjanya dapat mengetahui tentang persoalan yang terjadi pada diri Moehammad Yatim. Setelah ia sadar, rekan kerja dan tua kantor memberikan nasihat, menghibur atas peristiwa yang dialaminya dan membujuk untuk pulang. Akhirnya, Moehammad Yatim diantar pulang oleh rekan-rekan sekerjanya. Salah satu faktor utama kesedihannya atas kepulangan kedua orang tuanya adalah karena menurutnya belum lagi bisa membalas budi baik ibu bapaknya. Apalagi ia meninggal di luar negeri yang tidak bisa disaksikan.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Setelah Moehammad Yatim memasuki usia yang cukup untuk menikah, ia menyunting gadis yang dicintainya, yaitu Mahdaniar. Istrinya adalah sosok perempuan yang setia mendampingi hidupnya baik di kala suka maupun duka. Diketahui bahwa kehidupannya lebih banyak dijalani sejak masa penjjajaan. Dari pernikahan tersebut ia dikarunia Allah SWT. 10 orang putra putri, di antaranya adalah Zulkarnain (lahir di Binjai, 18 Februari 1938 dan meninggal di Payakumbuh 23 Oktober 1995), Mahdalena (lahir di Payakumbuh, 8 April 1939), H. Nurikhwan (lahir di Payakumbuh, 10 Oktober 1940 dan meninggal di Payakumbuh, 10 September 2009), Yetminiar (lahir di Payakumbuh, 6 Februari 1942), Darmiyati (lahir di Payakumbuh, 30 Agustus 1943), Muhammad Adnil (lahir di Payakumbuh, 14 Maret 1945), Muhammad Rizal (Lahir di Kisaran, 2 Februari 1950), Nurmiyati (Lahir di Kisaran, 18 Juni 1952), Muhammad Yusuf (lahir di Padang, 22 Juli 1954) dan Rahmiyati (lahir di Padang, 26 November 1956).²⁶

Kemudian meninggal dunia dalam usia 75 tahun pada 10 Februari 1976, pukul 05. 45 di Jorong Tanah Mati, Kota Nan IV, Payakumbuh.²⁷ Pada saat meninggal dunia, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sumatra Barat tidak dapat hadir meskipun pada waktu informasi meninggal sudah direncanakan akan pergi setelah sidang PMW pukul 14.00. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan. Oleh sebab itu, PMW juga berusaha menghubungi PMD 50 Kota, tetapi tidak bisa dilakukan karena telepon mengalami kerusakan.²⁸

Dalam pandangan Muhammadiyah Wilayah Sumatra Barat Ia adalah seorang yang ulet dan tabah serta meyakinkan dalam meneruskan cita-cita dan usaha persyarikatan.²⁹ Oleh karena itu, PMW menugaskan Buya H. Z. Abidin Syoe'ib, Ketua PMW Sumatra Barat dan Buya H. Zulkarnain, Ketua Majelis Tarjih Wilayah Sumatra Barat untuk melakukan takziah kepada

²⁶ Muhammad Yusuf, *op. cit.*

²⁷ *Harian Haluan*, 14 Februari 1976.

²⁸ Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatra Barat, *Surat Turut berlangsungkawa*, Nomor: A.6/329/1976 tanggal 10 Shafar 1396H/11 Pebuari 1976M.

²⁹ *Ibid.*

ahli famili/kaum kerabat almarhum.³⁰ Sedangkan PP Muhammadiyah mengirim surat belasungkawa sebanyak dua kali, masing-masing suratnya A/6-0565/76 tanggal 16 Shafar 1396/16 Februari 1976, yang ditandatangani M. Djindar Tamimy dan H. Djarnawi Hadikusuma kantor Yogyakarta.³¹ Sedangkan PP Muhammadiyah kantor Jakarta mengirimkannya No. A-6/031/176 tanggal 13 Syafar 1396/14 Februari 1976, yang dalam pandangan PP Muhammadiyah Moehammad Yatim adalah tokoh yang tabah, ulet, yang mampu membawakan misi persyarikatan dalam kondisi yang sangat sulit. Surat tersebut ditandatangani oleh H. A. Malik Ahmad dan Drs. Sutrisno Mukhdam.³² Sedangkan istrinya, Mahdaniar, yang setia mendampingi dalam suka dan duka, juga merupakan aktivis 'Aisyiyah yang meninggal dalam usia 60 tahun di RSUP Padang pada 12 Desember 1975, pukul 18.15.³³

Meniti Karier di Kantor Pos dan Telegraf

Moehammad Yatim mulai meniti karier di kantor pos dan telegraf mulai dari masa usia 16 tahun, yaitu sejak 1 April 1917 sebagai *Inlandseh Post Asistent* di Medan sampai pada masa usia pensiun pada 1 April 1961. Jabatannya yang terakhir adalah Pengawas Pos, yaitu inspektur Pos dan Telegraf. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mendedikasikan dirinya pada kantor pos dan telegraf selama 44 tahun. Selama menjadi pegawai kantor pos beberapa penghargaan pernah diterimanya. Selama itu pula ia telah berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan suka dan dukanya sesuai dengan penugasan pimpinan. Kariernya sebagai pegawai pos ia titi sejak dari pegawai bawahan sampai menjadi Kepala Kantor Pos dan Telegraf Besar di Padang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan kariernya berjalan dalam tiga zaman, yaitu, zaman penjajahan Belanda (periode 1917-1943), zaman Jepang (periode 1943-1945) dan zaman kemerdekaan. Pada tahun pertama bekerja sebagai pegawai, ia diserahkan posisi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat Turut berlangskawa*, Nomor: A/6-0565/76 16 Shafar 1396/16 Pebruari 1976.

³² *Ibid.*

³³ *Harian Haluan, op. cit.*

sebagai Djawatan PTT dengan tiga kali kenaikan gaji dari Rp. 50,- ke Rp. 60,-, dari Rp. 60,- ke Rp. 70,- dari Rp. 70,- ke Rp. 80,-. Pekerjaan tersebut ia jalani dengan baik dan memuaskan Djawatan PTT kerja bersama-sama group (golongan) *Inlandish Post Assistent* yang tidak kalah oleh hasil kerja *group Europeaseh Post Assistent*, menghilangkan kata *inlansch (inlander)* di muka nama *post assitent*.³⁴

Semasa bertugas di Medan, terutama ketika berada di Natal, Moehammad Yatim mendapat kesan yang menarik dari suatu peristiwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya. Dari peristiwa itu ia mendapat julukan masyarakat Natal berupa “Oerang Koeminih tulen”. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 1926, di mana ia mewakili *Hulppot Commies* yang sedang cuti. Sejalan dengan kebiasaan yang sudah ada di tempat itu Tua Besar Kebun biasanya ada di tempat tersebut termasuk asisten-asisten kebun yang berasal dari orang-orang Belanda. Mereka di tempat tersebut lalu lalang saja keluar masuk kantor pos dan memilih pos sesuka hatinya, meskipun pada tempat-tempat tertentu ada larangan kepada siapapun. Akan tetapi, larangan tersebut tidak mereka hiraukan karena mereka merasa berkuasa dengan keangkuhannya. Padahal di pintu ruang tertentu sudah diumumkan “*verbeden tugang*” (dilarang masuk). Pada suatu ketika pos datang, Tuan Besar Kebun membuka pintu tanpa memberi hormat dan langsung memilih posnya. Moehammad Yatim memberitahukan secara hormat kepadanya bahwa ruang tersebut terlarang masuk bagi siapapun dan diharapkan supaya ditunggu di luar saja. Akan tetapi, Tua Besar Kebun ini tidak mau tahu atas penjelasan tersebut, bahkan bersikap sebaliknya menunjukkan sikap yang angkuh dan terus masuk memilih posnya. Sikap yang tidak bersahabat yang ditunjukkan oleh orang Belanda ini, oleh Moehammad Yatim ditunjukkan maklumat larangan berbahasa Belanda yang terdapat di atas pintu dan kemudian dipersilahkan keluar dari kantor pos. Akhirnya, si Belanda tersebut tidak dapat berkutik karena mau tak mau dia wajib keluar dan langsung naik mobilnya dan berangkat. Peristiwa ini disaksikan oleh masyarakat banyak yang sedang mengantre untuk keperluan di pos. Mereka semua bergembira menyaksikan pengusiran orang Belanda tersebut

³⁴ Moehammad Yatim, dokumen, . *op. cit.*

dan berteriak-teriak “perangko lima belas sen kalah”. Masyarakat yang banyak tersebut mengunjukannya seperti demonstrasi kepada Moehammad Yatim dan kemudian menyalaminya tanda kagum dan hormat karena berani mengusir orang Belanda tersebut. Sejak itu, Moehammad Yatim dijuluki masyarakat Natal “*Oerang Koominih tulen*”. Peristiwa itu, ia ungkapkan dalam tulisannya bahwa

Mereka-mereka mengunjukannya tangannya pada saya dan kami bersalaman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya apa arti, “perangko limabelas sen kalah”, dijelaskannya sebagai berikut: oleh engkoe HPG (Hulpont) Commies tiap Belanda yang datang dibiarkan sendiri-sendiri mencari pos untuknya dan kami tidak, boleh jadi surat-surat untuk si Belanda diperangkoi limabelas sen, sedang surat-surat untuk kami rakyat cuma sepuluh sen saja. Sesudah kejadian ini saya dijuluki dengan nama yang bersejarah, “*Oerang Koominih tulen*.”³⁵

Namun demikian, bukan berarti ia tidak pernah mengalami masalah di lingkungan pekerjaannya, terutama dengan pihak atasannya. Beberapa kali ia pernah berbeda pendapat dan bahkan melawan pimpinannya. Hal itu menyebabkan ia diberikan sanksi pemindahan ke tempat lain, bahkan kesempatan baik untuk melanjutkan studi yang sudah di hadapan matanya mengalami kegagalan karena dibatalkan oleh pimpinan karena tidak sejalan atau berselisih paham. Pada 1927 misalnya, ketika Moehammad Yatim bertugas di Padang melawan inspektur karena menolak melaksanakan perintahnya yang tidak sesuai dengan keperibadian. Akibatnya, Moehammad Yatim dihukum dengan memindahkannya ke Sinabang selama satu tahun. Akan tetapi, Allah menunjukkan keadilannya belum sampai habis masa sanksi tersebut, ia kembali dipindahkan ke Padang.

Pada masa tugas di Padang beberapa bulan kemudian, ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Bandung, selain untuk menjadi persyaratan sebagai naik pangkat tentunya yang lebih penting lagi menambah penambahan dan pengayaan ilmu pengetahuan. Peluang itu tidak disia-siakannya, ia mengikuti tes melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pusat Pos dan Telegraf dan ternyata hasil tersebut menyatakannya lulus untuk disekolahkan. Dalam hal itu, Besluit pindah Kursus sudah diterimanya. Akan tetapi, perselisihan

³⁵ *Ibid.*

dengan inspektur kembali terjadi setelah empat bulan masa tugas di Padang. Diketahui bahwa pada masa itu adalah masa penjajahan, di mana inspektur sangat dihargai, kata dan tindakannya selalu benar dan tidak bisa dikritisi. Kemudian baginya tidak ada pemeriksaan. Akibat perselisihan tersebut Moehammad Yatim kembali dipindahtugaskan ke Rengat sebagai sanksi kepadanya.³⁶ Besluit kepindahan ke Kursus di Bandung untuk pangkat yang lebih tinggi dibatalkan dan diganti dengan besluit hukuman ke Rengat. Selain hukuman tersebut ia juga mendapatkan surat ancaman yang sifatnya rahasia dengan isinya menegaskan bahwa Moehammad Yatim tidak disekolahkan dengan biaya pemerintah untuk pangkat yang lebih tinggi.

Kesewenang-wenangan dan kezaliman inspektur tersebut pada mulanya ia patuhi, tetapi hatinya mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, Moehammad Yatim melakukan protes dengan cara melaporkan peristiwa perselisihan paham tersebut kepada Kepala Djawatan. Protes tersebut akhirnya direspons secara positif oleh Kepala Djawatan dengan membatalkan surat rahasia yang diberikan oleh inspektur kepadanya termasuk pemindahan ke Rengat. Selain itu, Kepala Djawatan juga melanjutkan besluit kepindahan kursusnya ke Bandung. Dalam hal inilah Moehammad Yatim semakin yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Penyayang bagi hambanya yang sungguh-sungguh dan tidak menyembunyikan kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Pada hal semasa penjajahan cara-cara demikian tidak biasa dilakukan oleh masyarakat pribumi karena yang berkuasa saat itu adalah penjajah termasuk inspektur kantor pos dan telegraf. Apalagi perselisihan paham dengan inspektur yang sama sudah dua kali terjadi. Untungnya hukuman yang diberikan tersebut tidak dalam bentuk *onstlag* (pemberhentian). Menurut Moehammad Yatim, pihak jawatan menyadari akan kerugian yang ditimbulkan jika melakukan pemberhentian atas peristiwa tersebut. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan bahwa “jawatan tahu pasti akan merugi jika diberhentikan karena hasil kerja sangat baik. Jadi diberi saja hukuman

³⁶ *Ibid.*

dengan baik sangka, supaya insaf (takut) dan seterusnya akan patuh.”³⁷

Pada akhir pemerintah penjajahan Belanda, Moehammad Yatim diberikan pangkat Bodriyfs Ambtenaar 1^o Klasse. Pangkat tersebut diberikan karena dipandang sukses dalam memimpin atau mengepalai (*chef*) beberapa kantor pos dan telegraf yang pernah ditugaskan kepadanya, di mana tugas terakhir itu adalah *chef post on telegraf* kantor Payakumbuh. Pada masa itu kantor pos hanya ada pada tiga tempat, yaitu Payakumbuh, Bukittinggi dan Padang. Semua kantor pos tersebut dikepalai oleh orang Belanda kecuali Payakumbuh. Kantor pos Padang dikepalai oleh pegawai yang berpangkat Hoofdkontroleur. Sedangkan kantor pos Port de Kook, Bukittinggi dikepalai oleh pegawai berpangkat controleur 1^o Klasse. Sementara itu, kantor Payakumbuh dikepalai oleh Moehammad Yatim dengan pangkat Bodriyfs Ambtenaar 1^o.³⁸

Pada zaman penjajahan Jepang, semua kantor pos tersebut ditutup (segel), kecuali Kantor Pos Payakumbuh dengan pertimbangan dikepalai oleh orang Indonesia, yaitu Moehammad Yatim. Akan tetapi, dari beberapa informasi sebagaimana diungkapkan Moehammad Yatim ada kabar bahwa ia pada masa itu akan ditarik ke Padang. Akan tetapi, ia berharap tetap berada di Payakumbuh. Dalam pada itu, oleh Persatuan Buruh Umum, ia ditunjuk menjadi ketua dan oleh Persatuan Pegawai Negeri diangkat pula sebagai ketua.³⁹

Menurut Moehammad Yatim pada awal Indonesia merdeka, Djawatan Kantor Kawat/Radio (PTT) berperan penting dalam memberikan informasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, semua pesawat radio di-*beslak* dan disimpan oleh Jepang sehingga informasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta nyaris tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Dalam hal itu, Djawatan PTT (Kantor Kawat/Radio) di Padanglah yang menerimanya dari kantor Jakarta. Kemudian diteruskan kantor kawat Padang ke kantor-kantor kawat lainnya. Selanjutnya, kantor Payakumbuh menyampaikannya kepada pemimpin-pemimpin pemuda, di antaranya Mainoeddin dan Amir Wahid yang berkantor di rumah bola pegawai-pegawai atau Molan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Setia, kantor SMP sekarang.⁴⁰

Selama bertugas di Payakumbuh, selain sebagai Kepala Kantor Pos dan Telegraf Moehammad Yatim pada masa awal-awal kemerdekaan juga ditugasi oleh Komite Nasional Kabupaten Limapoluh Kota, ketika itu dipimpin oleh Darwis Datuk Tumanggung, sebagai asisten Soetan Alamsyah. Begitu pula ketika komite nasional tersebut dipimpin oleh dokter Adnan, Moehammad Yatim tetap dipertahankan sebagai asistennya. Pada waktu dokter Adnan menjadi Bupati Lima Puluh Kota, Moehammad Yatim sempat ditugasi sebagai kepala urusan Pasar Payakumbuh bersama dengan tokoh lainnya seperti Sjoetjipto opzioeter sebagai pekerjaan umum dan Nazaruddin Thaha direktur Training Collogo. Dengan demikian, posisi Moehammad Yatim ketika itu sangat penting dan strategis. Selain sebagai kepala kantor pos juga merangkap sebagai asisten ketua Komite Nasional dan kepala urusan pasar.⁴¹ Asisten komite nasional tentunya berkaitan dengan pergerakan politik pasca kemerdekaan yang sangat menentukan kestabilan daerah dan kenyamanan masyarakatnya. Sedangkan urusan pasar berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang memengaruhi stabilitas politik daerah. Pada masa itu, pasar merupakan urat nadi ekonomi masyarakat. Bilamana pasar tidak berjalan dengan baik dan terganggu, maka semua aspek kehidupan termasuk stabilitas politik akan terganggu bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi gangguan keamanan masyarakat. Apalagi pada waktu itu, berada dalam situasi transisi dan masa-masa sulit. Apa saja bisa terjadi tanpa diketahui sebelumnya.

Satu tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka (1946), Moehammad Yatim pindah tugas ke Jambi mengepalai Djawatan PTT. Pada masa itu, jawatan ini sedang dalam keadaan tidak terurus. Istilah yang digunakan Moehammad Yatim dalam menggambarkan situasi itu adalah pada kondisi kacau balau. Dalam tulisannya ia menggambarkan situasi kantor pos yang didapatinya dalam keadaan yang memprihatinkan bahwa “pada 1946 saya pindah ke Jambi, di mana didapati Djawatan PTT sedang kacau balau. Pertanggung jawaban keuangan tidak selesai, uang kawat dan telepon dibagi-bagi oleh pegawai-pegawai

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

dan djawatan tak dipercayai rakyat untuk mengirim Postwissel.”⁴² Melihat situasi yang demikian, Moehammad Yatim berupaya melakukan pendekatan kepada seluruh pegawai yang masih ada. Kemudian dilakukan musyawarah secara bersama-sama dan dengan sangat mudah ia dapat diterima oleh pegawai pos Jambi. Yang terpenting dari pendekatan dan musyawarah tersebut adalah penerimaan pegawai kantor pos tersebut dalam menerima Moehammad Yatim sebagai kepala kantor dan berkomitmen akan bekerja sama.

Tugas mengembalikan kantor pos sebagaimana kantor-kantor pos lainnya dalam waktu yang relatif singkat dapat dijalankannya dengan baik termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pos wesel. Keberhasilan dan kecekatannya dalam memimpin dan membangun komunikasi dengan pihak lain tidak hanya berkulat sebagai kepala kantor pos dan telegraf Jambi melainkan pengaruhnya menyebar keluar sehingga ketika rapat persatuan pegawai kota Jambi diselenggarakan Moehammad Yatim dipilih menjadi ketua oleh Tuan Residen (Raden Ibnoo Kartapati, putra eks Sultan Jambi). Hal ini kemudian menjadikannya sebagai bagian keuangan dari keresidenan Jambi, yang berfungsi sebagai menerima setoran uang pinjaman nasional dari seluruh bupati-bupati, wedana-wedana dan asisten-asisten wedana sampai berjumlah jutaan rupiah.⁴³ Uang yang terkumpul mencapai jutaan rupiah tersebut, pada 1947 diserahkan kepada gubernur di Palembang dalam membantu pembiayaan pertahanan kemerdekaan karena Palembang kembali diserang oleh Belanda baik dari laut maupun udara.

Kondisi yang tidak aman dari gempuran Belanda karena terjadi agresi yang kedua, maka seluruh institusi pemerintah dilakukan militerasi termasuk Djawatan PTT. Moehammad Yatim diangkat menjadi Kapten Titulair dengan fasilitas atau mendapat jatah pakaian dan makanan. Kemudian pada zaman uang kertas Rp. 100,- RI, peredarannya sangat terbatas dan uang pecahan kecilpun sulit ditemukan. Kondisi ini semakin menyulitkan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, Moehammad Yatim mengusulkan kepada Tuan Residen dalam sidang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

DPR agar pemerintah mengeluarkan kupon-kupon dengan harga Rp.1,-; Rp. 2,50; Rp. 10,- sebagai ganti dari uang dan hal itu menjadi alat tukar (mata uang) yang sah bagi masyarakat. Kupon-kupon tersebut mesti ditandatangani oleh tiga komponen terdiri dari Moehammad Yatim sebagai panitia, Soetan Parandangan sebagai bupati dan dan Roemadi sebagai *opzichter* PU. Sedangkan uang kertas Rp. 100,- RI tersebut dilakber sama-sama dan disimpan oleh DPR.⁴⁴

Dedikasi dan prestasi yang ditunjukkan Moehammad Yatim sebagai pegawai kantor pos dan telegraf pada 27 Desember 1956 diberikan penghargaan oleh pemerintah secara tertulis dengan simbol air perak. Penghargaan tersebut diserahkan kepadanya karena ia telah mendedikasikan hidupnya selama 39 tahun. Satu tahun kemudian tepatnya pada 27 Desember 1957 pemerintah kembali memberikan penghargaan yang sama dengan simbol air mas yang menunjukkan sudah berdinias selama 40 tahun. Tiga tahun setelah penghargaan 40 tahun berdinias, Moehammad Yatim kembali menerima penghargaan dari negara, tepatnya pada 29 September 1960 dengan surat Nomor: 51795/Pog/A², yang menyatakan bahwa sebagai penghargaan tertinggi karena telah menyelamatkan/mengungsikan uang Djawatan dan barang-barang berharga lainnya dalam jumlah yang besar ketika pergolakan di Sumatra Barat sedang memuncak. Ketika pertempuran dan serangan udara, ia mengungsikannya ke Padang Panjang dan Sawhlunto dan menjemputnya kembali saat pertemuan masih berlangsung. Saat itu, tidak ada pegawai lainnya yang berani melaksanakannya.⁴⁵

Selain itu, Moehammad Yatim juga mendapatkan penghargaan karena ketika pergolakan terjadi, kantor Pos Besar dan Telegraf Padang tidak tutup dan tetap buka sebagaimana biasanya. Pada zaman itu, hanya kantor pos yang tidak mengungsikan dan tidak mengalami kerugian keuangan dan pegawai, sehingga pada waktu diperintahkan oleh Panglima bekerja kembali, kantor dapat dibuka dan bekerja lancar. Oleh sebab itu, negara memberikan penghargaan tertulis dalam simbol air perak.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Akhir dari dedikasi dan komitmen kuatnya bekerja di kantor pos dan telegraf, berakhir pada 11 Maret 1961 dengan tibanya masa pensiun melalui surat Nomor: 1930/Pog B1^a. Pada hari perpisahan dan peresmian pensiun Moehammad Yatim menerima lagi surat penghargaan dan uang hadiah dari negara.⁴⁷

Mengendalikan SSPTT dan PPRI

Moehammad Yatim sebagai pegawai pada kantor pos dan telegraf sejak masa usia muda sampai pensiun bekerja sejalan dengan aturan yang ada. Ia telah mengalami masa-masa sulit sejak dari masa penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan sampai pada pergolakan PRRI. Masa-masa itu, memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti dalam hidup dan keluarganya. Dalam hal itu, ia menyadari pentingnya solidaritas terhadap sesama yang ada dilingkungannya baik di tempat kerja maupun di mana tinggal. Rasa senasib dan sepejuangan yang ia tanamkan kepada rekan-rekan dan bawahannya telah membangun rasa simpati terutama di lingkungan pos dan telegraf.

Dalam hal itu, tidak mengherankan ketika berdirinya Organisasi Serikat Sekerdja Pos Telegraf dan Telepon (SSPTT pada 8 Oktober 1958 di Bandung, Moehammad Yatim ditunjuk sebagai ketua Pimpinan Daerah V (Sumatra Barat dan Riau). Organisasi yang bergerak pada profesi yang sama sesungguhnya sudah ada pula berdiri, yaitu SB Postel yang berafiliasi dengan SOBSI (PKI).⁴⁸ Organisasi ini di Sumatra Barat sudah lebih dahulu ada, namun tidak memiliki aktivitas dan bahkan lumpuh, sehingga anggotanya secara berangsur-angsur berpindah kepada SSPTT. SSPTT di bawah pimpinan Moehammad Yatim berkembang dengan baik dan anggotanya semakin hari semakin banyak. Begitu pula pergerakannya semakin dinamis dan anggotanya merasa terayomi.

Satu tahun kemudian setelah berdirinya SSPTT di Sumatra Barat terjadi pemogokan SSPTT di Sumatra Utara untuk menyelesaikan tuntutan pada Djawatan. Oleh sebab itu, SSPTT Sumatra Barat juga mengajak SSPTT yang ada Sumatra Barat, namun Moehammad Yatim

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

sebagai pimpinannya tidak mau diajak dan anggotanya dilarang untuk ikut dalam aksi mogok tersebut mengingat pengorbanan-pengorbanan yang yang diberikan tahun 1945 sampai tahun 1950 cukup besar. Jika hal itu dilakukan kondisinya akan semakin rumit dan tidak kondusif. Selain itu, Moehammad Yatim mengajak SSPTT yang ada di Sumatra Utara untuk membatalkan aksi mogok tersebut. Berbeda dengan SSPTT, SB Postel yang berafiliasi dengan PKI jika memang terjadi aksi mogok SSPTT di Sumatra Utara mereka akan mengirim anggotanya dengan kapal dan pesawat ke Medan dalam rangka membantu Djawatan. Pada 1961 Moehammad Yatim kembali dipilih sebagai ketua Daerah V secara aklamasi, meskipun sudah pensiun. Jabatan ketua periode kedua tersebut hanya diemban sampai 1962⁴⁹ kemudian diserahkan kepada generasi yang lebih muda.

Setelah memasuki usia pensiun pada Kantor Pos dan Telegraf, Moehammad Yatim selain masih aktif di SSPT, juga menginisiasi pembentukan Persatuan Pensiunan Republik Indonesia di Sumatra Barat. Hal itu, dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap para pensiunan yang tidak memiliki wadah perjuangan untuk menyampaikan banyak hal. Tidak hanya berkaitan dengan hak-haknya sebagai orang yang sudah pensiun, tetapi juga memberikan masukan perbaikan kehidupan bangsa dan negara yang sedang menghadapi banyak masalah. Pada mulanya berawal dari pertemuannya dengan Soetardjo Hadikoesoemo sebagai ketua Persatuan Pensiunan Republik Indonesia (PPRI) pada 1 Oktober 1960 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dan kesepakatan untuk membentuk PPRI di Sumatra Barat. Oleh sebab itu, PPRI Pusat memberikan mandat kepada Moehammad Yatim untuk menginisiasi terbentuknya organisasi pensiunan tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh PPRI sendiri.

Setelah kembali dari Jakarta pada bulan Januari 1961, Moehammad Yatim mulai melakukan konsolidasi dan rekrutmen anggota untuk dijadikan sebagai modal terbentuknya organisasi. Rekrutmen dan konsolidasi tersebut dilakukannya melalui iklan harian *Republika* dengan mengajak para pensiunan di seluruh Sumatra Barat untuk bergabung dengan PPRI. Sekretariat awalnya dipusatkan di Jalan

⁴⁹ *Ibid.*

Belakang Benteng No. 7, yang merupakan rumahnya sendiri. Khusus di kota Padang, pengumuman tersebut mendapat respons positif dari para pensiunan sehingga pada bulan Januari itu juga rapat anggota dapat diselenggarakan dengan baik. Rapat yang dimaksud dilaksanakan di Bioskop Capitol (raya). Beberapa putusan strategis pada rapat perdana tersebut, di antaranya; *Pertama*, kesepakatan membentuk PPRI di Padang. *Kedua*, terbentuknya kepengurusan PPRI dengan ketua terpilih Moehammad Yatim sendiri. *Ketiga*, pembentukan koperasi PPRI dengan modal awal Rp. 1000,- masing-masing anggota.

Organisasi yang baru didirikan ini berkembang lebih cepat, di luar dugaan. Banyak pihak yang memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap organisasi yang dipimpin Moehammad Yatim ini. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan yang diberikan oleh Finook berupa pembagian jatah-jatah tekstil, gula, tepung dan lain-lain. Kemudian kepercayaan berikut berasal dari *maatshappy-maatshappy* (toko-toko), bekas perusahaan Belanda. Yang disebutkan terakhir terjalin dengan baik berkat adanya jaringan dan hubungan baik Moehammad Yatim secara pribadi ketika masih kepala Kantor Pos dan Telegraf Besar Padang dengan badan-badan tersebut.⁵⁰ Dengan demikian eksistensi organisasi ini semakin tampak dan dapat memberikan kesejahteraan terutama bagi aggotanya. Oleh sebab itu, keanggotaanya semakin bertambah dan meluas. Apalagi setelah tersiar informasi tentang adanya jatah bagi anggota PPRI.

Dibalik perkembangan PPRI, ternyata sebelumnya sudah ada organisasi yang mengayomi para pensiunan, yaitu PPSI berpusat di Solo. Di Padang sendiri organisasi ini juga sudah terbentuk dengan nama komisaris PPSI. Akan tetapi, tidak bergerak dan tidak memiliki aktivitas yang dapat memperjuangkan hak-hak para anggotanya. Hal itu sebagaimana diungkapkan Moehammad Yatim bahwa "Rupanya waktu itu, di Padang dan di kota-kota lainnya sudah ada organisasi pensiunan yang dinamai PPSI yang berpusat di Solo, yang komisaris daerahnya berkedudukan di Padang juga, yang rupanya kurang berinisiatif."⁵¹

Oleh karena PPSI tidak bergerak, maka para pensiunan yang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pada mulanya terdaftar pada PPSI menyatakan keluar dari organisasi tersebut dan mendaftar menjadi anggota PPRI bahkan secara kelembagaan cabang-cabang PPSI Sumatra Barat secara langsung mendaftarkan anggotanya masuk ke dalam PPRI. Informasi tersebut didapatkan Moehammad Yatim dari banyak pengakuan pengurus PPSI cabang Sumatra Barat sendiri. Sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa “dari pengurus-pengurus cabang-cabang PPSI di Sumatra Barat diterima pernyataan meleburkan diri dari PPSI dan mendaftar sebagai anggota PPRI dengan mengirimkan daftar anggotanya.”⁵² Dalam hal itu, pihak PPRI tidak memberikan persyaratan yang ketat bagi siapapun yang mau masuk ke dalam anggotanya termasuk kepada anggota PPSI yang akan ikut bergabung dengan PPRI. Persyaratan yang dimaksud hanya membayar uang anggota, yang disebut dengan uang pangkal dengan jumlah hanya Rp. 5,- saja dan uang iuran (kontribusi) minimum Rp. 1,- dan maksimum Rp. 3,-.⁵³

PPRI selama kepemimpinan Moehammad Yatim mengalami perkembangan yang dinamis dan cepat. Hal itu, disebabkan PPRI bergerak secara aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan mengupayakan kesejahteraan bagi anggotanya. Oleh karena itu, kedua program ini menjadi skala prioritas. Program ini dimaksudkan untuk meralisasikannya diupayakan dengan melakukan kegiatan pendekatan kepada para pihak yang memiliki otoritas. Misalnya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok anggotanya, PPRI berupaya melakukan pendekatan kepada pemerintah. PPRI meminta harga yang diberikan kepadanya dengan tarif 0 pemerintah. Misalnya, tentang tekstil. Harga tekstil di pasaran pada waktu itu adalah Rp. 25,-. Dengan pendekatan kepada pemerintah pihak PPRI, ia membelinya dengan harga tarif pemerintah, yaitu sebesar Rp. 3,-. Pendekatan yang sama juga dilakukan kepada perusahaan-perusahaan asing yang pernah beroperasi di Sumatra Barat. Dengan jejaring dan hubungan baik Moehammad Yatim selama ini terutama ketika menjadi Kepala Kantor Besar Pos dan Telegraf Padang, perusahaan *maatsehappy-matsehappy* (bekas perusahaan-perusahaan asing) dapat diyakinkan. Pihak PPRI

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

dalam hal ini mendapatkan harga murah dari perusahaan-perusahaan asing seperti Barsumy, Goo Wahry, Karl Schllispen, dan lain-lain. Misalnya, kain sarung cap padi, handuk, sabun cuci cap tangan, sabun mandi bris, luxe, lifebuey, radion, tinta stempel dan banyak lagi barang-barang lainnya.⁵⁴

Pergerakan PPRI semakin nyata dan jelas dalam memperjuangkan hak-hak dan menyejahterakan para anggotanya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika anggotanya semakin banyak yang bertambah. Dalam catatan Moehammad Yatim, pada akhir 1962 anggota PPRI sudah mencapai 60 orang yang tersebar di 16 cabang di seluruh Sumatra Barat.⁵⁵ Hal itu menunjukkan bahwa pergerakan PPRI ini berjalan secara masif. Hanya dalam rentang waktu setahun, PPRI mampu merekrut anggota puluhan ribu dengan berbagai kegiatan yang sangat menyentuh kehidupan anggotanya. Pergerakan yang bersifat dinamis dan cepat ini tidak mengherankan bilamana Moehammad Yatim kembali terpilih dengan suara terbanyak dalam Konferensi PPRI 1962 di Padang. Dalam catatan Moehammad Yatim sendiri dari 16 cabang yang hadir dalam konferensi tersebut para anggota memberikan suara kepada dua calon lainnya tidak lebih dari dua suara pada masing-masingnya, selebihnya diberikan kepada Moehammad Yatim.⁵⁶ Salah satu faktor yang ikut menentukan dukungan kembali kepada Moehammad Yatim adalah sikap dan pendiriannya yang teguh dalam mempertahankan prinsip dan memperjuangkan kemaslahatan orang banyak. Pada masa meletusnya peristiwa “bagolak”, yang dikenal masyarakat Sumatra Barat dengan istilah *peri-peri* (PRRI), Moehammad Yatim dengan berani tidak terpengaruh dengan situasi waktu itu dengan tetap membuka kantor pos dan telegraf sebagaimana hari-hari biasanya terutama pada Mei-Desember 1958. Sedangkan kantor pos dan kantor pembantu lain yang terdapat di Sumatra Barat, termasuk di Payakumbuh dan Bukittinggi semua ditutup selama peristiwa pergolakan tersebut. Akibatnya, para pensiun banyak pensiunannya yang terputus karena dianggap terlibat dalam PRRI. Di Padang sendiri menurut Moehammad Yatim

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

para pensiun yang ikut mengungsi pensiunannya tidak dibayarkan dan dikembalikan kepada negara dengan keterangan yang bersangkutan mengungsi atau berangkat ke tempat yang lain. Akibatnya, bulan ketiga berikutnya pensiunannya tidak dibayarkan lagi sama sekali karena dianggap terlibat dalam PRRI.⁵⁷

Menanamkan Urat Tunggang

Sebelum meletusnya konflik politik antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Sumatra Barat terutama yang tergabung dalam pergolakan PRRI, Moehammad Yatim di Muhammadiyah Sumatra Barat belum begitu tampak memainkan peran penting. Ia lebih populer sebagai pejabat penting pada Kantor Besar Pos dan Telegraf di Padang. Pada era sebelum Moehammad Yatim memimpin Muhammadiyah, Muhammadiyah Sumatra Barat umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki akar ulama dan tokoh pergerakan. Misalnya, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto (1926-1930), AR. Sutan Mansoer (1930-1942), Buya Hamka (1946-1949) dan Malik Ahmad (1956-1958).⁵⁸ Begitu pula kepemimpinan sesudahnya, Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh ulama dan tokoh pergerakan seperti Buya Haroen el-Ma'any (1962-1964), Jamaan Saleh (1964-1966), Dt. Gunung Hijau (1966-1972), Buya ZAS (1972-1983), Hasan Ahmad (1983-1984), M. Idris Manaf (1984-1986), Amir Ali (1986-1991),⁵⁹ dan seterusnya. Sementara itu, kemunculan Moehammad Yatim tidak berasal dari latar belakang ulama dan tokoh pergerakan. Ia lebih dikenal sebagai pegawai sebuah badan usaha milik negara, yang sekarang disebut sebagai tenaga profesional. Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas muncul dari proses kepemimpinan sebelumnya, yang disebut kader berlapis. Artinya, kehadiran tokoh-tokoh tersebut di puncak kepemimpinan Muhammadiyah Sumatra Barat melalui proses yang cukup panjang dan berlapis. Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan Buya AR. Sutan Mansoer, misalnya, lahir dari pembinaan intensif Abdul Karim Amrullah. Begitu pula Buya Hamka dan Malik Ahmad lahir dari perkaderan yang dilakukan oleh Buya

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ RB. Khatib Pahlawan Kayo dkk, *op. cit.*, hlm. 91-101.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.106-125.

AR. Sutan Mansoer dan seterusnya. Sehingga hampir setiap periode kepemimpinan Wilayah Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang muncul di puncak kepemimpinan selalu ada dan tampil mendampingi pimpinan sebelumnya.

Berbeda dengan tokoh-tokoh tersebut, Moehammad Yatim dalam sejarah Muhammadiyah Minangkabau nyaris tidak muncul dalam kepemimpinan sebelumnya baik kepemimpinan Buya Malik Ahmad, Buya Hamka dan seterusnya. Meskipun demikian, Moehammad Yatim bukan berarti adalah orang baru dalam aktivitas Muhammadiyah. Ia adalah salah seorang tokoh Muhammadiyah yang tidak pernah berhenti memikirkan dan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan Muhammadiyah tidak hanya di Sumatra Barat melainkan di mana saja ia bertugas. Sebagai seorang pegawai badan usaha milik negara, dalam sejarahnya di mana saja ia bertugas bersama istrinya, Mahdaniar di situ ia mengambil peran memelopori, menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah dan 'Aisiyah. Sebut misalnya, ketika ia bertugas di Sigli, Aceh. Moehammad Yatim menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah Sigli, Aceh periode 1934-1936.⁶⁰ Pada periode ini ia mampu meyakinkan banyak orang terhadap kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mengadvokasi masyarakat dari ketertindasan dan keterbelakangan terutama pegawai kantor pos dan telegraf di tempat ia bekerja. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah ketika itu juga sangat kompleks. Selain berhadapan dengan tradisi masyarakat yang masih terikat dengan kultur yang bercampur aduk antara ajaran Islam dengan tradisi lokal, Muhammadiyah juga menghadapi situasi berhadapan dengan penjajahan Belanda. Dalam situasi demikian, Moehammad Yatim dengan keuletannya mampu menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah di daerah Sigli ini. Tentunya, keberhasilan tersebut bukanlah kerja kerasnya sendiri, melainkan juga kerja keras tokoh-tokoh lainnya, terutama tokoh lokal. Satu sama lain bekerja sama dalam membumikan Muhammadiyah di Sigli.

Kemudian ketika ditugasi Kantor Pos dan Telegraf di Sumatra Utara pada 1937, Moehammad Yatim memelopori pendirian dan

⁶⁰ Moehammad Yatim, *op. cit.*

pembentukan ranting Muhammadiyah di Binjai. Oleh karena di daerah ini, Moehammad Yatim menjadi perintis pembentukan ranting dan orang yang diajak bergabung dalam Muhammadiyah belum banyak yang mengetahui dan memahami hakikat perjuangan dan organisasi Muhammadiyah. Lalu, atas saran dan permintaan orang yang diajak ia diminta langsung memimpin ranting. Di ranting ini Moehammad Yatim memimpin Muhammadiyah pada periode 1937-1938.⁶¹ Dalam rentang satu tahun tersebut, ia dengan dibantu oleh tokoh-tokoh setempat mampu menggerakkan Muhammadiyah meskipun menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Persoalan yang dihadapi ranting Muhammadiyah Binjai di bawah kepemimpinan Moehammad Yatim, bukan hanya berasal dari masyarakat yang masih terjebak dalam pencampuran ajaran Islam dengan kultur lokal, ia juga menghadapi tantangan dari petugas keagamaan kerajaan Langkat. Dalam pergerakan menumbuhkan Muhammadiyah di daerah tersebut tidak jarang ranting Muhammadiyah ini dihalang-halangi dengan berbagai cara oleh petugas keagamaan yang dibentuk oleh kerajaan Langkat. Selain menghadapi situasi demikian, Moehammad Yatim sebagai pimpinan ranting juga menghadapi tekanan dari pihak Belanda. Tantangan yang terakhir ini oleh Moehammad Yatim dapat di atasinya dengan melakukan pendekatan sejalan dengan posisinya sebagai pegawai kantor pos dan telegraf. Dengan kata lain, jabatan yang diemban oleh Moehammad Yatim di kantor tempat ia bekerja dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan Muhammadiyah. Apalagi ketika itu, pegawai Pos dan Telegraf dipandang orang yang tidak memiliki hubungan dengan perlawanan kepada pemerintah Belanda, sehingga hal itu dapat memudahkannya dalam menggerakkan Ranting Muhammadiyah meskipun tidak menampik adanya kecurigaan-kecurigaan pihak pemerintah kepadanya. Akan tetapi, semuanya itu dapat diatasi dengan tidak merugikan pribadi, institusi tempat ia bekerja dan Muhammadiyah sendiri. Begitu pula tantangan dari pihak otoritas keagamaan Langkat dapat disiasatnya meskipun tekanan demi tekanan terus datang tanpa henti. Hal itu, kadang menyulitkan ranting yang didirikannya untuk bergerak lebih

⁶¹ *Ibid.*

leluasa. Akan tetapi, gerakan menghalangi tersebut secara perlahan dan pasti dapat diatasinya, sehingga ranting Muhammadiyah ini dapat melakukan berbagai macam aktivitas, seperti layanan sosial dan keagamaan.

Pada 1938 ia dipindahtugaskan oleh pimpinan kantor pos dan telegraf ke Medan. Di Medan, Moehammad Yatim ternyata tidak hanyut dengan kesibukannya di tempat kerja yang baru melainkan semangat kemuhammadiyahannya terus membara. Dalam hal itu, ia mencari informasi di mana pusat aktivitas gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya Moehammad Yatim bergabung dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan, sehingga ia termasuk menjadi anggota pimpinan. Sama halnya dengan tokoh-tokoh Minang lainnya sifat egaliterannya menjadi magnet bagi pihak lain. Ia dengan mudah dapat menyesuaikan diri dan bergaul dan bahkan menjadi tokoh yang memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Begitu pula dalam persyarikatan Muhammadiyah, di Medan ia menjadi salah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah. Meskipun ia hanya bergabung selama satu tahun dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan karena kembali dipindahtugaskan, perhatian dan perjuangannya dalam mengemban amanah umat sangat jelas dan terbukti. Masa kepemimpinannya di pimpinan cabang berlangsung dalam rentang waktu 1938-1939. Pada masa yang amat singkat ini Moehammad Yatim telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan Muhammadiyah di Kecamatan Medan.

Pada 1939 Moehammad Yatim dipindahtugaskan kembali dari Medan kekampung halamannya, Payakumbuh. Di Payakumbuh, Muhammadiyah sudah tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tantangan yang dihadapinya juga tidak ringan. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Muhammadiyah baik kepada pimpinannya secara pribadi maupun secara kelembagaan. Misalnya, kasus larangan pengajian dan penutupan panti asuhan yang dilakukan oleh kepala nagari pada 16 April 1930. Larangan dan penutupan ini bukan hanya dilakukan oleh kepala nagari, melainkan juga didukung oleh lembaga nagari. Dengan alasan belum ada kesepakatan di kerapatan nagari, lagi

pula kepala nagari bersikukuh dengan keinginannya untuk melarang dan menutup kegiatan Muhammadiyah. Aqib Suminto dalam hal ini menggambarkan situasi yang terjadi ketika itu.

Diberitahukan kepada pengurus sekolah anak yatim Kubang, bahwa sekolah malam bagi laki-laki dan sekolah siang bagi perempuan yang besar-besar, disebabkan pengurus itu masuk Partij Muhammadiyah tidak boleh diteruskan karena belum semufakat dengan datuk-datuk negeri kubang. Yang mana akan memasuki partij itu sekali-kali belum dimufakati dengan datuk-datuk atau anggota kerapatan nagari Kubang seperti yang dimaksud kebetulan kerapatan negeri Kubang yang tertulis pada tanggal 9 Januari 1929 No. 2 dan yang tertulis 10 April 1930 No. 19.⁶²

Pelarangan di atas, berawal dari meningkatnya aktivitas Muhammadiyah terutama di Kubang sesudah berhasilnya masyarakat Minangkabau melakukan rapat akbar dalam rangka penolakan terhadap Ordonansi Guru pada akhir 1928 yang dilaksanakan di Surau Jamil Jambek, Bukittinggi. Dalam pada itu, sebagian tokoh masyarakat Kubang mendorong berdirinya cabang Muhammadiyah di Payakumbuh dengan pertimbangan kekhawatiran terhadap pengaruh Muhammadiyah di Kubang semakin menguat. Dengan pertimbangan itu pula, maka pada 9 Januari 1929 lembaga nagari mengeluarkan resolusi yang melarang masyarakat untuk menyelenggarakan rapat agama dengan pembicara dari luar daerah. Begitu pula larangan tersebut dimaksudkan bagi rapat-rapat yang dilaksanakan atas dukungan organisasi luar tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kekuasaan nagari.⁶³

Bagi pimpinan Muhammadiyah kasus pelarangan dan penutupan kegiatan tersebut bukan hanya sebatas kepentingan masyarakat Kubang dan sekitarnya, melainkan menyangkut kepentingan organisasi yang lebih luas. Dalam hal itu, pimpinan Muhammadiyah melaporkannya kepada Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Selain itu, tindakan kepala nagari tersebut pada 18 April 1930 juga dilaporkan kepada Asisten Wedono. Bagi pegawai pemerintah sesungguhnya kasus ini dipandang dilematis. Di satu pihak dewan nagari yang

⁶² Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm. 195.

⁶³ *Ibid.*

tidak dihubungi oleh pimpinan Muhammadiyah adalah benar, sementara di pihak lain pemindahan sekolah yatim piatu kepada Muhammadiyah adalah sangat masuk akal. Hampir semua sponsornya merupakan anggota organisasi ini di Payakumbuh. Tambahan pula Muhammadiyah merupakan organisasi legal dan diakui, yang berdasarkan undang-undang dan tidak melakukan suatu pelanggaran apapun.⁶⁴

Kunjungan pimpinan Muhammadiyah ke pejabat pemerintah membuahkan hasil dengan adanya perintah dari Pemerintah Daerah Suliki untuk kembali mencabut pelarangan dan penutupan aktivitas Muhammadiyah tersebut. Pencabutan itu dilakukan kepala nagari pada 23 April 1930. Dengan adanya pencabutan itu, berarti Muhammadiyah dapat kembali melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Akan tetapi pimpinan Muhammadiyah memandang bahwa pencabutan itu tidak menyelesaikan masalah karena tindakan kepala nagari itu bukan lagi persoalan masyarakat Kubang, melainkan masalah Muhammadiyah secara nasional. Oleh karena itu, pimpinan Muhammadiyah Kubang pada 27 April 1930 menutup sendiri aktivitas tersebut dan melaporkannya kepada Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta.⁶⁵

Dalam laporannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta tertanggal 24 April 1930, sebagaimana dikemukakan Aqib Suminto

Pengurus Muhammadiyah Payakumbuh menyatakan bahwa sebab terjadinya larangan adalah semata-mata karena Muhammadiyah. Berdasarkan laporan kontrolir Suliki, rapat Muhammadiyah di Payakumbuh memutuskan akan mengirimkan kawat ke Pimpinan Pusat Yogya untuk mengusahakan perlindungan pemerintah, dan untuk sementara sekolah ditutup kembali sambil menunggu keputusan dari pimpinan pusat. Baru pada 8 Mei 1930 Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan jawaban supaya sabar, sementara pemerintah Batavia yang dihubunginya menyatakan bahwa tidak selayaknya sekolah tersebut ditutup, dan segera akan disuruh membukanya kembali.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 196.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 195.

⁶⁶ *Ibid*.

Peristiwa pelarangan dan penutupan kegiatan Muhammadiyah di atas oleh Pengurus Besar Muhammadiyah ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke Kantoor Voor Inlandsche Zaken. Goobe, sebagai pimpinannya sebagaimana Van der Plas, sangat mengkritik cara pemerintah setempat menangani masalah Muhammadiyah, dan dia membawa masalah itu langsung ke Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Setelah melalui perdebatan di kalangan pegawai tinggi, akhirnya pada Desember Gubernur Jenderal mengintruksuksikan Gonggrijp untuk mengubah kebijaksanaannya, dan memerintahkannya agar menyelesaikan peristiwa Kubang dengan memuaskan.⁶⁷ Dengan demikian, pelarangan tersebut sudah menjadi konsumsi pemerintah dan tokoh di tingkat atas. Hal ini pulalah yang mengakibatkan pemerintah melaporkannya ke Volksraad meskipun semula peristiwa ini dalam istilah seorang kontrolir hanya merupakan “topan dalam gelas”. Pada konteks ini Teuku Nya’ Arif sebagaimana dijelaskan Aqib Suminto dalam salah satu sidang melancarkan tuduhan terhadap penguasa Minangkabau. Dikatakan bahwa pemerintah setempat merupakan pangkal sebab terjadinya kesulitan bagi Muhammadiyah di sana. Tuduhan ini terpaksa menyibukan Gubernur Sumatra Barat Gonggrijp, sehingga peristiwa ini kemudian diketahui umum.⁶⁸

Bukan hanya itu, gubernur diperintahkan untuk meningkatkan hubungan dengan Muhammadiyah dan penguasa setempat. Di sisi lain, Adviseur Voor Inlandsche Zaken diperintahkan menghubungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar membuka konsulnya di Sumatra Barat. Dengan demikian bisa diharapkan bahwa watak radikal Muhammadiyah setempat menjadi loyal semacam pimpinan pusatnya di Jawa.⁶⁹ Pertimbangan yang menjadi landasan instruksi gubernur jenderal tersebut disampaikan Goobe, bahwa kalau pemerintah terlalu mempersulit aksi dan terlalu merintangangi tabligh Muhammadiyah, pastilah para pemimpin Muhammadiyah akan pindah ke Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Kalau ini terjadi, maka fungsi

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 196.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 196-197.

Muhammadiyah sebagai kekuatan yang mengimbangi Permi, akan hilang.⁷⁰ Oleh karena Belanda memandang bahwa Muhammadiyah memandang jauh lebih lunak dari pada Permi, karena itu diharapkan mengimbangi organisasi Permi ini.

Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal, Goobe meyakini bahwa Gubernur Sumatra Barat harus meralat ucapannya yang bernada merendahkan golongan reformasi. Di mana *Gonggrijp* menuduh golongan reformasi sebagai minoritas revolusioner sangat kecil, yang hendak memaksakan pendapatnya ke mayoritas seribu kali lebih besar dengan cara brutal dan tanpa taktik.⁷¹ Di sini tampak bahwa masalah stabilitas sosial politik merupakan tekanan utama, dan bukan masalah membela Muhammadiyah itu sendiri. Peranan *Kantoor Voor Inlandsche zaken* dalam hal ini tepat dikatakan sebagai *middleman* (perantara) daripada sebagai pembela Muhammadiyah.⁷² Dalam penanganan masalah peristiwa Kubang betapapun tampak bahwa Goobe tampil sebagai pembela Muhammadiyah.

Periode Muhammadiyah di Sumatra Barat pada 1930 ini menunjukkan suatu peranan penting terakhir bagi *Kantoor Voor Inlandsche Zaken* dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan sehubungan dengan gerakan politik dua tahun terakhir, meskipun kewenangannya dalam mengawasi gerakan politik lebih dipertegas sejak 1931. Hal ini bisa dimaklumi karena situasi medan yang dihadapi menjadi demikian berubah, berbeda dengan tahun-tahun awal berdirinya. Situasi dan kondisi yang menjadi semakin keras tidak menguntungkan bagi kantor yang menginginkan garis lunak ini.⁷³

Dengan sudah berkembangnya Muhammadiyah di Payakumbuh ini, tentunya Moehammad Yatim tidak begitu sulit menggabungkan diri dalam persyarikatan ini. Namun demikian, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Pimpinan Muhammadiyah dan aktivisnya sangat berat. Selain masih berhadapan dengan tradisi lokal yang mencampurkan ajaran agama dengan kebiasaan,

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 197.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*.

⁷³ *Ibid*, hlm. 198.

Muhammadiyah secara politik juga mengalami tantangan yang tidak ringan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pada masa ia pindah ke Payakumbuh, kebanyakan dari pimpinan Muhammadiyah berasal dari alumni Sumatra Thawalib Padang Panjang. Para alumninya sering dapat tekanan politik dari pemerintah karena dicurigai aktivis Permi.⁷⁴ Tekanan yang sama juga diperlakukan kepada Muhammadiyah. Para pimpinan Muhammadiyah sering dipanggil, dinasihati dan bahkan ancaman dari tuan Asistent Schumacher, Hoofd Van Plaatsaly Bestuur J do Graaf, Demang Thaib, Asistent Demang Zakir dan Inyik Dagang Datuk Tuah.⁷⁵ Jauh dari itu, para penggiat dan Pimpinan Muhammadiyah diancam supaya meninggalkan dan tidak mengembangkan Muhammadiyah. Meskipun tekanan terus terjadi, para pimpinan Muhammadiyah tidak pernah surut dalam menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah dengan semangat dakwah. Akibatnya, para aktivis dan pimpinan termasuk ke dalam daftar lis merah untuk dihilangkan. Oleh karena tekanan itu terus terjadi dari berbagai pihak baik dari masyarakat yang masih mempertahankan “tradisi lokal” (pencampuran ajaran agama dengan kebiasaan) maupun dari penguasa, lama kelamaan gerakan Muhammadiyah menyurut.

Dalam situasi yang demikian, Moehammad Yatim hadir kembali menghidupkan Muhammadiyah tanpa ada tekanan yang sangat berarti. Hal itu, disebabkan oleh dua hal, yaitu; *Pertama*, Moehammad Yatim secara personal tidak terlibat di dalam partai Permi yang dipersepsikan berbeda haluan dengan pihak yang sedang berkuasa ketika itu. Ia adalah pegawai kantor pos dan telegraf yang jauh dari pro kontra. Jadi, ia tidak memiliki resistensi politik sehingga gerakan yang dibangunnya tidak begitu kontra-produktif dengan penguasa. Ia lebih banyak menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah dalam konteks kultural dan tidak lewat jalur politik. *Kedua*, Moehammad Yatim memiliki strategi yang berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Kalau pimpinan sebelumnya, tidak jarang melakukan kritik tajam secara terbuka terhadap kebijakan dan perilaku pihak yang berkuasa,

⁷⁴ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 60.

⁷⁵ Moehammad Yatim, *op. cit.*

terlebih jika dinilai menyimpang dari ajaran agama. Cara demikian, tidak dilakukan oleh Moehammad Yatim. Ia melakukannya dengan pendekatan yang lebih persuasif, santun, halus dan tidak reaktif, sehingga pihak yang berbeda dengan Muhammadiyah tidak mudah tersinggung dan tidak menganggap lawan. Hal itu, bukan berarti Moehammad Yatim tidak memiliki sikap tegas dan konsisten terhadap perjuangan yang digariskan Muhammadiyah. Akan tetapi, cara itu dilakukannya dalam rangka untuk strategi agar Muhammadiyah dapat diterima oleh semua pihak. Para pihak yang selama ini antipati terhadap Muhammadiyah secara berangsur-angsur dapat menerima termasuk pihak yang sedang berkuasa. Pendekatan ini agaknya berhasil membawa Muhammadiyah masuk ke dalam jantung masyarakat luas di Payakumbuh, sehingga Muhammadiyah dapat lebih berkembang dan leluasa dalam menggerakkan dakwahnya. Moehammad Yatim dalam hal ini, selain bekerja aktif sebagai pegawai Kantor Pos dan Telegraf Payakumbuh, memimpin Muhammadiyah Payakumbuh selama dua tahun, tepatnya periode 1939-1941.⁷⁶

Pada 1946, Moehammad Yatim kembali dipindahtugaskan ke Jambi. Dalam situasi yang amat terbatas dan kondisi kantor pos dan telegraf yang tidak terurus. Tambah lagi pegawainya yang tidak lagi bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Semua hal itu, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap kantor pos dan telegraf tidak ada lagi. Keadaan ini dipulihkan oleh Moehammad Yatim dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kepercayaan masyarakat dapat kembali dipulihkan. Begitu pula halnya dengan Cabang Muhammadiyah Jambi. Kondisinya juga dalam keadaan sulit dan dilema. Sama dengan di tempat yang lain, Moehammad Yatim ketika ditugaskan oleh kantor pos dan telegraf sebagai kerja pokoknya, ia selalu melihat secara dekat bagaimana keadaan Muhammadiyah di sekitar ia bekerja. Jika Muhammadiyah belum ada, ia yang membentuk dan mengenalkannya kepada masyarakat sekitar dengan merangkul dan mengajak orang-orang yang telah baik menerima gagasannya. Meskipun masyarakat tersebut belum secara utuh memahami Muhammadiyah. Akan tetapi,

⁷⁶ *Ibid.*



Muhammad Yatim, Mahdaniar (istri) dan Anggota 'Aisyiyah selesai rapat pembentukan ranting 'Aisyiyah di Kisaran, Sumatra Utara
Sumber: koleksi pribadi penulis

ia berkeyakinan bahwa pada suatu saat orang yang diajak tersebut akan bisa meneruskannya. Dalam hal itu, Moehammad Yatim kadang harus memimpin sendiri Muhammadiyah yang ia dirikannya itu.

Di Jambi, Muhammadiyah ia perhatikan sudah tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, secara internal mengalami berbagai masalah, terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagian besar personalia Pimpinan Cabang Muhammadiyah secara ideologi tidak sejalan dengan Muhammadiyah itu sendiri. Anggotanya lebih banyak berasal dari anggota komunis. Akibatnya, terjadi polemik di kalangan warga persyarikatan antara yang pro dan kontra. Dalam keadaan demikian, Muhammadiyah mengalami kemandekan, mati suri dan tidak bergerak. Ia selain membenahi dan memulihkan keadaan kantor pos dan telegraf, juga membangun kembali Cabang Muhammadiyah yang dalam keadaan lumpuh tersebut. Ia merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah aktif di Muhammadiyah termasuk yang pernah aktif di komunis. Keaktifan yang terakhir dalam pandangannya bukan karena faktor ideologis melainkan disebabkan persoalan ekonomi yang teramat sulit. Formasi di pimpinan cabang ternyata memang hampir sama dengan yang sebelumnya kebanyakan berasal dari anggota komunis.

Akan tetapi, ia berkeyakinan mereka akan dapat kembali kejalan yang benar bersama-sama membesarkan Muhammadiyah. Apa yang diyakininya ternyata memang benar, bahwa anggota komunis yang bergabung di Muhammadiyah bukan didorong oleh ideologis, tetapi dominan faktor ekonomi. Al-hasil, Muhammadiyah dapat kembali dibangun, konsolidasi organisasi dapat dilakukan secara utuh dan anggota yang cabang Muhammadiyah yang pernah aktif di komunis menyatakan keluar dari keanggotaannya, meskipun Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang dipimpinya pernah pula dapat teguran dari Buya AR. Sutan Mansur sebagai Konsul Muhammadiyah Sumatra Tengah. Pada konteks ini, Moehammad Yatim berhasil meyakinkan Buya AR. Sutan Mansur, sehingga Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambi dapat digerakan dan dipulihkan kembali.⁷⁷

Dalam hal itu, Moehammad Yatim mengungkapkan bahwa

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambi yang kami pimpin menerima teguran dari Pimpinan Sumatra Tengah Buya AR. Sutan Mansoer dan setelah dijalankan bahwa anggota-anggota yang 80% jadi PKI itu, bukan berideologi PKI melainkan karena perut, Buya AR. Sutan Mansoer memakluminya dan menyetujui tindakan kami.⁷⁸

Kutipan pernyataan Moehammad Yatim di atas menunjukkan bahwa gerakan Muhammadiyah yang dibangun sejak masa lalu bersifat merangkul dan membina, bukan menghakimi. Kondisi dan situasi yang menyulitkan itu kadang membuat umat terjebak kepada sikap yang pragmatis sehingga merugikan perjuangan dakwah itu sendiri. Oleh sebab itu, gerakan dakwah mestinya juga memperhatikan denyut kehidupan masyarakat, dan tidak serta merta melihatnya secara komprehensif. Hal itulah yang dilakukannya ketika membangun kembali Muhammadiyah di berbagai tempat. Dalam hal itu, Moehammad Yatim memimpin Cabang Muhammadiyah Jambi hanya selama dua tahun, tepatnya periode 1946-1948,⁷⁹ disebabkan pindah tugas ke Medan.

Pada 1949, Moehammad Yatim oleh pimpinan kantor pos dan telegraf dipindahtugaskan ke Medan. Sejalan dengan kepindahannya

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

ke Medan selain bekerja, ia juga mencari informasi di mana pimpinan Muhammadiyah. Ketika itu, di Kisaran ia dapati organisasi Muhammadiyah belum hidup, tetapi orang-perorangan sudah banyak yang memiliki pemikiran yang sama dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, ia berinisiatif untuk mendirikan ranting dengan mengajak tokoh-tokoh lain terutama masyarakat setempat. Denyut pergerakan yang ia inisiasi tersebut ternyata mendapat respons positif dari masyarakat. Apalagi Cabang Muhammadiyah Kisaran yang memang sudah ada pada saat itu. Oleh karena di ranting tersebut sudah ada beberapa tokoh yang sangat memungkinkan untuk memimpin ranting tersebut, Moehammad Yatim menyerahkan pucuk pimpinannya kepada yang lain. Ia hanya memosisikan diri sebagai wakil ketua. Ranting ini bergerak lebih dinamis dan perkembangannya sangat menggembirakan. Apresiasi dari apa yang dilakukannya bersama tokoh lainnya yang tergabung dalam Ranting Muhammadiyah Kisaran datang dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kisaran dengan mempercayakan sebagai tuan rumah konferensi daerah sebanyak dua kali pelaksanaan. Pada saat dilangsungkannya konferensi daerah yang kedua, pada 1952, ada kegiatan yang fundamental di saat itu, yaitu hadirnya para pembesar Belanda, Inggris dan Amerika serta tuan-tuan kebun dalam resepsi jamuan malam. Kegiatan-kegiatan semacam ini sangat langka dilakukan baik oleh Muhammadiyah sendiri maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Pada malam resepsi konferensi, dihadapan para pembesar asing tersebut Buya H. Boestami Ibrahim yang didaulat memberikan penjelasan tentang gerakan Muhammadiyah sangat berkesan dan menarik. Sebagai tindaklanjut dari kesan dan ketertarikan penjelasan itu, para tuan-tuan kebun memberikan ruang yang lebih leluasa kepada Muhammadiyah untuk mengembangkan dakwahnya. Secara khusus, Muhammadiyah diundang pada setiap hari Sabtu untuk melakukan tabligh dan memberikan penjelasan tentang keislaman.⁸⁰ Di Kisaran ini, Moehammad Yatim tinggal agak lama dibandingkan di tempat lain sehingga memiliki waktu yang cukup lama pula dalam menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah. Ia tinggal di daerah ini selama

⁸⁰ *Ibid.*

tiga tahun, dan ikut memimpin ranting Muhammadiyah sebagai wakil ketua pada periode 1949-1953.⁸¹

Pada 1953, Moehammad Yatim dipindahtugaskan oleh Pimpinan kantor pos dan telegraf ke Padang. Di Padang ia menggabungkan diri dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampung Jawa. Pada saat itu, ia diberikan kepercayaan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Kampung Jawa sebagai salah seorang wakil ketua. Pada periode ini, berbagai kegiatan Muhammadiyah dapat dilaksanakan baik dalam bentuk mendirikan sekolah maupun wirid dan pengajian. Sama halnya dengan di tempat-tempat yang lain, yang dialaminya bahwa pergerakan Muhammadiyah tidak selalu mulus, tetapi menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan dimaksud bukan hanya datang dari masyarakat yang tetap bersikukuh dengan “tradisi lokal” berupa pencampuran antara ajaran agama dengan kebiasaan, tetapi juga muncul dari pihak penguasa lokal. Tekanan-tekanan dari berbagai pihak ini biasanya dihadapi oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah dengan sabar dan arif, yang akhirnya berdampak kepada perkembangan Muhammadiyah. Pada ranting ini, Muhammadiyah menghadapi hal yang sama. Pendirian sekolah dan pengajian sering menghadapi ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak dengan berbagai tuduhan. Untungnya, Moehammad Yatim tidak berlatarbelakang tokoh yang pernah aktif di partai politik maupun perguruan yang memiliki hubungan dengan pergerakan tertentu sehingga ia memiliki hubungan baik dengan semua komponen masyarakat. Tentunya, berbeda dengan tokoh Muhammadiyah lainnya, sebagian besar memiliki akar dan berhubungan baik secara langsung maupun tidak dengan pergerakan politik tertentu. Hal itu, kadang menyulitkan gerak Muhammadiyah karena sudah dipersepsikan dengan kelompok partai tertentu. Apalagi oleh pihak sedang berkuasa, yang memang berbeda kepentingan dengan partai tokoh tersebut. Bahkan sampai pada situasi yang mengancam eksistensi Muhammadiyah itu sendiri.

Moehammad Yatim selain bekerja penuh di kantor pos dan telegraf, aktif di Ranting Muhammadiyah Kampung Jawa, dalam

⁸¹ *Ibid.*

perkembangannya termasuk tokoh kunci yang ikut berperan di dalam pembentukan Cabang Muhammadiyah Kota Besar Padang dengan memisahkan dari luar kota. Pada saat itulah ia dipercaya memimpin Muhammadiyah pada tingkat yang lebih luas, tepatnya pada periode 1955-1958.⁸²

Pertahanan di tengah Pergolakan

Sejalan dengan meletusnya perang bersenjata antara pemerintah pusat dengan Dewan Banteng, Muhammadiyah termasuk salah satu yang yang menjadi korbannya secara langsung. Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang dipandang sebagai pengkhianat dan pimpinannya selali diintimidasi. Hal itu, tentunya efek dari beberapa waktu lalu yang memang pernah menjadi anggota istimewa partai Masyumi. Partai ini oleh pemerintah pusat dipandang sebagai biang terjadinya beberapa pemberontakan di beberapa daerah. Apalagi sebagian besar pimpinan Masyumi di tingkat pusat basisnya ada di Sumatra Barat. Begitu pula pimpinan di tingkat daerah kebanyakan terdiri dari tokoh Muhammadiyah.

Pemberontakan yang pada mulanya diawali dengan perpecahan di kalangan militer yang tidak bisa terselesaikan oleh pemerintah pusat, berakhir dengan perang senjata. Akan tetapi, perang senjata itupun tidak berimbang antara pasukan pusat dengan PRRI. Perpecahan di kalangan militer yang diawali dari ultimatum Dewan Banteng kepada pemerintah pusat pada awal 1958 agar pemerintah pusat dalam masa 5 x 24 jam membubarkan kabinet Djuanda dan diganti dengan penunjukan Bung Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai formatur Zaken Kabinet.⁸³ Bersamaan dengan perpecahan di kalangan militer, perpecahan yang sama juga memunculkan kemelut politik antara Hatta dan Soekarno yang semakin meruncing. Di antara penyebabnya adalah kepemimpinan Soekarno sudah kental dipengaruhi oleh orang-orang komunis.⁸⁴ Berhentinya Hatta sebagai

⁸² *Ibid.*

⁸³ Sayuti Dt. Rajo Penghulu, *Bung Hatta Suri Tauladan Kita; Cara Baik Bung Hatta* (Padang: Mega Sari, 2003), hlm. 56.

⁸⁴ Anwar Abbas, *op. cit.*, hlm. 127.

wakil presiden membawa pengaruh yang tak terduga sebelumnya. Daerah-daerah terutama di Sumatra dan di Sulawesi, meningkatkan tuntutan, bahkan ada yang mulai memisahkan diri dari pusat seperti Sumatra Utara, dibawah pimpinan Panglima Militer Kolonel M. Simbolon, Sumatra Tengah di bawah Letnan Kolonel A. Hussein dan Sulawesi di bawah Letnan Kolonel V Samuel.⁸⁵

Peristiwa ini membawa pada posisi Masyumi terancam dan dikucilkan dari DPRGR bersama dengan PSI. Kemudian empat bulan setelah itu diperintahkan bubar dengan alasan keterlibatan para pemimpinnya dalam pemberontakan daerah PRRI/Permesta. Hal ini membawa malapetaka bagi Masyumi. Muhammadiyah juga memperoleh bahaya yang sama dengan Masyumi. Pihak-pihak anti Islam mendesak agar Muhammadiyah juga dibubarkan karena pendukung utama Masyumi.⁸⁶ Para pimpinan Muhammadiyah terutama yang berasal dari Sumatra Barat termasuk yang diincar sehingga sebagian besarnya ikut keluar kota.⁸⁷

Untungnya, Moehammad Yatim tidak termasuk ke dalam pusaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sebelumnya dan juga tidak terlibat dalam aktivitas politik selama ini. Ia lebih banyak berhubungan langsung dengan pengalaman mengurus urat tunggang Muhammadiyah, yaitu ranting dan cabang. Pengalaman membentuk, menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah di berbagai tempat membawa ia tidak canggung berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Ia dapat memposisikan diri dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam posisi-posisi tersebut dan bahkan dalam suasana yang mencekam sekalipun. Pada beberapa ranting dan cabang yang ia bentuk dan hidupkan nyaris tidak mulus, tetapi selalu menghadapi tantangan

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 129.

⁸⁶ Syarifuddin Jurdi, *op. cit.*, hlm. 150.

⁸⁷ Sumatra Barat bersama dengan daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan dan beberapa daerah lainnya merupakan basis Masyumi karena pada daerah tersebut Muhammadiyah kuat, mempunyai pengaruh dan pengikut. Sebagai anggota istimewa sebelum kembali menarik diri dari keanggotaan tersebut, Muhammadiyah sebagaimana istilah Hamka telah bekerja keras membanting tulang, agar jangan kalah. Hamka, *Muhammadiyah-Masjumi, op. cit.*, hlm. 3.

dan rintangan yang tidak ringan. Kadangkala ia harus berhadapan dengan situasi yang sulit karena berhadapan tidak hanya dengan masyarakat yang tidak senang dengan gerakan yang dibangunnya melalui Muhammadiyah. Akan tetapi, juga berhadapan dengan kekuasaan, yang secara politik tentunya memiliki kekuatan yang kuat dan menentukan. Di beberapa daerah yang kulturnya berbeda dengan basis keluarganya jelas sangat menentukan kepiawaiannya dalam menghadapi situasi-situasi yang amat sulit tersebut. Sebagaimana yang ia hadapi di Payakumbuh, kampungnya sendiri. Selain berhadapan dengan kekuasaan, juga dengan tokoh-tokoh adat yang antipati terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah pada saat itu dalam keadaan terjepit. Tambah lagi dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat dalam Permi. Begitu pula pengalamannya ketika berada di Kisaran, Sigli dan seterusnya tidak membuat ia putus arang untuk terus mengembangkan dakwah Muhammadiyah.

Pada periode kepemimpinannya (1958-1962) di dalam negeri sendiri terjadi pertentangan-pertentangan politik mengenai pemerintahan, pimpinan negara dan lain-lain, yang menyeret Indonesia ke dalam kancah pertumpahan darah. Peristiwa demi peristiwa itu, banyak atau sedikit membawa pengaruh terhadap keberadaan Muhammadiyah. Di Sumatra Tengah/Sumatra Barat, sejumlah pemimpin baik yang terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah ataupun hanya sebagai simpatisan terlibat langsung dalam peristiwa pergolakan. Akibat yang dirasakan organisasi ini tidak terurus dengan baik dan rapi, amal usaha seperti sekolah, rumah sakit, balai kesehatan, panti asuhan dan lain-lain kurang terawat sebagaimana mestinya.⁸⁸

Di saat-saat genting dan rumit itu, ia terjun menjadi pemimpin Muhammadiyah Sumatra Barat. Begitu pula dalam situasi sulit itu ia dan tokoh lainnya konsentrasi membentuk dan memisahkan daerah Muhammadiyah Padang dengan luar kota yang baru saja dilaksanakan terjadi gejolak politik antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno dengan PRRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang secara fakta memang banyak terlibat di dalam partai Masyumi atau paling tidak

⁸⁸ St. Zaili Asril dkk (Ed.), *op. cit.*, hlm. 44.

sebagai simpatisan, secara langsung berdampak kepada perkembangan dan dinamika Muhammadiyah. Dalam pada itu, pucuk pimpinan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah nyaris berada pada posisi memihak kepada PRRI. Sebagian besarnya, secara langsung ikut terlibat dalam perlawanan pemerintah pusat yang otoriter dan dipandang sudah menyimpang dari konstitusi negara. Banyak tokoh Muhammadiyah yang ikut berjuang, masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung melakukan konsolidasi gerakan dan mempertahankan diri dari serangan dan kesewenang-wenangan pemerintah pusat yang di lapangan dikendalikan oleh tentara.

Hal ini secara langsung berdampak kepada persyarikatan, di mana Muhammadiyah nyaris tidak ada pergerakan karena ditinggalkan oleh para pemimpinnya yang sudah tidak ada lagi di kota. Muhammadiyah betul-betul berada dalam kevakuman. Sedangkan anggota dan simpatisannya yang masih ada di kota tidak dapat berbuat apa-apa bahkan di antaranya tidak berani mengatakan atau mengakui bahwa dia adalah orang Muhammadiyah. Begitu pula walaupun ada pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang tidak ikut meninggalkan kota mereka tidak berani mengambil inisiatif dalam mengendalikan kepemimpinan Muhammadiyah. Hal itu, disebabkan berbahaya bagi kehidupan dan keluarganya karena Muhammadiyah dianggap sebagai Masyumi oleh masyarakat umum dan oleh pihak yang sedang berkuasa.⁸⁹ Oleh sebab itu, kepemimpinan Muhammadiyah nyaris berada dalam kelumpuhan.

Kauman, Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Muhammadiyah, diduduki oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kehancurannya untuk kedua kalinya. Akibat tragedi tersebut, kompleks Kauman, Padang Panjang beserta seluruh asetnya terpaksa ditinggalkan begitu saja, karena seluruh siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pimpinanya ikut bergerilya ke luar kota.⁹⁰ Kondisi kauman itu sangat parah dan luluh lantak akibat diduduki oleh tentara pusat. Walaupun pemberontakan PRRI telah berakhir dengan perdamaian pada Agustus 1961 dan semua pejuang telah kembali ke kota, namun

⁸⁹ Moehammad Yatim, *Laporan Sedjarah Organisasi dan Kebijaksanaan Pimpinan Daerah Sumatra Barat*, 20 Ramadhan 1382H/15 Februari 1963M.

⁹⁰ Marjohan dkk, *op. cit.*, hlm. 25.

komplek ini sudah hancur berantakan dan sebagian gedungnya telah diduduki oleh anggota-anggota PKI. Sementara peralatan yang ada seperti kendaraan, buku-buku perpustakaan dan sebagainya banyak yang dirampas oleh tentara pusat dan PKI.⁹¹

Dalam situasi itulah Moehammad Yatim, tampil dan mengambil alih kepemimpinan Muhammadiyah dalam rangka menyelamatkan dan mempertahankan eksistensinya di ranah Minang. Ia bukanlah sosok yang selama ini dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah yang ikut ataupun simpatisan dari partai tertentu atau pergerakan yang sedang bergejolak. Kemudian dari sisi politik, ia bukan pula sosok yang dengan mudah dicurigai oleh pihak pemerintah pusat terlibat dalam pergerakan PRRI karena ia telah lama dikenal sebagai Kepala Kantor Pos dan Telegraf Kota Besar Padang. Bahkan kantor pos yang ia pimpin tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang menegangkan dan mencekam tersebut. Kantornya tetap dibuka sebagaimana biasanya, melayani siapapun saja yang membutuhkan jasa pos dan telegraf.

Pada saat itu, Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Buya Malik Ahmad. Buya ini ikut bersama Syafruddin Prawiranegara dalam pengungsian masuk hutan keluar hutan. Begitu pula tokoh lainnya seperti Idris Manaf, Hasan Ahmad dan sederetan tokoh lainnya. Pada waktu itu, tokoh-tokoh sentral Muhammadiyah nyaris tidak lagi berada di tempat dan Muhammadiyah Wilayah mengalami kekosongan pimpinan. Sementara itu, pimpinan cabang, ranting dan amal usaha nyaris "bak ayam kehilangan induk" dan tidak ada lagi yang memberikan pengayoman. Begitu pula aset dalam bentuk amal usaha nyaris sebagian besar ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurusinya. Di pihak lain, rasa kekhawatiran dan ketakutan keluarga para tokoh tersebut selalu menghantui sehingga pimpinan cabang, ranting dan amal usaha kehilangan pegangan. Dalam situasi yang demikian aset Muhammadiyah dengan sangat mudah diambil alih oleh pihak lain tanpa adanya pertahanan yang berarti dari warga dan pimpinan Muhammadiyah. Mereka secara terang-terangan menduduki aset Muhammadiyah. Di samping itu, sebagian aset Muhammadiyah juga dirusak sampai porak poranda. Baik pengambilalihan maupun

⁹¹ *Ibid*, hlm. 25.

perusakan tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang sejak dari awal memang sudah antipati terhadap Muhammadiyah maupun pihak pemerintah sendiri. Misalnya, Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang diduduki oleh pemerintah pusat pada 1 Mei 1958.⁹² Pusat pendidikan ini bukan hanya sekadar diduduki, tetapi dihancurkan dengan seluruh asetnya. Akibatnya, seluruh siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pimpinannya mengungsi keluar kota.⁹³ Selain pemerintah, anggota PKI juga menduduki aset Muhammadiyah ini sehingga ketika kondisi sudah kembali pulih tidak ada lagi aset yang tersisa dari peristiwa tersebut.⁹⁴ Pada sisi lain, amal usaha Muhammadiyah yang tidak ikut diduduki dan dirusak oleh pihak lain, kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak lagi diurus dengan baik, bahkan di antaranya sudah ada yang dijadikan sebagai kandang sapi dan kambing.

Moehammad Yatim sebagai tokoh yang tidak melibatkan diri pada pergerakan politik tetapi lebih memilih bekerja sebagai pegawai kantor pos dan telegraf mengambil posisi yang sangat strategis di tengah terjadinya kekosongan pimpinan. Dalam sejarah hidupnya, Ia telah berpengalaman dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam membentuk dan menumbuhkan Muhammadiyah terutama di tingkat *grass root*. Ketika menghadapi situasi yang terjadi seperti pergolakan tersebut ia tidaklah canggung menghadapinya. Ia mengambil peran yang sangat berarti dan mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang pelit. Walaupun sangat disadari ia dalam pusaran kepemimpinan wilayah dan proses perkaderan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya tidak begitu intens. Dengan modal *basic* yang sangat kuat sejak dari mudanya, membawa ia menjadi orang yang penting dalam perkembangan Muhammadiyah di berbagai tempat tidak hanya di Sumatra Barat melainkan Aceh dan Sumatra Utara.

Posisinya sebagai kepala kantor pos dan telegraf tentunya sangat menguntungkan karena tidak termasuk tokoh yang diincar oleh pihak

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

pemerintah pusat maupun lawan politik partai Masyumi terutama PKI. Bahkan dengan posisinya itu, memberikan ruang yang lebih luas kepadanya untuk bergerak lebih leluasa dalam mempertahankan Muhammadiyah dari berbagai hantaman dan ancaman dari berbagai pihak. Hal itu, dibuktikannya dalam melakukan konsolidasi Muhammadiyah tidak hanya di Sumatra Barat bahkan menjalar ke Riau. Dengan semangat jihad dan pengorbanan yang sangat luar biasa tanpa kenal lelah ia terus melakukan keliling kecabang-cabang Muhammadiyah guna kembali memberikan semangat dan menghidupkan Muhammadiyah di berbagai tempat. Ia menelusuri pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang masih dapat bertahan dan tidak ikut dalam pengungsian keberbagai pelosok.

Semua yang dilakukannya itu, sama sekali tidak dibiayai oleh persyarikatan. Jadi, semata-mata berasal dari biayanya sendiri tanpa membebankan kepada siapa-siapa. Muhammadiyah ketika itu, berada dalam kondisi yang lumpuh. Begitu pula amal usahanya sebagian besar tidak lagi terurus dan diambilalih oleh pihak lain. Tentunya, ia tidak sendirian. Dalam situasi perang dan mencekam itu masih ada beberapa tokoh dan angkatan muda yang masih bisa dan dapat membantu menggerakkan Muhammadiyah terutama mereka yang tidak diincar oleh pemerintah pusat. Mereka pada dasarnya juga sudah terlatih dan tahan banting dalam menghadapi situasi-situasi sulit meskipun akan mengancam jiwa dan keluarganya. Dengan penuh tanggung jawab yang tinggi bersama dengan beberapa tokoh lainnya ia berhasil menyelamatkan dan mempertahankan Muhammadiyah dari badai yang sangat besar.

Pada waktu itu, Muhammadiyah betul-betul berada dalam tekanan berat dari berbagai pihak karena dianggap sebagai bagian dari partai Masyumi. Khusus di Kota Padang, pimpinan dan tokoh Muhammadiyah sudah pergi meninggalkan tempat dan satu-satunya yang tertinggal hanyalah Moehammad Yatim, yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala Kantor Pos dan Telegraf Besar Padang.⁹⁵ Dalam situasi demikian, Muhammad Yatim melakukan langkah-langkah strategis dengan menyelamatkan aset yang sebagian sudah

⁹⁵ Moehammad Yatim, dokumen, *op. cit.*

mulai diduduki oleh kelompok-kelompok lain. Langkah-langkah yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut.

Mempertahankan Masjid Taqwa Muhammadiyah

Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berdiri megah di tengah kota saat ini, dirintis dengan suka dan duka oleh para perintisnya sebagaimana diungkapkan A. Syahrudji Tanjung, karena masih ada yang beranggapan bahwa Muhammadiyah sebagai aliran baru yang berseberangan dengan tradisi Islam di Minangkabau ketika itu.⁹⁶ Sementara bagi Muhammadiyah, untuk mendirikan sebuah Ranting disyaratkan harus ada sebuah amal usaha.⁹⁷ Dalam hal itu, tidak mudah diwujudkan karena memerlukan pengorbanan dan dukungan banyak hal, tidak saja material tetapi diperlukan semangat untuk dapat bertahan dengan berbagai keadaan karena tantangan dan rintangan yang dihadapi, kadangkala membuat keberanian berubah menjadi ketakutan dan munculnya perasaan ragu-ragu dan putus. Menurut Syahrudji bagi warga Muhammadiyah di Kampung Jawo Kota Besar Padang berupaya mencari strategi agar tujuan dapat dicapai meskipun kadang harus mundur selangkah tetapi untuk maju tiga langkah.⁹⁸

Sebagai persyaratan dalam mendirikan ranting Muhammadiyah, pada awal 1952, sekitar 25 orang warga Muhammadiyah berinisiatif mendirikan Ranting Muhammadiyah Kampung Jawa Padang. Ranting ini digerakan oleh Hasan Berbalis sebagai ketua, Marah Rusli sebagai sekretaris dan Abd. Aziz Djalil sebagai bendahara, dibantu oleh beberapa tokoh yang lain.⁹⁹ Setelah ranting terbentuk, ranting tersebut melaksanakan kegiatan pengajian dua kali seminggu, dengan menumpang pada masjid Kampung Jawa Dalam (Mesjid Nurul Islam sekarang). Adapun guru yang diminta sebagai narasumbernya adalah Muhammad Zen Yasin, Buya Kari Sutan, Buya H. Darwas Idris dan Rasjid Tahir. Sedangkan untuk pembinaan roh keorganisasian

⁹⁶ Syahrudji Tanjung, "Sepatah Kata Pengurus Masjid", dalam RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Sejarah dan Profil Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatra Barat 1952-2012* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. x.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. x.

⁹⁸ *Ibid*.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

dan kemuhammadiyahahan khusus didatangkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta/Jakarta seperti Buya AR Sutan Mansur, Buya Duski Samad, Yunus Anis dan buya Abd. Wahab Samad.¹⁰⁰

Pengajian tentang kemuhammadiyahahan lebih dititik beratkan pada pendalaman pemahaman tentang hakikat Islam dan tuntutan akidah serta ibadah menurut pedoman Al-Qur'an dan as-sunnah. Pengajian tersebut terus mengalami perkembangan dan sekaligus menjadi cikal bakal anggota Muhammadiyah dan 'Aisiyiah. Dalam perkembangan itu, sebagian warga dan masyarakat Kampuang Jawo ada yang merasa terusik dan kurang senang karena belum bisa menerima paham keislaman yang dibawa Muhammadiyah itu, bahkan menganggap Muhammadiyah sebagai aliran baru yang bertentangan dengan tradisi lama.¹⁰¹ Pertentangan tersebut digambarkan Wisran Hadi bahwa

Perbedaan-perbedaan beribadah antara jamaah dan anggota Muhammadiyah dengan pihak pengurus masjid semakin tajam, apalagi menyangkut persoalan takhayul, bid'ah dan khurafat. Muhammadiyah memberikan kesadaran kepada jamaahnya untuk tidak melakukan beberapa hal seperti tidak perlu melafazkan ushali setiap sembahyang menjelang takbiraul ihram. Niat sudah cukup bila terucap dalam hati. Tidak melafalkan bismillah pada setiap memulai membaca fatihah dalam sembahyang. Tidak perlu mencium tangan guru bila bersalaman dengannya. Guru mengaji jangan menjadikan diri sebagai penerima zakat fitrah. Tidak boleh mendoa di kuburan dan makan-makan. Sembahyang tarawih selama bulan Ramadhan cukup dengan melakukan 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir, penentuan hari raya harus mengikuti ahli hisab tidak berdasar pada tampak atau belumnya bulan pada 1 Syawal dan beberapa ketentuan lainnya.¹⁰²

Kondisi itu sudah menimbulkan gesekan-gesekan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dakwah dan ukhwah serta gerak organisasi Muhammadiyah sendiri. Dalam hal itu, pada 1956 pengajian yang semakin diminati masyarakat itu dipindahkan kedai milik Bilal, anggota pengajian di Pasar Kampuang Jawo, dibelakang Blok A sekarang. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai surau

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 9.

Los Bada.¹⁰³ Adapun materi pengajian yang diselenggarakan tersebut khusus dengan materi Buya AR. Sutan Mansur dapat dikompilasi dan ditraskripiikan oleh Rasjid Thaher dan pada 1952 diterbitkan dengan judul “Khittah Gerak Muhammadiyah.”¹⁰⁴

Surau los ini kemudian berkembang menjadi keinginan dan mendorong membangun masjid meskipun dimulai dengan sebuah surau dalam ukuran yang kecil dan sederhana sekalipun. Dalam hal itu, terdapat sebidang tanah kosong bekas reruntuhan toko besi milik Robinson yang telah ditinggalkan karena ia sudah pulang ketanah leluhurnya. Tanah tersebut terletak di belakang toko Banjar Jl. M. Yamin sekarang. Setelah melalui proses yang berliku dan alot, atas usaha dan pendekatan beberapa orang pengurus, akhirnya dengan bantuan Letkol Sofyan Ibrahim, aparatur Pemko Padang, kepada Muhammadiyah diberi izin untuk mendirikan surau darurat di atas tanah tersebut dengan ukuran 9 x 12 m.¹⁰⁵

Pembangunannya dilaksanakan dengan cara swadaya jamaah, tercatat tiang/tonggak ditanggung oleh Abdul Aziz Djalil, bendahara Muhammadiyah, pedagang kain asal Silungkang. Atap seng ditanggung oleh Kapten Ju'ib Ibrahim, pejabat Rohis TNI, asal Katapiang Padang Luar Kota. Sedangkan kebutuhan yang lainnya dikumpulkan dari jamaah dan warga pengajian tetap mingguan serta dermawan lainnya.¹⁰⁶ Dalam rentang waktu dua minggu surau tersebut sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun dengan berlantai papan, atap seng dan separuh dinding bagian bawah juga papan. Sedangkan bagian atasnya dalam keadaan terbuka. Kemudian surau tersebut oleh jamaah disebut sebagai surau papan diresmikan pemakaiannya pada 18 November 1957, bertepatan dengan Milad Muhammadiyah ke-44. Pada persmian itu juga dilaksanakan shalat Jum'at pertama dengan khatib dan imam, Buya H. Darwas idris.¹⁰⁷ Inilah yang menjadi cikal bakal masjid Taqwa Muhammadiyah

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.128.

Sumatra Barat yang terus ramai dan megah.

Kemudian pada saat meletusnya gejolak politik PRRI, aset Muhammadiyah berupa bangunan kecil yang berada di Jalan Bundo Kandung tersebut—sekarang merupakan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatra Barat—dituduh oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa bangunan tersebut adalah liar dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Tambah lagi dengan adanya putusan rapat Musyawarah Besar rakyat Sumatra Barat (MBRSB) yang salah satunya juga menyangkut terkait dengan tuduhan bangunan liar tersebut. Oleh sebab itu, putusan rapat besar ini juga merekomendasikan agar dilakukan pembongkaran. Pada hal, bangunan tersebut merupakan pusat kegiatan Muhammadiyah Sumatra Barat yang menjadi kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Selanjutnya, bangunan tersebut diambil alih oleh pihak tertentu yang antipati terhadap Muhammadiyah. Menurut Moehammad Yatim, informasinya mereka berasal dari kelompok Partai PERTI.¹⁰⁸ Bangunan ini mereka jadikan sebagai pusat aktivitas sehari-hari. Salah satu di antara kegiatannya adalah wirid yang dilaksanakan setiap harinya. Pada siang hari dimanfaatkan mereka untuk tempat wirid ibu-ibu, sedangkan pada malamnya dijadikan sebagai tempat wirid bagi bapak-bapak.

Dalam kondisi itulah Moehammad Yatim sebagai tokoh Muhammadiyah kota Padang ketika itu mengambil peran penting dalam mempertahankan aset Muhammadiyah yang diambil alih oleh pihak lain. Bukannya hanya aset di jalan Bundo Kandung tersebut melainkan kepemimpinan Muhammadiyah diambil alihnya guna mempertahankan Muhammadiyah dari berbagai tekanan dari berbagai pihak. Hampir setiap hari ia melewati jalan Bundo Kandung tersebut, terutama setelah pulang bekerja dari kantornya dengan berjalan kaki. Tidak senang dengan pengambilalihan sepihak oleh kelompok tertentu itu, maka ia berinisiatif melakukan konsolidasi ke dalam, mencari dan menelusuri anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang tidak ikut meninggalkan kota. Ia dan istrinya, Mahdaniar terus berupaya menggalang kekuatan dan konsolidasi dengan mengunjungi dan menemui warga dan tokoh Muhammadiyah

¹⁰⁸ Moehammad Yatim, *Laporan, op. cit.*

yang masih tersisa dan tidak ikut meninggalkan kota. Ia mengajak simpatisan dan anggota Muhammadiyah untuk kembali berupaya merebut dan mempertahankan aset Muhammadiyah yang diambilalih oleh pihak tertentu itu. Ia mengunjungi keluarga Muhammadiyah yang masih berada di kota dan mengajak mereka supaya bersama-sama melakukan wirid-wirid pengajian seperti biasa dibangun, kepunyaan Muhammadiyah, jalan Bundo Kandung No. 1 itu.¹⁰⁹ Usaha itu ia lakukan berdua dengan istrinya, Mahnadiar.

Pada mulanya setiap orang yang diajak selalu tidak bersedia karena mereka sangat khawatir dan ketakutan mendengar adanya keputusan MBRSB. Apalagi mendengar adanya keputusan yang menganggap bahwa bangunan kecil berupa masjid itu adalah bangunan liar tanpa adanya izin. Tambah lagi, adanya informasi bahwa bangunan tersebut akan dibongkar oleh tentara. Akan tetapi, ia bersama istrinya tetap berusaha mencari dukungan dan konsolidasi. Akhirnya, ia bertemu dengan Haji Zainoeddin, pemilik toko emas bersebelahan dengan bangunan Muhammadiyah. Dalam sejarahnya, Haji Zainoeddin pernah pula menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Kota Padang pada 1963. Kemudian bersama Haji Zainoeddin menemui Haji St. Darwis, di mana tempat tinggalnya berdekatan dengan bangunan Muhammadiyah dan para pedagang emas dan pedagang lainnya.¹¹⁰ Semuanya bersepakat untuk kembali melakukan aktivitas Muhammadiyah. Di antara usaha yang dilakukannya adalah dengan menghidupkan kembali shalat berjamaah khususnya pada malam hari. Usaha ini ternyata mendapat respons baik dari jamaah sekitarnya karena semakin hari jamaahnya semakin ramai. Oleh sebab itu, pada suatu malam beberapa tokoh tadi bersepakat untuk menunjuk Haji Darwas dan Haji Zainoeddin ditambah dengan beberapa orang jamaah untuk menjadi pengurus wirid sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa “usaha ini makin hari, makin nampak hasilnya dan pada suatu malam, kami tunjukkan Haji Darwas dan Haji Zainoeddin ditambah beberapa orang kawannya sebagai pengurus wirid. Berkat sucinya persyarikatan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Muhammadiyah, usaha kami berhasil".¹¹¹

Buya Darwas termasuk yang kembali merintis dan mempertahankan secara bersama-sama dengan para pedagang pasar raya mendirikan Masjid Raya Muhammadiyah di Padang.¹¹² Terbentuknya kepengurusan wirid di tempat ini yang terdiri dari tokoh kharismatik dengan sendirinya wirid malam yang dilaksanakan oleh pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah dapat digantikan tanpa perlawanan yang berarti. Bahkan pengajian wirid tersebut secara berangsur-angsur menjadi lengang dan bahkan hilang sama sekali dari bangunan tersebut. Hal ini, semakin memudahkan dan memuluskan jalan kembali untuk menempati atau mengambil alih bangunan dari pihak lain yang sudah menduduki bangunan tersebut. Sedangkan wirid yang diselenggarakan ibu-ibu pada siang harinya diupayakan dengan melakukan pendekatan secara persuasif. Moehammad Yatim dan kepengurusan wirid pada siang harinya mendatangi ibu-ibu tersebut guna menjelaskan bahwa bangunan itu adalah milik Muhammadiyah. Dalam pada itu, tokoh ini juga tidak melakukan pelarangan wirid yang sudah dijalankan tersebut, bahkan dianjurkan sebagaimana yang diungkapkan Moehammad Yatim bahwa "Kami kunjungi mereka, yang sedang melakukan pengajian dan kami jelaskan bahwa bangunan ini adalah milik Muhammadiyah, dan tentangan mengadakan wiri-wirid tidak dilarang, melainkan dibolehkan bahkan dianjurkan".¹¹³

Meskipun demikian, pengurus wirid yang baru terbentuk ini menyarankan kepada ibu-ibu tersebut agar dilakukan atas nama 'Aisyiyah. Setelah didatangi dan diberikan saran keesokan harinya pengajian wirid ini secara berangsur-angsur lengang dan bahkan terhenti sama sekali. Untuk memperkuat dan menggantikan wirid tersebut, maka pengurus membentuk pula pengurus wirid pengajian bagi ibu-ibu dengan susunan pengurusnya, antara lain ibu Hj Sjamsinar sebagai wakil ketua, ibu Gustina (Perti) sekretaris, ibu Noerachman keuangan, dan beberapa ibu-ibu lainnya pembantu. Sedangkan ketuanya diserahkan kepada ibu Mahdaniar Yatim (istri

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² St. Zaili Asril dkk, *op. cit.*, hlm. 12.

¹¹³ Moehammad Yatim, Laporan, *op. cit.*

Moehammad Yatim), yang dulunya ketua ranting 'Aisyiyah Kampung Djawa.¹¹⁴ Pengajian ibu-ibu 'Aisyiyah ini semakin hari semakin ramai dan digemari oleh para jamaahnya.

Dengan demikian, kedua wirid yang pada mulanya diambilalih oleh pihak yang menuduh Muhammadiyah sebagai pengkhianat kepada negara, dapat kembali direbut oleh Muhammadiyah tanpa adanya perlawanan yang berarti. Wirid ini semakin hari semakin ramai baik di malam hari maupun siang. Dalam pada itu, rapat-rapat masih belum diizinkan oleh pemerintah, maka pengurus harus dibentuk. Sementara itu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Besar Padang yang terbentuk sebelum pergolakan masih belum ada yang kembali ke kota Padang. Dalam rangka mengamankan aset dan mempertahankan eksistensi Muhammadiyah, maka tokoh-tokoh ini berinisiatif membentuk dan menyusun pimpinan cabang baru. Mereka namai dengan Cabang Muhammadiyah Kota Padang dengan menghilangkan besarnya. Pimpinan yang baru ini diketuai oleh Moehammad Yatim sendiri. Pembentukan pimpinan tersebut berjalan dengan baik dan begitu pula aktivitas yang dilakukannya berjalan sebagaimana mestinya karena mendapat dukungan dari keluarga-keluarga baru. Dalam hal itu, keluarga-keluarga baru tersebut menyarankan agar dilakukan shalat Jum'at dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang berwenang sebagaimana diungkapkan Moehammad Yatim bahwa

Karena rapat-rapat belum diizinkan, pengurus harus dibentuk dan pengurus Cabang Kota Besar Padang sebelum pergolakan belum juga ada yang kembali ke kota Padang, kami tunjuk pulalah pemimpin cabang baru, dinamai Cabang Kota Padang (besarnya dihilangkan) yang diketahui oleh Moehammad Yatim sendiri. Gerakan ini sukses dan oleh keluar-keluarga baru, dianjurkan supaya diadakan sidang Jum'at dengan minta izin lebih dahulu.¹¹⁵

Saran dan masukan dari keluarga-keluarga baru tersebut dapat disetujui oleh pimpinan yang sudah terbentuk, tetapi tidak dengan persetujuan dari pihak berwenang. Oleh sebab itu, Moehammad

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

Yatim dan tokoh lainnya meminta kepada jamaah supaya berpedoman dan mengikuti gerakan pimpinan yang baru terbentuk. Begitu pula kalau ada pihak yang melarang dari siapa dan mana saja, hendaklah dihadapi dengan tenang, diam dan tidak terkejut atau lari dari tempat serta tetap berada dalam satu arahan pimpinan sebagaimana yang ungkapkan bahwa

Penjelasan yang perlu kami berikan dan sidang Jum'at disetujui tetapi tanpa minta izin, mereka-mereka dinasihati supaya selalu berpedoman pada gerak gerik kami, yakni jika andainya dilarang oleh siapapun juga, turutlah kami dan sekali lagi jangan terkejut atau lari, pendeknya diam dan tenteram.¹¹⁶

Shalat Jum'at pertama berjalan dengan aman dan tenang serta tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi tetap dengan sikap kehati-hatian. Sedangkan khatib dan imam langsung diambilalih oleh Moehammad Yatim dan beberapa Jum'at setelah itu. Jum'atan ini terus mengalami perkembangan dan orang yang pergi shalat Jum'at semakin ramai sehingga bangunan kecil tersebut tidak bisa membuat lagi jamaahnya karena sudah kekecilan. Dalam pada itu, pengurus masjid menjalankan kotak infak, shadaqah, wakaf dan zakat. Hasil dari kotak tersebut digunakan untuk memperbesar bangunan dan masjid tersebut. Menurut Moehammad Yatim, Haji Sutan Darwis memiliki peran penting dalam memakmurkan masjid ini karena ialah yang mengusahakan khatib, Haji Mansur dari Pariaman. Selain Haji Sutan Darwis, Hasan Arif juga memberikan kontribusi besar dalam memberikan bantuan kepada Muhammadiyah di zaman kegelapan itu. Hal yang sama juga dilakukan Haji Zainoeddin, Haji Syarif, Bakar Rajo Bujang dan lain-lain untuk pembangunan masjid darurat¹¹⁷ yang sekarang sudah berdiri megah di tengah kota Padang.

Meskipun demikian, bukan berarti pihak-pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah berdiam diri. Mereka terus melakukan upaya-upaya penekanan terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu. Misalnya, Haji Darwas yang merupakan ketua wirid/masjid ditangkap oleh pihak APRI dan

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

ditahan oleh KMKB. Informasi ditangkapnya tokoh Muhammadiyah yang memiliki kharisma tersebut dilaporkannya ketika Jum'at, saat ia pergi shalat Jum'at ke bangunan jalan Bundo Kandung tersebut. Pada Jum'at itu, hadir pula Mayor Basuni yang membawa surat (pesan) dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ia menemui Moehammad Yatim. Dalam hal itu, Moehammad Yatim dan Mayor Basuni pergi ke KMKB untuk menemui pimpinannya dengan tujuan meminta supaya Haji Darwas dibebaskan dari penangkapan dan tahanan. Permintaan tersebut dengan dasar bahwa yang bersangkutan adalah guru dan keluarga Muhammadiyah sebelum pergolakan. Pihak KMKB dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini dapat dikabulkan oleh pihak KMKB dengan membebaskan Haji Darwas. Kemudian ia di tempatkan di masjid sebagaimana diungkapkan Moehammad Yatim bahwa

Pada suatu hari Jum'at, muncul Haji Darwas dan melaporkan bahwa dia ditangkap APRI dan ditahan oleh KMKB. Untung baik pula hari itu, ikut berjum'at pula Mayor Basuni yang membawa pesan dari Pimpinan Pusat dan menemui kami. Bersama saudara Basuni kami berkunjung pada KMKB dan minta supaya Haji Darwas dibebaskan dengan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah guru kami, keluarga Muhammadiyah sebelum pergolakan. Bersyukur usul dikabulkan dan Haji Darwas dibebaskan, terus di tempatkan di masjid.¹¹⁸

Keberhasilan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam mempertahankan eksistensi dan aset Muhammadiyah bahkan syiarnya juga semakin tanpak, kelompok yang antipati terhadap Muhammadiyah terus pula melakukan berbagai upaya dengan cara menghasut dan menyebarkan fitnah bahwa masjid Muhammadiyah adalah masjid liar.¹¹⁹ Dalam hal itu, ia sering dipanggil, diintegrasikan dalam urusan bangunan, menghidupkan dan mempertahankan kembali Muhammadiyah oleh KMKB. Akan tetapi, ia dengan keyakinan yang penuh menegakan kebenaran dan mempertahankan dakwah Muhammadiyah tidak pernah gentar menghadapi pemanggilan tersebut. Apalagi pada masa itu, kalau tentara yang memanggil kemarkasnya sangat mengkhawatirkan baik keluarga maupun

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

masyarakat sekitarnya. Dalam hal itu, Nurmiyati, putri kedelapan dari Moehammad Yatim, mengungkapkan bahwa

Jika papa sudah dipanggil oleh tentara, kami sudah ketakutan dan sangat mengkhawatirkan keselamatan beliau. Dari kejauhan kami terus melihat beliau kalau ada apa-apanya. Bukan hanya kami yang ketakutan, tetapi tetangga juga mengalami hal yang sama. Apalagi ketika beliau pulang dari kantor Muhammadiyah sering diantar oleh tentara dan kami merasa ketakutan karena papa sering bersikap diam sesampai di rumah.¹²⁰

Situasi demikian, umumnya terjadi pada masyarakat luas. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah tersebut ternyata oleh KMKB diterima terutama berkaitan dengan pendirian masjid yang berada di jalan Bundo Kandung tersebut dipandangnyanya liar. Tambah lagi, ketika KMKB mengkonfirmasi ke Balai Kota surat izin bangunan tersebut, ternyata memang tidak ditemukannya. Hal ini membuat KMKB semakin yakin terhadap pengaduan pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah tersebut. Apalagi posisinya berada berada di tengah kota dan dihadapan gedung KMKB, dekat dengan Balai Kota. Itu artinya, Muhammadiyah mendirikan masjid liar di dalam kota. Dalam hal itu, beberapa kali Moehammad Yatim sempat dipanggil untuk diintogradi oleh pihak KMKB beberapa kali. Akan tetapi, Moehammad Yatim tanpa ada rasa was-was setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya dijawab secara tegas dan lugas. Pada mulanya oleh KMKB tuduhan tersebut dialamatkan kepada pribadi Moehammad Yatim, kemudian beralih kepada Muhammadiyah sebagaimana diungkapkannya bahwa

Karena dijawab dengan tepat, ditukar pula tuduhan bukan pak Jatim, tetapi Muhammadiyah. Kami beri jawaban lebih tegas dan bertanya, kenalkah tuan Muhammadiyah dan percayakah tuan, Muhammadiyah mendirikan masjid liar? Tuan KMKB menjawab “tidak mungkin, saya cukup kenal pada persyarikatan Muhammadiyah, pusatnya di Jogja di negeri saya.¹²¹

Tidak lama setelah pemanggilan tersebut, Muhammadiyah yang dipimpin Moehammad Yatim menghadapi peristiwa berat pula, yaitu

¹²⁰ Nurmiyati, *op. cit.*

¹²¹ Moehammad Yatim, *Laporan..., op. cit.*

Musyawarah Besar Rakyat Sumatra Barat (MBRSB) yang berlangsung di Balai Prajurit, Padang dengan dimediasi oleh pemerintah atas desakan beberapa pihak yang sengaja mengganyang keberadaan Muhammadiyah. Musyawarah tersebut dihadiri oleh sejumlah partai, ninik mamak dan alim ulama. Salah satu putusan musyawarah tersebut berkaitan dengan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah anggota partai Masyumi dan pengkhianat negara. Oleh karena itu, musyawarah ini merekomendasikan agar yang berwajib melarang persyarikatan Muhammadiyah bergerak di Sumatra Barat.

Tiga hari sesudah musyawarah tersebut, Moehammad Yatim dipanggil oleh yang berwajib. Pada mulanya pertanyaan intograsi tersebut diarahkan kepada pribadinya yang mempertanyakan posisinya sebagai pegawai negara kenapa menggerakkan Muhammadiyah. Pada hal Muhammadiyah itu sendiri adalah anggota istimewa Masyumi dan Masyumi itu dilarang di Sumatra Barat. Dalam hal itu, ia menjelaskan bahwa "Muhammadiyah sudah lama keluar sebagai anggota istimewa dari Masyumi dan Muhammadiyah tidak berpolitik, semata-mata persyarikatan agama dan sosial."¹²² Akhir dari pemanggilan tersebut Muhammadiyah tidak jadi dilarang sebagaimana rekomendasi dan desakan dari pihak MBRSB. Artinya, Muhammadiyah dibolehkan bergerak lagi.

Gagalnya rencana penggagas MBRSB melarang Muhammadiyah bergerak di Sumatra Barat tidak membuat mereka patah arang. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan mendesak pihak KMKB agar masjid dan bangunan milik Muhammadiyah yang ada di jalan Bundo Kandung tersebut dibongkar karena mereka tuduh sebagai bangunan liar. Dalam hal itu, ia kembali dipanggil untuk diintograsi tentang bangunan tersebut. Dengan demikian, Masjid Taqwa yang ada berdiri megah sekarang sudah dua kali rencana pembongkarannya oleh Komando Militer Besar Padang (KMKB) karena adanya pengaduan dan hasutan dari pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah dengan tuduhan masjid liar tanpa surat izin bangunan.¹²³ Dalam hal ini

¹²² *Ibid.*

¹²³ Muhammad Yusuf, dokumen..., *op. cit.*

Moehammad Yatim, sudah beberapa kali dipanggil oleh pihak KMKB tetapi dijawab dengan tepat dan tegas pula, di antaranya; *Pertama*, kalau memang harus dibongkar beri surat perintah bongkar. *Kedua*, masalah ini akan kami kirim ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. *Ketiga*, untuk bapak ketahui pemerintah menyuruh bangun tempat-tempat ibadah, tapi bapak suruh bongkar. *Keempat*, apakah suatu bangunan berdiri di depan kantor KMKB dan kantor Balai kota pada pusat kota tanpa surat izin. *Kelima*, kebetulan pimpinan yang lain sedang berada di luar kota. *Keenam*, akhirnya, komandan KMKB Padang menelpon walikota supaya mengeluarkan surat izin.¹²⁴

Pada akhirnya, Komandan KMKB, Major Soelah Dumadi, dalam pemanggilan yang terakhir hanya memberikan nasihat supaya Muhammadiyah memasukan permohonan izin pembangunan masjid dan ia akan berusaha pula membantunya, supaya surat izin tersebut dikeluarkan oleh wali kota Padang sebagaimana diungkapkannya bahwa "bagi kami putunjuk dicinta ulan tiba, karena gambar dan surat sudah sedia dan besoknya surat permohonan dan lampiran dan salinannya pada komandan KMKB Kota Besar Padang dipendekan saja surat izin itu diterima".¹²⁵

Kemudian pada 8 April 1959, Moehammad Yatim dipanggil oleh Panglima, Oversto Pranoto kemarkasnya. Untungnya, panglima ini sudah kenal dekat dengannya ini terkait dengan jabatannya sebagai kepala kantor pos dan telegraf. Apalagi kemenakan panglima ini, Soetanto pernah menjadi anak buah dari Moehammad Yatim sendiri di Kantor Pos dan Telegraf Padang sehingga pemanggilan tersebut tidak seperti intograsi yang dialami sebelumnya. Pertemuan tersebut berjalan dengan rasa kekeluargaan. Satu sama lain saling bercerita pengalamannya soal keluarga dan tugas-tugas yang diembankan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Termasuk Pranoto menanyakan soal keadaan kemenakannya, Soetanto yang sudah pindah ke Tanjung Pinang.¹²⁶

Pada akhirnya, Pranoto sebagai panglima sampai pada pertanyaan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Moehammad Yatim, Laporan..., *op. cit.*

¹²⁶ *Ibid.*

soal Muhammadiyah, tetapi pertanyaan itu disampaikan dengan santai dan tidak seperti sedang melakukan integrasi yang dilakukan KMKB sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Pranoto terkait dengan kebenaran informasi bahwa Moehammad Yatim adalah tokoh yang kembali menegakan dan mempertahankan Muhammadiyah. Pertanyaan itu secara santai pula, tetapi tegas dan mengena dijawab Muhammad Yatim bahwa informasi tersebut benar dan itulah faktanya. Hal itu didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan yang kuat bahwa Muhammadiyah berada pada posisi yang benar dan patut untuk dipertahankan nama baiknya.¹²⁷ Dalam hal itu, terungkap pula dari pernyataan Pranoto bahwa ia sendiri sesungguhnya berasal dari anak Muhammadiyah, yang didik oleh sekolah Muhammadiyah. Oleh karena itu, ia sendiri merasa gembira dengan jawaban yang lugas, tegas dan tidak ragu-ragu dari Moehammad Yatim. Dalam hal itu, Pranoto sebagaimana ditulis Moehammad Yatim menyatakan bahwa “dengan tegas beliau mengabarkan pak Jatim bergerak terus, bangun dengan giat Muhammadiyah”.¹²⁸

Dengan saling bagi informasi itu, semakin kuatlah keyakinan dan kepercayaan Moehammad Yatim karena terasa mendapat dukungan dari panglima sendiri sehingga tidak ada lagi masalah yang bisa menghalangi dalam mempertahankan Muhammadiyah dari berbagai tekanan dan ancaman. Sehubungan dengan hal itu, ia mengungkapkan bahwa “Kami dipanggil, karena ini syukur Tuhan menunjukkan keadilannya, kami berikan jawaban-jawaban yang tepat sehingga pembongkaran terhindar.”¹²⁹ Dari pemanggilan itu, Allah memberikan jalan keluar di saat-saat Muhammadiyah dalam tekanan dan ancaman. Bangunan kecil berupa masjid yang dipersoalkan oleh MBRBS tersebut, akhirnya bisa diselamatkan dan dipertahankan dari pembongkaran. Oleh karena, bangunan tersebut sudah dua kali akan dilakukan pembongkaran oleh tentara atas desakan dari MBRBS. Akan tetapi, atas keulekan dari Moehammad Yatim dan beberapa tokoh lainnya pembongkaran tersebut batal dilaksanakan. Pemanggilannya oleh

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

panglima tersebut merupakan pemanggilan terakhir dari persoalan bangunan yang direkomendasikan untuk dibongkar, karena setelah Pranoto bertemu dengannya tidak ada lagi gugatan dan desakan dari berbagai pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah. Perjuangan Moehammad Yatim mempertahankan aset Muhammadiyah yang berada di jalan Bundo Kandung dari pembongkaran mengalami keberhasilan dan kembali dapat direbut. Sejak itu, pada lahan tersebut dibangun masjid yang lebih permanen sebagai cikal bakal masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatra Barat yang berdiri megah di tengah kota Padang hari ini. Dalam pembangunan sejak dari awal itu, peran dari ibu-ibu 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Asiyiyah sangat penting terutama dalam penggalangan dana dari jamaah masjid. Usaha yang paling populer dilakukan oleh para ibu-ibu tersebut di antaranya melalui bazar setiap hari Jum'at. Ibu-ibu ini menyediakan kupon yang dibagi-bagi kepada para jamaah Jum'at. Cara ini sangat ampuh dalam penggalan dan penggalangan dana karena mendapat sambutan baik dari jamaah Jum'at. Sedangkan makanan yang dijual pada waktu Jum'at di masak di rumah Moehammad Yatim sendiri yang dikoordinir langsung oleh Mahnadiar, istrinya Moehammad Yatim, yang juga merupakan pengurus 'Aisyiyah.¹³⁰

Menahan Senjata Sakti Panglima

Kegigihan dan keuletan Moehammad Yatim dalam mempertahankan aset Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan di atas, bukan berarti dilapangan tidak mengalami masalah. Meskipun secara moral sudah mendapatkan dukungan dari panglima, yang ketika itu dijabat oleh Pranoto. Upaya-upaya yang dilakukan Moehammad Yatim di masyarakat tetap saja mendapat tekanan terutama dari pihak pemegang kekuasaan di tingkat nagari. Banyak hal, yang ditemukan dan dihadapi oleh Moehammad Yatim ketika berkunjung kecabang-cabang Muhammadiyah. Usahnya dalam mempertahankan Muhammadiyah dari tekanan dan ancaman dari berbagai pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah tidak sebatas lagi bergerak di kota Padang. Setelah persoalan aset yang ada di jalan

¹³⁰ Muhammad Yusuf, dokumen..., *op. cit.*



Kemegahan Masjid Taqwa Muhammadiyah di tengah kota Padang menjadi saksi sejarah Muhammadiyah akan dibubarkan
Sumber: koleksi pribadi penulis

Bundo Kandung selesai dan terasa sudah aman dari penyerobotan pihak tertentu termasuk pembongkaran dari pihak tentara, ia terus bergerak dari pelosok kepelosok guna menelusuri kembali serta menghidupkan Muhammadiyah yang sempat ditinggalkan oleh para pimpinannya karena terlibat dalam perjuangan melawan kediktatoran pemerintah pusat.

Di masa-masa sulit itu, Moehammad Yatim mengumpulkan dan mengkonsolidasikan kembali potensi Muhammadiyah. Sebagian besar dari warga dan sebelumnya menjadi tokoh Muhammadiyah yang tidak ikut meninggalkan daerahnya banyak yang tidak bersedia lagi aktif dalam Muhammadiyah, bahkan jauh dari itu di antaranya ada yang tidak bersedia lagi disebut-sebut sebagai orang Muhammadiyah. Meskipun demikian, ia dan beberapa tokoh lainnya semangatnya tidak pernah pudar apapun risikonya. Usahnya itu, cukup berhasil sesuai dengan kondisinya ketika itu. Dalam hal itu, ia mengungkapkan bahwa "berkat pertolongan illahi di Padang Muhammadiyah dapat saya pertahankan dan hartanya terpelihara yang tadinya akan dikuasai

APRI, karena disangkanya bekas kepunyaan Masyumi.¹³¹

Ketika ia mengunjungi cabang-cabang Muhammadiyah termasuk aset dan amal usahanya nyaris tidak ada lagi yang mengurus. Sebagiannya ada yang memang sudah ditinggalkan oleh pimpinannya karena ikut mengungsi ke tempat lain, tetapi disebagian yang lain disebabkan karena kekhawatiran dan ketakutan. Amal usaha milik Muhammadiyah sudah banyak yang kosong, tidak berpenghuni lagi. Sebagian ada pula yang sudah diduduki oleh pihak tertentu. Sedangkan yang lain, didukuti oleh tentara. Hampir semua aset dan amal usaha yang ia kunjungi kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan jauh dari itu ada pula yang sudah rata dengan tanah karena dibongkar oleh pihak yang antipati terhadap Muhammadiyah seperti halnya aset yang ada di Kauman Padangpanjang.

Melihat kondisi yang demikian, bersamaan dengan cuti besarnya, selama tiga bulan, dimulai pada 1 Oktober 1960¹³² ia pergunakan waktunya itu untuk melakukan konsolidasi keberbagai cabang dan daerah. Oleh karena mengalami kesulitan berupa tekanan dan ancaman dari berbagai pihak, maka Moehammad Yatim pada 14 Desember 1960 menemui kembali Pranoto dengan maksud minta persetujuan panglima untuk normalisasi Muhammadiyah.¹³³ Selain menemui panglima, Moehammad Yatim sekaligus membawa surat permohonan yang dimaksud dengan surat tertanggal 14 Desember 1960 Nomor. 66.¹³⁴ Oleh karena Pranoto sebagai panglima sudah memahami akan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang kembali mendorongnya untuk menggerakkan Muhammadiyah, panglima memberikan Surat persetujuan sebagai wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menormalisasi Muhammadiyah di Sumatra Barat. Surat persetujuan yang dimaksud dikeluarkan panglima pada 6 April 1961 dengan Nomor: B Peperda/134/A/1961.¹³⁵

Seminggu setelah keluarnya surat persetujuan panglima tentang normalisasi Muhammadiyah tersebut, Moehammad Yatim melanjutkan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Moehammad Yatim, dokumen..., *op. cit.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

kunjungannya keberbagai daerah untuk melakukan konsolidasi. Pada 12 April 1961 ia melanjutkan perjalanan ke Riau Daratan, Pekanbaru, Talaok dan Rengat.¹³⁶ Pada daerah-daerah yang ia kunjungi tersebut yang pertama dicarinya adalah pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang sudah tidak mengaktifkan diri lagi karena ketakutan dicurigai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah tentara. Untuk menghindari kesalahpahaman dan meyakinkan para pimpinan Muhammadiyah tersebut Moehammad Yatim memperlihatkan surat persetujuan panglima yang ia bawa itu. Selain itu, didaerah-daerah tersebut ia juga menemukan banyak simpatisan dan anggota Muhammadiyah yang merupakan pegawai dan pensiunan jawatan agama. Kunjungannya itu, disebagian daerah di luar dugaan Moehammad Yatim karena ia diterima secara antusias dan mereka sangat bergembira dengan kedatangan tokoh Muhammadiyah dari Padang tersebut. Informasi yang disampaikan Moehammad Yatim tersebut mampu meyakinkan anggota dan pimpinan Muhammadiyah setempat dan menghilangkan keragu-raguan mereka yang selama ini terjadi terutama sejak meletusnya perseteruan politik yang berujung pada konflik senjata. Hal ini menjadikan pimpinan Muhammadiyah setempat tidak lagi ragu dan semakin yakin bahwa Muhammadiyah akan terus bergerak dalam mewujudkan dakwah Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Khusus di Rengat, Moehammad Yatim mengunjungi beberapa orang pimpinan Muhammadiyah. Pada mulanya tokoh-tokoh yang ia kunjungi ini merasa was-was dan ragu-ragu atas kehadirannya di tengah mereka. Dalam rangka meyakinkan mereka, Moehammad Yatim mengeluarkan dan memperlihatkan kepada mereka surat persetujuan normalisasi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh panglima. Setelah itu, baru mereka yakin terhadap misi yang dibawa Moehammad Yatim tersebut. Para mantan dan anggota pimpinan yang ia temui ternyata kebanyakan di antara mereka adalah para pegawai jawatan agama. Dengan latarbelakang itu, Moehammad Yatim tidak mengalami kesulitan dalam menjelaskan maksud dan tujuan Muhammadiyah dan ketidakterlibatannya dengan persoalan PRRI sebagaimana yang dituduhkan kebanyakan pihak terutama di Sumatra Barat. Kemudian di Pekanbaru sekembali dari Rengat,

¹³⁶ *Ibid.*

Moehammad Yatim meneruskan perjalanannya ke Pekanbaru. Di kota ini ia menghubungi Badjuri, kepala kas negara. Pertemuan dengan tokoh dan anggota Muhammadiyah dilangsungkan di rumah Badjuri ini. Pada pertemuan tersebut berhasil disepakati pembentukan kepanitiaan rapat – semacam musyawarah cabang – Muhammadiyah untuk dilaksanakan secepatnya.¹³⁷

Sekembalinya dari kunjungan ke Pekanbaru dan sekitarnya, Moehammad Yatim meyakini pentingnya surat persetujuan normalisasi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh panglima. Selanjutnya ia mengurus surat persetujuan normalisasi Muhammadiyah kepada Kepala Polisi Komisariat sebagaimana yang dikeluarkan oleh panglima. Dalam waktu yang tidak terlalu lama surat persetujuan yang dimaksud dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan suratnya bertanggal 8 Oktober 1962 Nomor: 1491/35-78/1-1962, Tuan KP. Kom (Kepala Polisi Komisariat). Kedua surat ini menjadi senjata tajam bagi Moehammad Yatim untuk mempertahankan dan membangun kembali Muhammadiyah yang berada dalam kevakuman, sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa “surat-surat persetujuan Bapak Panglima dan KP. Kom tersebut di atas adalah senjata tajam yang melancarkan tugas kami, untuk membangun cabang-cabang dan membentuk pengurus-pengurusnya.”¹³⁸

Sama dengan di beberapa daerah sebelumnya, upaya memperkenalkan dan mengembangkan Muhammadiyah bukan tidak ada tantangan yang sulit dan rumit. Di Bandar Sepuluh, Pesisir Selatan misalnya, pernah seluruh cabang Muhammadiyah ditutup dan para pemimpinnya di usir.¹³⁹ Bermodalkan dua surat persetujuan tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatra Barat di bawah pimpinan Moehammad Yatim dapat lebih leluasa kembali membangun Muhammadiyah dari kevakuman meskipun tantangan yang dihadapinya dilapangan sangat berat. Apalagi Pimpinan Cabang dan tokoh Muhammadiyah yang ia gerakan kembali berhadapan dengan masyarakat dan kelompok serta penguasa setempat yang belum sepenuhnya bisa memahami dan menerima Muhammadiyah.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ A. Jainuri, *op. cit.*, hlm. 85.

Bahkan pada sebagian tempat Muhammadiyah dipersepsikan sebagai gerakan yang harus dilawan dan dilarang. Namun kesulitan dan tantangan tersebut secara sabar dan tabah dihadapinya dengan tenang.

Pada masa ini, Muhammadiyah betul-betul mengalami kevakuman. Para pimpinan Muhammadiyah sebagian besarnya sudah tidak ada lagi di dalam negeri melainkan pergi ke tempat-tempat yang dipandang lebih aman. Kalaupun ada di antara pimpinan Muhammadiyah yang tidak pergi, umumnya mereka sudah tidak lagi bisa menggerakkan Muhammadiyah lebih leluasa. Tekanan dan intimidasi menjadi irama perjuangan pada masa itu. Pada keadaan demikian, Moehammad Yatim bergerak kembali melakukan penguatan dan mobilisasi sumber daya Muhammadiyah yang masih tersisa. Apalagi pergerakan yang ia bangun tidak lepas dari mata-mata komunis. Oleh sebab itu, cabang dan ranting kembali dikuatkan guna membangun dan segera bangkit dalam mempertahankan Muhammadiyah. Daerah-daerah yang ia upayakan menghidupkan kembali Muhammadiyah, di antaranya;

Sulit air

Sulit Air terletak di wilayah Kabupaten Solok, di mana kehidupan masyarakatnya lebih banyak berada di perantauan daripada di kampung. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal itu secara khusus memerintahkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatra Barat untuk mengunjungi dan menghidupkan Muhammadiyah di daerah tersebut. Oleh sebab itu, Moehammad Yatim pergi sendirian guna memenuhi surat perintah Pimpinan Pusat tersebut, namun di sana belum diketahui siapa yang akan ditemuinya. Ia tiba di Sulit Air sekitar pukul 18.30 dalam keadaan hujan rintik, turun di stasiun bus. Pada saat itu, ia meminta kepada seorang buruh untuk mengantarkan kepada Jaani, kepala kantor pos dan telegraf. Pada Jaani, ia meminta informasi jika ada mengenal anggota atau orang Muhammadiyah di tempat tersebut. Kemudian anggota Muhammadiyah yang dikenalnya diminta panggil oleh petugas Pos dan Telegraf. Akan tetapi, dari tiga orang Muhammadiyah yang dipanggilnya oleh pegawai pos tersebut tidak satupun yang berani membangun Muhammadiyah di daerah tersebut karena takut akan membahayakan diri dan keluarganya.

Oleh sebab itu, Moehammad Yatim menanyakan kepada anggota Muhammadiyah yang bertiga tersebut siapa kira-kira yang akan berani dan bisa melakukannya. Mereka sepakat menjawab bahwa hal itu bisa dilakukan oleh Djamin Ahmad. Kemudian Djamin Ahmad di panggil.

Setelah bercerita yang agak panjang, Moehammad Yatim menanyakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membangun kembali Muhammadiyah. Djamin Ahmad menyanggupi keinginan ketua Pimpinan Daerah tersebut. Selanjutnya Moehammad Yatim dengan ditemani oleh petugas kantor pos menemui camat yang berada dirumahnya guna menyampaikan dan menjelaskan tentang tujuan Muhammadiyah dan maksudnya datang dari Padang. Sementara Djamin Ahmad diminta tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut melainkan disuruh menunggu di kantor pos. Pertimbangannya adalah kalau terjadi kebuntuan dalam pertemuan tersebut, tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sepeeninggal Moehammad Yatim.

Pada saat terjadinya pertemuan itu, camat ini tidak begitu yakin, ragu dan bimbang atas kehadiran Moehammad Yatim. Oleh sebab itu, ia cepat menyampaikan dan memperlihatkan surat persetujuan Panglima dan KP.Resort Polisi terhadap persetujuan normalisasi Muhammadiyah. Setelah itu, camat tersebut baru yakin dan memanggil petugas dan beberapa kepala polisi guna mengenalkan Moehammad Yatim. Kemudian diskusi dan perundingan dimulai sambil memperlihatkan surat persetujuan panglima tersebut. Dalam perundingan itu didapatkan kesepakatan dan persetujuan bahwa pihak pemerintah tidak keberatan membangun kembali Muhammadiyah. Adanya persetujuan camat tersebut, petugas pos dan telegraf yang mendampingi Moehammad Yatim diminta untuk menjemput Djamin Ahmad yang sedang berada di kantor pos. Kemudian Djamin Ahmad diperkenalkan kepada pihak camat dan kepala kepolisian bahwa ialah yang akan mengadakan rapat Muhammadiyah dan akan membentuk pimpinan cabang Muhammadiyah. Pertemuan tersebut menjadi lancar dan Tritunggal berjanji akan memberikan bantuannya. Besok paginya pukul 04.00 Moehammad Yatim kembali ke Padang dan Djamin Ahmad, berhasil

membentuk cabang dan pemimpin-pemimpinnya.¹⁴⁰

Kuraitaji

Berbeda dengan di Sulit Air, di Kuraitaji Muhammadiyah sudah ada. Hanya saja mengalami kevakuman akibat ditinggal oleh pimpinannya karena meninggalkan kota. Beberapa orang anggota dan tokoh Muhammadiyah beberapa kali datang menemui Moehammad Yatim di Padang dengan maksud berkeinginan kembali menggerakkan Muhammadiyah di Kampungnya, Kuraitaji. Namun, usahanya tersebut gagal karena kepala negerinya orang PKI yang nyata-nyata tidak mengingini Muhammadiyah bergerak kembali. Oleh sebab itu, Moehammad Yatim datang dan turun langsung ke Kuraitaji dari Padang. Kedatangannya ke Kuraitaji merupakan kunjungannya yang pertama kali kedaerah ini sejak menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Pada waktu itu tepat pada bulan Ramadhan dan sesudah berbuka puasa, ia mengunjungi kepala nagari.¹⁴¹

Pertemuan saat itu berjalan lancar dan kepala negeri minta ditangguhkan selama tujuh hari untuk proses perizinan kebangunan kembali Muhammadiyah didaerahnya. Meskipun sudah agak larut malam, Moehammad Yatim merasa khawatir untuk bermalam di Kuraitaji sehingga diputuskan untuk kembali ke Pariaman dengan diantar oleh kawan-kawannya. Sebelum berangkat ke Pariaman, ia terlebih dahulu singgah dirumah Kasim Munafi, mantan ketua Pimpinan Muhammadiyah Kuraitaji. Setelah selesai minum, tiba-tiba datang seorang koprал bawahan dari Butarpra dan meminta supaya tidak berangkat ke Pariaman malam itu, melainkan tidur dirumah Kasim Munafi. Ia berjanji akan mengamankan sampai besok pukul 06.00. Atas jaminan keamanan tersebut, Moehammad Yatim dapat tidur di rumah Kasim Munafi dengan aman dan besok pagi langsung kembali ke Padang. Setelah pertemuan ia dengan kepala negeri beberapa hari yang lalu itu, terdengar bahwa wali naari tersebut sudah insaf dan mengizinkan Muhammadiyah bergerak kembali. Meskipun dengan persyaratan bahwa anggota pimpinan yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

¹⁴⁰ Moehammad Yatim, Laporan..., *op. cit.*

¹⁴¹ *Ibid.*

kepala negeri tersebut. Akhirnya, Pimpinan Muhammadiyah Kuraitaji dapat dibentuk dan dilantik.¹⁴²

Kambang

Situasi lebih menyulitkan dan mencekam lagi terjadi di kampung Buya Samik Ibrahim, tokoh Muhammadiyah Sumatra Barat, yaitu Kambang, Pesisir Selatan. Pada daerah ini sekolah Muhammadiyah, Muallimin, dijadikan sebagai kandang sapi, sementara pada hari pasar sebagai tempat parkir sepeda. Bachtiar Ichsan, salah seorang pemuda Kambang yang baru pulang dari Medan dan ia aktif di Pemuda Muhammadiyah merasa tidak senang dengan diperlakukannya aset pendidikan Muhammadiyah seperti itu oleh sebagian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, ia berinisiatif menemui Moehammad Yatim di Padang menjelaskan keprihatinan dan kekesalannya terhadap penghinaan itu terhadap Muhammadiyah. Selain memberikan penjelasan dan kepedulian keprihatinannya, ia sekaligus meminta arahan dan petunjuk langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukannya untuk menghidupkan kembali Muhammadiyah serta mengembalikan aset Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, dihadapan Moehammad Yatim ia berjanji akan mempertahankan dan memperjuangkan kembali Muhammadiyah. Dalam hal itu, Moehammad Yatim sebagai ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah meminta kepada Bachtiar Ichsan untuk membangun kembali Muhammadiyah dan sekaligus menyerahkan surat persetujuan normalisasi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh panglima Kodam III/17 Agustus untuk dijadikan sebagai rujukan di saat-saat genting dan membahayakan. Dalam pada itu, ia terus memotivasi agar tetap kukuh dalam membangun kembali Muhammadiyah, tidak hanya di sekitar Kiambang melainkan di seluruh Pesisir Selatan.¹⁴³ Petunjuk yang diberikan ketua Muhammadiyah Daerah tersebut ia konsolidasikan dengan seluruh tokoh dan warga Muhammadiyah yang masih ada kepeduliannya terhadap Muhammadiyah. Pada akhirnya, mereka bersepakat untuk mengundang Moehammad Yatim ke Kambang untuk memberikan penjelasan perkembangan terakhir dan membangun

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

kembali Muhammadiyah.

Setelah mendapat respons baik dari tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, akhirnya Bachtiar Ichsan kembali ke Padang menemui Moehammad Yatim melaporkan perkembangan terakhir sebagai tindaklanjut dari pertemuan yang sebelumnya dan sekaligus mengundang Moehammad Yatim ke Kambang untuk membangun kembali Muhammadiyah. Atas permintaan pemuda ini Moehammad Yatim dengan keyakinan memperjuangkan agama Allah berangkat pada hari itu juga ke Kambang sekitar pukul 21.00 Wib. Sekitar pukul 07. 30 hari esoknya kedua tokoh ini tiba di Kambang dan disambut oleh Haji Manan, ketua Cabang Muhammadiyah Kambang. Namun demikian, ketua cabang ini merasa bimbang dan penuh rasa kekhawatiran atas kedatangan ketua Muhammadiyah tersebut dihantui oleh rasa ketakutan atas keselamatan baik warga Muhammadiyah yang ada di Kamang maupun Moehammad Yatim sendiri. Keraguan dan ketakutan tersebut ia sampaikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada hari-hari sebelumnya ketika Bachtiar Ichsan berangkat ke Padang. Tiga orang penggerak Muhammadiyah, kawan-kawan dari Bachtiar Ichsan dipanggil oleh Buterpra, di mana kondisinya sangat menyedihkan setelah pulang dari pemanggilan tersebut. Mereka dipukuli sampai berlumuran darah.

Dalam pada itu, Bachtiar Ichsan yang baru saja berpisah dari Moehammad Yatim dan Haji Manan diiringkan oleh seorang tentara Buterpra kekantornya. Tidak lama kemudian, anak dari ketua cabang Muhammadiyah Kambang melaporkan bahwa Bachtiar dipukuli oleh tentara sehingga berlumuran darah sebagaimana diungkapkan Moehammad Yatim bahwa

Bachtiar yang baru saja bercerai dengan kami, kelihatan diiringkan seorang tentara kekantor Buterpra. Sebentar sesudah itu, berlalilah seorang anak pada Haji Manan, mengabarkan bahwa Bachtiar dipukuli dengan pangkal karabyin dan berdarah.¹⁴⁴

Mendengar laporan anak ketua cabang tersebut, Moehammad Yatim tidak bersenang hati dan bermaksud untuk mengunjunginya ke kantor Buterpra melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Oleh

¹⁴⁴ *Ibid.*

sebab itu, ia minta izin pada Haji Manan. Akan tetapi, Haji Manan tidak mengizinkannya karena dikhawatirkan keselamatan jiwa Moehammad Yatim sendiri sebagaimana diungkapkannya bahwa “kami minta izin pada Haji Manan, mengunjungi Buterpra, tetapi tidak dibolehkan karena katanya kita berhadapan dengan harimau yang kelaparan.”¹⁴⁵ Dalam situasi yang dilema tersebut, dari dalam rumah terlihat tentara lalu lalang melewati halaman rumah di mana pertemuan Muhammadiyah akan dilaksanakan pada hari itu. Mereka melewati halaman rumah ketua cabang itu dengan menunjukkan keberkuasaannya di daerah tersebut, namun tidak satu katapun yang terucap dari tentara itu sebagaimana dalam tulisannya bahwa

Tidak berapa lama lalulah seorang anggota tentara dihadapan rumah yang melihat dengan mata yang terbelalang pada kami, seolah mata kucing yang sedang menghadapi mangsanya (tikus), tetapi tidak berbicara, seolah-olah mulutnya tak dapat dibukanya. Kejadian ini beruang-ulang.¹⁴⁶

Bersamaan dengan itu, disusul dengan kedatangan camat yang memperkenalkan dirinya sebagai kepala pemerintahan terendah. Secara pribadi sesungguhnya ia sudah mengetahui dan mengenal agak lebih dekat dengan Moehammad Yatim sejak 1943 ketika ia bertugas di Payakumbuh. Dalam pengakuan camat tersebut, ia mengetahui maksud kedatangan ketua Muhammadiyah ini berkunjung ke Kambang dengan maksud yang sangat baik. Akan tetapi, suasananya yang kurang tepat memaksa camat ini harus menyampaikan apa adanya kepadanya, yaitu permintaan untuk kembali ke Padang dengan menggunakan otobus. Otobus yang dimaksud sudah dikondisikan terlebih dahulu oleh camat tersebut sehingga tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengelak dari permintaan camat itu. Meskipun dipaksa terus oleh camat ini untuk berangkat ke Padang hari dan dengan otobus itu juga, Moehammad Yatim tetap bersikukuh bertahan di tempat itu. Oleh karena terjadi ketegangan antara kedua pihak. Pada akhirnya, camat itu mengeluarkan senjata pamungkasnya dengan mengancam bahwa kalau Moehammad Yatim tetap bertahan dan tidak jadi berangkat ke

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

Padang, ia tidak menjamin atas keselamatan jiwa dan termasuk orang yang ditiggalkannya. Dalam hal itu, tidak ada lagi kata yang diucapkan oleh ketua Muhammadiyah ini selain dengan keterpaksaan mengikuti kata dari camat tersebut. Walaupun begitu, Moehammad Yatim masih tetap menanyakan keberadaan Bachtiar yang dibawa oleh tentara kekantornya. Dialog antara kedua pihak tersebut dapat dilihat dari kutipan tulisan Moehammad Yatim yang menyatakan bahwa

Secara santun dan berkata, saya kenal pak Yatim, sejak dari tahun 1943 di Payakumbuh dan mengerti pula hajat kedatangan kemarin suci/bersih. Walaupun begitu saya minta pak Yatim dengan otobis ini ke Padang.” Kami tanyakan kejadian Bachtiar Ichsan dan minta supaya kami dibawa kekantor Buterpra. Camat menjawab, “Pak, Bis akan berangkat, naiklah, jika tidak kami tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan bapak”. Tas kami dinaikkan keatas bis dan kami terpaksa menurut dan sempat berpesan kepada Haji Manan, supaya memberi kabar selanjutnya. Kami sebenarnya enggan naik bis karena; (1) kami akan dicap seorang penakut, sebagai wakil PP Muhammadiyah, meninggalkan anaknya dalam bahaya dan lari ketakutan tanpa menghiraukan anaknya. (2) jika dicegat di atas bis dan dituduh lari, bersalah kami bisa ditembak saja, tetapi pak camat telah berkata, tidak akan bertanggung jawab atas diri kami, sebagai warga negara Indonesia kami terpaksa patuh, kembali ke Padang.¹⁴⁷

Simabur

Peristiwa yang hampir sama mengecewakan juga dialami ketua Muhammadiyah ini di Simabur. Pada saat itu, Moehammad Yatim diundang untuk melakukan prosesi sidang dan pelantikan cabang. Acara yang dimaksud terpaksa batal karena tidak diizinkan oleh camat sebagai penguasa daerah. Namun demikian, Moehammad Yatim sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah tidak bersenang hati diperlakukannya Muhammadiyah oleh aparat pemerintah seperti itu. Apalagi sebelumnya, informasi dari kepanitaan persoalan perizinan rapat sudah tidak ada masalah lagi. Pada saat itu, Moehammad Yatim sampai di Simabur pukul 12.00. Oleh sebab itu, Moehammad Yatim turun tangan mengurus surat izin rapat tersebut dengan cara menemui kepala polisi dan selanjutnya kekantor camat. Di kantor camat, Moehammad Yatim menjelaskan tentang maksud dan tujuan

¹⁴⁷ *Ibid.*

Muhammadiyah termasuk agenda rapat yang akan dilaksanakan oleh Muhammadiyah Simabur. Pada pertemuan tersebut juga dihadirkan Buterpa. Akhirnya, camat dan Buterpa dapat memahami tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah sebenarnya, tidak seperti yang dipersepsikan oleh sebagian masyarakat bahwa Muhammadiyah adalah Masyumi. Kekhilafan pemerintah itu diakui oleh Tritunggal bahwa mereka selama ini menyamakan Muhammadiyah dengan Masyumi. Oleh karena itu, camat mengutus sendiri kepala polisi ke Batu Sangkar, menemui K.P Pos untuk meminta izin rapat. Surat izin diperoleh, rapat berlangsung dengan memuaskan malam itu juga.¹⁴⁸

Pulau Punjung

Dalam situasi sulit dan alat transportasi yang amat dan sangat terbatas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatra Barat di bawah kepemimpinan Moehammad Yatim terus melakukan konsolidasi kecabang-cabang terutama yang sudah ada sebelumnya. Meskipun menghadapi berbagai persoalan bukan hanya kelumpuhan secara keorganisasian, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa tokoh dan anggota yang dikunjungi maupun jiwanya sendiri. Akan tetapi, ia bertekad terus akan melakukannya apapun bentuk rintangan dan kesulitan tersebut. Selain cabang-cabang di atas, kecabangan Pulau Punjung menjadi perhatian dari Moehammad Yatim. Oleh karena daerah ini sangat strategis bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah sebelumnya sudah ada, tetapi berhubungan dengan adanya kejolak politik daerah dan pusat, cabang dan amal usaha banyak sudah tidak terurus karena ditinggalkan oleh pimpinannya. Sebagai daerah yang jauh jaraknya dari Solok, di mana K. P. Pos jauh, maka rapat baru bisa dilaksanakan, sesudah tiga hari.¹⁴⁹

Suliki Gunung Mas

Kesulitan yang sama dalam mengurus izin rapat Muhammadiyah tidak hanya dialami di cabang-cabang yang telah disebutkan di atas, tetapi juga dialami oleh kecabangan Muhammadiyah Suliki Gunung Mas. Di Suliki ini Muhammadiyah secara organisasi sebelumnya belum

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

ada, namun memiliki potensi untuk berkembang. Apalagi sejumlah tokoh sudah mewarisi corak pemahaman keagamaan yang modernis. Dalam hal itu, Moehammad Yatim mendorong berdirinya cabang di daerah tersebut. Hanya saja, proses perizinan untuk rapat dari pemerintah (Tritunggal) sangat dan amat susah didapatkan. Namun, proses itu dilalui dengan kesabaran sehingga izin yang dimaksud berhasil didapatkan setelah dua bulan Moehammad Yatim dan tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat mengurusnya secara langsung.¹⁵⁰

Kamang

Kesulitan dalam mengurus izin rapat juga dialami di Kamang, Agam. Selain prosedurnya yang berbelit-belit, secara politik tokoh-tokoh Muhammadiyah juga tidak diuntungkan dengan banyaknya para aktivis Muhammadiyah yang terlibat sebelumnya dengan Masyumi. Walaupun mereka tidak ikut mengungsi bersama dengan tokoh lainnya bergabung dengan PRRI.¹⁵¹

Lintau

Di daerah ini, perkembangan Muhammadiyah juga mendapat tantangan tidak hanya dari kelompok masyarakat yang masih antipati terhadap Muhammadiyah, tantangan lebih berat datang dari pemerintah nagari. Moehammad Yatim sendiri sebagai ketua Muhammadiyah Daerah, yang datang dari Padang untuk melangsungkan rapat Muhammadiyah dihalangi oleh pemerintah nagari. Caranya, tidak dengan langsung melarang rapat tersebut, tetapi dilakukan dengan cara mengkondisikan masyarakat untuk melakukan gotong royong. Moehammad Yatim dalam hal itu, mengungkapkan bahwa izin rapat sudah didapatkan dan sesuai jadwal yang sudah diagendakan oleh panitia rapat akan dilaksanakan pukul 09.00. Akan tetapi, saat rapat akan dimulai kepala nagari menugaskan tukang “canang”nya untuk memukul canang berkeliling nagari guna memerintahkan masyarakat melaksanakan gotong royong.

Oleh sebab itu, rapat terpaksa tidak jadi dilaksanakan. Dalam hal itu, terjadi perselisihan paham antara kepala nagari dengan

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Moehammad Yatim, Laporan...,*loc. cit.*

anggota Muhammadiyah. Wali nagari yang tetap bersikukuh dengan kekuasaannya. Pada masa itu diduga Muhammadiyah oleh kepala nagari bagian dari Masyumi. Dalam kondisi demikian, akhirnya dengan berat hati Moehammad Yatim terpaksa mengeluarkan surat Panglima III/17 Agustus sehingga membuat wali nagari melunak dan paham dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Setelah peristiwa tersebut, rapat Muhammadiyah baru bisa kembali dilaksanakan dengan baik.¹⁵²

Surian

Lebih keras lagi tantangan Muhammadiyah terjadi di Surian. Ketika Moehammad Yatim berkunjung untuk melaksanakan rapat, Tritunggal menolak dengan keras permintaan izin rapat tersebut bahkan jauh dari itu mereka menolak membangun Muhammadiyah dengan alasan rakyat menolak keberadaan Muhammadiyah di daerah ini. Dalam hal itu, Moehammad Yatim memperlihatkan dua surat persetujuan dari Panglima III/17 Agustus dan K.P. Kom. Komisariat di Padang tentang persetujuan normalisasi Muhammadiyah mewakili PP Muhammadiyah kepada tritunggal, tetapi mereka tetap tidak mau menerimanya. Sekembalinya di Padang Moehammad Yatim melaporkan peristiwa tersebut kepada K.P. Kom Komisariat Sumatra Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh K.P. Kom dengan pemberian izin langsung dari K.P. Kom. Komisariat Sumatra Barat. Pada saat K.P mendapat laporan dari Moehammad Yatim, K.P merasa dilecehkan oleh Tritunggal yang ada di Surian sehingga ia merasa tidak senang terhadap perlakuan mereka terhadap Muhammadiyah dan tidak menghargai surat persetujuan yang sudah dikeluarkannya. Dalam hal itu, K.P memberi izin untuk mengadakan rapat dan membangun Muhammadiyah atas nama Moehammad Yatim sendiri dan salinan surat izin pada K.P Res Solok dan K.P Sektor di Surian sehingga rapat dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.¹⁵³

Payakumbuh

Di Payakumbuh Muhammadiyah sudah resmi berdiri sejak 21

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

Desember 1928¹⁵⁴ dipelopori oleh H. Chatib, H. Budin, H. Dawaher dan Dt. Manggung Padang. Semua tokoh ini berasal dari Nagari Kubang dan bahkan termasuk ninik mamak, tetapi tidak termasuk ke dalam kepengurusan Kerapatan Nagari Kubang. Di sini Muhammadiyah berkembang dengan baik termasuk amal usahanya terutama lembaga pendidikan meskipun menghadapi tantangan yang berat dan bertubi-tubi dari berbagai pihak berupa tekanan dan intimidasi. Tekanan tersebut bukan hanya berasal dari kelompok masyarakat yang antipati terhadap pergerakan Muhammadiyah, tetapi juga datang dari pemerintah nagari bahkan dengan kerapatan nagari. Pada masa pasca PRRI Pimpinan Muhammadiyah dituduh sebagai anggota partai Permi¹⁵⁵ dan berbagai alasan lainnya. Alasan itu dimaksudkan agar Muhammadiyah tidak berkembang dan harus dibubarkan dari daerah ini.

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah sempat dilarang oleh pihak pemerintah nagari termasuk menutup lembaga pendidikan yang didirikannya. Peristiwa itu dialami misalnya, oleh ranting Muhammadiyah Kubang. Namun, tekanan itu memiliki hikmah di mana pemerintah kolonial menyarankan agar Pengurus Besar Muhammadiyah membentuk konsul untuk perpanjangan tangan kedaerah-daerah dan akhirnya menjadi salah satu putusan kongres ke-19 di Minangkabau.¹⁵⁶ Bagi pemerintah pembentukan konsul tersebut dapat diharapkan sebagai upaya untuk pelunakan model gerakan Muhammadiyah di Minangkabau sebagaimana halnya yang sedang jalan di Jawa. Oleh karena Muhammadiyah dalam opini yang berkembang terutama di kalangan pemerintah kolonial bahwa pergerakan Muhammadiyah Minangkabau lebih menonjol kepada pergerakan politik bukan seperti Muhammadiyah yang ada di Jawa. Berbeda dengan Muhammadiyah di Jawa, gerakannya lebih banyak pada pendekatan kultural. Pada sisi itu, pemerintah pusat memerintahkan kepada gubernur agar membangun hubungan baik dengan Muhammadiyah dengan harapan bahwa yang bisa

¹⁵⁴ Mailraport, 538x/30.

¹⁵⁵ Moehammad Yatim, Laporan..., *loc. cit.*

¹⁵⁶ Mailraport, 538x/30.

mengimbangi gerakan Permi hanyalah Muhammadiyah. Dalam pandangan pemerintah, Permi merupakan gerakan politik yang keras dan harus diawasi secara ketat. Kemudian anggotanya sulit di kendalikan dan bahkan bisa lebih liar.

Muhammadiyah di Kubang mulai tumbuh sejak 1928. Berawal dari anggota “persarikatan pemusyawaratan” yang terdiri dari beberapa orang ulama, penghulu dan cadiak pandai.¹⁵⁷ Kemudian kebanyakan dari anggota persarikatan ini meleburkan diri menjadi Muhammadiyah seiring dengan diterimanya Muhammadiyah sebagai organisasi pergerakan. Hampir sama dengan perkembangan Muhammadiyah di Sungai Batang dan beberapa organisasi yang dibentuk oleh para perantau Minang seperti Pakih Hasyim di Surabaya dan Dt. Barena di Pekalongan. Pada mulanya didirikan organisasi yang sifatnya terbatas, tetapi dilebur menjadi Muhammadiyah karena memiliki corak pemikiran yang sama terutama berkaitan dengan corak paham keagamaan. Hanya saja, tatanan organisasi lokal ini sebelum Muhammadiyah didirikan secara resmi dilanda konflik dengan kerapatan nagari. Dalam ordonansi nagari 1914 pengulu dibagi kepada dua bentuk, yaitu penghulu yang berada di kerapatan nagari dan penghulu rendah. Penghulu yang berada di Kerapatan Nagari merasa memiliki *power* lebih dibandingkan dengan penghulu rendah yang berada pada pemusyawaratan permufakatan. Sedangkan penghulu rendah tidak memiliki tempat dan kekuasaan di nagari. Umumnya yang menjadi penggerak Muhammadiyah adalah para penghulu yang tidak termasuk ke dalam kerapatan nagari dengan dibantu oleh para pedagang. Pada 1928 para penghulu tersebut berusaha

¹⁵⁷ Karakter dan tatanan sosial masyarakat Minangkabau pada masa pemerintah kolonial diupayakan untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kolonialisasi. Salah satu tatanan dimaksud di antaranya Kerapatan Nagari. Dalam sistem pemerintahan nagari, penghulu menjadi pemimpin secara kolektif. Sistem ini oleh pemerintah kolonial diubah menjadi dua bentuk, di mana salah satu dari penghulu yang tergabung dalam kerapatan nagari tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai kepala nagari (*nagarihoofd*). Pola ini diciptakan selain untuk efektivitas pengendalian elite nagari oleh pemerintah, juga digunakan untuk memecah konsentrasi penghulu yang ada di kerapatan nagari. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan ordonansi nagari 1914. Oleh sebab itu, Menurut Ordonansi Nagari 1914, penghulu inti

untuk mendirikan sekolah yatim dan disetujui oleh kerapatan nagari.¹⁵⁸

Perselisihan terjadi bermula dari intensifnya para penghulu yang tidak tergabung dalam kerapatan nagari dalam menggerakkan Muhammadiyah pada masyarakat terutama setelah keluarnya Ordonansi Guru akhir tahun 1928.¹⁵⁹ Perkembangan dan pengaruh Muhammadiyah dengan 'Aisyiyahnya semakin kuat di Kubang, sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak kerapatan nagari. Oleh sebab itu, pada 9 Januari 1929 kerapatan nagari mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan penyelenggaraan rapat dan pengajian agama yang disampaikan dan didukung oleh organisasi yang mendukung dari luar tanpa terlebih dahulu persetujuan dari kekuasaan nagari.¹⁶⁰ Faktor lain adalah daya kritis para penghulu tersebut dalam menyikapi berbagai kebijakan dan sikap penguasa nagari. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap mereka semakin kuat dari masyarakat ketimbang penghulu yang berada di kerapatan nagari. Tambah lagi, sikap dari para penghulu kerapatan nagari lebih cenderung tidak memperjuangkan kehidupan masyarakatnya. Mereka lebih banyak mengambil sikap bungkam dan bahkan menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan kepentingannya kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan organisasi perserikatan lebih memiliki jaringan dan pengaruh yang jauh lebih kuat daripada penghulu yang berada di kerapatan nagari. Sejalan dengan itu, organisasi ini terbilang aktif dalam merespons berbagai hal yang berkembang di tengah masyarakat termasuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat yang terasa dirugikan oleh aturan tersebut. Tokoh-tokoh yang dimaksud antara lain H. Chatib, H. Dawaher. Dt. Manggung Padang, Dt. Singo Marapi dan Dt. Muhammad Kayo.¹⁶¹ Kesemuanya selain ulama, sekaligus sebagai ninik mamak dikaumnya, namun tidak termasuk ke dalam anggota Kerapatan

¹⁵⁸ Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik; Gerakan Kaum Muda...*, *op.cit*, hlm. 138.

¹⁵⁹ Siska Okvatningsih, *"Dari Asas Tunggal ke Asas Islam" Organisasi Aisyiyah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Payakumbuh (1985-2000)*, hlm. 29.

¹⁶⁰ Aqib Suminto, hlm. 195.

¹⁶¹ Mailraport, 538x/30 dan Mailraport, 1233x/30.

Nagari Kubang. Para pendiri organisasi lokal ini pernah belajar secara intensif di Darul Funun Abbsiyah di Padang Panjang.¹⁶² Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah pergerakan pembaruan pemikiran Islam di Minangkabau, lembaga pendidikan ini termasuk bagian terpenting dari basis pembaruan Islam. Organisasi yang mereka dirikan tersebut bergerak dibidang pendidikan, sosial dan agama. Tentunya, hal ini memiliki kesamaan dalam pergerakan dengan Muhammadiyah. Secara nyata memang dalam gerakannya pernah mendirikan sekolah yatim dan tempat-tempat ibadah. Dalam Muhammadiyah hal ini lebih populer disebut dengan amal usaha. Kesemua lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah yang didirikannya itu nyaris setelah bergabung didaftarkan menjadi aset dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam catatan sejarah, pada saat kongres ke-19 di Bukittinggi aset ini dicatatkan sebagai asetnya Muhammadiyah.

Awalnya, perserikatan permusyawaratan ini memiliki hubungan baik dengan kerapatan nagari, tetapi dalam perjalanannya mengalami ketegangan dan konflik yang tidak terselesaikan. Situasi ini berpengaruh besar terhadap perjalanan dan perkembangan Muhammadiyah. Hubungan baik itu, ditandai dengan persetujuan kerapatan nagari terhadap pendirian sekolah yatim yang didirikan oleh organisasi tersebut. Jauh dari itu, sekolah ini dinyatakan sebagai sekolah milik nagari. Murid pertamanya berjumlah 22 orang yang diasuh oleh Darmawi dari Kubang sendiri.¹⁶³ Menjelang terbangunnya gedung sekolah yang baru, proses belajar mengajarnya dilaksanakan pada sore harinya dengan menempati sekolah yang dipinjam dari sekolah nagari. Selain mendirikan sekolah, perserikatan ini juga giat membangun tempat-tempat ibadah. Dengan begitu, sifat gerakan perserikatan ini nyaris sama betul dengan pola yang dibangun oleh Muhammadiyah sendiri. Samanya pola gerakan tersebut tentunya tidak mengherankan karena beberapa tokoh yang terdapat di dalamnya sudah ada yang lebih duluan menjadi penggerak Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang dimaksudnya, di antaranya H. Chatib, H. Budin, H. Dawaher dan Dt.

¹⁶² Rida Anita, *Organisasi Muhammadiyah Cabang Kubang (1929-1965)*, Skripsi (Payakumbuh: STKIP, 2009), hlm. 24.

¹⁶³ Mailraport, 538x/30.

Manggung Padang.

Muhammadiyah masuk ke Kubang adalah melalui tokoh-tokoh tersebut dengan basis utama pengembangannya pada organisasi perserikatan itu. Hal itu, ditandai dengan fakta sejarah bahwa semua para pendiri dan yang bergabung dalam organisasi lokal tersebut bersepakat mengubahnya menjadi Muhammadiyah meskipun terdapat hubungan kurang baik dengan kerapatan nagari. Akan tetapi, hal ini menjadi *starting poin* bagi diterimanya Muhammadiyah secara luas oleh masyarakat setempat. Ketegangan itu, dimulai dari sikap dan pemikiran yang kritis dari tokoh-tokoh yang aktif di perserikatan terutama berkaitan dengan isu-isu strategis yang mengatur tentang kehidupan orang banyak. Kadangkala diskusi-diskusi aktual itu melibatkan masyarakat luas. Kultur ini nyaris tidak dimiliki oleh kerapatan nagari. Meskipun secara normatif kerapatan nagari lah yang mestinya melakukan hal itu. Akan tetapi, nyaris tidak pernah terjadi. Melihat pengaruh dari organisasi ini semakin kuat, kadang membuat kerapatan nagari kelabakan dan “kebakaran jenggot”. Akibatnya, di kalangan anggota kerapatan nagari ada yang berfikir bahwa tindakan dan gerakan perserikatan itu menjatuhkan posisi dan wibawa kerapatan nagari di mata masyarakat. Sedangkan bagi penghulu yang tidak termasuk ke dalam kerapatan nagari sendiri sesungguhnya dijadikan sebagai momentum untuk menunjukkan eksistensinya dimata masyarakat yang selama ini terasa tersisihkan dalam hak dan tanggung jawabnya terhadap nagari.

Pemikiran kritis yang terbangun itu, nyaris tidak dimiliki dalam kerapatan nagari. Walaupun secara idealnya kerapatan nagari ini berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terugikan oleh pemerintah karena yang menjadi korbannya adalah anak dan kemenakan masing-masing para ninik mamak. Begitu pula dalam hal, pencerdasan kehidupan masyarakat, mestinya menjadi tanggung jawab kerapatan nagari dalam memperjuangkannya kepada pemerintah termasuk memobilisasi masyarakat untuk itu. Akan tetapi, keadaan demikian tidak terjadi. Oleh sebab itu, fungsi dan peran itu dimainkan oleh perserikatan ini. Hal itulah yang menyebabkan pengaruh perserikatan ini lebih kuat dimasyarakat daripada kerapatan nagari sendiri. Apalagi

diskusi-diskusi yang dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat nyaris tidak pernah dilakukan oleh kerapatan nagari. Dalam hal itu, diperankan oleh organisasi perserikatan.

Ketegangan itu semakin menguat ketika perserikatan melaksanakan rapat pada bulan Oktober 1928. Dalam catatan sejarahnya, organisasi ini melaksanakan rapat pada bulan tersebut selama dua kali membahas tentang peraturan pemerintah tentang pencegahan kebakaran. Akan tetapi, rapat itu tidak menghadirkan pihak kerapatan nagari. Pertemuan tersebut umumnya dihadiri oleh para penghulu yang menjadi anggota Muhammadiyah sekitar 10 orang dari 88 orang penghulu yang terdapat pada nagari Kubang.¹⁶⁴ Konflik dan ketegangan ini terus berlanjut hingga organisasi lokal ini benar-benar menjadi basis gerakan Muhammadiyah. Pada saat itu, tabligh-tabligh Muhammadiyah bergerak secara inovatif dan masif sehingga menambah kekhawatiran dan kecurigaan kerapatan nagari. Keadaan demikian, berujung pada pembubaran dan pelarangan Muhammadiyah di daerah tersebut. Selain sikap ketidaksenangan kerapatan nagari terhadap Muhammadiyah semakin tampak saat dilaksanakan rapat perserikatan dua kali selama bulan Oktober. Meskipun terjadi ketegangan dan konflik antara kedua belah pihak, Muhammadiyah tidak terpengaruh betul terhadap keadaan demikian. Muhammadiyah secara masif terus bergerak mengembangkan pengaruhnya di nagari Kubang. Hal ini semakin mengkhawatirkan dan meresahkan pihak kerapatan nagari hingga munculnya beberapa surat keputusan yang diamatkan kepada Muhammadiyah. Hampir semua surat tersebut bermuara pada pelarangan dan menghambat laju-gerak Muhammadiyah. Ketegangan kerapatan nagari dengan Muhammadiyah, selain sudah dimulainya dari perserikatan, kemungkinan lain disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya;

Muhammadiyah dinilai mengambil alih hak dan tanggung jawab kerapatan nagari

Faktor ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh pendirian sekolah yatim oleh Muhammadiyah sebagai kelanjutan dari sekolah yatim

¹⁶⁴ *Ibid.*

yang sudah lebih dahulu dirintis oleh perserikatan. Bagi Muhammadiyah sendiri pendirian sekolah atau dalam bentuk amal usaha lainnya menjadi pemenuhan dari persyaratan berdirinya sebuah ranting atau cabang. Meskipun Muhammadiyah di Kubang belum berdiri secara resmi, tetapi pergerakannya sudah menyentuh denyut kehidupan masyarakat dan pengaruhnya sudah semakin kuat. Tema-tema pokok yang diusung oleh gerakan Muhammadiyah menjadi isu aktual bagi kehidupan masyarakat Kubang terutama setelah para mubaligh dan ulama Muhammadiyah bergerak secara aktif dalam tabligh terutama pada tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh perserikatan.

Muhammadiyah pada mulanya sudah mulai merencanakan pembangunan sekolah yatim sejak bulan Oktober 1929. Rencana pembangunan tersebut dapat dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak. Salah satu dukungan nyata adalah pemberian bahan-bahan bangunan yang diberikan oleh masyarakat Kubang dan pemberian wakaf oleh salah seorang masyarakat.

Menurut Masrul Dt. Rajo Nan Godang, sebagaimana dikutip Rida Anita bahwa bahan bangunan diberikan oleh masyarakat dari bahan yang direncanakan untuk pembangunan pemondokan bagi 18 orang anak Kubang yang sedang belajar di Parabek. Pemondokan tersebut gagal dibangun karena Parabek sendiri pindah ke Bukittiggi.¹⁶⁵ Sedangkan lokasi lahan pembangunannya dilaksanakan pada tanah yang diwakafkan oleh warga sejumlah 16 meter panjang, 10 meter lebar.¹⁶⁶ Oleh karena lokasi dan bahannya sudah tersedia, maka pekerjaan membangun segera dimulai. Dalam proses pembangunan itu, kerapatan nagari mempersoalkannya dengan menyatakan bahwa tindakan Muhammadiyah ini dipandang telah mengambil hak dan wewenang dari kerapatan nagari.¹⁶⁷ Sebab, penyediaan dan pembangunan sekolah yatim merupakan tanggung jawab dari kerapatan nagari bukan oleh Muhammadiyah. Meskipun dalam kenyataannya belum pernah itu terjadi sebelum digagas oleh

¹⁶⁵ Rida Anita, *op. cit.* 26.

¹⁶⁶ JGF. Sartorius, *Keterangan Ringkas dari Sekolah Yatim Kubang*, Mailraport, 538x/30.

¹⁶⁷ Mailraport, 538x/30.

organisasi perserikatan yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Dalam pada itu, para penghulu yang mendukung gerakan Muhammadiyah memandang bahwa persoalan pembangunan sekolah yatim bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kerapatan nagari karena lokasinya berada di Koto Baru. Dalam hal itu, kewenangan dan tanggung jawab penyelesaiannya berada di tangan para penghulu-penghulu yang ada pada Koto Baru.¹⁶⁸

Suasana ini membuat hubungan ninik mamak yang menggerakkan pembangunan sekolah yatim dengan kerapatan nagari semakin tegang. Ninik yang menggerakkan tersebut tentunya notebenanya adalah anggota perserikatan yang sudah bergabung dengan Muhammadiyah. Akan halnya, terjadi hubungan yang tidak baik antara kedua belah pihak membuat pembangunan tersebut tidak disetujui oleh kerapatan nagari. Namun demikian, pembangunan yang sudah direncanakan itu tetap jalan sampai selesai pada 1930 meskipun dipersoalkan oleh kerapatan nagari. Setelah pembangunan fisik selesai, sebelum digunakan untuk proses belajar mengajar panitia merencanakan akan diadakan acara khusus untuk meresmikannya. Pada perencanaan awal kegiatan dimaksud dilaksanakan selama tiga hari, yaitu 13-16 Januari 1930. Tentunya, acara tersebut didesain menjadi besar untuk tingkat nagari karena gedung fasilitas yang bersifat umum baru ada di nagari tersebut. Tambah lagi bahwa sekolah yatim adalah satu-satunya ada di nagari Kubang dan sekitarnya. Tentunya, sekolah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kubang utamanya Koto Baru. Acara itu direncanakan juga sekaligus dimanfaatkan untuk penggalangan dana untuk melanjutkan pembangunan.

Acara peresmian ini akhirnya juga kembali dipersoalkan oleh kerapatan nagari hingga ketegangan tidak dapat hindari. Dalam undangan yang ditandatangani oleh 29 orang anggota perserikatan, tidak satupun yang mengatasnamakan kerapatan nagari. Oleh sebab itu, kerapatan nagari merasa terhina karena tanpa dibawa serta panitia peresmian. Begitu pun dalam acara dimaksud, ninik mamak yang menjadi anggota kerapatan nagari tidak diperlakukan sebagai tamu melainkan sebagaimana halnya undangan yang lain. Kemudian peristiwa

¹⁶⁸ Abd. Rahman, dalam Rida Anita, *op. cit.*, hlm. 27.

ini memicu berkumpulnya 14 orang anggota kerapatan nagari dan menghadap kepada *controleur* pada 29 Januari 1930 guna melaporkan peristiwa tersebut. Bukan hanya itu yang dipersoalkan oleh kerapatan nagari juga gerakan mengumpulkan beras, kelapa dan uang dari anggota masyarakat. Dalam laporannya itu diungkapkan bahwa perserikatan dan Muhammadiyah telah melakukan tindakan di nagari yang tidak terlebih dahulu bermusyawarah dengan kerapatan nagari. Atas kejadian tersebut perserikatan dan Muhammadiyah dipandang tidak lagi menghormati bahkan mereka dipandang telah melakukan “pengangkatan’ terhadap peran dan fungsi kerapatan nagari. Oleh sebab itu, kerapatan nagari meminta kepada JBF. Sartorius, penguasa *controleur* agar menutup sekolah yatim tersebut.¹⁶⁹ Akan tetapi, permintaan itu tidak dikabulkan oleh *controleur* justru pihak kerapatan nagari disarankan agar persoalan tersebut dinetralisir dan diselesaikan secara internal nagari.

Selanjutnya, ketika kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi, H. Chatib, sebagai bendahara cabang Muhammadiyah Payakumbuh berhasil membawa “Perserikatan Permusyawaratan” ikut menjadi peserta dan sekaligus menyepakati organisasi lokal ini dibubarkan oleh para penggagas dan pendirinya, kemudian secara resmi bergabung dengan Muhammadiyah. Saat itulah perserikatan tersebut membubarkan diri sendiri dan berubah nama menjadi Muhammadiyah. Hal ini menjadi sejarah baru pula sebagai tonggak berdirinya Muhammadiyah di Kubang. Peristiwa demikian terjadi pada 28 Maret 1930.¹⁷⁰ Sebelumnya, menurut Rosna Djanin sebagaimana dikutip Siska Okvatningsih sudah berdiri pula ‘Aisyiyah sebagai gerakan bagi perempuan, tepatnya pada 25 Februari 1930 yang dipelopori oleh Fatimah Luis, istri dari H. Khatib.¹⁷¹ ‘Aisyiyah menjadi sangat penting dalam pergerakan Muhammadiyah. Apalagi mengorganisir kaum ibu untuk melakukan pengajian, ‘Aisyiyah melakukannya *door to door* mengunjungi masyarakat. Selain bentuk pengajian, pendirian sekolah yatim bersama dengan Muhammadiyah menjadi bagian yang terpenting

¹⁶⁹ *Kebulatan Kerapatan Nagari Kubang*, No. 19, 10 April 1930, dalam *Mailraport*, 538x/30.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Siska Okvatningsih, *op. cit.*, hlm. 27.

dari irama pergerakan 'Aisyiyah di Kubang ini.

Peleburan persarekatan pemusyawaratan menjadi Muhammadiyah ini untuk kesekian kalinya, membuat kerapatan nagari semakin "kebakaran jenggot" dan "hilang akal" dalam membatasi ruang gerak dan menghalangi agar Muhammadiyah tidak masuk ke Kubang. Situasi itu, semakin membuat kerapatan nagari tidak dapat lagi menahan kemarahannya terhadap perserikatan yang sudah dilebur menjadi Muhammadiyah. Dalam pandangan mereka, senjata ampuh yang akan memabat Muhammadiyah adalah dengan memanfaatkan pendekatan kekuasaan berupa penghentian semua aktivitas Muhammadiyah baik dalam bentuk organisasi maupun amal usaha. Tindakan itu di antaranya melarang para ulama dan mubaligh Muhammadiyah menjadi khatib Jum'at serta memanggil satu persatu warga yang sudah ikut bergabung. Mereka diperintahkan untuk keluar dan meninggalkan Muhammadiyah. Meskipun larangan dan perintah tersebut sulit untuk didengar oleh masyarakat, tetapi yang terjadi adalah semakin menguatnya arus gerakan Muhammadiyah. Para aktivis yang dipanggil tersebut justru semakin kokoh dan kukuh dalam mempertahankannya. Senjata kerapatan nagari tersebut, antara lain dengan mengeluarkan surat keputusan yang berisi ancaman kepada warga yang ikut dalam Muhammadiyah. Isi surat tersebut antara lain mengungkapkan bahwa

Menyamboeng keboelatan kerapatan jang terseboet, kalau anak boeah atau penghoeloe jang bersalah menoeroet boeni keboelatan kerapatan itoe dihoekoem sepadjang adat kalau anak boeah salah keninik mamak (penghoeloe) kalau penghoeloe salah ke moefakat, kalau tidak maoe menerima hoekoeman itoe diboeang sepadjang adat tidak di bawah sehilir semoedik sahoetang saphoetang kok doedoek tidak samo rendah, kok tagak tidak samo tinggi di dalam nan sepadjang adat. Kalau anak boeah jang djadi Imam, Bilal, Chatib dan Hakim ajarak jang bersalah itoe diperhentikan dari djabatannya diganti orang lain.¹⁷²

Selanjutnya, kebulatan kerapatan nagari tersebut menyatakan bahwa

Sekarang anak boeah di Koebang soedah adakan perkoempoelan enz: Moehammadijah, Asjiah, HW dan sekolah Jatim Moehammadijah. Perbuatan ini sekali-sekali tidak mintak idzin dan memberi tahoe

¹⁷² *Ibid.*

pada ninik mamak (penghoeloe) berdjandjang naik bertanggo toeroen seperti dimaksoed keboelatan kerapatan jang terseboet di bawah ini:

1. Dihoekoem sependjang adat kalau anak boeah atau penghoeloe jang bersalah itoe.
2. Karena perbuatan anak boeh itoe meroesakan adat istiadat Minangkabau, kok kemenakan tidak seperintah mamak, anak boeah tidak seperintah penghoeloe, pai tidak bertanja poelang tidak babarito lagi.¹⁷³

Kutipan isi surat kerapatan nagari yang dibuat pada 10 April 1930 tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah dipandang merusak adat. Oleh sebab itu, para penggerak dan pegiat Muhammadiyah yang terdiri dari para penghulu dan kemenakan para ninik mamak mereka diancam dengan hukuman berupa dibuang sepanjang adat. Dalam pergaulan sosial mereka disisihkan dari masyarakat. Namun, ancaman tersebut tidak menghalangi perkembangan Muhammadiyah. Para pegiatnya terus jalan mengembangkan sayap Muhammadiyah, bahkan semakin mereka ditekan, kekuatannya semakin bertambah dan kuat. Oleh karena semangat jihad yang sudah tertanam di dalam dirinya masing-masing. Apalagi, dalam pandangan mereka bahwa menghidupkan dan mengembangkan Muhammadiyah berarti meghidupkan dan mengembangkan Islam. Dalam hal itu mereka tetap konsisten, bertahan dan terus menyebarkannya. Setelah surat tersebut dikeluarkan oleh Kerapatan Nagari Kubang, kepala nagari, Dt. Tanjoeng Ameh memanggil Dt. Manggung Padang, Dt. Indomo dan Ahmad Khatib guna meminta klarifikasi sekaligus memerintahkan agar meninggalkan Muhammadiyah dan menutup sekolah yatim yang telah diresmikan tersebut.

Dalam pada itu, Pimpinan Cabang Payakumbuh mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan ranting Muhammadiyah Kubang secara resmi. Melalui surat cabang Payakumbuh pada 12 April 1930 didapatkan informasi bahwa susunan pimpinan ranting tersebut terdiri dari ketua H. Zulkarnain, Wakil Ketua H. Zawaher, Sekerataris satu H. Chatib, sekretaris dua H. Salauddin dan keuangan

¹⁷³ *Ibid.*

Dt. Singo Marapi.¹⁷⁴

Meskipun ranting tersebut sudah resmi berdiri melalui surat keputusan pimpinan cabang Payakumbuh, namun pihak kerapatan nagari masih tetap saja tidak mengakui keberadaan Muhammadiyah. Dalam hal itu, kerapatan nagari berupaya dengan berbagai cara agar Muhammadiyah tidak ada di Kubang. Pada konteks demikian, kerapatan nagari kembali mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Muhammadiyah, sekolah yatim dan kursus-kursus harus dibubarkan dan ditutup karena belum ada izin dari para penghulu yang tergabung di dalam kerapatan nagari. Menurut Rosma Djanin sebagaimana dikutip Rida Anita bahwa dengan keluarnya surat keputusan tersebut Muhammadiyah menjadi terpukul.¹⁷⁵

Corak pemahaman keagamaan yang berbeda

Munculnya ulama Muhammadiyah di dalam memberikan tabligh juga dipersoalkan oleh kerapatan nagari. Bahkan secara terang-terangan H. Noerdin Penning dan Islami, sehari-hari berperan sebagai bilal di masjid nagari diperintahkan berhenti dan keluar dari Muhammadiyah. Namun, keduanya tidak mempedulikan terhadap perintah kerapatan nagari hingga betul-betul diberhentikan dari jabatan bilal.¹⁷⁶Tambah lagi ketidaksenangan kerapatan nagari yang disebabkan corak paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah berbeda dengan *mainstream* praktik keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota kerapatan nagari dan masyarakat umumnya seperti soal upacara kematian dan maulid nabi. Hal ini, dipandang telah melanggar adat dan kebiasaan yang ada pada nagari. Bukan hanya melanggar tetapi disebutkan merusak tatanan adat di Minangkabau.

Dalam usahanya memurnikan ajaran Islam tabligh Muhammadiyah Kubang bergerak dalam menghilangkan; *Pertama*, menuju bulan, yaitu selamatan bagi perempuan yang umur kehamilannya sudah mencapai tujuh bulan dengan maksud mendoakan bagi keselamatan bagi si bayi yang berada dalam kandungan ibu. Prosesi upacara

¹⁷⁴ Mailraport, 538x/30.

¹⁷⁵ Rida Anita, *op. cit.*, hlm. 39.

¹⁷⁶ Mailraport, 538x/30.

tersebut dalam pandangan tablig Muhammadiyah jauh dari ajaran Islam bahkan masuk ke dalam kategori berlebihan. Dalam istilah agama disebut mubazir. Perbuatan ini dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang mesti dijauhi oleh umat Islam. *Kedua*, selamat dan upacara penghormatan yang berlebihan terhadap Syekh Abdul Kadir Jaelani. Sehingga menjebak diri ke dalam perbuatan yang dilarang syara' berupa kesyirikan. *Ketiga*, khaul, yaitu; menziarahi kuburan orang-orang tertentu yang dipandang memiliki kelebihan atau keistimewaan utamanya kuburan orang yang dianggap keramat. Di sana mereka memohonkan rezeki, keselamatan, jodoh dan lain-lain. Ziarah yang dimaksud dilaksanakan dalam waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Pada hal di dalam Islam ziarah itu boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan waktu tertentu. Pada waktu tiba dikuburan umat Islam disyari'atkan untuk mendo'akan orang yang berada dikuburan supaya diampuni dosanya, dilampirkan kuburannya dan diterima disisi-Nya. Kemudian tidak dibolehkan memberikan sesajian dikuburan. Kebalikan dari itu, dalam praktiknya kuburan dijadikan sebagai tempat untuk meminta dengan memberikan sesajian dengan kepercayaan permintaan tersebut dapat dikabulkan. *Keempat*, prosesi yasinan dan zikir yang hanya dilaksanakan khusus pada hari Jum'at. Membaca Al-Qur'an dan berzikir dalam Islam tidak mesti surat yasinan berketerusan karena banyak ayat-ayat lain selain surat Yasin untuk dijadikan petunjuk dalam berbagai hal kehidupan. Oleh sebab itu, waktunya tidak terbatas pada hari Jum'at semata melainkan berlaku sepanjang hari. Kemudian Al-Qur'an pewahyuannya ditujukan kepada orang yang masih hidup bukan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bagi orang yang ditinggalkan oleh si mayit diharapkan menjadi pembelajaran bahwa mereka semua juga akan meninggal. *Kelima*, tahlilan dan shalawatan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh dan seterusnya. Perbuatan yang sama juga berlaku bagi tahlil, shalawat tidak mesti diwiridkan membacara ketika ada orang meninggal terbatas pada hari-hari tertentu seperti tiga, tujuh, empat belas hari dan seterusnya dari kematian si mayit. Do'a kepada simayit dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja terutama bagi anak-anak tanpa terbatas pada hari-hari tersebut. Bahkan dalam

pelaksanaannya terjadi perbuatan yang berlebihan dan kadang menyulitkan pihak keluarga yang ditinggalkan. Dalam praktiknya ada yang hutang-hutangi dan bahkan sampai menggadaikan sawah dan ladang kepada pihak lain guna melaksanakan prosesi tersebut. Melihat keadaan itu, Muhammadiyah memandang perbuatan tersebut bukan berasal dari ajaran Islam tetapi hanya kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, perbuatan dimaksud harus diluruskan. *Keenam*, mengadu kerbau, meminum tuak yang sudah dicampur dengan darah kerbau, perang batu di antara suku, kampung dengan kampung atau nagari dengan nagari.

Kecurigaan terhadap Muhammadiyah

Pasca terjadinya pemberontakan 1927 di Silungkang yang ditunggangi oleh komunis, membawa pengaruh dan trauma yang mendalam bagi nagari-nagari di Minangkabau termasuk bagi nagari Kubang. Sebab, setelah pemberontakan tersebut pemerintah kolonial bersikap represif sehingga banyak masyarakat yang terkena getahnya dan mengalami ketakutan. Sejak itu pula terjadi pengetatan dan pembatasan terhadap gerakan organisasi bahkan untuk melaksanakan rapat-rapat harus terlebih dahulu minta izin kepada pejabat yang berwenang. Kebijakan politik pemerintah ini memengaruhi pola dipemerintahan nagari termasuk dikerapatan nagari. Begitu pula antara masyarakat, satu sama lain saling curiga dan tidak mempercayai. Akibatnya, muncul ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat di nagari sendiri. Dalam hal itu, kerapatan nagari membatasi gerak dan langkah masyarakat terutama karena kecurigaan yang mendalam terhadap gerakan komunis.

Tambah lagi dalam kenyataannya pergerakan yang selama ini berkembang dan masuk ke nagari Kubang selalu membawa simbol-simbol Islam seperti Sarekat Islam, Permi dan termasuk komunis pada awalnya juga membawa-bawa ajaran Islam. Yang disebutkan terakhir pada mulanya merupakan guru agama pada madrasah kenamaan, mereka menafsirkan ayat-ayat yang sejalan dengan misi yang mereka bawa sehingga masyarakat yang tidak jeli mencermatinya dapat dengan mudah menerimanya. Hal itulah yang terjadi dinagari-nagari hingga banyak masyarakat yang terkena pengaruh dan getahnya. Akibat dari

pemberontakan Silungkang tersebut banyak di antara masyarakat yang ditangkap karena dicurigai terlibat dalam gerakan komunis. Kerapatan nagari dalam hal itu, memang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kestabilan nagari serta melakukan pengawasan terhadap pengaruh luar terutama dari penyusupan komunis.

Masuknya Muhammadiyah sejak dari awal sudah dicurigai dan tidak disukai oleh pihak kerapatan nagari. Hal itu terlihat dari surat keputusan yang ditandatangani pada 9 Januari 1929 yang isinya melarang orang luar Kubang melakukan tabligh di nagari Kubang termasuk kegiatan-kegiatan organisasi. Kalaupun hal itu dilakukan surat tersebut menghendaki mesti ada terlebih dahulu izin dari ninik mamak dalam nagari tersebut. Selanjutnya, ninik mamak memberitahukan kepada kepala negeri dan kepala negeri harus pula memberitahukan kepada *onderdistrictshoofd*. Selanjutnya dalam surat tersebut secara gamblang dinyatakan bahwa

Kerapatan negeri Koebang mempermakloemkan sesoedah bermoeafakat dalam negeri itoe, dengan orang jang patoet sepanjang adat...

Loer dari orang nagari Koebang dan djoega apa2 jang diperboeat dari sjarikat2 enz: moesti setahoe dari ninik mamak dalam negeri itoe dan ninik mamak memberi tahoe poela pada kepala negeri, kepala negeri memberi tahoe poela pada odendistrictshoofd, artinya berdjanjang bertangga toeroen.¹⁷⁷

Kecurigaan ini terus berlanjut dan mengalami hubungan yang tidak harmonis sehingga keadaannya semakin runyam dan tajam. Jauh dari itu, kerapatan nagari mengancam akan membubarkan Muhammadiyah dan anggotanya akan diberikan sanksi berupa dibuang sepanjang adat. Ancaman hukuman tersebut dituangkan dalam surat kerapatan nagari Nomor: 19 tanggal 10 April 1930.¹⁷⁸ Secara nyata, para datuk-datuk yang termasuk ke dalam anggota kerapatan nagari sudah sepakat menyatakan bahwa bagi yang terlibat dalam keagggotaan Muhammadiyah dihukum sepanjang adat karena dinilai sudah melanggar adat di mana pendirian Muhammadiyah, 'Aisyiyah,

¹⁷⁷ Mailraport, 538x/30 dan Mailraport, 1233x/30.

¹⁷⁸ Mailraport, 1233x/30.

HW dan sekolah anak Yatim Muhammadiyah tidak minta izin dan memberi tahukan kepada ninik mamak (penghulu) dalam pepatah adat disebut dengan berjanjang naik bertanggung turun. Selain itu, hukuman tersebut juga disebabkan karena dipandang telah merusak adat istiadat Minangkabau, di mana kemenakan tidak seperintah mamak, anak buah tidak seperintah penghulu, pergi tidak tempat bertanya pulang tidak berberita lagi.

Dalam surat tersebut secara nyata ditegaskan bahwa

Menyamboeng keboelatan kerapatan jang terseboet, kalau anak boeah atau penghoeloe jang bersalah menoeroet boeni keboelatan karapatan itoe dihoekoem sepanjang adat kalau anak boeah salah keninik mamak (penghoeloe) kalau penghoeloe salah ke moefakat, kalau tidak maoe menerima hoekoeman itoe diboeang sepanjang adat tidak di bawah sehilir semoedik sahoetang sapihoetang kok doedoek tidak samo rendah, kok tagak tidak samo tinggi di dalam nan sepadjang adat. Kalau anak boeah jang djadi Imam, Bilal, Chatib dan Hakim ajarak jang bersalah itoe diperhentikan dari djabatannya diganti orang lain.¹⁷⁹

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kerapatan nagari menjelaskan sikap para penghulu yang menjadi anggota kerapatan nagari, di mana masyarakat yang bersalah kepada ninik mamak dibuang sepanjang adat berupa tidak dibawa ikut dalam pergaulan di tengah masyarakat “sehilir semudik sehtutang sepihutang”. Kemudian duduk tidak sama rendah dan berdiri tidak sama tinggi sepanjang adat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut diberikan sanksi sosial dengan tidak dibawa ikut dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Surat larangan yang ditandatangani oleh kepala kerapatan nagari Kubang, Dt. Tanjoeng Ameh, Dt. Patieh Baringek dan Bajambek, Dt. Madjo Besar nan Baserong, Dt. Maradjo Diradjo dan Dt. Siri¹⁸⁰ sesungguhnya bertujuan untuk menghalangi masuknya pengaruh Muhammadiyah ke dalam nagari Kubang. Surat ini menurut penelitian Rida Anita efektif selama setahun dan nagari-nagari di luar Kubang melakukan hal yang sama untuk menghalangi masuknya pengaruh Muhammadiyah seperti

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

Sungai Rimbang, Suliki, Banjar Lawas dan Mahat.¹⁸¹ Kemudian pada 16 April 1930, sekolah tersebut ditutup atas perintah kepala nagari dengan dukungan Kerapatan Nagari Kubang.¹⁸²

Setelah surat keputusan kerapatan nagari tentang perintah menutup sekolah yatim dan kursus-kursus tersebut, tidak dapat diterima oleh pimpinan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, pada 18 April 1930 pimpinan Muhammadiyah melaporkan peristiwa tersebut kepada Asisten Demang di Dangung-Dangung. Bagi pemerintah, peristiwa ini sesungguhnya suatu dilema karena dalam tradisi adat memang bentuk apapun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok harus terlebih dahulu seizin dari pihak kerapatan nagari, sementara Muhammadiyah dengan 'Aisyiyahnya tidak mengkonsultasikan atau minta izin sebagaimana yang diatur dalam adatnya tersebut. Akan tetapi, benar juga yang dipertahankan oleh para penghulu dan warga yang memperjuangkan dan menggerakkan Muhammadiyah bahwa hampir semua penggagas dan penggerak Muhammadiyah¹⁸³ adalah warga yang berasal dari nagari Kubang sendiri dan nyaris tidak ada yang berasal dari luar Kubang.

Asisten Demang agaknya mendukung tindakan yang dilakukan oleh kerapatan nagari dengan alasan bahwa tindakan tersebut wajar karena Muhammadiyah belum berdiri secara resmi di nagari Kubang. Oleh Ahmad Khatib, dijelaskan bahwa Muhammadiyah Kubang sudah berdiri secara resmi dan telah diakui oleh Muhammadiyah Cabang Payakumbuh sebagai salah satu ranting.¹⁸⁴ Dalam rangka meyakinkan Asisten Demang, Ahmad Khatib kembali menemuinya untuk memperlihatkan surat keputusan Muhammadiyah Payakumbuh tentang pengakuan ranting. Peristiwa dalam sejarahnya tercatat pada 19 April 1930.¹⁸⁵

Pada sisi lain, kerapatan nagari juga melakukan hal yang

¹⁸¹ Rida Anita, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁸² Afschrift No. 107/177/Ap. Mailrapport N. 538x/30 Kubang: leet Nagarihofd van Koebang, 1930.

¹⁸³ Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik...*, *op. cit.*, hlm. 131.

¹⁸⁴ Rida Anita, *op. cit.*, hlm. 41.

¹⁸⁵ Mailrapport, 538x/30.

sama. Pada 22 April 1930 Kepala Nagari Kubang menghadap COUNTROLEUR untuk mempertanyakan status Muhammadiyah Kubang. Pada pertemuan tersebut, kepala nagari oleh COUNTROLEUR didesak agar kembali dibuka sekolah yatim yang sudah didirikan oleh Muhammadiyah tersebut. Akan tetapi, pada saat itu juga ada kesepakatan untuk tetap menutup kursus-kursus. Tinjakan lanjut dari pertemuan tersebut, pada 23 April 1930 sekolah dimaksud kembali dibuka dan dihadiri langsung oleh COUNTROLEUR.¹⁸⁶ Meskipun sekolah ini sudah dibuka kembali secara resmi oleh COUNTROLEUR, namun bagi pihak Muhammadiyah masih tetap tidak merasa senang dengan perlakuan demikian, maka Ahmad Khatib kembali menyampaikan hal itu kepada Saalah Yusuf Sutan Mangkuto di Padang Panjang sebagai Pimpinan Muhammadiyah Minangkabau. Kemudian pada hari Sabtu, 26 April 1930, H. Khatib, sekretaris ranting Muhammadiyah berangkat ke Padang Panjang dengan kereta api guna menemui Saalah Yusuf Sutan Mangkuto untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Kubang. H. Khatib berhasil membawa Saalah ke Payakumbuh dan bermalam di rumah Haji Boedin di Bunian. Kemudian keesokan harinya, 27 April 1930, Sutan Mangkuto, Haji Mohammad Arsyad dan Haji Khatib mengunjungi Kubang dan bertemu dengan ranting untuk mendengarkan dan melihat secara langsung keadaan yang sesungguhnya. Dalam pertemuan itu, Saalah meminta kepada warga ranting Muhammadiyah supaya bersabar dalam menghadapi sikap dan tindakan kerapatan nagari tersebut. Hal itu sebagai pertanda bahwa Muhammadiyah akan tumbuh dan berkembang dalam nagari Kubang. Bersamaan dengan kunjungan Saalah tersebut, sekolah ini oleh Muhammadiyah kembali ditutup pada 27 April 1930 karena dinilai masih belum tuntas.¹⁸⁷

Kemudian pada malam itu juga, Pimpinan Muhammadiyah Payakumbuh melaksanakan rapat yang dihadiri oleh sekitar 40 orang terdiri dari pimpinan dan anggota. Rapat ketika itu dihadiri oleh Haji Mohammad Arsyad sebagai ketua dan Mohammad Ilyas

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Afschrift No. 107/177/Ap. Mailrapport N. 538x/30 Kubang: leet Nagarihofd van Koebang, 1930 dan Aqib Suminto, op. cit., hlm. 195.

sebagai sekretaris. Rapat tersebut menetapkan tiga hal pokok, yaitu, *pertama*, mengirim telegram kepada Hoofd Bestuur Muhammadiyah di Jogjakarta tentang penutupan Sekolah Yatim dan ditanyakan kapan harus dibuka. *Kedua*, sekolah malam bagi laki-laki dan siang bagi wanita serta sekolah yatim yang telah dibuka oleh Controuleur ditutup kembali sampai mendengar kabar dari Hoofd Bestuur Muhammadiyah. *Ketiga*, papan nama Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan Yatim School Muhammadiyah dipasang. Dan beberapa keputusan lagi yang menyangkut permasalahan Muhammadiyah keseluruhan.¹⁸⁸

Hasil rapat tersebut dikirimkan kepada Hoofd Bestuur di Jogjakarta melalui telegram oleh Saalah untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah kolonial. Kemudian sekolah tersebut kembali ditutup pada 28 April 1930¹⁸⁹ oleh Muhammadiyah sendiri. Penutupan ini memunculkan reaksi lagi kepada Muhammadiyah. Hal itu, ditandai dengan pemanggilan H. Khatib oleh kerapatan nagari guna mempertanyakan penutupan sekolah yang sudah dibuka kembali oleh Controuleur sekaligus para penghulu meminta maaf kepada Muhammadiyah atas tindakannya. Sementara itu, H. Khatib sendiri dalam pemanggilan tersebut masih mempersoalkan kerapatan nagari tidak mengizinkan membuka kembali kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah.

Atas peristiwa itu pula, Pimpinan Cabang Payakumbuh meminta kepada Pengurus Besar Muhammadiyah agar meningkatkan status ranting Kubang menjadi cabang melalui suratnya Nomor: 127 tanggal 22 September 1932. Kemudian surat cabang Payakumbuh tersebut dilanjutkan oleh consul Minangkabau Nomor: 52/4.¹⁹⁰ Permintaan cabang Payakumbuh dikabulkan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah melalui surat keputusan Nomor: 364 tanggal 6 Sya'ban 1351H/5 Desember 1932.¹⁹¹ Isi surat tersebut menyatakan bahwa "menetapkan

¹⁸⁸ Mailraport, 538x/30.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Persarekatan Moehammadijah Hindia Timoer*, Hoofdbestuur Moehammadijah 6 Syakban 1351/5 Desember 1932.

¹⁹¹ Mailraport, 1233x/30.

dan mengakoe sah berdirinya Tjabang Moehammadijah Koebang.”¹⁹²

Telegram dari Muhammadiyah Minangkabau tersebut oleh Pengurus Besar Muhammadiyah dilanjutkan dengan mempersoalkan tindakan kerapatan nagari tersebut kepada pemerintah kolonial. Gobe sebagai perwakilan pemerintah Belanda menerima laporan Pengurus Besar dan bahkan menyayangkan tindakan pemerintah nagari itu. Dalam hal ini, Gobe membawanya kepada Gubernur Jenderal di Jakarta. Di kalangan pejabat dan pegawai tinggi sendiri, laporan Muhammadiyah ini disikapi dengan dua pendapat yang berbeda. Sebagian ada yang pro kepada tindakan kerapatan nagari dan sebagian lagi sama dengan sikapnya Gobe. Keputusan pemerintah baru keluar pada bulan Desember 1930 dengan keluarnya instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada *Gongrijp* (residen Sumatra Barat). Instruksi tersebut berisi tentang perintah kepada *Gongrijp* untuk menyelesaikan masalah Muhammadiyah dengan kerapatan nagari Kubang dengan cara yang persuasif dan bijak. Instruksi Gubernur Jenderal tersebut akhirnya dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi Muhammadiyah, di mana sekolah yatim dan kursus ‘Aisyiyah dibuka kembali secara resmi. Sejak itu, Muhammadiyah dengan organisasi otonomnya dapat berkembang dengan baik sehingga pada 1940 ‘Aisyiyah Kubang dapat membeli aset tidak bergerak berupa sebidang tanah dari suku Caniagu untuk mendirikan panti asuhan.¹⁹³

Beberapa peristiwa dan persoalan yang dialami oleh pimpinan Muhammadiyah di atas berlanjut pada masa pemerintahan militer Jepang. Organisasi Otonom seperti ‘Aisyiyah dan Hizbul Wathan pada masa ini tidak dibolehkan dan harus ditutup sehingga organisasi otonom Muhammadiyah tersebut tidak dapat bergerak. Pemerintah militer Jepang justru membuat organisasi baru sesuai dengan kepentingan didaerah jajahannya. Keadaan demikian terus terjadi sampai terjadi Agresi Belanda.

Begitu pula pasca meletusnya PRRI ancaman dan intimidasi yang sama beratnya terus terjadi. Masyarakat terus mengalami ketakutan karena yang datang itu adalah tentara pusat dan PKI. Akibatnya, Muhammadiyah

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Soerat Keterangan Djoel Beli 11 Juni 1940.

yang mulai tumbuh dan berkembang, kembali mengalami ketersendatan. Berbagai aktivitas dan rapat terpaksa harus dihentikan termasuk pengajian-pengajian yang sebelumnya sudah terselenggara dengan rutin. Para orang tua selalu dalam keadaan kecemasan terutama bagi nasib anak-anak gadisnya karena OPR yang menjadi kaki tangan PKI masuk secara bergerombolan kenagari-nagari di Payakumbuh dan sekitarnya. Sikap dan tindakan mereka yang kasar telah membuat masyarakat ketakutan. Yang menjadi sasaran utamanya adalah anak-anak gadis terutama yang mereka duga sebagai pendukung PRRI. Apalagi, di setiap rumah pihak mereka mewajibkan menggali lubang dimasing-masing rumah dalam bentuk letter L dengan ukuran 1 x 2 meter yang bertujuan untuk pertahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Kecurigaan terhadap Muhammadiyah semakin menjadi-jadi. Peristiwa tragis terjadi ketika musyawarah cabang. Pada saat itu, terpilih menjadi ketua Rasjid Noer, tokoh yang sudah malang melintang di Muhammadiyah sehingga ia cukup dikenal di masyarakat dan kalangan Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya Muhammadiyah bergerak secara dinamis dan banyak terobosan-terobosan baru yang dapat dilakukannya. Sedang giat-giatnya menggerakkan Muhammadiyah, Rasjid Noer dipanggil oleh Kodim dan diperintahkan untuk mundur dari ketua Muhammadiyah. Ternyata, pemanggilan tersebut tidak terlepas dari skenario pihak-pihak yang tidak senang terhadap keberadaan Muhammadiyah.

Rasjid Noer tidak banyak bisa berbuat atas perintah Kodim tersebut sehingga ia mengundurkan diri dari ketua Muhammadiyah. Kemudian digantikan oleh Datuk Lubuk, yang pada waktu itu berada pada posisi wakil ketua. Tentunya, perintah Kodim kepada Rasjid Noer untuk mengundurkan diri secara tidak langsung juga memberikan ancaman dan intimidasi kepada tokoh yang menggantikannya. Bersamaan dengan Rasjid Noer, Nurani Japin sebagai ketua Bagian 'Aisyiyah juga dilarang aktif dan harus mengundurkan diri sebagai ketua.¹⁹⁴ Akan tetapi, Datuk Lubuk tidak terpengaruh dengan intimidasi dan ancaman tersebut, semangatnya menggerakkan Muhammadiyah sama dengan Rasjid Noer bahkan dengan ancaman dan intimidasi

¹⁹⁴ Moehammad Yatim, dokumen..., *op. cit.*

itu pula ia lebih dapat berhati-hati sehingga Muhammadiyah dapat bergerak dan berkembang secara dinamis.¹⁹⁵

Pada masa setelah PRRI, keadaan Muhammadiyah di nagari-nagari termasuk di Kubang sendiri mengalami nasib yang lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Perang saudara itu, telah membuat trauma dan ketakutan yang mendalam bagi anak nagari. Pada saat itu, nyaris aktivitas Muhammadiyah terhenti karena sebagian besar pimpinan dan tokoh Muhammadiyah ikut mengungsi “*ijok*” keluar baik yang ikut dengan perjuangan PRRI maupun karena tidak tahan dengan tekanan dan intimidasi dari tentara maupun komunis. Kondisi ini terjadi sampai meletusnya gerakan pemberontakan PKI pada 1965.

Situasi pasca terjadinya PRRI ini sebagaimana dalam laporan Moehammad Yatim perlu mendapat perhatian serius dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurut laporan Moehammad Yatim, sebelum terjadinya pergolakan Muhammadiyah di cabang-cabang tersebut Muhammadiyah bergerak secara dinamis. Apalagi izin untuk rapat-rapat tidak diperlukan. Akan tetapi, cabang ini mengalami tekanan dan dipersulit. Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah Wilayah Sumatra Barat—ketika itu masih dinamakan pimpinan daerah—di bawah kepemimpinan Moehammad Yatim dapat kembali menghidupkan cabang dan ranting Muhammadiyah yang sudah tidak bergerak lagi karena pimpinannya banyak yang sudah pergi meninggalkannya. Hal itu, disebabkan terjadinya pergolakan yang menyisakan banyak persoalan di kalangan Muhammadiyah. Muhammadiyah menghadapi tuduhan terlibat dalam PRRI dan Masyumi. Bukan hanya itu, pimpinan Muhammadiyah juga menghadapi tantangan dari pihak yang dasar dan corak pemahaman keagamaannya berbeda, dan bahkan antipati terhadap Muhammadiyah. Namun, semua tantangan itu oleh Moehammad Yatim dapat diatasi terutama dengan memanfaatkan dua surat persetujuan dari Panglima dan KP. Kom. Polisi Sumatra Barat sebagai perwakilan Pengurus Besar Muhammadiyah guna menormalisasikan kembali Muhammadiyah sehingga dapat kembali bergerak secara dinamis. Dalam laporannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia menyebutkan bahwa dalam rentang waktu

¹⁹⁵ Moehammad Yatim, Laporan..., *op. cit.*

yang singkat, Muhammadiyah sudah kembali bergerak secara dinamis setelah dalam beberapa waktu lama mengalami kevakuman. Beberapa cabang Muhammadiyah telah berhasil kembali dibangun dan dilantik, seperti Kuraitaji, Simabur, Lintau, Biaro Gadang, Pulau Punjung, Tarusan, Painan, Lengayang, Ampang, Padang Timur dan Padang Tarab dan dalam pelaksanaan Ujung Gading, Surian, Tilatang Kamang dan lain-lain.¹⁹⁶ Hanya saja, Pimpinan Muhammadiyah di tingkat bawah tetap menghadapi kesulitan dan tekanan dari berbagai pihak. Untuk melangsungkan rapat dalam membangun kembali Pimpinan Cabang menghadapi kesulitan terutama dalam permohonan perizinan karena rapat-rapat tidak boleh dilaksanakan sebelum ada izin dari pihak pemerintah setempat. Pengalaman Moehammad Yatim sering dilapangan menghadapi masalah dan perjalanan rapat tidak mulus. Dinamisasi pergerakan Muhammadiyah yang sudah diupayakan tersebut dibuktikannya dengan berhasilnya kembali melakukan Konpres Daerah pada 25 Agustus 1963 dengan meresmikan 42 cabang dan 94 ranting yang tersebar diseluruh pelosok Sumatra Tengah.¹⁹⁷

Dengan sumber daya yang amat terbatas dan situasi yang sulit, tentunya usaha menggerakkan Muhammadiyah seperti ini tidak merupakan upaya ringan melainkan penuh dengan tantangan dan kadang mengharuskan pengorbanan harta dan jiwa. Tekanan dan intimidasi yang datang berbagai pihak sudah menjadi makanannya sehari-hari. Satu langkahpun Moehammad Yatim tidak pernah ingin mundur dari perjuangan tersebut. Ia lakukan keliling keseluruh pelosok melakukan konsolidasi dan membangun kembali Muhammadiyah yang tidak bergerak lagi karena ditinggalkan oleh para pimpinannya. Begitu pula amal usaha yang dibangun sebelumnya secara swadaya dengan bersusah payah tinggal begitu saja tanpa ada lagi yang mengurusnya. Keadaan masing-masing amal usaha sangat memprihaitnkan. Ada sebagian diambil alih dan diduduki oleh pihak lain. Pada sisi lain, ada pula yang dijadikan bahan olok-olok dan ejekan sebagai penghinaan terhadap Muhammadiyah karena tidak berdaya lagi. Sebagian lagi, dibiarkan kosong tanpa berpenghuni.

¹⁹⁶ *Ibid.*,

¹⁹⁷ *Ibid.*

Tentunya, keadaan berbanding terbalik dengan situasi yang sebelumnya, Muhammadiyah secara politik tidak mengalami kesulitan yang bersifat mendasar dalam pengembangan organisasi dan amal usahanya. Akan tetapi dimasa pergolakan ini, Muhammadiyah tidak bisa lebih leluasa. Untuk mendapatkan izin rapat saja dibutuhkan kesabaran karena sebagian besarnya selalu dipersulit oleh pihak yang sedang berkuasa. Kalaupun ada yang diizinkan, kadang waktunya berbulan-bulan. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana Muhammadiyah tidak memerlukan adanya izin dari pihak penguasa setempat oleh karena pemerintah dipegang oleh Masyumi. Dalam hal itu, Moehammad Yatim mengungkapkan bahwa

Jika dibandingkan dengan zaman, sebelum bergolak, tentu kita merasa kecewa, alasan yang nyata, SOB, Muhammadiyah dibenci masyarakat sehingga untuk mengadakan rapat Muhammadiyah saja, memerlukan perundingan yang lama, ada yang memakan waktu berbulan, sedangkan sebelum bergolak tanpa izin karena pemerintah dipegang oleh Masyumi. Kami merasa sangat beruntung dan bersyukur pada Tuhan yang maha berkuasa dan adil, karena dengan petunjuk dan keredaannya kami dalam waktu yang sangat sulit dan sangat berbahagia bagi jiwa, telah dapat membangun Muhammadiyah kembali dan menyerahkan pada pemimpin daerah yang menggantikan kami, 42 Cabang dan 94 Ranting, supaya dibina, dipupuk dan disiram mudah-mudahan sukses.¹⁹⁸

Dalam laporannya tertanggal 4 Februari 1963 kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Moehammad Yatim menyebutkan bahwa perjalanan dan konsolidasi keberbagai cabang tidak hanya dilakukan di Sumatra Barat, melainkan sampai ke Riau.¹⁹⁹ Di lapangan Moehammad Yatim menemukan dan mengalami perlakuan yang diskriminatif bahkan ancaman terhadap warga dan pimpinan Muhammadiyah baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun pihak pemerintah lokal meskipun surat persetujuan normalisasi dari panglima dan

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Laporan itu, selain disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga ia tembuskan secara pribadi kepada Buya AR. Sutan Mansur, Muliadi Djojomartono dan Fakih Usman. Surat yang bersifat rahasia itu, bernomor: 1/Ketua P.M.D/Rahasia tertanggal 4 Februari 1963. Pada saat itu, ia tinggal di Jl. Danau Singkarak No. 7 Padang. Moehammad Yatim

KP. Resort Polisi sudah ada. Akan tetapi, Moehammad Yatim tetap bersikap optimis terhadap usaha yang dilakukannya. Bahkan ia dalam laporannya itu meyakinkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa pergerakan Muhammadiyah akan segera kembali pulih sebagaimana sebelum terjadinya pergolakan. Optimisme tersebut didasarkan pada beberapa indikasi, di antaranya kebanyakan dari wali nagari yang baru diangkat, mereka dapat memahami tujuan Muhammadiyah, apalagi di antaranya sudah sempat ada yang berdiskusi dan bertukar fikiran dengan Moehammad Yatim sendiri. Begitu pula para camat dan tritunggal yang sebelumnya pengaruh dari pihak yang anti terhadap Muhammadiyah begitu sangat dominan. Mereka melakukan hasutan-hasutan yang sesungguhnya tidak berdasar sehingga Muhammadiyah berada dalam keadaan terjepit. Dalam perkembangannya, keadaan demikian mulai berubah secara berangsur-angsur sehingga keadaan Muhammadiyah dapat dipulihkan.

Dalam pada itu, Moehammad Yatim pada laporannya meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bersikap arif dan bijak dalam menyikapi apa yang sedang dihadapi Muhammadiyah Sumatra Barat. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar tidak mengirim anggota Pimpinan Pusat yang berasal dari Sumatra Barat sendiri karena ia berkeyakinan bahwa tokoh-tokoh yang dimaksud untuk kondisi itu tidak akan mendapat sambutan baik dari pihak pemerintah (berwajib).²⁰⁰ Bahkan kedatangan mereka ke Sumatra Barat akan semakin membuat suasana semakin keruh dan tidak kondusif sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa

Berhubung dengan kejadian-kejadian yang merugikan Muhammadiyah, khususnya di Sumatra Barat saya mengharapkan bantuan dan kebijaksanaan Pimpinan Pusat, akan lebih aktif dan lebih bijaksana menghadapi Sumatra Barat dan seperti yang pernah dulunya saya minta, janganlah diutus pemimpin-pemimpin kedaerah kami, pemimpin yang berasal dari Sumatra Barat karena saya yakin tidak akan mendapat sambutan baik, dari yang berwajib.²⁰¹

²⁰⁰ Moehammad Yatim, dokumen, *op. cit.*

²⁰¹ Moehammad Yatim, Laporan..., *op. cit.*

Akan tetapi, saran dan masukan Moehammad Yatim di atas berujung kepada polemik terutama oleh anggota Pimpinan Pusat yang berasal dari Sumatra Barat seperti Marzoeki Yatim. Dalam hal itu, berbagai pernyataan-pernyataan pimpinan yang pro kontra tersebut membuat suasana pimpinan terganggu bahkan muncul tuduhan yang mestinya tidak terjadi, seperti pernyataan bahwa ia tidak memiliki kapasitas untuk memimpin Muhammadiyah. Gambaran konflik tersebut dapat disimak dari pernyataan Moehammad Yatim sendiri yang menyatakan bahwa “pribadi saya tidak bercacat terutama dalam segi keuangan seperti laporan pemimpin besar Marzoeki Yatim cara tertulis pada PP”.²⁰²

Alasan mendasar yang dikemukakan Moehammad Yatim agar Pimpinan Pusat yang dikirim ke Sumatra Barat bukan tokoh yang berasal dari Sumatra Barat adalah karena tokoh-tokoh dan teman-teman yang sekelompok dengan Marzoeki Yatim masih mengalami karantina politik.²⁰³ Kalau saja mereka datang ke Sumatra Barat dalam situasi yang belum aman akan menyebabkan Muhammadiyah semakin sulit untuk bergerak. Pergerakan Muhammadiyah Sumatra Barat baru dimulai melakukan hubungan baik dengan pemerintah termasuk pengurusan izin di tingkat cabang dan ranting. Dalam situasi konflik itu, masih bisa mengirim utusan untuk muktamar sebanyak 172 orang. Hal ini, tentunya jumlah yang fantastis dibandingkan dengan utusan-utusan dari Tapanuli, Sumatra Utara, Aceh, Palembang, Jambi dan Bengkulu, jauh lebih banyak.²⁰⁴ Kepesertaan muktamar ke Jakarta termasuk yang difasilitasi oleh Pimpinan Wilayah tokoh yang dikategorikan ke dalam karantina politik meskipun polisi DPKN Kota Besar Padang minta dilaporkan para utusan (peringatan cara halus).²⁰⁵

Selain saran Moehammad Yatim tidak mengirim tokoh Muhammadiyah asal Sumatra Barat. Ia juga meminta Pimpinan Pusat agar menunda pelaksanaan konferensi daerah sampai bulan Mei 1963 karena beberapa cabang Muhammadiyah masih kesulitan dalam

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

mendapatkan perizinan rapat seperti Surian dan Tilatang Kamang. Persoalan ini sedang dalam proses pengurusan dengan Kepala Polisi Komisararis Sumatra Barat di Padang. Selain itu, Moehammad Yatim juga meminta kepada Pimpinan Pusat untuk mengundurkan waktu konferensi daerah sampai bulan Mei 1963 atau setelah usaha-usaha pimpinan istimewa Muhammadiyah di Jakarta berhasil membebaskan pemimpin-pemimpin besar yang masih dalam karantina politik, jadi yang akan dipilih telah banyak.²⁰⁶ Kalau sekiranya para pimpinan terpilih mereka bisa bergerak agak lebih leluasa tidak dalam kondisi yang tidak nyaman. Apalagi jika kepemimpinan tersebut diserahkan kepada para tokoh yang secara kapasitas dapat diandalkan seperti buya Zainal Abidin Syuib. Dengan kelebihan buya ini dalam pandangan Moehammad Yatim, Muhammadiyah akan kembali dapat lebih digerakan lagi. Oleh karena, Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh yang memiliki kapasitas kuat untuk memimpin termasuk memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Apalagi para tokoh tersebut sudah mengakar di kalangan masyarakat umum. Tambah lagi dengan jejak rekam jejak sebelum terjadinya pergolakan lebih baik. Apabila SOB telah hapus, dan pemimpin-pemimpin besar lainnya sudah bebas, maka Moehammad Yatim meminta supaya terjadi pergantian pimpinan yang lebih baik sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa

Jika SOB hapus, atau saudara-saudara telah berhasil membebaskan saudara-saudara saya yang saya dimaksud di atas, konprensi segera diadakan dan saya rela menyerahkan ketua pimpinan daerah pada mereka-mereka, karena saya juga yakin dengan baik bahwa tenaga saya jauh lebih kurang dari mereka-mereka.²⁰⁷

Selabelas hari kemudian setelah ia melaporkan situasi terakhir tentang perkembangan Muhammadiyah Sumatra Barat yang sedang dalam keadaan bergolak melalui suratnya Nomor: 1/Ketua P.M.D/Rahasia tertanggal 4 Februari 1963, Moehammad Yatim kembali menyampaikan laporan terbaru tentang denyut Muhammadiyah melalui surat Nomor: 2/Ketua P.M.D/rahasia tertanggal 20 Ramadhan 1382H/15 Februari 1963. Surat tersebut dikirimnya melalui jasa Kantor

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

Pos dan Telegraf Padang. Dalam laporannya itu, ia menjelaskan tentang pembicaraannya dengan beberapa pejabat di Sumatra Barat, yang merupakan teman lamanya, yaitu; Daramin, Ketua Jawatan Penerangan (Djapenprop) dan Sutan Djohan, Ketua Djapenko. Kedua pejabat ini menyarankan kepada Moahammad Yatim agar mengundurkan diri dari persyarikatan Muhammadiyah.²⁰⁸ Saran pengunduran diri tersebut disampaikan kedua pejabat tersebut karena beberapa orang Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak menyetujui kepemimpinannya karena masih muda di Muhammadiyah dan banyak tokoh lain yang patut memimpin Muhammadiyah. Dalam hal itu, Moehammad Yatim mengungkapkan bahwa

Menurut pengakuannya, “entah menghasut saya, supaya saya menarik diri dari persyarikatan Muhammadiyah, entahlah, tetapi dengan jelas mengabarkan bahwa saudara Marzoeki mengatakan saya sebagai ketua, tidak disetujui oleh beberapa kawan pemimpin besar Marzoeki Yatim karena muda dalam persyarikatan Muhammadiyah dan banyak yang lain yang patut menggantikan, yang dulunya sudah biasa menjabat ketua Pimpinan Daerah (boleh jadi sahabat karibnya atau orang sekampungnya saudara ZAS /Zainal Abidin Su’ib).²⁰⁹

Jika benar kejadian ini, betul-betul sangat saya sayangkan karena pada saya sering diucapkannya bahwa tujuan konferensi yang diajukannya adalah untuk membersihkan diri saya dipandangan anggota-anggota Muhammadiyah yang banyak dan sebagai pimpinan daerah oleh PP akan tetap ditunjuk pribadi saya. Boleh jadi Marzoeki Yatim, menganggap saya ingin dan akan berusaha, supaya dapat tetap jadi ketua PMD.²¹⁰ Kemudian dalam informasinya, ia menjadi pimpinan Muhammadiyah di Binjai pada 1937, di Medan pada 1939, di Payakumbuh pada 1940-1945, di Jambi pada 1946-1948, di Kisaran pada 1949-1953 dan di Padang 1953-1963. Selain itu, strinya juga aktif sebagai ketua bagian ‘Aisyiyah. Di Binjai bersama Haji Bustami Ibrahim membangun Muhammadiyah, yang tadinya sulit bergerak, berhubung rintangan-rintangan atau halangan-halangan yang dilakukan oleh alim ulama dan kaki tangannya di pihak kesultanan Langkat dan bagaimana

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

di Kisaran sehingga Muhammadiyah mendapat sambutan baik dari dastaehappy- dastaehappy perkebunan yang akhirnya mengundang Muhammadiyah untuk bertabligh.²¹¹ Meskipun demikian muncul informasi yang kurang baik, dalam pengakuannya menegaskan bahwa

Saya tjinta pada Muhammadiyah begitu rupa, sehingga air mata saya keluar, meleleh waktu berbitjara antara empat mata dengan Sdr Marzoeki Yatim. Waktu saja mengunjungi Tjabang2 Pulau Pundjung-Padang Tarab dan Suriam baru-baru ini, beberapa anggota Muhammadiyah jang pergi Kongres ½ abad, melaporkan pada saja sidang2 yang dilakukan oleh Sdr2 jang anti saja di Djakarta jang di antaranja jang ingin menggantikan saja sebagai ketua P.M.D dan dilaporkannya pada Pimpinan Pusat jang baru kabarnja, menurut Sdr Marzoeki Jatim, akan langsung memimpin Daerah Sumatra Barat.²¹²

Setelah laporan tersebut disampaikan dalam sidang, ia mengungkapkan bahwa (1) badannya telah uzur dan ingin beristirahat, menikmati hari-hari akhir sebagai seorang pensiunan. Ia minta pensiun pula sebagai pemimpin Muhammadiyah dan berhubung dalam daftar-daftar calon pemimpin yang ia terima, ia dicalonkan pula oleh cabang-cabang, ia sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih dan karena hal-hal tersebut di atas tak dapat ia penuhi. (2) pemimpin-pemimpin kita yang telah kita kenal, kepemimpinanya, telah berada kembali di lingkungan kita.²¹³ •

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

Bab V

Penutup

PENGARUH ulama kaum muda di Minangkabau bukan hanya di ranah Minang melainkan merambah keberbagai pelosok nusantara melalui para perantau Minang. Sebagian ada yang menjalankan misinya secara perorangan, dan sebagian lagi ada pula yang membentuk perkumpulan. Yang disebutkan terakhir pada mulanya tidak menjadi bagian jaringan daripada yang lainnya, tetapi setelah melebur ke dalam Muhammadiyah semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Minangkabau dalam fakta sejarah memang tidak berhasil melahirkan organisasi pergerakan yang berskala nasional baik organisasi politik, keagamaan, profesi dan seterusnya. Oleh sebab itu, Muhammadiyah di Minangkabau hanya menjadi salah satu cabang dari Yogyakarta. Meskipun dalam penyebaran dan penguatannya secara masif tidak bisa dilepaskan dari kontribusi Minangkabau. Di Minangkabau sendiri cepatnya pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah tidak dapat pula dipisahkan dari pergerakan yang sudah ditumbuhkan dan disemaikan oleh ulama-ulama sebelumnya di berbagai pelosok Minangkabau baik kaum Paderi maupun kaum ulama muda. Meskipun bergerak dengan pendekatan yang jauh berbeda.

Kehadiran Muhammadiyah di Minangkabau tepat saat para pembaru Minangkabau dari kaum muda sedang pada titik puncaknya. Bermula dari beberapa orang rantau Minangkabau yang menetap di Pekalongan, Yogyakarta dan Surabaya. Pada tiga tempat tersebut, mereka sudah lebih duluan masuk ke dalam Muhammadiyah. Setelah secara terbuka Muhammadiyah diperkenalkan sejak kembalinya Abdul Karim Amrullah dari Jawa yang kedua kalinya. Selain diperkenalkan oleh para perantau, Muhammadiyah secara tidak langsung juga disosialisasikan oleh komunis sendiri yang menjadi penghalang dan penentang masuk dan berkembangnya Muhammadiyah di Minangkabau. Pergerakan Muhammadiyah sesuai dengan tujuan dan misinya ditandai dengan perubahan “Tiang Aman Sendi Selamat”, yaitu organisasi lokal yang dibentuk oleh ulama kaum muda di Sungai Batang. Selain melalui jalur Sungai Batang, Muhammadiyah juga ditumbuhkan di Padang Panjang dengan dibentuknya Tabligh Muhammadiyah.

Kedua jalur ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di Sungai Batang, Muhammadiyah boleh dikatakan tidak menemui tantangan yang sangat berarti baik di dalam memobilisasi sumber daya maupun membangun struktur organisasi. Sumber daya relatif kuat terutama digerakan oleh tokoh ulama dan ninik mamak serta masuk ke dalam jantung masyarakat. Sedangkan jalur di Padangpanjang sasaran utamanya adalah para pelajar yang masih dalam proses menyelesaikan studinya di Sumatra Thawalib. Di sini sumber daya manusia masih sangat minim. Meskipun demikian, kepaiwaan Saalah Yusuf Sutan Mangkuto berhasil membawa ulama dari kaum tua untuk masuk ke Muhammadiyah seperti Inyiek Jao dan diikuti oleh M. Zain Simabur dan Engku Tapakis meskipun dalam perjalanannya, terutama setelah mengikuti kongres, tidak datang-datang lagi ke Muhammadiyah karena merasa salah masuk.

Dalam situasi yang gamang dan mencemaskan para penggiat Muhammadiyah, Pengurus Besar menugaskan tiga tokoh Minang yang sudah cukup lama bergabung di dalamnya. Ketiga tokoh yang dimaksud, di antaranya AR. Sutan Mansur, Datuk nan Barena dan Fatimah. Mereka terutama AR. Sutan Mansur ditugasi secara khusus

untuk membimbing dan meluruskan arah pergerakan Muhammadiyah di Minangkabau. Usaha itu ternyata berhasil dan sukses. Dalam hal ini, Pengurus Besar memberikan perhatian yang serius sehingga dikunjungi secara berturut-turut. Walaupun keamanan di Minangkabau sendiri sesungguhnya kurang kondusif karena terjadi beberapa peristiwa penting. Beberapa bulan sebelum AR. Fakhruddin datang misalnya, terjadi pemberontakan di Silungkang yang dimainkan oleh komunis. Begitu pula ketika M. Yunus Anis turun kedaerah, di Minangkabau sedang terjadi isu yang hangat dan menentukan, yaitu terjadinya kongres ulama dan guru pendidikan Islam dalam rangka menentang kebijakan Ordonansi Guru. Kunjungan kedua tokoh nasional di awal tumbuhnya Muhammadiyah membawa perubahan sangat berarti. Dalam hal itu, pada 1930, kongres dapat dilaksanakan dengan sukses bahkan sejak kongres tersebut menjadi titik tolak pengakuan Muhammadiyah secara nasional tidak hanya bisa hidup di Yogyakarta. Keadaan demikian, membawa suatu perubahan yang sangat berarti di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, muncul slogan Memuhammadiyahkan Nagari dan Menagarikan Muhammadiyah. Di tengah kegembiraan dan usaha itu, perubahan peta dunia tidak dapat dihindari lagi. Keadaan Muhammadiyah meskipun masih dibiarkan untuk hidup pada masa Jepang, tetapi gerak dan langkahnya tetap saja sangat dibatasi dan bahkan dimasa agresi Belanda nyaris mengalami kelumpuhan karena potensinya dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Keadaannya semakin tertekan dan terintimidasi saat meletusnya peristiwa pergolakan PRRI seperti halnya "kue bika", di atas panas di bawah panas. Muhammadiyah oleh elite terutama oleh penguasa dari tingkat atas sampai ke penguasa tingkat paling bawah dipandang bagian dari Masyumi bahkan ada yang menginginkan agar dilarang di Sumatra Barat. Kondisi traumatis dan ketakutan hampir dialami oleh seluruh tokoh dan warga Muhammadiyah diseluruh nagari. Tambah lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh para OPR. Dalam hal itu, pimpinan Muhammadiyah dari tingkat wilayah hingga keranting nyaris mengalami kelumpuhan termasuk amal usaha yang selama ini menjadi basis gerakan menjadi tidak berpenghuni. Nyaris pula tidak ada tokoh

yang secara sadar melakukan konsolidasi dan penguatan kekuatan Muhammadiyah yang sudah berada dalam kekosongan itu. Salah satu di antara tokoh yang berani muncul ketika itu adalah Moehammad Yatim. Ia merupakan orang yang tidak termasuk dicurigai terlibat dalam pergolakan politik tersebut oleh pemerintah pusat maupun oleh kelompok komunis. Begitu pula oleh PRRI, ia tidak dikategorikan sebagai mata-matanya pemerintah pusat. Apalagi Moehammad Yatim sendiri sudah terlatih dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu sejak zamannya pemerintah kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Hampir bersamaan dengan itu, oleh komunispun tidak menjadi incaran untuk dihabisi karena selama ini ia tidak terlibat dalam pengumpulan perang ideologis sebagaimana tokoh Muhammadiyah yang lain. Dengan kefigurannya itu, ia agak leluasa kembali untuk menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai serangan.

Sebelum meletusnya pergolakan itu, ia telah berkeliling bersamaan dengan tugasnya di kantor pos dan telegraf. Uniknya, tokoh ini di manapun ia ditugasi oleh atasannya, di situ ia dan istrinya menghidupkan dan memperkuat pimpinan dan cabang dan ranting. Pada 1934 ia menghidupkan Muhammadiyah di Sigli, Aceh. Pada 1937 memelopori pendirian dan pembentukan Ranting Muhammadiyah di Binjai. Di Medan pada 1937 Moehammad Yatim menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah. Kemudian pada 1939 ia kembali ke Payakumbuh menghidupkan Muhammadiyah yang sudah mengalami kevakuman. Ketika ditugasi sebagai pegawai kantor pos dan telegraf di Jambi pada 1946, ia memulihkan kembali Cabang Muhammadiyah Jambi. Sejalan dengan kepindahannya kembali ke Medan ia dapati di Kisaran Muhammadiyah belum hidup, ia inisiasi pendirian ranting dengan mengajak tokoh-tokoh lain terutama masyarakat setempat. Sejak 1953, Moehammad Yatim aktif di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampung Jawa sejalan dengan kepindahannya ke Padang.

Ketika meletusnya peristiwa PRRI Moehammad Yatim, tampil dan mengambil alih kepemimpinan Muhammadiyah dalam rangka menyelamatkan dan mempertahankan eksistensinya di ranah Minang. Semangat jihad dan pengorbanan yang sangat luar biasa tanpa kenal lelah ia keliling kecabang-cabang Muhammadiyah guna kembali

memberikan semangat dan menghidupkan Muhammadiyah di berbagai tempat. Ia menelusuri pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang masih dapat bertahan dan tidak ikut dalam pengungsian keberbagai pelosok. Semuanya itu, ia biayai sendiri dengan keikhlasan, kesabaran dan keteguhan. Pada waktu itu, Muhammadiyah betul-betul berada dalam tekanan berat dari berbagai pihak karena dianggap sebagai bagian dari partai Masyumi dan pendukung PRRI. Dalam hal itu, ia dapat mempertahankan dan menyelamatkan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sekarang berdiri megah di kota Padang dari rencana pembongkaran pihak tentara. Dalam berkeliling ke cabang-cabang yang terdapat pada nagari-nagari termasuk ke Riau, untungnya dapat sepucuk surat dari panglima untuk memulihkan kembali kehidupan Muhammadiyah. Surat inilah yang kemudian menjadi senjata sakti yang dibawa ke mana-mana. Jika terdesak, surat tersebut dikeluarkan oleh Moehammad Yatim. Dalam situasi yang demikian, ia dengan kemampuannya berhasil kembali menghidupkan dan memperkuat pimpinan yang tersebar di nagari-nagari suka dan dukanya. Beberapa cabang yang dikonsolidasikan kembali itu, di antaranya; Sulit Air, Kuraitaji, Kambang, Simabur, Pulau Punjung, Suliki Gunung Mas, Kamang, Lintau, Surian, Payakumbuh dan beberapa cabang dan ranting lainnya. •

Daftar Pustaka

- Abas, Anwar, *Bung Hatta & Ekonomi Islam* (Jakarta: Kerjasama Multi Pressendo, LP3M STIE Ahmad Dahlan dan FH UMJ, 2008)
- Abdullah, Taufik, *Sekolah dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat 1927-1933*, Padang: FSUA, 1988.
- Alfian, *Muhammadiyah; The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: UGM Press, 1989.
- Afschrift No. 107/177/Ap. *Mailrapport* N. 538x/30, Kubang: leet Nagarihofd van Koebang, 1930.
- Agustina, Magdalena, Djuliaty Suroyo, "Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia Sebuah Proses yang Belum Selesai," Pidato Pengukuhan, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro di Semarang, 9 Februari 2002.
- Aisyah, Ti, Subhani, Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia, 1953-1964*, Lhoukseumawe: Unimal Press, 2008.
- AN, Firdaus, *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde baru yang tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Anita, Rida, "Organisasi Muhammadiyah Cabang Kubang (1929-1965)," Skripsi, Payakumbuh: STKIP, 2009.
- Asnan, Gusti, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: PPIM, 2003.
- _____, *Memikir Ulang Regeonalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

- Agustina, Magdalena, Djulianti Suroyo, "Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia Sebuah Proses yang Belum Selesai, Pidato Pengukuhan," Makalah disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro di Semarang, 9 Februari 2002.
- Amig, M.Bahrul, dkk, *Jejak Sidoarjo dari Jenggala ke Suriname*, Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006.
- Asril St. Zaili, dkk (Ed.), *Menyemangati Kembali Peran Muhammadiyah di Minangkabau*, Padang: Yayasan Alam Jadi Takambang & PW Muhammadiyah Sumatra Barat, 2000.
- Ariyanto, Dodik, "Tentara Nasional Indonesia dalam Evolusi Negara Republik Indonesia," *Jurnal Negarawan*, No. 25 Tahun 2012
- Bahar, Saafroedin, "Pemberontakan PRRI Ditafsirkan Kembali: Sebuah Renungan Awal Filsafat Sejarah Lokal", Makalah ini disajikan dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Tungku Tigo Sajaringan Minangkabau (LKTTSM) di Universitas Yarsi Jakarta, pada bulan Desember 2014, dimuat di <http://www.mantagibaru.com/2015/05/pemberontakan-prri-ditafsirkan-kembali.html>. diakses 16 Februari 2016.
- Bakhtiar dan RB. Khatib Pahlawan Kayo (Ed.), *Dari Pergulatan Ideologis ke Penguatan Aqidah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Mekanisme Ijtihad di Kalangan Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, No. 17 Tahun ke-67, 1987.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, t.th.
- Bismark, Rowdland, "Hatta Jejak yang Melampui Zaman," <www.goodreads.com/pdf>, diakses 18 Februari 2016.
- Cesaria, Fathiannisa, "Proses Pergeseran Sekolah Muhammadiyah; dari Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah ke Sekolah Guru Agama Atas (SGAA) Muhammadiyah Padang Panjang, 1951-1959," Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Darban, Ahmad Adaby, *Sejarah Kauman Menguk Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Barat*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah departemen

- Pendikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
- Efendi, Hary, "Berebut Suara Rakyat: Perseteruan Partai Masyumi dengan Perti Dalam Pemilu 1955 di Sumatra Tengah," *Jurnal Analisis Sejarah*, Volume 03 Tahun 2013.
- Fachruddin, AR., *Menyongsong Tanwir Muhammadiyah di Sala, Surakarta, Menjelang akan dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh*.
- Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah Sumatra Tengah, *Pembukaan Falsafah dan Hukum Muhammadiyah*, t.tp: Pengurus Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah Sumatra Tengah, t.th.
- Fatimah, Siti, "Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau pada Masa Pendudukan Jepang," *Tingkap*, Vol. VII No. 1 Th. 2011.
- Fernando, Obert, "Ahmad Kasim Dt. Gunung Hijau; Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat (1930-1977)," Skripsi, Padang: UNAND, 2013.
- Formichi, Chiara, *Islam and the Making of the Nation Kartosuwiryo and Political Islam in 20th century Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2012.
- Hadler, Jeffrey, *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformis Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR.H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*, Jakarta: Panjimas, 1982.
- _____, *Dari hati ke Hati tentang Agama Sosial, Budaya dan Politik*, Jakarta: Panjimas, 2005.
- _____, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Panjimas, 1994.
- _____, *Muhammadiyah-Masjumi*, Jakarta: Masyarakat Islam, t.th.
- _____, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Panjimas, 1983.
- _____, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Panjimas, 1984.
- Hanif, Fikrul, "Penolakan Abdul Malik Ahmad terhadap Asas Tunggal Pancasila di Organisasi Muhammadiyah (1982-1985)," <www.pasca.sarjana.unand.ac.id/pdf>, diakses 20 Februari 2016.
- Hoofdbestuur Moehammadijah, *Persarekatan Moehammadijah Hindia Timoer*, tanggal 6 Syakban 1351/5 Desember 1932.
- Hermiwahyoeni, Zahrofa, dkk, *Dampak Migrasi terhadap Politik*, Jakarta: BKKBN, 2011.
- Hikam, Muhammad AS (Ed.), *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*, Jakarta: Rumah Buku, t.th

- Ilham, Mhd, “Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) di Kecamatan Sungai Beremas 1958-1965,” <www.pasca.unand.ac.id/gerakan-wanita-indonesia.pdf>, diakses 20 Februari 2016.
- Jainuri, A., *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Kedua Puluh*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Kayo, RB. Khatib Pahlawan dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatra Barat dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- _____, *Sejarah dan Profil Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatra Barat 1952-2012*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Karsyah, Lindo, *Dari Gubernur M. Nasroen Sampai Zainal Bakar*, Padang: PT Genta Singgalang Press, 2005
- Maksum, Ilyas, *Wawancara*, 8 Januari 2016 di Kambang, Pesisir Selatan.
- Marjohan dkk, *Embrio Muhammadiyah ada di kauman Padang panjang*, Padangpanjang: Panitia Peringatan 80 Tahun Perguruan Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, 2006
- Mukhtar, H.D.G., *Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, Jakarta: Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, t.th
- Nain, Sjafnir Aboe, *Tuanku Imam Bonjol*, Padang: PPIM, 2004
- Nazwar, Akhria, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad ini*, Jakarta: Panjimas, 1983
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendiidkan Islam*, Jakarta: Tiara Kencana, 2008.
- Nurhabsyah, *Pemberontakan PKI Di Silungkung Tahun 1927*, e-USU Repository © 2004 Universitas Sumatra Utara/pdf, diakses 20 Februari 2016 .
- Nurmiyati, *Wawancara*, tanggal 12 Agustus 2015 di Padang.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996 .
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat, *Mengenal Muhammadiyah Sumatra Barat dalam Rangka Milad Muhammadiyah ke-70*, Bukittinggi: PW. Muhammadiyah Sumatra Barat, 1983 .
- _____, *Surat Turut berlangsungkawa*, Nomor: A/6-0565/76 tanggal 16 Shafar 1396/16 Pebruari 1976.
- Penghulu, Sayuti Dt. Rajo, *Bung Hatta Suri Tauladan Kita; Cara Baik Bung Hatta*, Padang: Mega Sari, 2003.

- Yatim, Moehammad, *Laporan Sedjarah Organisasi dan Kebijaksanaan Pimpina Daerah Sumatra Barat*, tanggal 20 Ramadhan 1382H/15 Februari 1963M.
- Puar, Yusuf Abdullah, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1989.
- Programma Vergadering Moehammadijah di Padang Panjang, *Suara Muhammadiyah*, No. 5/IX/ 1927.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaher, Ishaq, *Sejarah Kebangkitan Nasionan Daerah Sumatra Barat*, Jakarta: Depdikbid, 1978.
- Zahir, Ahmad Sarwono bin, dan Shofrotum binti al-Aydrus, *KH.R.Ng. Ahmad Dahlan Pembaharu, Pemersatu dan Pemelihara Tradisi Islam*, Yogyakarta: Matan, 2013.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Zulqayyim, *Boekittiggi Tempo Doeloe*, Padang: Andalas University Press.
- Safa'at, Muhammad Ali, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959–2004)," Disertasi Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.
- Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Jakarta: Kartika Insan, 2003.
- Sartorius, JGF., *Keterangan Ringkas dari Sekolah Yatim Kubang*, Mailraport, 538x/30.
- Shodiqun, Mochammad Ali, *Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqh yang terlupakan*, Jakarta: Noura Books, 2013.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti, 1990.
- S.K, Wahyono., "Berakhirnya Kekuasaan Belanda di Hindia-Belanda", *Majalah Veteran*, Vol. 2 No.7 Maret 2012.
- Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam, terj. Dari The New World of Islam*, Djakarta: t.p., 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia-Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soerat Keterangan Djoeal Beli tanggal 11 Juni 1940.

- Yuliani, Erfan, " Agresi Militer Belanda I di Bondowoso, AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No. 1, Maret 2014.
<http://www.sumbarprov.go.id/> diakses pada tanggal 6 Februari 2016.
- Verslag dengan Ringkasan Djalan Oetoesan H.B. Moehammadijah Saudara Fachroddin, Hindia Timur, dikutip dari Soerat-Soeratnya H. Fachroddin, yang dikirim pada H.B. Moehammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, No. 5/IX/ 1927, 32-35.
- Yamin, Muhammad, *Dewan Banteng Contra Neo Ningrat*, Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2009.
- Ramadhan. KH dan Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Rosa, John, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008.
- Rosidi, Ajip, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah SWT: Biografi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa: Periode 1950-1960*, Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005.
- Warta*, 26 Januari 1959 dan 8 Januari 1960.
- Woodward, Mark R, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Okvatiningsih, Siska, "Dari Asas Tunggal ke Asas Islam" Organisasi Aisyiyah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Payakumbuh (1985-2000)," Skripsi, Payakumbuh: STKIP

Dokumen dan Koran

- Yusuf, Muhammad, *Dokumen Pribadi*.
- Mailraport, 538x/30 dan Mailraport, 1233x/30.
- Kebulatan Kerapatan Nagari Kubang*, No. 19, 10 April 1930, dalam Mailraport, 538x/30.
- Congres Moehammadijah ke-19 di Minangkabau, *Bintang Islam*, No. 3,/VIII/1930.
- Yatim, Muhammad, Dokumen pribadi ditulisnya pada tanggal 12 April 1968.
- Harian Haluan*, tanggal 14 Februari 1976.

Tentang Penulis



BAKHTIAR adalah dosen pada UIN Imam Bonjol Padang dan wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat, dilahirkan di Limau Purut, Sungai Nanam Kab. Solok, tanggal 9 Juli 1976 dari pasangan Busiam dan Syamsidar. Ia menamatkan Sekolah Dasar di Limau Purut, Sungai Nanam. Selanjutnya meneruskan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Alahan Panjang.

Pada tahun 1990 melanjutkan pendidikannya ke MAN Simpang Rumbio Kota Solok dan meneruskan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Pidana dan Politik Islam (Jinayah-Siyasah) melalui PMDK dengan *yudicium Cumlaude*. Pada tahun 2001 melanjutkan studi ke S2 di perguruan tinggi yang sama pada konsentrasi Syari'ah. Pernah pula nyantri di Ma'had Zubair bin Awwam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) khusus mendalami bahasa Arab. Kemudian sudah menyelesaikan studi program doktor pada UIN Imam Bonjol Padang tahun 2018 dalam studi hukum Islam.

Semasa kuliah, suami dari Kurniadewi dan ayah dari lima orang anak ini telah aktif di Muhammadiyah. Persentuhannya dengan persyarikatan ini dimulai dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Ia pernah menjadi salah seorang ketua Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Cabang IMM Kota Padang serta ketua umum DPD IMM Sumatra Barat. Bersamaan dengan keaktifannya di IMM, ia menggalas Forum

Generasi Muda Islam (FGMI). Selain itu, mendirikan pula dan sekaligus sebagai direktur Aliansi Masyarakat Madani (AMM). Kemudian aktivitasnya di Muhammadiyah berlanjut sebagai sekretaris Pemuda Muhammadiyah, tim hisab dan sekaligus sebagai sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid. Selanjutnya, wakil sekretaris dan wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat pada periode 2010-2015. Saat ini (periode 2015-2020), dipercayakan lagi sebagai salah seorang wakil ketua membidangi pembinaan kader, lembaga pengembangan cabang dan ranting, Lazismu dan wakaf uang. Di samping itu, dipercaya sebagai sekretaris Badan Pembina Harian UMSB pada tahun 2001-2018 (selama dua periode). Kini, selain sebagai pengajar di UIN Imam Bonjol, menggerakkan ranting dan cabang Muhammadiyah, menulis juga aktif dalam menggerakkan ekonomi syari'ah melalui BMT at-Taqwa di bawah Koperasi Syari'ah at-Taqwa Muhammadiyah Sumatra Barat dan wakaf uang. Di samping itu juga menjadi pengurus dan aktif di FKUB Sumatra Barat, MUI Sumatra Barat dan ICMI Sumatra Barat.

Dalam kegiatan tulis menulis ia pernah menjadi wartawan di Harian Padang Ekpress, Redaktur Jurnal Tazkia, Redaktur Tabloid Suara AR. Sutan Mansoer, kontributor pada majalah Islam Sabili. Selanjutnya pernah sebagai Koordinator Lembaga Kajian Agama dan Peradaban (LKAP). Di samping itu, ia memiliki pengalaman dalam menggerakkan Tim Kerja Anti Korupsi kerja sama dengan Ma'arif Institut Jakarta.

Selain aktif menulis di berbagai media cetak dan kontributor tetap pada beberapa majalah penulis juga telah menghasilkan beberapa karya, di antaranya; Ranah Minang di Tengah Cengkeraman Kristenisasi diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta, salah seorang penulis pada Ensiklopedi Minangkabau yang diterbitkan Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), dari Pergulatan Ideologis ke Aqidah sebagai editor diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, Dinamika Pemikiran Fiqh Muhammadiyah (penelitian). Sedangkan dalam bidang hukum Islam tulisannya lebih banyak diterbitkan dalam jurnal ilmiah. •